

N. SRI SUJASTYARTO

MANAJEMEN LABA

TEORI DAN MODEL EMPIRIS



MANAJEMEN LABA: Teori dan Model Empiris

© H. Sri Sulistyanto

GM 501 08.523

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Editor Penyelia: Pamusuk Eneste

Editor: MA Arita Listyandari

Desain Cover: Bene

Penata isi: Rita Eviana

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Grasindo, Anggota
Jakarta, 2008

Cetakan II 2013

Dilarang mengutip atau memperbanyak tanpa izin tertulis dari
cipta, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun, seperti
mikrofilm, CD-Rom, dan rekaman suara.

KATA PENGANTAR

Perkembangan ilmu akuntansi saat ini sedemikian pesat, sejalan dengan perkembangan dunia bisnis. Akuntansi tidak lagi hanya menjadi ilmu catat mencatat transaksi dan peristiwa, namun telah menjelma menjadi ilmu dengan beragam kajian. Keterbatasan teori yang selama menjadi kendala diatasi dengan mengadopsi beragam teori dari bidang-bidang lain, misalkan manajemen dan psikologi. Hingga membuat akuntansi tidak lagi hanya membicarakan metode dan prosedur pencatatan yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan (*financial accounting*), namun juga membahas perilaku seorang manajer yang menyusun informasi itu (*behavioral accounting*). Hal-hal inilah yang menjadi dasar perkembangan teori akuntansi positif (*positive accounting theory*) selama beberapa dekade terakhir ini.

Sisi positif lain dari perkembangan teori akuntansi adalah semakin berkembangnya penelitian-penelitian akuntansi keuangan dan keperilakuan, termasuk manajemen laba. Teori dan penelitian manajemen laba tidak lagi hanya berkuat pada angka-angka laporan keuangan tetapi berkembang pada upaya mengidentifikasi nilai etis dan tanggung jawab sosial penyusun laporan keuangan. Teori dan penelitian manajemen laba tidak lagi hanya terfokus pada besarnya angka yang direkayasa dan metode rekayasa yang digunakan perusahaan. Penelitian manajemen laba juga berusaha mengidentifikasi nilai etis dan tanggung sosial pengelola perusahaan terhadap aktivitas rekayasa manajerial ini. Inilah yang membuat berkembang instrumen-instrumen untuk mengidentifikasi nilai etis dan tanggung jawab sosial seorang manajer terhadap manajemen laba, selain model empiris untuk mendeteksi aktivitas rekayasa manajerial ini.

Perkembangan teori dan penelitian manajemen laba ini tidak hanya terjadi di negara-negara maju dengan *developing market*-nya, tetapi juga terjadi di Indonesia. Namun perkembangan teori dan penelitian manajemen laba ini sampai sekarang belum didukung oleh referensi-referensi dalam bahasa Indonesia. Alasan inilah yang mendorong penyusunan draft buku ini. Untuk itu buku ini mencoba mengkombinasikan referensi-referensi yang ada, khususnya artikel empiris dan normatif, dari dalam dan luar negeri. Contoh-contoh yang diberikan pun merupakan kombinasi dari dalam dan

luar negeri, tentunya sesuai dengan pembahasan. Keterbatasan referensi dari dalam negeri membuat beberapa contoh dari dalam negeri tidak bisa berikan.

Secara umum buku ini ditujukan kepada siapapun yang peduli dan memimpikan dunia usaha di Indonesia yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab (*good corporate governance*). Namun, secara khusus, buku ini ditujukan kepada mahasiswa dan dosen akuntansi atau manajemen keuangan yang sedang mempelajari pasar modal dan teori akuntansi, khususnya manajemen laba. Hingga keterbatasan referensi yang selama ini ada dapat sedikit terpecahkan dengan buku ini. Apalagi pada dasarnya tiga hipotesis yang diajukan dalam teori akuntansi positif merupakan dasar pengujian manajemen laba. Selain itu buku ini juga ditujukan kepada para mahasiswa dan dosen yang sedang melakukan penelitian manajemen laba. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para mahasiswa dan dosen, maupun para peneliti lainnya.

Ada delapan pokok bahasan dalam buku ini, dimana setiap pokok bahasan akan dibagi dalam beberapa sub pokok bahasan untuk mempermudah pembahasan. Bab I menguraikan bahwa perbedaan pandangan terhadap manajemen laba dapat membawa hal-hal positif, misalkan berkembangnya definisi, penelitian, model empiris manajemen laba. Selain itu bab ini juga membahas bahwa manajemen laba merupakan cermin perilaku oportunistik seorang manajer yang mengakibatkan informasi menjadi tidak berkualitas. Bab II menjelaskan bahwa manajemen laba pada dasarnya merupakan permainan manajerial yang dilakukan dengan berbagai cara untuk mengatur besar kecilnya laba perusahaan. Bab III membahas motivasi yang mendasari manajer perusahaan melakukan manajemen laba. Bab IV menjelaskan bahwa perbedaan pandangan terhadap manajemen disebabkan karena perbedaan sudut pandang, nilai etis, dan tanggung jawab sosial seseorang. Selain itu bab ini juga membahas implikasi yang ditimbulkan manajemen laba terhadap perekonomian, etika, moral, dan standar akuntansi. Sedangkan bab V membahas konsep *good corporate governance*, sebab pada dasarnya kegagalan untuk menerapkan konsep ini secara konsisten disebabkan oleh aktivitas rekayasa manajerial ini.

Selanjutnya Bab VI menguraikan bahwa manajemen laba merupakan dampak akuntansi berbasis akrual yang selama ini diterima dan digunakan secara umum. Selain itu bab ini juga menjelaskan beberapa metode rekayasa yang dipakai untuk mengatur besar kecilnya laba perusahaan. Bab VII membahas obyek rekayasa yang menjadi target

manajemen laba. Bab terakhir atau bab VIII membahas model empiris yang selama ini telah dikembangkan oleh beberapa peneliti. Untuk mempermudah pemahaman maka tiga bab terakhir ini disertai dengan contoh-contoh sederhana agar lebih mudah untuk diikuti dan dipahami. Contoh aplikasi juga diberikan untuk menunjukkan bagaimana manajemen laba dilakukan dan bagaimana menggunakan model empiris tersebut.

Harus diakui masih banyak hal yang harus dikoreksi dan belum dibahas dalam draft buku ini. Untuk itu siapapun yang ingin memahami teori dan model empiris manajemen laba tidak cukup hanya membaca buku ini, diperlukan referensi-referensi lain sesuai dengan kebutuhannya. Namun pada dasarnya buku ini mencoba memberikan secara integratif dan komprehensif semua hal yang terkait dengan manajemen laba, termasuk hasil-hasil penelitian manajemen laba di Indonesia. Sebagai catatan untuk peneliti yang akan menggunakan kuisisioner dalam buku ini sebagai acuan, diharapkan untuk melakukan cek ulang dengan kuisisioner aslinya. Agar apa yang ingin ditanyakan peneliti melalui kuisisionernya tidak melenceng dari makna yang ingin disampaikan kepada responden penelitiannya.

Selesaiannya buku ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Haris Wibisono yang pertama kali mendorong penulis untuk menyusun draft buku ini, Hudi Prawoto yang terkadang punya waktu untuk berdiskusi, Riandy Tarigan yang seringkali membantu pengeditan, dan Joko Setijowarno yang tidak pernah berhenti mendorong penulis untuk menulis buku. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Jurusan Akuntansi Unika Soegijapranata Semarang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada “guru-guru” penulis di Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada yang telah mengkurat pengetahuan tentang akuntansi pada mimpi-mimpi penulis. Sembah sujud penulis persembahkan untuk kedua orang tua, Th. Soemarno dan Th. Sri Wahyuti, yang telah mengorbankan nikmatnya hidup untuk membuat penulis jadi “orang”. Akhirnya dengan suka cita, buku ini dipersembahkan untuk orang-orang tercinta: Harsiwi dan Anin yang selalu merindukan dan penulis rindukan. Terima kasih.

Semarang, 02 November 2004

H. Sri Sulistyanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PERSPEKTIF MANAJEMEN LABA	1
A. Perspektif Dasar	4
B. Perspektif Informasi.....	10
C. Perspektif Oportunis	18
BAB 2 TEORI DAN KONSEP	25
A. Permainan Manajerial	27
B. Definisi Manajemen Laba	41
BAB 3 MOTIVASI MANAJERIAL	54
A. Motivasi Pasar Modal	57
B. Motivasi Kontraktual	75
C. Motivasi Regulasi	82
BAB 4 PANDANGAN DAN IMPLIKASI	88
A. Pandangan Terhadap Manajemen Laba	90
B. Pemahaman Etis Terhadap Manajemen Laba	95
C. Implikasi Manajemen Laba	103
BAB 5 GOOD CORPORATE GOVERNANCE	114
A. Konsep, Definisi, dan Penerapan	117
B. Good Corporate Governance dan Manajemen Laba	134
BAB 6 METODE MANAJEMAN LABA	140
A. Akuntansi Berbasis AkruaI	142
B. Metode Manajemen Laba	150
BAB 7 OBYEK MANAJEMEN LABA	159
A. Aktiva Lancar	161
B. Aktiva Tetap	173
C. Hutang Lancar	179
BAB 8 MODEL EMPIRIS	183
A. Pendekatan Manajemen Laba	185
B. Model Empiris	189
DAFTAR PUSTAKA	205
INDEKS	216

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penyimpangan korporasi di Indonesia	3
Tabel 1.2. Model empiris manajemen laba	8
Tabel 2.1. Tujuh permainan manajerial	29
Tabel 2.2. Sepuluh cara mendeteksi permainan manajemen	38
Tabel 3.1. Manajemen laba pada penawaran perdana	63
Tabel 3.2. Manajemen laba pada SEO	69
Tabel 3.3. Manajemen laba pada saat transaksi dan peristiwa lain	74
Tabel 3.4. Manajemen laba untuk mengoptimalkan kompensasi manajerial	79
Tabel 3.5. Manajemen laba untuk melanggar perjanjian hutang	82
Tabel 3.6. Manajemen laba untuk meminimalkan pajak	84
Tabel 3.7. Manajemen laba untuk melanggar regulasi lainnya	86
Tabel 4.1. Perbedaan manajemen laba dan kecurangan	94
Tabel 4.2. Pemahaman etis dan tanggung jawab sosial	96
Tabel 4.3. Pemahaman etis mempengaruhi manajemen laba	98
Tabel 5.1. Indeks transparansi lingkungan bisnis	115
Tabel 5.2. Kasus <i>good corporate governance</i> di dunia	119
Tabel 5.3. Kasus <i>good corporate governance</i> di Indonesia	130
Tabel 5.3. Hubungan manajemen laba dengan <i>good corporate governance</i>	138
Tabel 6.1. Metode akuntansi	153
Tabel 6.2. Pola manajemen laba	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Arus informasi untuk investor	17
Gambar 2.1. Pengaruh insentif, kendala, dan <i>cost</i> terhadap manajemen laba	51
Gambar 3.1. Skema bonus	77
Gambar 4.1. Premium untuk <i>good corporate governance</i>	110
Gambar 5.1. <i>House of good corporate governance</i>	123
Gambar 5.2. <i>Score of good corporate governance</i>	129

BAB 1

PERSPEKTIF MANAJEMEN LABA

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah membaca bab ini pembaca diharapkan dapat memahami bahwa:

1. Ada beberapa sisi positif sebagai dampak perbedaan pandangan dan pemahaman terhadap manajemen laba.
2. Manajemen laba merupakan upaya rekayasa manajerial untuk memperlakukan informasi-informasi dalam laporan keuangan.
3. Manajemen laba merupakan cermin perilaku oportunistis seorang manajer perusahaan.

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah membaca bab ini pembaca diharapkan dapat memahami bahwa:

1. Perbedaan pandangan dan pemahaman terhadap manajemen laba mempengaruhi perkembangan definisi manajemen laba, penelitian akuntansi keuangan dan keperilakuan, model empiris untuk mendeteksi manajemen laba, dan konsep *good corporate governance*.
2. Manajemen laba telah mengakibatkan informasi dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan, netral, komprehensif, serta mempunyai daya banding dan daya uji.
3. Manajer melakukan manajemen laba karena mempunyai kesempatan untuk mengoptimalkan kesesjahteraan dan kepentingan pribadinya. Kesempatan ini muncul karena adanya transaksi yang berkaitan dengan pasar modal, kontraktual, dan regulasi.

Ada permasalahan serius yang dihadapi para praktisi dan akademisi dibidang akuntansi dan keuangan selama beberapa dekade terakhir ini, yaitu manajemen laba¹. Alasannya, *pertama*, manajemen laba seolah-olah telah menjadi *corporate culture* yang

dipraktikkan oleh semua perusahaan di seluruh dunia. Tidak hanya di negara-negara dengan sistem bisnis yang belum tertata, aktivitas rekayasa manajerial ini juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di negara yang sistem bisnisnya telah tertata, seperti halnya Amerika Serikat. *Kedua*, sebab dan akibat yang ditimbulkan aktivitas rekayasa manajerial ini tidak hanya menghancurkan tatanan ekonomi, namun juga tatanan etika dan moral suatu negara. Inilah yang membuat publik mempertanyakan etika, moral, dan tanggung jawab pelaku bisnis yang seharusnya menciptakan kehidupan bisnis yang bersih dan sehat. Publik juga mempertanyakan dan meragukan integritas dan kredibilitas para akuntan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendeteksi manajemen laba dan regulator yang seharusnya mempersiapkan regulasi yang memadai untuk menciptakan kehidupan bisnis yang bersih dan sehat.

Alasan-alasan itulah yang membuat publik meragukan informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Informasi yang seharusnya menjadi sumber utama bagi publik untuk mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya justru kehilangan makna dan fungsi karena ulah menyimpang orang-orang tertentu. Laporan keuangan tidak lagi mampu menjalankan fungsinya untuk menginformasikan apa yang sesungguhnya telah dilakukan dan dialami perusahaan selama satu periode. Selain meragukan orang yang menyusun dan memeriksa laporan keuangan, publik juga mempertanyakan dan meragukan kelayakan standar akuntansi dan pemeriksaan yang selama ini dipakai secara luas oleh dunia usaha. Berbagai pertanyaan dan keraguan publik ini terjadi mengingat manajemen laba tidak hanya mempengaruhi perekonomian nasional namun juga perekonomian internasional.

Dari sudut pandang perekonomian nasional, secara mikro, manajemen laba mengakibatkan perusahaan yang melakukannya bagaikan menyimpan “bara dalam sekam”. Artinya, meski manajemen laba dapat disembunyikan dalam jangka pendek namun dalam jangka panjang perusahaan bersangkutan akan mengalami kesulitan keuangan, kolaps, bahkan bangkrut. Hal ini disebabkan manajemen laba tidak mungkin dilakukan perusahaan dalam jangka panjang. Alasannya, *pertama*, perusahaan tidak mampu lagi melanjutkan aktivitas rekayasa manajerial itu sebab sekali melakukan maka perusahaan terpaksa harus menutupinya dengan aktivitas rekayasa yang lain. Demikian

¹Terjemahan untuk *earnings management*. Istilah lain yang juga biasa digunakan untuk menterjemahkan *earnings management* adalah manajemen keuntungan, manipulasi laba,

seterusnya sampai perusahaan kehilangan kemampuan untuk meneruskannya lagi. *Kedua*, aktivitas rekayasa manajerial ini diketahui publik ketika akuntan publik melakukan pemeriksaan keuangan dan menolak memberikan opini terhadap laporan keuangan perusahaan bersangkutan. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika perusahaan yang sebelumnya mempunyai kinerja bagus dan dinyatakan sehat selama beberapa periode tiba-tiba mengalami kesulitan keuangan, kolaps, atau bahkan bangkrut.

Tabel 1.1
Penyimpangan Korporasi di Indonesia

Kekayaan perusahaan disalahgunakan orang dalam
Diabaikannya hak-hak pemegang saham minoritas
Ketidakterbukaan informasi bisnis
Penggunaan nama perusahaan untuk pinjaman pribadi
Keputusan yang diambil karena <i>moral hazard</i>
Intervensi pemegang saham dalam pengelolaan perusahaan
Praktik perusahaan dalam perusahaan
<i>High leverage</i> tapi tidak mempertimbangkan <i>service capacity</i>
Diversifikasi dan ekspansi usaha dengan tidak <i>prudential</i>
Resiko tidak dikelola dengan hati-hati
Bank digunakan sebagai kasir kelompok usaha
Praktik <i>transfer pricing</i> antar <i>affiliated companies</i>

Sumber: Djalil, 2002.

Sedangkan secara makro, manajemen laba telah membuat dunia usaha seolah berubah menjadi sarang pelaku korupsi, kolusi, dan berbagai penyelewengan lain yang merugikan publik. Publik menganggap apa yang diinformasikan dunia usaha hanya merupakan akal-akalan pelakunya untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dan kelompok tertentu, tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain. Hingga tidak aneh jika pada akhir dasawarsa 1980-an kasus *creative accounting* ini menyebabkan *good corporate governance* menjadi perhatian publik di Inggris. Demikian juga dengan kasus-kasus kecurangan korporasi di Indonesia yang terbukti menjadi salah satu penyebab runtuhnya perekonomian negara ini. Atau skandal keuangan Enron, Worldcom, dan Xerox yang menyebabkan publik Amerika Serikat meragukan integritas dan kredibilitas para pelaku dunia usaha. Skandal ini bahkan tidak hanya membuat

manipulasi keuangan, dan rekayasa keuangan.

perusahaan yang melakukannya mengalami kebangkrutan namun juga mengakibatkan para pelakunya diseret ke pengadilan sebagai pelaku kejahatan ekonomi.

Sementara dari sudut pandang perekonomian internasional, dampak buruk manajemen laba terbukti telah menyebabkan hancurnya jaringan global Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersson & Co. Sebagai sebuah akuntan publik, Arthur Andersson & Co merupakan KAP yang mempunyai klien paling banyak di antara KAP ternama lainnya sebab integritas dan kredibilitasnya telah diakui secara internasional. Bahkan KAP lokal di berbagai negara yang menjadi afiliasinya pun juga menjadi KAP terpercaya dan mempunyai klien terbanyak di negara bersangkutan. Namun upaya yang dilakukan KAP Arthur Andersson & Co di Amerika Serikat untuk melegalisasi atau menyembunyikan penyelewengan yang dilakukan kliennya ternyata tidak hanya meruntuhkan KAP Arthur Andersson & Co di negara itu, tetapi juga seluruh afiliasinya di seluruh dunia. Lebih menarik lagi, KAP ini runtuh tanpa harus melewati proses pengadilan, namun hanya karena dijauhi oleh klien dan publik yang menganggapnya sebagai pesakitan. Hingga skandal keuangan yang melibatkan KAP ini berdampak secara luas terhadap bisnis internasional.

A. PERSPEKTIF DASAR

Anehnya, meski berbagai kasus manajemen laba terbukti telah mengakibatkan hancurnya tatanan ekonomi, etika, dan moral masih ada perbedaan pandangan dan pemahaman terhadap aktivitas rekayasa manajerial ini. Sampai saat ini masih ada kontroversi dalam memandang dan memahami manajemen laba. Secara umum kontroversi ini terjadi antara praktisi dan akademi yang pada dasarnya mempertanyakan apakah manajemen laba dapat dikategorikan sebagai kecurangan (*fraud*) atau tidak. Para praktisi menilai manajemen laba sebagai kecurangan, sementara akademisi menilai manajemen laba tidak bisa dikategorikan sebagai kecurangan. Ada argumen yang cukup kuat yang diungkapkan oleh setiap pihak untuk mempertahankan pendapatnya ini. Tetapi meski setiap pihak berusaha mengungkapkan alasan logis sebenarnya ada satu benang merah dalam antara kedua pendapatan ini, yaitu kedua belah pihak menyepakati bahwa manajemen laba adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan, dan menunda informasi keuangan.

Secara umum para praktisi, yaitu pelaku ekonomi, pemerintah, asosiasi profesi dan regulator lainnya, berargumen bahwa pada dasarnya manajemen laba merupakan perilaku oportunistik seorang manajer untuk memperlakukan angka-angka dalam laporan keuangan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Perbuatan ini dikategorikan sebagai kecurangan karena secara sadar dilakukan manajer perusahaan agar *stakeholder* yang ingin mengetahui kondisi ekonomis perusahaan tertipu karena memperoleh informasi palsu. Apalagi perbuatan ini dilakukan manajer dengan memanfaatkan kelemahan pihak lain yang tidak mempunyai sumber dan akses yang memadai untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan. Selain itu perbuatan ini sebenarnya juga merupakan upaya manajer untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kepentingan pribadi. Akibatnya, *stakeholder* kehilangan kesempatan untuk memperoleh *return* dari hubungan ekonomi yang dijalinnya dengan perusahaan bersangkutan.

Sementara para akademisi, termasuk peneliti, berargumen bahwa pada dasarnya manajemen laba merupakan dampak dari kebebasan seorang manajer untuk memilih dan menggunakan metode akuntansi tertentu ketika mencatat dan menyusun informasi dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan ada beragam metode dan prosedur akuntansi yang diakui dan diterima dalam prinsip akuntansi berterima umum (*generally accepted accounting principles*). Selama metode dan prosedur akuntansi yang dipilih dan digunakan masih dalam ruang lingkup prinsip akuntansi maka apa yang dilakukan manajer tidak bisa dikategorikan sebagai kecurangan. Oleh sebab itu upaya untuk mengurangi manajemen laba dianggap sebagai upaya untuk melakukan koreksi terhadap standar akuntansi. Ada wacana untuk membuat standar akuntansi lebih dogmatis sehingga tidak ada lubang yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari standar itu.

Secara konseptual wacana ini memang dapat menyelesaikan masalah manajemen laba walaupun tidak mudah dan sulit untuk dilaksanakan. Alasannya, standar akuntansi bukan hukum tunggal maupun dogma yang mengikat pemakainya untuk mengikutinya secara penuh. Prinsip akuntansi pada dasarnya merupakan kumpulan dari berbagai metode dan prosedur akuntansi yang selama ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Hingga perusahaan mempunyai kebebasan untuk memilih dan menggunakan sesuai dengan kepentingannya. Bahkan perusahaan juga mempunyai kebebasan untuk mengganti dari satu metode akuntansi menjadi

metode akuntansi yang lain dan dari satu prosedur akuntansi yang satu menjadi prosedur akuntansi yang lain. Namun demikian ada beberapa sisi positif yang dapat diambil dari kontroversi pandangan dan pemahaman terhadap manajemen laba ini.

1. Semakin berkembangnya definisi manajemen laba

Sampai saat ini ada belum ada kesepakatan mengenai batasan dan definisi manajemen laba. Perbedaan inilah yang menyebabkan setiap pihak yang *concern* pada masalah aktivitas rekayasa manajerial ini mencoba untuk mendefinisikannya, baik dari pemahaman positif maupun negatif. Akibatnya, ada banyak batasan dan definisi manajemen laba. Ada pihak yang mendefinisikan manajemen laba sebagai kecurangan yang dilakukan seorang manajer untuk mengelabui orang lain, sedangkan pihak lain mendefinisikannya sebagai aktivitas yang lumrah dilakukan manajer dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen laba tidak bisa dikategorikan sebagai kecurangan sejauh apa yang dilakukannya masih dalam ruang lingkup prinsip akuntansi. Inilah yang membuat spektrum manajemen laba menjadi sedemikian luas.

Secara umum manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Istilah intervensi dan mengelabui inilah yang dipakai sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai manajemen laba sebagai kecurangan. Sementara pihak lain tetap menganggap aktivitas rekayasa manajerial ini bukan sebagai kecurangan. Alasannya, intervensi itu dilakukan manajer perusahaan dalam kerangka standar akuntansi, yaitu masih menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang diterima dan diakui secara umum.

2. Semakin berkembangnya penelitian akuntansi keuangan dan berperilaku

Semakin berkembangnya penelitian dibidang akuntansi keuangan dan berperilaku didasari pada perkembangan perspektif manajemen laba yang tidak lagi hanya dalam konteks informasi (*information perspective*) namun juga dalam perspektif oportunistik (*opportunistic perspective*). Artinya, penelitian-penelitian itu tidak hanya terfokus pada upaya untuk mendeteksi keberadaan, bagaimana, dan konsekuensi manajemen laba, tetapi meluas menjadi penelitian untuk mengetahui mengapa seorang manajer melakukan aktivitas rekayasa manajerial ini. Inilah yang membuat

penelitian akuntansi tidak hanya terbatas pada besarnya angka laporan keuangan yang direkayasa, metode, dan obyek manajemen laba namun juga pada upaya untuk mengidentifikasi pandangan, pemahaman, perilaku etis, dan motivasi apa yang mendorong seseorang untuk melakukan manajemen laba.

Oleh sebab itu penelitian akuntansi tidak hanya berkuat dengan angka-angka laporan keuangan, namun juga pada upaya pengumpulan data-data primer dengan menggunakan kuisioner. Analisis yang digunakan pun juga mulai memanfaatkan basis data primer untuk membuat kesimpulan penelitian menjadi lebih valid. Selain itu perkembangan-perkembangan ini juga mengakibatkan berkembangnya teori akuntansi, khususnya teori akuntansi positif (*positive accounting theory*). Keterbatasan teori akuntansi yang selama ini menghambat perkembangan penelitian-penelitian akuntansi diselesaikan dengan mengadopsi teori-teori dari disiplin ilmu lain yang relevan, misalkan ilmu manajemen dan psikologi. Upaya untuk mengadopsi inilah yang membuat teori akuntansi semakin diperkaya dengan berbagai teori yang relevan dengan perkembangan penelitian dan teori akuntansi.

3. Semakin berkembangnya model empiris manajemen laba

Perbedaan pemahaman terhadap manajemen laba juga mendorong semakin berkembangnya model empiris yang digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas rekayasa manajerial itu. Secara umum ada tiga kelompok model empiris manajemen laba yang diklasifikasikan atas dasar basis pengukuran yang digunakan, yaitu model yang berbasis akrual agregat (*aggregate accruals*), akrual khusus (*specific accruals*), dan distribusi laba (*distribution of earnings*). Model berbasis akrual merupakan model yang menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba. Model manajemen laba ini dikembangkan oleh Healy, DeAngelo, Jones, serta Dechow, Sloan, dan Sweeney. Model kedua merupakan model yang berbasis *specific accruals*, yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan keuangan tertentu dari industri tertentu pula. Model ini dikembangkan oleh McNichols dan Wilson, Petroni, Beaver dan Engel, Beneish, serta Beaver dan McNichols. Sedangkan model ketiga merupakan model *distribution of earnings* dikembangkan oleh Burgtahler dan Dichev, Degeorge, Patel, dan Zeckhauser, serta Myers dan Skinner.

TABEL 1.2
Model Empiris Manajemen Laba

Peneliti	Proksi Manajemen Laba
A. Model <i>Aggregate Accruals</i>	
Healy (1985)	Total akrual (<i>total accruals</i>).
DeAngelo (1986)	Perubahan dalam total akrual (<i>change in total accruals</i>).
Jones (1991)	Sisa regresi total akrual dari perubahan penjualan dan <i>property, plant, and equipment</i> .
Model Jones Dimodifikasi dari Dechow, Sloan & Sweeney (1995)	Sisa regresi total akrual dari perubahan penjualan dan <i>property, plant, and equipment</i> , dimana pendapatan disesuaikan dengan perubahan piutang yang terjadi pada periode bersangkutan.
Kang & Suvaramakrishnan (1995)	Sisa regresi dari aktiva lancar non-kas yang dikurangi dengan kewajiban yang dibagi dengan aktiva tersebut pada periode sebelumnya, yang disesuaikan dengan kenaikan pendapatan, biaya, dan <i>plant and equipment</i> .
B. Model <i>Specific Accruals</i>	
McNichols & Wilson (1988)	Sisa provisi untuk piutang tak tertagih, yang diestimasi sebagai sisa regresi provisi untuk piutang tak tertagih pada saldo awal, serta penghapusan piutang periode berjalan dan periode yang akan datang.
Petroni (1992)	Klaim terhadap estimasi cadangan kesalahan, yang diukur selama lima tahun perkembangan cadangan kerugian penjaminan kerusakan <i>property</i> .
Beaver & Engel (1996)	Biaya yang tersisa dari kerugian pinjaman, yang diestimasi sebagai sisa regresi biaya dari kerugian pinjaman pada <i>charge-of</i> bersih, pinjaman yang beredar, aktiva yang tidak bermanfaat dan melebihi satu tahun perubahan aktiva tidak bermanfaat.
Beneish (1997)	Hari-hari dalam indeks piutang, indeks laba kotor (<i>gross margin</i>), indeks kualitas aktiva, indeks depresiasi, indeks biaya administrasi umum dan penjualan, indeks total akrual terhadap total aktiva.
Beaver & McNichols (1998)	Korelasi serial dari satu tahun perkembangan cadangan kerugian penjaminan kerusakan <i>property</i> .
C. Pendekatan <i>Distribution of Earnings</i>	
Burgthaler & Dichev (1997)	Menguji apakah frekuensi realisasi laba tahunan yang merupakan bagian atas (bawah) laba yang besarnya nol dan laba akhir tahun adalah lebih besar (kecil) daripada yang diharapkan.
Degeorge <i>et al.</i> (1999)	Menguji apakah frekuensi realisasi laba kuartalan yang merupakan bagian atas (bawah) laba yang besarnya nol, laba akhir kuartal dan <i>forecast</i> investor adalah lebih besar (kecil) daripada yang diharapkan.

Myers & Skinner (1999) Menguji apakah angka-angka laba meningkat yang berurutan adalah lebih besar dibandingkan angka-angka jika tanpa manajemen laba.

Sumber: McNichols, 2000.

Namun sejauh ini hanya model berbasis *aggregate accrual* diterima secara umum sebagai model yang memberikan hasil paling kuat dalam mendeteksi manajemen laba. Alasannya, model empiris ini sejalan dengan akuntansi berbasis akrual (*accruals basis of accounting*) yang selama ini banyak dipergunakan oleh dunia usaha. Model akuntansi ini merupakan pencatatan yang membuat munculnya komponen akrual yang mudah untuk dipermainkan besar kecilnya. Hal ini disebabkan komponen akrual merupakan komponen yang muncul dari transaksi-transaksi yang tidak disertai penerimaan dan pengeluaran kas. Alasan kedua, model *aggregate accrual* menggunakan semua komponen laporan keuangan untuk mendeteksi rekayasa keuangan ini. Hal ini sejalan dengan basis akuntansi yang selama ini diterima umum, sebab akrual memang ada dalam setiap komponen laporan keuangan tanpa terkecuali, baik dalam aktiva tetap maupun lancar dan pasiva jangka pendek maupun jangka panjang.

4. Semakin berkembangnya konsep *good corporate governance*

Semakin merebaknya aktivitas manajemen laba juga telah mendorong berkembangnya perhatian publik terhadap konsep *good corporate governance*. Konsep ini secara definitif diartikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar selalu menciptakan nilai tambah untuk semua *stockholder* dan *stakeholder*-nya. Ada dua *point* penting yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu hak *stockholder* dan *stakeholder* untuk memperoleh informasi akurat dan tepat waktu (*timeliness*) serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan semua informasi mengenai perusahaan. Atau dengan kata lain, konsep *good corporate governance* menekankan pentingnya kesetaraan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan responsilitas (*responsibility*) informasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Alasannya, laporan keuangan merupakan alat komunikasi utama perusahaan dengan semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Hingga semakin berkualitas laporan

keuangan semakin berkualitas pula keputusan yang dibuat *stakeholder* yang menggunakan informasi itu.

B. PERSPEKTIF INFORMASI

Ada dua perspektif penting yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan mengapa manajemen laba dilakukan seorang manajer, yaitu perspektif informasi dan oportunistis. Perspektif informasi merupakan pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan kebijakan manajerial untuk mengungkapkan harapan pribadi manajer tentang arus kas perusahaan dimasa depan. Sedangkan perspektif oportunistis merupakan pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan perilaku oportunistis manajer untuk mengelabui investor dan memaksimalkan kesejahteraannya karena menguasai informasi lebih banyak dibandingkan pihak lain. Secara konseptual kedua perspektif ini mempunyai hubungan sebab-akibat yang mendorong terjadinya manajemen laba. Artinya, manajemen laba sebenarnya merupakan upaya oportunistis seseorang untuk mempengaruhi informasi yang disajikannya dengan memanfaatkan ketidaktahuan orang lain mengenai informasi yang sebenarnya.

Upaya mempengaruhi informasi itu dilakukan dengan memanfaatkan kebebasan untuk memilih, menggunakan, dan mengubah berbagai metode dan prosedur akuntansi yang ada. Selama ini memang ada berbagai metode akuntansi untuk satu komponen tertentu. Sebagai contoh adalah metode FIFO, LIFO, dan rata-rata untuk menentukan harga pokok penjualan atau metode depresiasi garis lurus, saldo menurun, dan jumlah angka tahun untuk mengalokasikan harga perolehan aktiva tetap. Penggunaan metode yang berbeda akan menghasilkan nilai yang berbeda pula. Hingga seseorang dapat mengatur nilai perusahaan dengan memanfaatkan kebebasan untuk memilih dan mengubah metode-metode itu. Mengubah metode yang dipakai berarti mengubah nilai seperti yang dikehendaki orang itu. Selain itu juga ada berbagai prosedur akuntansi untuk satu komponen tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk mengatur nilai perusahaan. Sebagai contoh adalah prosedur dalam menentukan nilai estimasi umur ekonomis untuk mengalokasikan harga perolehan aktiva tetap, nilai estimasi amortisasi aktiva tak berwujud, prosentase untuk menentukan kerugian piutang, dan lain-lain.

Oleh sebab itu manajemen laba dapat dikatakan sebagai permainan akuntansi (*accounting games*). Apalagi jika melihat bahwa rekayasa ini merupakan upaya untuk menyembunyikan dan mengubah informasi dengan mempermainkan besar kecilnya angka-angka komponen laporan keuangan yang dilakukan ketika mencatat dan menyusun informasi itu. Ada dua alasan yang dapat menjelaskan mengapa laporan keuangan rawan untuk dipermainkan oleh siapapun yang menyusun informasi itu. Alasan pertama adalah hanya dengan memahami dan menguasai konsep-konsep akuntansi dan keuangan seseorang dapat mempermainkan informasi keuangan ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya.

Alasan kedua adalah kebebasan dalam memilih dan menggunakan metode dan prosedur akuntansi ini secara tidak langsung membuat standar akuntansi seakan-akan mengakomodasi atau memfasilitasi aktivitas rekayasa manajerial ini. Hal inilah yang membuat publik mempertanyakan kembali kelayakan standar akuntansi yang dipakai secara umum. Meski untuk melakukan koreksi terhadap standar akuntansi sebenarnya bukan hal yang mudah sebab “kesalahan” itu tidak hanya terletak pada standar itu namun juga pada perilaku etis dari orang yang menggunakannya. Oleh sebab itu untuk memahami persoalan manajemen laba seseorang harus memahami prinsip, standar, metode, prosedur, dan proses akuntansi dengan baik.

Akuntansi pada dasarnya merupakan proses untuk mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan, yaitu informasi mengenai aktiva, kewajiban, perubahan aktiva dan hutang, serta aktivitas operasional, pendanaan, dan investasi suatu perusahaan. Informasi-informasi dalam laporan keuangan ini tidak hanya dipakai oleh pihak internal namun juga pihak eksternal perusahaan, termasuk pemilik, calon investor, kreditur, asosiasi profesi, pemerintah, regulator dan publik secara umum. Alasan inilah yang membuat harus dapat dipahami dan dimengerti oleh pihak-pihak itu. Selain itu laporan keuangan harus dapat dipercaya para pemakainya sebab informasi ini akan dipakai untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba dimasa depan. Untuk itu laporan keuangan harus disusun dengan menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang telah diakui, diterima, dan dipahami oleh semua pihak yang akan menggunakan informasi ini.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar laporan keuangan dapat diakui dan diterima informasi yang berkualitas. Secara konseptual laporan keuangan dinilai

sebagai informasi yang berkualitas apabila menyajikan informasi yang relevan netral, lengkap (komprehensif), serta mempunyai daya banding dan uji. Agar dapat memenuhi syarat-syarat ini maka seluruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus disusun dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Inilah yang membuat metode dan prosedur yang tercakup dalam standar akuntansi harus diikuti dan ditaati oleh penyusun laporan keuangan. Tujuannya, agar peran strategis laporan keuangan dalam menyediakan informasi yang relevan dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan dapat terpenuhi.

1. Informasi yang relevan

Informasi akuntansi dikatakan relevan apabila dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang akan menggunakannya. Secara konseptual bukan hanya pihak internal perusahaan atau manajer yang membutuhkan informasi-informasi dalam laporan keuangan, tetapi juga pihak eksternal yang mempunyai kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan informasi yang dibutuhkan satu pihak dengan pihak lain menjadi berbeda. Untuk itu laporan keuangan harus mampu mengakomodasi dan memfasilitasi semua kebutuhan itu dengan baik. Oleh sebab itu laporan keuangan akan dianggap sebagai informasi yang relevan apabila mampu memenuhi semua kebutuhan informasi dari pihak yang berbeda ini.

- a. Manajer membutuhkan informasi-informasi dalam laporan keuangan untuk menyusun rencana dan anggaran, strategi untuk masa depan, pengendalian, serta menilai kinerja yang telah dicapainya selama satu periode tertentu.
- b. Pemilik membutuhkan informasi-informasi dalam laporan keuangan untuk menilai apakah yang dilakukan manajer perusahaan telah sesuai dengan apa yang disepakati. Penilaian ini akan dipakai untuk menentukan kinerja, kompensasi, dan kompetensi manajer yang mengelola perusahaannya.
- c. Calon investor membutuhkan informasi-informasi dalam laporan keuangan untuk menilai dan menentukan apakah dana yang dimilikinya tepat untuk diinvestasikan di perusahaan itu atau tidak.
- d. Kreditur membutuhkan informasi-informasi dalam laporan keuangan untuk menilai dan menentukan apakah suatu perusahaan layak menerima kucuran

- kredit. Selain itu kreditur membutuhkan informasi ini untuk mengetahui dan memperkirakan apakah dana yang dipinjam perusahaan dapat diterima kembali.
- e. Supplier membutuhkan informasi-informasi dalam laporan keuangan untuk menilai apakah barang yang dikirim telah dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan. Selain itu kreditur membutuhkan informasi ini untuk mengetahui dan memperkirakan apakah perusahaan bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar barang yang telah diterimanya.
 - f. Regulator membutuhkan informasi-informasi dalam laporan keuangan untuk menilai dan menentukan tingkat kesehatan perusahaan, kebijakan yang harus disusun, dan menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dalam dunia usaha.
 - g. Pemerintah membutuhkan informasi-informasi dalam laporan keuangan untuk menentukan berapa besarnya pajak yang harus dipungut dari perusahaan itu, sehingga pajak dapat dipungut dalam jumlah yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan dan kewajiban perusahaan bersangkutan.

2. Informasi yang netral

Informasi akuntansi dikatakan netral apabila informasi itu bebas dari ketergantungan dan keinginan pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu upaya menyajikan informasi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak lain tidak diperbolehkan dalam proses akuntansi. Selain itu, upaya untuk menyembunyikan informasi tertentu demi kepentingan pihak tertentu tetapi merugikan pihak-pihak lain juga dilarang untuk dilakukan. Atau dengan kata lain informasi akuntansi harus melaporkan apa yang seharusnya dilaporkan secara terbuka. Secara adil (*fairness*) laporan keuangan harus menyediakan, menyajikan, dan memberikan informasi yang sama persis untuk semua pihak yang membutuhkan. Hingga apabila ada dua orang yang berbeda menggunakan laporan keuangan untuk kepentingan yang sama akan menghasilkan keputusan yang sama. Kesetaraan kesempatan untuk memperoleh informasi ini diharapkan dapat membuat laporan keuangan menjadi lebih berkualitas.

3. Informasi yang lengkap

Informasi laporan keuangan juga harus lengkap atau komprehensif untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua fakta, baik transaksi (*transaction*) maupun peristiwa (*event*), yang dilakukan dan dialami perusahaan selama satu periode

tertentu. Upaya untuk menyembunyikan, menunda pengungkapan, atau mengubah fakta-fakta yang ada merupakan kegiatan yang melanggar aturan yang tidak diperbolehkan dalam proses akuntansi. Apalagi jika upaya itu dilakukan untuk menyembunyikan penyelewengan, kecurangan, kekurangan, kegagalan, dan kelemahan suatu perusahaan. Oleh sebab itu standar akuntansi tidak mentolelir upaya menyembunyikan, menunda atau mengubah informasi untuk kepentingan pihak tertentu. Setiap orang dapat memperoleh informasi mengenai kondisi dan kinerja perusahaan secara lengkap dan berkualitas. Tujuannya, agar keputusan ekonomi yang dibuat *stakeholder* atas dasar informasi itu juga menjadi lebih berkualitas.

4. Informasi yang mempunyai daya banding dan uji

Maka agar dapat menyajikan informasi yang relevan, netral, dan lengkap, akuntansi menyediakan standar yang harus diikuti dan dipakai oleh orang yang menyusun laporan keuangan. Artinya, penyusun laporan keuangan terikat untuk menggunakan standar akuntansi itu sehingga informasi yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh selera orang bersangkutan. Harapannya, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mempunyai daya banding (*comparability*) dan daya uji (*verifiability*), serta dapat dimengerti oleh pihak lain yang menggunakan laporan keuangan itu. Laporan keuangan yang mempunyai daya banding merupakan laporan yang dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau dengan laporan perusahaan lain dalam periode yang sama. Sedangkan laporan keuangan yang mempunyai daya uji merupakan laporan yang tidak dibuat atas dasar pertimbangan yang subyektif.

Agar laporan keuangan mempunyai daya banding dan daya uji maka informasi itu harus disusun dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Laporan keuangan yang tidak disusun dengan menggunakan standar akuntansi itu akan dinilai sebagai informasi yang tidak mempunyai daya banding dan daya uji, tidak berkualitas, tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi. Alasannya, standar akuntansi secara umum juga dipakai untuk menyusun laporan keuangan perusahaan-perusahaan lain. Oleh sebab itu apabila perusahaan tidak menggunakan standar akuntansi itu maka laporan keuangannya tidak mungkin dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lain.

Selain itu perusahaan diharapkan menerapkan standar akuntansi secara konsisten dari periode ke periode. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan informasi yang mempunyai daya banding dan daya uji, khususnya apabila informasi ini akan diperbandingkan dengan informasi dari periode-periode lalu. Meskipun demikian suatu perusahaan diijinkan mengganti metode dan prosedur akuntansi yang selama ini digunakan dengan metode dan prosedur akuntansi yang lain. Syaratnya, perubahan ini diungkapkan dengan jelas dalam laporan keuangan, sehingga pemakai laporan keuangan dapat mengetahui adanya perubahan-perubahan itu.

Oleh sebab itu laporan keuangan yang secara konsisten disusun dengan menggunakan standar akuntansi dianggap sebagai informasi relevan, netral, dan lengkap. Apalagi standar akuntansi sudah mengatur semua komponen dalam laporan keuangan secara lengkap. Bahkan satu komponen mempunyai lebih satu metode akuntansi yang bebas dipilih dan digunakan oleh pemakainya, termasuk mengganti metode yang dipakainya, asal diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan. Selain kebebasan dalam memilih dan mengganti metode akuntansi, prinsip akuntansi juga memberikan kebebasan pemakainya untuk menentukan nilai estimasi yang digunakannya. Secara konseptual nilai estimasi merupakan nilai yang digunakan periode waktu alokasi harga perolehan (*cost*) aktiva tetap dan biaya dibayar dimuka (*deferred charge*), nilai residu aktiva tetap, prosentase biaya kerugian piutang, dan lain-lain.

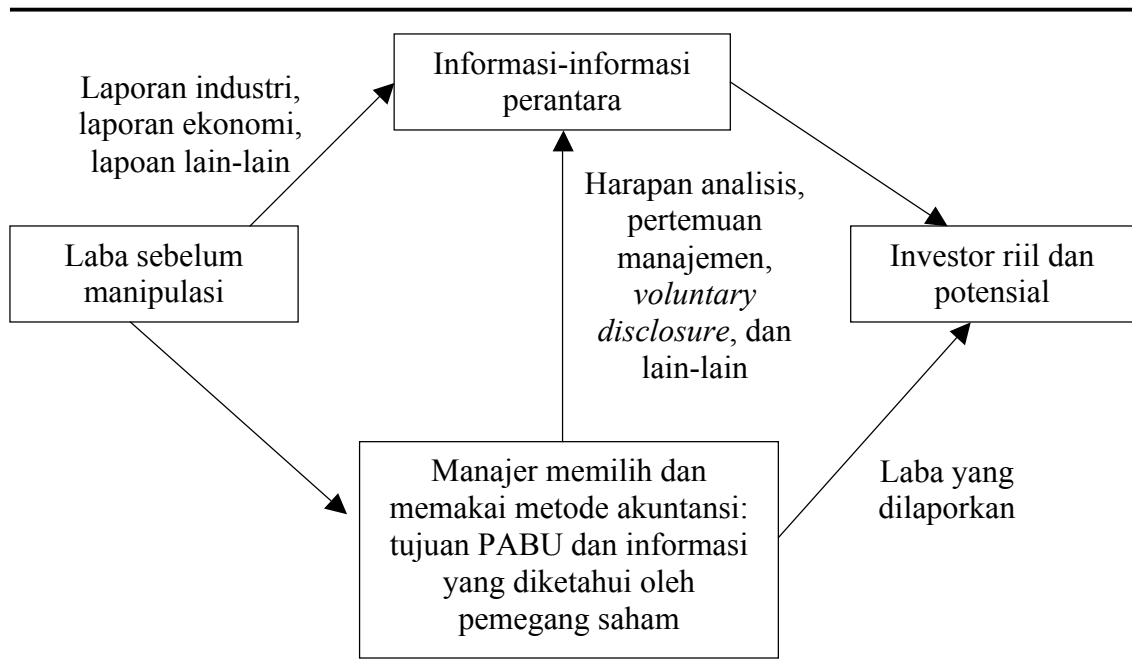
Kebebasan memilih metode akuntansi dan nilai estimasi inilah yang memicu dan mendorong seseorang untuk merekayasa informasi keuangan. Penyusun laporan keuangan hanya mau memilih dan menggunakan metode akuntansi dan menentukan nilai estimasi yang dapat mengoptimalkan kesejahteraannya. Artinya, penyusun laporan keuangan hanya mau menggunakan suatu metode akuntansi tertentu apabila ada manfaat yang bisa diperoleh. Sementara metode yang tidak memberi manfaat tidak akan dipergunakan dalam menyusun laporan keuangan. Oleh sebab itu secara konseptual ada dua cara yang bisa digunakan seorang manajer untuk mempengaruhi laporan keuangan, yaitu, *pertama*, bermain dengan menggunakan metode akuntansi atau nilai estimasi akuntansi dan, *kedua*, menggunakan metode akuntansi sekaligus nilai estimasi akuntansi. Cara yang terakhir ini biasanya digunakan untuk mengatur besarnya kecilnya biaya depresiasi aktiva tetap atau biaya amortisasi aktiva tak berwujud.

Apabila penyusun laporan keuangan memilih menggunakan metode akuntansi maka kebijakan ini relatif lebih mudah diketahui oleh pemakai laporan keuangan. Alasannya, metode akuntansi yang digunakan harus diungkapkan dalam laporan keuangan bersangkutan, termasuk jika terjadi perubahan metode akuntansi yang digunakan. Sedangkan apabila seorang penyusun laporan keuangan memilih menggunakan nilai estimasi akuntansi untuk mengendalikan transaksi akrual maka kebijakan ini lebih relatif lebih sulit untuk diketahui pihak lain, sehingga penyusun laporan keuangan cenderung memilih kebijakan rekayasa dengan mengendalikan berbagai akrual. Alasannya, transaksi akrual yang diatur dengan memanfaatkan kebebasan menentukan nilai estimasi akuntansi ini merupakan transaksi yang tidak mudah untuk diketahui pemakai laporan.

Upaya mempengaruhi informasi keuangan inilah yang disebut dengan manajemen laba. Secara umum manajemen laba dapat dilakukan karena dasar pencatatan transaksi yang dipakai adalah akrual, yaitu pencatatan transaksi yang dilakukan tanpa harus disertai penerimaan kas dan atau pengeluaran kas. Akuntansi berbasis akrual (*accruals basis of accounting*) berusaha mencatat semua pengaruh keuangan yang terjadi dalam suatu transaksi dan peristiwa yang mempunyai konsekuensi kas untuk periode bersangkutan, tidak hanya ketika kas diterima atau dibayarkan secara tunai. Akuntansi berbasis akrual menggunakan prosedur akrual, *defferal*, pengalokasian yang bertujuan untuk menghubungkan pendapatan, biaya, keuntungan (*gains*), dan kerugian (*losses*) selama periode tertentu, meski kas belum diterima atau dikeluarkan. Maka esensi penggunaan akuntansi akrual terletak pada upaya untuk mempertemukan seluruh pendapatan dan biaya (*matching of cost and revenues*) untuk mengukur kinerja perusahaan.

Secara konseptual laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan basis akrual dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan komprehensif dibandingkan laporan keuangan yang menggunakan basis kas. Alasannya, dalam akuntansi berbasis akrual semua transaksi dan peristiwa yang dilakukan perusahaan selama satu periode tertentu, baik kas maupun non-kas. Inilah yang membuat laporan keuangan lebih relevan dengan kebutuhan pemakai informasi ini dibandingkan dengan laporan keuangan basis kas. Sebab pada dasarnya pemakai laporan keuangan ingin mengetahui kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan bersangkutan secara utuh. Tidak hanya

kinerja kas, namun juga kinerja non-kas. Oleh sebab itu perusahaan-perusahaan dan *stakeholder* di seluruh dunia lebih banyak menerima dan menggunakan laporan keuangan basis akrual ini.



Sumber: Richardson, 1998.

Gambar 1.1
Arus Informasi untuk Investor

Oleh sebab itu manajemen laba dapat dikatakan sebagai upaya manajerial untuk mengintervensi informasi dalam laporan keuangan dengan cara memanfaatkan kebebasan memilih dan menggunakan metode akuntansi dan menentukan nilai estimasi akuntansi. Meskipun demikian secara praktis aktivitas rekayasa manajerial ini sulit untuk dideteksi. Pemakai laporan keuangan akan merasa kesulitan untuk mengetahui apakah informasi itu telah direkayasa atau tidak hanya dengan melihat dan membaca informasi itu. Ada dua keterbatasan pemakai laporan keuangan dalam menginterpretasikan laporan keuangan untuk mendeteksi manajemen laba, yaitu, *pertama*, kriteria penyajian laporan keuangan rawan terhadap kebijakan manajerial, yang merupakan fleksibilitas dalam menghitung laba, karena akuntansi memang memberikan peluang bagi manajer untuk mencatat fakta dengan cara tertentu dan mengestimasi secara subyektif. *Kedua*, tidak ada observasi yang sempurna terhadap kebijakan manajerial, mengingat tidak semua kebijakan manajerial dapat diobservasi

oleh pemakai laporan keuangan. Bahkan jika kebijakan itu diungkapkan dalam laporan keuangan sekalipun.

Upaya-upaya rekayasa inilah yang membuat informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan dengan kebutuhan pemakainya. Informasi yang telah direkayasa hanya relevan dengan kebutuhan pihak-pihak tertentu, khususnya manajer. Apalagi penyelewengan itu sebenarnya telah mengakibatkan informasi keuangan menjadi tidak relevan, netral, lengkap, serta tidak mempunyai daya banding dan daya uji lagi. Sementara kebutuhan dan kepentingan pihak lain atau *stakeholder* untuk memperoleh informasi yang berkualitas menjadi terabaikan. Hal ini disebabkan penyelewengan telah membuat informasi tidak dapat lengkap menyajikan secara lengkap apa yang seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan. Pemilik yang membutuhkan informasi untuk menilai kinerja manajer menjadi keliru dalam menetapkan kebijakan untuk kompetensi dan kompensasi manajerial. Calon investor akan keliru dalam memilih perusahaan sebagai tempat menanamkan dananya. Kreditur akan keliru ketika menilai kelayakan perusahaan yang akan atau telah menerima dananya. Supplier akan keliru mengirimkan barangnya kepada perusahaan yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Regulator akan keliru dalam menilai kesehatan perusahaan. Pemerintah akan keliru dalam menentukan berapa pajak yang harus dipungutnya.

C. PERSPEKTIF OPORTUNIS

Secara konseptual laporan keuangan merupakan media yang dipakai perusahaan untuk menginformasikan apa yang telah dilakukan dan dialami perusahaan itu selama satu periode tertentu. Laporan keuangan juga dipergunakan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh dari seluruh aktivitas perusahaan selama satu periode itu. Selain itu laporan keuangan pun dipergunakan untuk menginformasikan kondisi perusahaan pada saat tertentu sebagai akibat dari apa yang dilakukan dan dialaminya. Oleh sebab itu laporan keuangan secara langsung harus disusun, dipersiapkan, dan disajikan oleh orang yang mengelola perusahaan atau oleh orang yang memperoleh tugas untuk melaksanakan pekerjaan itu, yaitu akuntan internal. Alasannya, sebagai pengelola perusahaan, manajer merupakan satu-satunya pihak yang menguasai seluruh informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan. Manajer bisa menjelaskan secara

rinci mengapa dan untuk apa informasi itu ada. Manajer juga mengetahui dan memahami hubungan antara satu informasi dengan informasi lain.

Sementara pihak lain diluar perusahaan, yaitu pemilik, calon investor, kreditur, supplier, regulator, pemerintah, dan *stakeholder* lain, yang mempunyai keterbatasan sumber dan akses untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan. Pihak-pihak ini hanya bisa mengandalkan informasi yang disajikan manajer jika ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Artinya, seberapa banyak informasi yang dapat dikuasai pihak-pihak ini sangat tergantung pada seberapa banyak informasi yang diterimanya dari manajer. Semakin banyak informasi yang diungkapkan manajer semakin banyak pula informasi yang dapat dikuasainya, sebaliknya semakin sedikit informasi yang diungkapkan manajer semakin sedikit pula informasi yang dapat dikuasainya.

Selain kuantitas informasi maka kualitas informasi yang diterima dan dikuasai *stakeholder* juga sangat tergantung pada kamauan manajer perusahaan. Semakin berkualitas informasi yang diungkapkan manajer semakin berkualitas pula informasi yang diterima dan dikuasainya, sebaliknya semakin tidak berkualitas informasi yang diungkapkan manajer semakin tidak berkualitas pula informasi yang diterima dan dikuasainya. Secara konseptual kemauan seorang manajer dipengaruhi oleh motivasi dan perilaku etisnya, sehingga kualitas informasi dalam laporan keuangan pun juga sangat tergantung pada motivasi dan perilaku etis manajer bersangkutan. Artinya semakin meragukan motivasi dan perilaku etis seorang manajer semakin meragukan pula kualitas laporan keuangan yang dipublikasikannya. Oleh sebab itu apabila integritas dan kredilitas sebuah perusahaan juga sangat tergantung pada integritas dan kredibilitas manajernya.

Situasi inilah yang membuat manajer cenderung menjadi pihak yang lebih superior dalam menguasai informasi dibandingkan pihak lain. Secara konseptual kesenjangan informasi antara manajer dengan pihak lain ini disebut dengan asimetri informasi (*information asymmetry*). Kesenjangan informasi inilah yang mendorong manajer untuk berperilaku oportunistis dalam mengungkapkan informasi-informasi penting mengenai perusahaan. Semakin besar asimetri informasi semakin besar dorongan bagi manajer untuk berperilaku oportunistis. Hal inilah yang mengakibatkan manajer hanya akan mengungkapkan suatu informasi tertentu jika ada manfaat yang diperolehnya. Sedangkan apabila tidak manfaat yang bisa diperolehnya maka manajer

akan menyembunyikan atau menunda pengungkapan informasi itu. Bahkan manajer akan mengubah atau memalsukan informasi jika ada manfaat yang bisa diperolehnya.

Ada tiga pola laba yang bisa dipilih dan dipakai manajer untuk mengubah informasi ini. Pola yang dipilih dan dipakai manajer tergantung pada tujuan yang ingin dicapainya. Apabila manajer menginginkan kinerja terlihat lebih bagus daripada kinerja sesungguhnya maka manajer akan menaikkan informasi labanya lebih tinggi dibanding laba sesungguhnya. Sementara apabila manajer menginginkan kinerja perusahaan rendah maka manajer itu akan mengaturnya labanya lebih rendah dibandingkan kinerja sesungguhnya. Sedangkan agar kinerjanya terlihat lebih merata selama beberapa periode, manajer akan mengatur informasi sedemikian rupa sehingga labanya tidak bergerak secara fluktuatif selama periode-periode itu. Upaya untuk mempermainkan informasi dalam laporan keuangan dengan menyembunyikan, menunda pengungkapan, dan mengubah informasi inilah yang disebut dengan manajemen laba.

Upaya menyembunyikan, menunda pengungkapan, dan mengubah informasi ini dipandang sebagai kecurangan (*fraud*) seorang manajer dalam melaporkan kinerjanya. Alasannya, upaya ini dilakukan manajer untuk menyesatkan pihak lain yang ingin mengetahui dan menilai kinerja dan kondisi perusahaan. Apalagi jika upaya itu merupakan tindakan-tindakan manajerial yang disengaja untuk menipu pihak lain yang menyebabkannya kehilangan kekayaan. Hilangnya kekayaan ini disebabkan manajemen laba dapat mengakibatkan kesalahan alokasi sumberdaya. Manajer tidak bisa mengalokasikan apa yang telah didapatnya kepada pihak-pihak yang tepat. Hingga investor kehilangan kesempatan memperoleh deviden, kreditur dan supplier memperoleh kesempatan pengembalian pinjaman dan bunganya, serta pemerintah yang kehilangan kesempatan memperoleh sejumlah pajak.

Oleh sebab itu perspektif ini dinilai sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan akan mendorong setiap pihak berusaha memaksimalkan kesejahteraan masing-masing. Pemilik akan mendorong manajer agar mau bekerja lebih keras dengan menggunakan berbagai intensif untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Alasannya, kesejahteraan pemilik akan meningkat seiring dengan peningkatan nilai perusahaan itu. Sebaliknya manajer karena kesuperiorannya dalam menguasai informasi akan berperilaku oportunistis. Upaya manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan akan mengarah pada

upaya memaksimalkan kesejahteraan pribadi. Artinya, perilaku oportunistik mengimplikasikan upaya manajer dalam mentransfer kemakmuran pemilik perusahaan kepada dirinya sendiri.

Atas dasar pemikiran itulah mengapa manajemen laba dinilai sebagai cermin perilaku oportunistik seorang manajer dengan mempercantik laporan keuangannya (*fashioning accounting reports*), yaitu melaporkan laba atau kinerja sesuai dengan kepentingan yang dicapainya. Manajemen laba tidak lagi hanya dipandang sebagai upaya untuk mengintervensi laporan keuangan dengan mempermainkan dan mengutak-atik angka-angka dalam laporan keuangan agar kelihatan lebih cantik. Namun juga merupakan upaya untuk memaksimalkan kesejahteraan seorang manajer dengan biaya yang harus ditanggung pihak lain. Bahkan dalam beberapa kasus, perilaku oportunistik itu membuat seseorang terpaksa harus menanggung biaya agensi, yaitu kehilangan kesempatan untuk memperoleh kekayaan, menderita kerugian, atau kehilangan kekayaannya. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan bisnis perusahaan, bukan hanya pemilik perusahaan yang harus menanggung biaya agensi karena perilaku oportunistik itu namun juga *stakeholder* lain yang mempunyai hubungan dengan perusahaan.

Perilaku oportunistik ini telah menyebabkan kekayaan perusahaan tidak dialokasikan dengan tepat (*misallocation*). Pemilik tidak memperoleh *return* sesuai dengan besarnya modal yang ditanamkannya. Calon investor keliru dalam memilih perusahaan yang dapat memberikan *return* atas investasinya itu. Kreditur keliru dalam menilai kemampuan perusahaan sehingga dana yang dipinjamkannya terancam tidak dikembalikan. Supplier keliru menilai kelayakan perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh *return* dari barang yang dikirimkannya, bahkan juga bisa kehilangan barang-barang yang telah diserahkan kepada perusahaan itu. Regulator keliru dalam menilai kesehatan perusahaan sehingga membuat kebijakan yang tidak tepat untuk perusahaan bersangkutan. Pemerintah pun tidak memperoleh hak yang seharusnya diterima dalam bentuk pajak sebagaimana mestinya. Perilaku oportunistik yang tercermin dari manajemen laba ini hanya membuat sebagian besar kekayaan perusahaan dialokasikan dan diterima manajer sendiri. Bahkan dalam beberapa kasus, seluruh kekayaan perusahaan dialokasikan dan diterima manajer itu sendiri.

Meski demikian ada sebagian pihak yang mencoba memahami mengapa manajer berperilaku oportunistik. Secara konseptual manajer berperilaku oportunistik ketika menghadapi *intertemporal choice*, yaitu kondisi yang memaksa manajer membuat keputusan tertentu untuk mengoptimalkan kesejahteraannya (*moral hazard*). Sebagai contoh adalah ketika seorang manajer mencoba mensiasati regulasi pemerintah dibidang perpajakan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkannya atau ketika seorang manajer berusaha mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh manajer dari kontrak yang dibuat antara seorang manajer dengan pihak lain, misalkan dalam mengoptimalkan bonus yang akan diperoleh seorang manajer ketika mencapai tingkat kinerja tertentu. Contoh lain adalah ketika seorang manajer ingin mengoptimalkan nilai saham yang ditawarkan di pasar modal, manajer dapat mengatur kinerja perusahaannya sehingga dapat menarik minat investor untuk membeli saham yang ditawarkan. Hal ini disebabkan karena investor tidak mampu mendeteksi keberadaan dan besarnya bagian laba yang telah dimanipulasi dan gagal memahami implikasi penggunaan akrual dalam laporan keuangan.

Ada berbagai motivasi yang ditengarai mendasari dan mendorong seorang manajer berperilaku oportunistik. Motivasi-motivasi inilah yang mempengaruhi pola rekayasa manajerial yang dilakukan manajer perusahaan. Artinya, bagaimana pola rekayasa ini sangat tergantung pada apa yang ingin dicapai oleh manajer bersangkutan. Manajer bisa merekayasa labanya menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada laba sesungguhnya tergantung motivasi apa yang mendasarinya. Demikian juga apabila manajer merekayasa laba agar cenderung selalu sama selama beberapa periode sebelumnya. Secara umum ada beberapa motivasi-motivasi yang mendorong manajer untuk berperilaku oportunistik, yaitu motivasi bonus (*bonus purposes*), motivasi kontrak (*contractual motivations*), motivasi politik (*political motivations*), motivasi pajak (*taxes motivations*), pergantian *chief executive officers* (*changes of CEO*), *initial public offerings* dan mengkomunikasikan informasi ke investor (*to communicate information to investors*), yang bisa dikelompokkan sebagai berikut:

1. Memanfaatkan transaksi di pasar modal

Studi tentang pasar modal yang berkembang saat ini mendorong pengujian terhadap perilaku oportunistik terfokus pada saat perusahaan mempunyai dorongan yang tinggi untuk melakukan manajemen laba, yaitu pada saat perusahaan melakukan periode

transaksi. Apalagi pada saat ada kesenjangan informasi antara perusahaan, investor, dan analis. Sebagai contoh adalah pada saat perusahaan melakukan penawaran saham perdana (*initial public offerings*), *seasoned equity offerings*, dan *management buyout*. Dalam transaksi-transaksi ini manajer perusahaan merekayasa informasi sedemikian rupa agar laporan keuangan yang disajikannya mampu menarik minat publik untuk merespon penawarannya secara positif. Atau dengan kata lain, dengan menyajikan informasi yang lebih baik daripada informasi sesungguhnya diharapkan dapat membuat publik mau membeli saham yang ditawarkan dengan harga yang relatif lebih tinggi daripada harga sesungguhnya.

Upaya merekayasa informasi ini disebabkan laporan keuangan merupakan sumber informasi utama bagi investor yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan untuk menilai apakah perusahaan bersangkutan tepat untuk dijadikan tempat berinvestasi. Investor bahkan cenderung menggunakan laporan keuangan sebagai satu-satunya sumber informasi sebelum membuat keputusan membeli saham-saham yang ditawarkan itu. Investor akan membeli saham-saham itu apabila melihat informasi yang disajikan dalam laporan keuangan cenderung positif dan prospektif. Oleh sebab itu manajer perusahaan yang menginginkan saham yang ditawarkannya direspon secara positif oleh pasar akan melakukan manajemen laba. Apalagi sebagai pihak yang menguasai informasi, seorang manajer mempunyai kebebasan untuk menyembunyikan, menunda sementara pengungkapan, dan mengubah laporan keuangan agar terlihat lebih cantik.

2. Memanfaatkan kontrak dengan pihak lain

Motivasi kontraktual ini muncul karena perjanjian antara manajer dan pihak lain yang berbasis pada kompensasi manajerial (*managerial compensations*) dan perjanjian hutang (*debt covenant*). Motivasi manajerial yang berbasis bonus ini merupakan dorongan bagi manajer dalam melaporkan laba yang diperolehnya untuk memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba yang diperolehnya. Jika laba lebih rendah daripada target yang ditetapkan maka akan mendorong manajer untuk melakukan rekayasa dengan mentransfer laba masa depan (*future earnings*) menjadi laba sekarang (*current earnings*) dengan harapan akan memperoleh laba.

Hipotesis tentang perencanaan bonus memprediksi bahwa pengunduran diri dalam pendekatan *chief executive officers* (CEO) digunakan sebagai strategi untuk

memaksimalkan laba sebagai upaya untuk menaikkan bonusnya. CEO melakukan manajemen laba untuk menaikkan kemungkinan laba masa depan agar positif. Penelitian mengenai pelanggaran perjanjian hutang (*debt covenant violations*) membuktikan adanya manajemen laba dengan menaikkan laba dalam laporan keuangan tahunan perusahaan yang melanggar perjanjian ini. Perjanjian hutang terbukti mempunyai pengaruh terhadap pilihan akuntansi pada tahun pelaporan dan tahun terjadinya pelanggaran. Penelitian sejenis membuktikan bahwa perusahaan yang dinyatakan melanggar perjanjian hutang secara signifikan akan menaikkan laba sehingga rasio *debt-to-equity* dan *interest coverage* pada level yang ditentukan.

3. Memanfaatkan regulasi pemerintah

Motivasi regulasi (politik) merupakan motivasi yang muncul karena manajer berperilaku oportunistik dengan memanfaatkan kelemahan akuntansi yang menggunakan estimasi akrual dan pemilihan metode akuntansi dalam mendasar berbagai regulasi pemerintah. Perusahaan yang terbukti menjalankan praktik pelanggaran terhadap regulasi *anti-trust* dan anti monopoli melakukan manajemen laba untuk menurunkan laba yang dilaporkannya. Perusahaan akan menurunkan laba dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan pengadilan dalam menetapkan finalti terhadap perusahaan yang mengalami *damage award*. Selain itu *income taxation* juga merupakan motivasi dalam manajemen laba. Pemilihan metode akuntansi akan memberikan hasil yang berbeda terhadap laba yang dilaporkan yang dipakai sebagai dasar perhitungan pajak. Manajer cenderung memilih untuk menggunakan metode akuntansi yang menghasilkan laporan laba dan pajak yang relatif lebih rendah.

BAB 2

TEORI DAN KONSEP

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah membaca bab ini pembaca diharapkan dapat memahami bahwa:

1. Manajemen laba merupakan permainan manajerial yang dilakukan manajer untuk mengatur besar kecilnya laba perusahaan.
2. Perkembangan definisi manajemen laba.

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah membaca bab ini pembaca diharapkan dapat memahami bahwa:

1. Manajemen laba dilakukan dengan mengubah berbagai estimasi akuntansi, metode akuntansi, dan mempermainkan komponen cadangan.
 2. Manajemen laba secara umum didefinisikan sebagai upaya yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, serta ada biaya dan manfaat yang diharapkan pelakunya.
-

Ada sisi negatif yang tidak diharapkan dari perkembangan konsep-konsep manajemen sejak awal abad dua puluhan. Konsep pengelolaan korporasi yang seharusnya membuat dunia usaha dijalankan secara profesional justru menjadi pemicu kehancuran dunia usaha dan merugikan publik. Konsep yang seharusnya membuat permasalahan pengelolaan usaha dieliminasi seminimal mungkin justru diselewengkan hingga membuat munculnya permasalahan-permasalahan baru yang merugikan kepentingan berbagai pihak. Permasalahan ini tentu bukan hanya disebabkan adanya kelemahan yang melekat dalam konsep-konsep manajemen itu namun juga didorong oleh *moral hazard* orang-orang yang menggunakannya. Ada kecenderungan seseorang untuk selalu mencari celah dari suatu aturan atau pedoman tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Akibatnya konsep-konsep manajerial yang sebenarnya bertujuan positif diselewengkan hingga seolah-olah menjadi sesuatu yang negatif dan merugikan publik.

Hubungan sisi positif dan negatif konsep manajerial ini salah satunya terjadi dalam hubungan antara agensi teori (*agency theory*) dan manajemen laba. Secara konseptual manajemen laba memang merupakan sisi lain dari teori agensi yang menekankan pentingnya penyerahan operasionalitas perusahaan dari pemilik (*principals*) kepada pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk mengelola perusahaan dengan lebih baik (*agents*). Konsep manajerial yang mengatur hubungan antara pemilik dan pengelola ini menyatakan bahwa setiap pihak mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Setiap pihak harus mempunyai komitmen untuk menghargai dan menghormati hak dan wewenang pihak lain. Oleh sebab itu setiap pihak tidak diperbolehkan untuk mengintervensi hak dan wewenang pihak lain. Apalagi jika intervensi itu dilakukan demi kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain.

Sebagai pihak yang menyerahkan wewenang pengelolaan perusahaan, pemilik mempunyai hak dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan meminta laporan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan dan dialami pengelola perusahaan. Pemilik juga mempunyai hak untuk menerima hasil (*return*) yang layak dari modalnya sehingga kesejahteraannya meningkat. Seandainya pemilik merasa bahwa pengelola tidak menjalankan kewajiban maka pemilik berhak mengganti pengelola dengan orang lain yang dianggap lebih mampu. Selain itu pemilik mempunyai kewajiban untuk memperhatikan dan memberikan penghargaan secara layak kepada pengelola perusahaan. Untuk memotivasi agar pengelola mau bekerja dengan lebih baik pemilik juga dapat menjanjikan bonus yang akan diterima pengelola sesuai dengan kinerja dan prestasinya. Secara konseptual upaya semacam ini merupakan usaha pemilik untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi sebab peningkatan nilai perusahaan berarti peningkatan kesejahteraan pemilik.

Sementara sebagai penerima wewenang, pengelola mempunyai kewajiban untuk menjalankan dan mengoperasikan perusahaan secara bertanggung jawab. Pengelola mempunyai kewajiban untuk melaporkan secara berkala atas apa yang telah dilakukan dan dialaminya kepada pemilik secara terbuka, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu pengelola juga harus mau menerima pengawasan dan pengarahan dari pemilik ketika menjalankan perusahaan, apalagi jika hal ini dilakukan untuk kepentingan umum dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi

pemilik perusahaan. Namun demikian pengelola berhak menolak intervensi pemilik yang ingin mencampuri urusan manajerial perusahaan, apalagi jika intervensi ini dilakukan untuk kepentingan pribadi yang merugikan publik. Untuk semua pekerjaan yang telah dilakukannya itu maka pengelola mempunyai hak untuk menerima penghargaan yang layak sesuai dengan kinerja dan prestasinya. Bahkan pengelola perusahaan juga mempunyai hak untuk menerima penghargaan lain yang telah dijanjikan pemilik apabila kinerja dan prestasinya lebih bagus daripada yang ditargetkannya.

Secara konseptual hubungan agensi antara pemilik dan pengelola perusahaan ini seharusnya menghasilkan hubungan simbiosis mutualisme yang menguntungkan semua pihak, khususnya apabila setiap pihak menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab. Namun yang terjadi justru sebaliknya, yaitu munculnya permasalahan agensi (*agency problem*) antara pemilik dan pengelola perusahaan. Permasalahan ini muncul karena ada pihak yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi meskipun merugikan pihak lain. Bahkan dalam perkembangannya permasalahan agensi juga menjadi permasalahan antara pengelola dengan pihak lain yang mempunyai hubungan dengan perusahaan, yaitu calon investor, kreditur, supplier, regulator, dan *stakeholder* lainnya. Permasalahan yang muncul dari keinginan manajer untuk mengoptimalkan kesejahteraan pribadi dengan mengelabui pemilik dan *stakeholder* lain yang tidak mempunyai akses dan sumber informasi yang memadai.

A. PERMAINAN MANAJERIAL

Secara konseptual laporan keuangan merupakan media komunikasi utama antara manajer perusahaan dengan *stakeholder*. Apalagi saat ini memang belum ada media informasi lain yang dapat dipakai kedua belah untuk melakukan komunikasi bisnis. Manajer menggunakan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dan dialaminya selama mengoperasikan perusahaan. Sementara di sisi lain laporan keuangan dipakai oleh *stakeholder* untuk melihat, menilai, meminta pertanggungjawaban manajer atas apa yang telah dilakukan dan dialami manajer itu. Laporan keuangan juga dipakai *stakeholder* untuk menentukan tindakan yang selanjutnya harus dilakukan terkait dengan hubungan bisnisnya itu. Oleh sebab itu laporan keuangan harus dapat dimengerti dan dipahami oleh semua pihak yang

membutuhkan informasi itu. Alasan inilah yang menjelaskan mengapa laporan keuangan harus memenuhi beberapa kaidah kualitatif agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Ada beberapa kaidah agar laporan keuangan dapat menjalankan fungsinya itu, *pertama*, laporan keuangan harus menyediakan informasi yang relevan dengan kebutuhan pemakainya. Atau dengan kata lain, laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan informasi semua pihak yang membutuhkan. *Kedua*, laporan keuangan harus netral dari keinginan pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari informasi yang disajikan dalam laporan itu. *Ketiga*, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang lengkap atau komprehensif. Oleh sebab itu laporan keuangan harus mengungkapkan semua informasi mengenai kinerja dan kondisi perusahaan. Selain itu laporan keuangan tidak boleh menyembunyikan informasi untuk kepentingan pihak tertentu. *Keempat*, laporan keuangan harus mempunyai daya banding dan uji. Laporan keuangan dikatakan mempunyai daya banding apabila informasi yang disajikannya dapat dibandingkan dengan informasi pada periode atau perusahaan yang berbeda. Sedangkan daya uji adalah kemampuan laporan keuangan untuk tetap menghasilkan informasi yang sama apabila diuji kembali dengan menggunakan metode yang sama.

Kaidah-kaidah inilah yang membuat laporan keuangan layak digunakan sebagai media yang menginformasikan apa yang telah dilakukan dan dialami suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Kaidah-kaidah ini juga membuat *stakeholder* mempunyai informasi yang valid dan memadai untuk memastikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mengamankan kepentingannya. Sebaliknya laporan keuangan yang disusun tanpa memenuhi kaidah di atas akan diragukan validitas informasinya. Dampaknya, *stakeholder* tidak memperoleh informasi yang valid dan memadai untuk memastikan apa yang seharusnya dilakukan. Oleh sebab itu akurasi informasi yang disampaikan manajer dalam laporan keuangan secara langsung akan mempengaruhi ketepatan keputusan yang dibuat *stakeholder*. Atau dengan kata lain informasi bagus akan menghasilkan keputusan yang bagus, sebaliknya informasi keliru akan menghasilkan keputusan yang keliru pula.

Upaya menyelewengkan informasi dengan tidak mengikuti kaidah ini tidak hanya terjadi di atas kertas. Meski standar akuntansi sudah berusaha mengatur agar

laporan keuangan disusun dengan mentaati kaidah-kaidah baku namun bukti empiris justru menunjukkan salah satu biang keladi keruntuhan dunia usaha adalah upaya menyelewengkan informasi ini. Manajer seringkali menyusun dan menyajikan informasi tanpa mentaati kaidah-kaidah itu, tetapi justru mengikuti *moral hazard*-nya atau keinginan untuk memperkaya diri sendiri meski merugikan orang lain. Informasi yang seharusnya netral justru diselewengkan untuk memenuhi dari kepentingan-kepentingan tertentu. Informasi yang seharusnya lengkap dan komprehensif justru disembunyikan atau ditunda pengungkapannya agar kepentingan-kepentingan tertentu dapat tercapai. Akibatnya informasi menjadi tidak netral dan relevan lagi dengan kebutuhan pemakainya. Informasi hanya relevan dengan kebutuhan manajer karena disusun untuk memenuhi kepentingan manajer itu. Upaya penyelewengan ini juga membuat informasi akuntansi itu tidak mungkin lagi dapat dibandingkan dan diuji dengan informasi-informasi lain.

Secara konseptual upaya menyelewengkan informasi ini dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen dalam laporan keuangan, baik dengan mempermainkan besar kecilnya maupun menyembunyikan atau menunda pengungkapan komponen tertentu. Menariknya, upaya ini dapat dilakukan tanpa harus melanggar standar akuntansi yang selama ini digunakan secara umum. Hanya dengan mengganti metode dan prosedur akuntansi tertentu dengan metode dan prosedur akuntansi yang lain besar kecilnya komponen laporan keuangan dapat diatur sesuai keinginan manajer perusahaan. Selain itu manajer juga dapat mempermainkan komponen-komponen laporan keuangan dengan menentukan atau mengubah nilai estimasi yang dipakainya. Hingga banyak pihak yang mengatakan bahwa upaya mempermainkan laporan keuangan ini dapat dilakukan justru karena diakomodasi difasilitasi oleh prinsip akuntansi sendiri.

Tabel 2.1
Tujuh Permainan Manajerial

Mencatat pendapatan terlalu cepat.
Mencatat pendapatan palsu.
Mengakui pendapatan lebih cepat satu periode.
Mengakui biaya periode berjalan menjadi biaya periode sebelum atau sesudahnya.
Tidak mengungkapkan semua kewajibannya.
Mengakui pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode

sebelumnya.

Mengakui pendapatan masa depan menjadi pendapatan periode berjalan.

Sumber: Davin, 2004.

Ada beberapa cara yang dipakai perusahaan untuk mempermainkan besar kecilnya laba, yaitu dengan mengakui dan mencatat pendapatan terlalu cepat atau sebaliknya, mengakui dan mencatat pendapatan palsu, mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lebih lambat dari yang seharusnya, dan tidak mengungkapkan kewajibannya. Secara konseptual upaya mempermainkan besar kecilnya komponen laporan keuangan ini sulit untuk dideteksi dan diketahui oleh pemakai informasi keuangan, meskipun laporan keuangan menyertakan catatan yang menjelaskan secara rinci komponen-komponen dalam laporan itu. Alasannya, *pertama*, pemakai laporan keuangan tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk memahami catatan-catatan itu secara baik. *Kedua*, tidak semua metode atau prosedur yang dipakai perusahaan dapat dipahami oleh pemakai laporan keuangan.

1. Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih

Upaya ini dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat pendapatan periode-periode yang akan datang atau pendapatan yang secara pasti belum dapat ditentukan kapan dapat terealisasi sebagai pendapat periode berjalan (*current revenue*). Hal ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih besar daripada pendapatan sesungguhnya. Meningkatnya pendapatan ini membuat laba periode berjalan juga menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya. Akibatnya, kinerja perusahaan periode berjalan seolah-olah lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Meskipun hal ini akan mengakibatkan pendapatan atau laba periode-periode berikutnya akan menjadi lebih rendah dibandingkan pendapatan atau laba sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi investor akan mau membeli sahamnya, menaikkan posisi perusahaan ke level yang lebih baik, dan sebagainya.

2. Mengakui pendapatan lebih lambat satu periode atau lebih

Upaya ini dilakukan mengakui pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode sebelumnya. Hingga pendapatan periode berjalan menjadi lebih kecil daripada pendapatan sesungguhnya. Semakin kecil pendapatan akan membuat laba periode berjalan juga akan menjadi semakin kecil daripada laba sesungguhnya.

Akibatnya, kinerja perusahaan untuk periode berjalan seolah-olah lebih buruk atau kecil bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi keputusan investor agar menjual sahamnya (*management buyout*), mengecilkan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah, dan menghindari kewajiban pembayaran hutang.

3. Mencatat pendapatan palsu

Upaya ini dilakukan manajer dengan mencatat pendapatan dari suatu transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi, sehingga pendapatan ini juga tidak akan pernah terealisasi sampai kapanpun. Upaya ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih besar daripada pendapatan sesungguhnya. Meningkatnya pendapatan ini membuat laba periode berjalan juga menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya. Akibatnya, kinerja perusahaan periode berjalan seolah-olah lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan dengan mengakui pendapatan palsu sebagai piutang, yang pelunasan kasnya tidak akan pernah diterima sampai kapanpun. Upaya ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi investor akan mau membeli sahamnya, menaikkan posisi perusahaan ke level yang lebih baik, dan sebagainya.

4. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lambat

Upaya ini dapat dilakukan manajer mengakui dan mencatat biaya periode-periode yang akan datang sebagai biaya periode berjalan (*current cost*). Upaya semacam ini membuat biaya periode berjalan menjadi lebih besar daripada biaya sesungguhnya. Meningkatnya biaya ini membuat laba periode berjalan juga akan menjadi lebih kecil daripada laba sesungguhnya. Akibatnya, kinerja perusahaan untuk periode berjalan seolah-olah lebih buruk atau kecil bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Meskipun hal ini akan mengakibatkan biaya periode-periode berikutnya menjadi lebih kecil dan sebaliknya laba periode-periode berikutnya akan menjadi lebih besar dibandingkan pendapatan atau laba sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi keputusan investor agar menjual sahamnya (*management buyout*), mengecilkan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah, dan menghindari kewajiban pembayaran hutang.

5. Mengakui dan mencatat biaya lebih lambat

Upaya ini dapat dilakukan dengan mengakui biaya periode berjalan menjadi biaya periode sebelumnya. Hingga biaya periode berjalan menjadi lebih kecil daripada biaya sesungguhnya. Semakin kecilnya biaya ini membuat laba periode berjalan juga akan menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya. Akibatnya membuat kinerja perusahaan untuk periode berjalan seolah-olah lebih baik atau besar bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi investor akan mau membeli sahamnya, menaikkan posisi perusahaan ke level yang lebih baik, dan sebagainya.

6. Tidak mengungkapkan semua kewajiban.

Upaya ini dapat dilakukan manajer menyembunyikan eluru atau sebagian kewajibannya, sehingga kewajiban periode berjalan menjadi lebih kecil daripada kewajiban sesungguhnya. Sebagai contoh adalah kewajiban berupa hutang yang disembunyikan perusahaan. Menurunnya kewajiban berupa hutang ini akan membuat biaya bunga periode berjalan menjadi lebih kecil dari yang sesungguhnya, sehingga laba periode berjalan pun akan menjadi lebih kecil daripada laba sesungguhnya. Akibatnya membuat kinerja perusahaan untuk periode berjalan seolah-olah lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi keputusan investor agar mau membeli saham yang ditawarkannya, menghindari kebijakan multi papan, dan sebagainya.

Meskipun terkesan hanya mempermainkan besar kecilnya angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi sebenarnya permainan ini dilakukan manajer karena keinginannya menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin diketahui pihak lain. Upaya ini bisa dilakukan manajer dengan tujuan untuk melindungi kecurangan-kecurangan yang telah dilakukannya. Hal ini dilakukan untuk mengamankan posisi, kepentingan, dan kesejahteraan pribadinya meski harus merugikan posisi, kepentingan, dan kesejahteraan pihak-pihak lain. Inilah yang menyebabkan manajemen laba cenderung melanggar peraturan dan disebut sebagai kecurangan manajerial. Meski demikian tetap ada pihak yang menganggap manajemen laba bukan sebagai kecurangan dan semata-mata hanya merupakan permainan akuntansi yang difasilitasi dan diakomodasi oleh prinsip akuntansi berterima umum.

Argumen di atas disebabkan karena adanya kebebasan yang dimiliki seseorang yang mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan untuk memilih metode dan prosedur akuntansi yang sangat beragam. Seandainya seorang manajer ingin membuat labanya menjadi lebih besar dari nilai yang sesungguhnya pada suatu periode tertentu, maka banyak kemungkinan yang bisa dilakukannya. Sebagai contoh adalah dengan mengubah estimasi usia ekonomis aktiva tetap menjadi lebih besar dan mengganti metode depresiasinya menjadi garis lurus, mengecilkan prosentase biaya kerugian piutang, mengganti metode pengakuan persediaan menjadi FIFO, dan lain-lain. Sedangkan jika manajer ingin membuat labanya menjadi lebih kecil dari nilai yang sesungguhnya, maka manajer dapat melakukan, misalnya, mengubah estimasi usia ekonomis aktiva tetap menjadi lebih kecil dan mengganti metode depresiasinya menjadi sado menurun, membesarkan prosentase biaya kerugian piutang, mengganti metode pengakuan persediaan menjadi LIFO, dan lain-lain. Oleh sebab itu secara konkret ada tiga target permainan dalam manajemen laba, yaitu:

1. Meninjau kembali dan mengubah berbagai estimasi akuntansi

Permainan manajerial ini bisa dilakukan dengan meninjau kembali dan mengubah berbagai estimasi akuntansi yang selama ini telah digunakan perusahaan. Sebagai contoh adalah umur ekonomis aktiva tetap (*tangible assets*) dan aktiva tidak berwujud (*intangible assets*), prosentase biaya kerugian piutang, dan lain-lain. Perubahan estimasi akuntansi ini memang diperbolehkan dan diakui oleh prinsip akuntansi berterima umum meski sebenarnya rawan menjadi obyek permainan penyusun laporan keuangan. Oleh sebab itu agar semua perubahan estimasi akuntansi ini dapat diketahui oleh pemakai laporan keuangan maka standar akuntansi mensyaratkan bahwa perubahan ini harus diungkapkan dalam catatan kaki laporan keuangan (*footnotes of financial statement*).

Namun kenyataannya, walau sudah diungkapkan dalam laporan keuangan, lebih banyak pemakai laporan keuangan yang tidak memahami bagaimana membaca dan memahami pentingnya catatan kaki ini. Hingga perusahaan yang melakukan pengungkapan perubahan estimasi akuntansi justru akan memperoleh keuntungan dibandingkan perusahaan yang tidak mengungkapkan hal itu. Alasannya:

- a. Upaya mengungkapkan semua perubahan estimasi akuntansi akan membuat perusahaan terbebas dari pelanggaran terhadap standar akuntansi, sehingga

perusahaan terbebas dari tuduhan mengelabui pemakai laporan keuangan. Hal ini membuat “nilai” perusahaan akan meningkat dimata *stakeholder*, yang secara langsung akan meningkatkan harga saham perusahaan bersangkutan di pasar modal.

- b. Seandainya perusahaan memang berniat mengelabui pemakai laporan keuangan dengan mengubah estimasi akuntansi maka upaya inipun tidak mudah untuk diketahui oleh pihak lain karena ketidakmampuan pihak-pihak itu memahami laporan keuangan secara integral dan komprehensif. Akibatnya, pemakai laporan keuangan mempercayai perusahaan tidak melakukan kecurangan dalam melaporkan kinerja. Hingga membuat harga saham perusahaan bersangkutan stabil bahkan cenderung naik.

Sementara perusahaan yang mengelabui pemakai laporan keuangan dengan mengubah estimasi akuntansi, sebenarnya mulai membuat masalah yang sulit dihentikan dan apabila telah mencapai mencapai titik nadir akan menghancurkan perusahaan itu sendiri. Hal ini disebabkan manajemen laba pada dasarnya dilakukan dengan menggeser biaya saat ini menjadi biaya periode masa depan dan pendapatan periode masa depan menjadi pendapatan saat ini, agar laba yang dilaporkan lebih tinggi dari laba sesungguhnya. Sebaliknya, jika perusahaan menginginkan laba yang dilaporkan lebih rendah dari laba sesungguhnya, maka upaya yang dilakukan adalah menggeser biaya periode masa depan menjadi biaya saat ini dan pendapatan saat ini menjadi pendapatan periode masa depan. Atau dengan kata lain, perusahaan mempunyai pilihan untuk melaporkan apa yang sesungguhnya terjadi atau merekayasa labanya menjadi lebih besar atau kecil. Namun, upaya geser-menggeser biaya dan pendapatan ini sebenarnya tidak mungkin dapat dilakukan perusahaan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Ada dua hal yang menyebabkannya:

- a. Perusahaan akan menanggung akumulasi biaya dan pendapatan periode masa lalu atau masa depan yang menyebabkan kinerja perusahaan menjadi sangat rendah atau tinggi. Situasi ini tidak mungkin dapat ditanggung perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan akan mengalami kesulitan likuiditas pada saat harus mengungkapkan apa yang sebenarnya telah dan sedang terjadi.
- b. Ada pihak eksternal yang mengetahui dan menangkap kecurangan yang dilakukan perusahaan itu. Artinya, meski sulit untuk dideteksi, upaya permainan

manajerial semacam ini kemungkinan besar juga bisa terungkap, apalagi oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk memahami laporan keuangan secara integral dan komprehensif, misalkan akuntan publik.

2. Mengubah atau mengganti metode akuntansi

Secara konseptual manajer mempunyai kebebasan untuk mengubah atau mengganti metode akuntansi yang selama ini dipakainya dengan metode akuntansi lain. Hal inilah yang mendorong atau memotivasi seorang manajer untuk mengoptimalkan kepentingan dan kesejahteraan pribadi. Seorang manajer hanya mau menggunakan suatu metode akuntansi tertentu apabila ada manfaat yang bisa diperoleh. Hingga metode akuntansi yang tidak memberi manfaat jika digunakan dalam melaporkan kinerja tidak akan digunakan atau diganti dengan metode lain oleh manajer bersangkutan. Apalagi jika manajer mengetahui bahwa tidak semua pemakai laporan keuangan dapat memahami dampak dari perubahan metode-metode akuntansi itu.

Meski mempunyai kebebasan untuk mengubah atau mengganti metode akuntansi secara bebas, namun perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan semua metode yang dipakainya dalam laporan keuangan. Namun kenyataannya, banyak pemakai laporan keuangan yang tidak memahami bagaimana membaca dan memahami laporan keuangan secara komprehensif, termasuk memahami pengaruh perubahan metode akuntansi yang dipakai perusahaan. Inilah yang membuat perusahaan yang mengungkapkan perubahan metode akuntansi yang dipakai akan memperoleh manfaat positif daripada menyembunyikan perubahan-perubahan itu. Ada beberapa hal yang mendasarinya:

- a. Upaya mengungkapkan perubahan- perubahan metode akuntansi akan membuat perusahaan terbebas dari pelanggaran standar akuntansi, sehingga perusahaan terbebas dari tuduhan mengelabui pemakai laporan keuangan. Hal ini membuat “nilai” perusahaan akan meningkat dimata *stakeholder*, yang akan meningkatkan harga saham perusahaan bersangkutan di pasar modal. Hal ini disebabkan, selain dipengaruhi oleh laba, harga saham suatu perusahaan juga dipengaruhi oleh *goodwill* perusahaan bersangkutan.
- b. Upaya mengubah metode akuntansi tidak mudah untuk diketahui oleh pihak lain karena ketidakmampuan pihak-pihak itu memahami laporan keuangan secara integral dan komprehensif. Oleh sebab itu seandainya perusahaan memang

berniat mengelabui pemakai laporan keuangan maka kecurangan inipun tidak mudah diketahui pemakai laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan tidak dapat memahami bahwa perusahaan sudah melakukan kecurangan dalam melaporkan kinerja, sehingga membuat harga saham perusahaan bersangkutan stabil bahkan cenderung naik.

3. Permasalahan cadangan

Secara konseptual cadangan (*reserves*) merupakan “laba yang ditarik kebelakang dari periode pengakuan sesungguhnya dan menggunakan pada saat dibutuhkan”. Sebagai contoh adalah cadangan kerugian piutang, penurunan nilai persediaan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan perusahaan dengan tujuan agar laba yang dilaporkan perusahaan pada periode berjalan tidak terlalu tinggi. Sebaliknya, pada saat menginginkan labanya menjadi lebih tinggi maka perusahaan dapat menggunakan cadangan itu untuk mengatur laba sesuai dengan keinginannya itu. Secara konseptual perataan laba ini dilakukan perusahaan agar:

- a. Dalam konteks kompensasi manajerial maka upaya perataan laba ini dilakukan manajer agar setiap periode dapat selalu memperoleh bonus yang dijanjikan pemilik perusahaan, apalagi jika bonus dihitung berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan. Manajer akan meratakan laba agar laba yang dilaporkan tidak melebihi batas atas (*cap*) dan tidak kurang dari batas bawah (*boogey*) untuk memperoleh bonus sebab kelebihan laba itu tidak akan dipakai lagi untuk menentukan berapa besarnya bonus yang dapat diterima manajer itu. Sedangkan kelebihan laba yang belum dilaporkan pada periode berjalan akan dilaporkan pada periode berikutnya, sehingga dalam setiap periode manajer dapat memperoleh bonus yang dijanjikan pemilik perusahaan.
- b. Dalam konteks perpajakan maka upaya perataan laba ini dilakukan agar perusahaan dapat mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah pada periode berjalan. Ada dua tujuan yang ingin dicapai perusahaan yang melakukan hal ini, yaitu:
 - Perusahaan hanya ingin penundaan pembayaran pajak sesungguhnya. Artinya, meski pajak yang dibayarkan pada periode berjalan relatif lebih rendah dibandingkan pajak sesungguhnya namun penurunan ini tetap akan dibayarkannya pada periode-periode mendatang.

- Perusahaan menginginkan pajak yang dibayarkannya benar-benar lebih rendah dibandingkan kewajibannya. Sedangkan pajak periode berjalan yang disembunyikan tetap akan disembunyikan sampai kapanpun dan tidak akan dibayarkan pada periode-periode mendatang.

Namun upaya untuk membuat cadangan ini sebenarnya tidak diijinkan dalam ruang lingkup prinsip akuntansi berterima umum, karena prinsip akuntansi mensyaratkan bahwa laba baru dapat diakui apabila ada kepastian laba tersebut dapat diperoleh dan direalisasi. Selain itu, upaya ini sebenarnya akan membuat laporan keuangan menjadi tidak mencerminkan kondisi fundamental perusahaan yang sesungguhnya. Akibatnya, pemakai laporan keuangan akan memperoleh informasi yang menyesatkan dan membuat keputusan untuk mengalokasikan sumberdaya menjadi keliru. Investor keliru dalam menilai dan menentukan harga saham yang mencerminkan kondisi fundamental perusahaan. Debitur keliru dalam menilai kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya. Pemerintah keliru dalam menilai dan menghitung pajak yang harus ditarik dari perusahaan bersangkutan.

Aktivitas semacam ini, walaupun harus diungkapkan dalam laporan keuangan, bukan hal yang mudah untuk dideteksi dan terdeteksi. Ada kecenderungan pemakai laporan keuangan yang hanya melihat *bottom line* dari informasi keuangan itu tanpa mau bersusah payah mempelajari dan memahami pelaporan keuangan (*financial reporting*) secara integral dan komprehensif. Padahal laporan keuangan hanya akan bisa “berbicara” jika pemakainya memahami seluruh informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan itu. Pemakai laporan keuangan tidak mungkin dapat mempunyai pemahaman yang integral dan komprehensif hanya dengan memahami satu komponen informasi tertentu. Apalagi akuntansi sebenarnya banyak melibatkan subyektifitas dalam melakukan estimasi pengukuran suatu komponen atau item tertentu. Atas dasar alasan itulah Schilit membuat daftar 10 petunjuk untuk mendeteksi permainan laba ini. Walau masih sangat umum, namun diharapkan petunjuk ini dapat menjadi kunci dalam upaya untuk mereduksi manajemen laba dalam dunia bisnis.

Tabel 2.2
Sepuluh Cara Mendeteksi Permainan Manajemen

Manajemen tidak jujur
Lingkungan pengendalian yang tidak mencukupi
Perubahan auditor, konsultan hukum eksternal, atau CFO
Perubahan prinsip akuntansi dan estimasi
Defisit yang cukup besar dalam arus kas operasi relatif terhadap laba bersih
Perbedaan substansial antara pertumbuhan penjualan dan penerimaan
Kenaikan atau penurunan laba kotor yang besar
Mencatat pendapatan dari pembeli yang beresiko
Keberadaan komitmen dan kontinjensi

Sumber: Davin, 2004.

Ada alasan utama mengapa seorang manajer perusahaan mengelola dan mengatur laba padahal aktivitas ini cenderung melanggar peraturan. Secara sederhana, seorang manajer mengelola laba adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi pemilik atau pemegang saham (*stockholders*) perusahaan yang dikelolanya. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menegaskan bahwa kewenangan yang diterima manajer dari pemilik perusahaan untuk mengelola dan menjalankan perusahaan membawa konsekuensi logis yang harus dijalankan dan manajer dan pemilik perusahaan. Manajer mempunyai kewajiban untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemilik serta mempunyai hak untuk menerima penghargaan atas apa yang telah dilakukannya.

Sementara, disisi lain, pemilik perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberi penghargaan kepada pengelola perusahaan karena telah bekerja untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraannya. Meski secara teoritis kelihatan indah, yang terjadi justru sebaliknya. Setiap pihak hanya berupaya memaksimalkan kesejahteraannya dengan mengorbankan kesejahteraan orang lain. Pemilik selalu mendorong dan mendesak manajer untuk bekerja lebih keras agar nilai perusahaannya dapat meningkat lebih cepat dan besar. Sedangkan manajer bersedia melakukan hal itu bukan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik namun juga untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri.

Tentu ada sesuatu yang menjadi alasan mengapa mengapa manajer termotivasi melakukan hal ini. Motivasi-motivasi inilah yang mempengaruhi pola rekayasa manajerial yang dilakukan manajer perusahaan. Artinya, bagaimana pola rekayasa ini

sangat tergantung pada apa yang ingin dicapai oleh manajer bersangkutan. Manajer bisa merekayasa labanya menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada laba sesungguhnya tergantung motivasi apa yang mendasarinya. Demikian juga apabila manajer merekayasa laba agar cenderung selalu sama selama beberapa periode. Semua umum ada beberapa motivasi-motivasi yang mendorong manajer untuk berperilaku oportunistik ini, yaitu motivasi bonus, kontrak, politik, pajak, perubahan CEO, IPO atau SEO, dan mengkomunikasikan informasi ke investor. Pengelompokan ini sejalan dengan tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif (*positive accounting theory*), yang menjadi dasar pengembangan pengujian hipotesis untuk mendeteksi manajemen laba, yaitu:

1. Bonus plan hypothesis

Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa “*managers of firms with bonus plans are more likely to use accounting methods that increase current period reported income*”. Ada bukti empiris yang menyatakan bahwa perjanjian (kontrak) bisnis manajer dengan pihak lain merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Ada variabel yang selama diuji berkaitan dengan perjanjian bisnis tersebut, yaitu bonus atau kompensasi manajerial (*bonus or managerial compensation*). Dalam bonus atau kompensasi manajerial, pemilik perusahaan berjanji bahwa manajer akan menerima sejumlah bonus jika kinerja perusahaan mencapai jumlah tertentu. Janji bonus inilah yang merupakan alasan bagi manajer untuk mengelola dan mengatur labanya pada tingkat tertentu sesuai dengan yang disyaratkan agar dapat menerima bonus.

Seandainya pada tahun tertentu kinerja sesungguhnya berada di bawah syarat untuk memperoleh bonus, maka manajer akan melakukan manajemen laba agar labanya dapat mencapai tingkat minimal untuk memperoleh bonus. Sebaliknya, jika pada tahun tersebut kinerja yang diperoleh manajer jauh di atas jumlah yang disyaratkan untuk memperoleh bonus, manajer akan mengelola dan mengatur agar laba yang dilaporkan (*reported earnings*) menjadi tidak terlalu tinggi. Kelebihan laba sesungguhnya dengan laba yang dilaporkan akan disajikan pada tahun berikutnya. Upaya ini membuat manajer cenderung akan selalu memperoleh bonus dari periode ke periode. Akibatnya, pemilik perusahaan terpaksa harus kehilangan sebagian dari kesejahteraannya yang dibagikan kepada manajer sebagai bonus.

2. Debt (equity) hypothesis

Debt (equity) hypothesis yang menyatakan bahwa “*the larger the firms debt to equity ratio, the more likely managers use use accounting methods that increase income*”. Dalam konteks perjanjian hutang, manajer akan mengelola dan mengatur labanya agar kewajiban hutangnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Hal ini merupakan upaya manajer untuk mengelola dan mengatur jumlah laba yang merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya. Manajer akan melakukan pengelolaan dan pengaturan jumlah laba untuk menunda bebannya pada periode bersangkutan dan akan diselesaikannya pada periode-periode mendatang. Upaya seperti ini dilakukan agar perusahaan dapat menggunakan dana itu untuk keperluan lainnya. Walau sebenarnya hanya masalah waktu pengakuan (*timing*) kewajiban, namun hal ini sebenarnya telah mengakibatkan pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya akan memperoleh dan menggunakan informasi yang keliru. Akibatnya, pihak-pihak ini membuat keputusan bisnis yang keliru pula.

3. Political cost hypothesis

Political cost hypothesis yang menyatakan bahwa “*larger firms rather than small firms are more likely to use accounting choices that reduce reported profits*”. Alasan terakhir adalah masalah pelanggaran regulasi pemerintah. Sejauh ini ada beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha, misalkan undang-undang perpajakan, *anti-trust* dan monopoli, dan sebagainya. Undang-undang mengatur jumlah pajak yang akan ditarik dari perusahaan berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Atau dengan kata lain, besar kecilnya pajak yang akan ditarik oleh pemerintah sangat tergantung pada besar kecilnya laba yang dicapai perusahaan. Sehingga perusahaan yang memperoleh laba lebih besar akan ditarik pajak yang lebih besar pula dan perusahaan yang memperoleh laba lebih kecil akan ditarik pajak yang lebih kecil pula.

Kondisi inilah yang merangsang manajer untuk mengelola dan mengatur labanya dalam jumlah tertentu agar pajak yang harus dibayarkannya menjadi tidak terlalu tinggi, karena manajer, sebagai pengelola, tentu tidak ingin kewajiban yang harus diselesaikannya terlalu membebaninya. Hal ini sangat mudah dilakukan perusahaan,

yaitu dengan “menarik” biaya periode yang akan datang menjadi biaya periode berjalan dan, sebaliknya, mengakui pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode yang akan datang. Upaya lain yang dilakukan perusahaan untuk menghemat pajak adalah dengan memperlakukan laba pada saat ada pergantian peraturan perundang-undang yang memberlakukan tarif pajak lebih rendah dimasa depan. Perusahaan menunda pengakuan laba periode berjalan dan baru akan diakui pada saat peraturan yang baru itu diperlakukan secara efektif.

B. DEFINISI MANAJEMEN LABA

Ada alasan mendasar mengapa manajer melakukan manajemen laba. Secara konseptual harga pasar saham suatu perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh laba, resiko, dan spekulasi. Oleh sebab itu perusahaan yang labanya selalu mengalami kenaikan dari period ke periode secara konsisten akan mengakibatkan resiko perusahaan ini mengalami penurunan lebih besar dibandingkan prosentase kenaikan laba. Hal inilah yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan pengelolaan dan pengaturan laba sebagai salah satu upaya untuk mengurangi resiko. Secara logika hal tersebut bisa dipahami karena manusia merupakan pribadi yang cenderung menghindari resiko (*risk adverse*) yang selalu berusaha mengeliminasi atau meminimalkan kerugian yang mungkin akan dialaminya, walaupun upaya yang dilakukannya mungkin merugikan pihak lain. Kondisi inilah yang mengakibatkan sampai saat ini manajemen laba masih dipertanyakan apakah merupakan aktivitas yang melanggar prinsip akuntansi berterima umum atau bukan.

Inilah yang mengakibatkan sampai saat ini ada belum ada kesepakatan dikalangan akademisi maupun antara akademisi dengan praktisi mengenai definisi manajemen laba yang diakibatkan perbedaan pandangan terhadap manajemen laba. Sebagian pihak menilai manajemen laba merupakan perbuatan curang yang melanggar prinsip akuntansi. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan metode dan standar akuntansi yang ada untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Sementara sebagian yang lain menilai manajemen laba sebagai aktivitas yang lumrah dilakukan manajer dalam menyusun laporan keuangan, apalagi jika upaya rekayasa manajerial ini dilakukan dalam ruang lingkup prinsip akuntansi. Hal inilah yang menyebabkan setiap pihak yang *concern* pada permasalahan ini mencoba untuk mendefinisikannya

manajemen laba sesuai dengan penilaian dan pemahamannya, baik secara positif maupun negatif. Akibatnya, saat ini ada cukup banyak definisi dan batasan mengenai manajemen laba yang membuat spektrum upaya rekayasa manajerial ini menjadi luas.

Oleh sebab itu sejalan dengan berkembangnya penelitian akuntansi keuangan dan keperilakuan saat ini ada beberapa definisi manajemen laba yang berbeda antara satu dengan lainnya sesuai dengan pemahaman dan penilaian orang yang mendefinisikan terhadap aktivitas pengelolaan dan pengaturan laba itu. Namun demikian apabila dicermati sebenarnya ada benang merah yang menghubungkan satu definisi dengan definisi lain. Artinya, meski menggunakan terminologi yang berbeda namun secara garis besar definisi-definisi itu mempunyai pengertian serupa. Secara umum ada beberapa definisi yang berbeda satu dengan yang lain, yaitu definisi manajemen laba yang diciptakan oleh Davidson, Stickney, dan Weil (1987), Schipper (1989), *National Association of Fraud Examiners* (1993), Fisher dan Rosenzweig (1995), Lewitt (1998), serta Healy dan Wahlen (1999).

1. Davidson, Stickney, dan Weil

Earnings management is the process of taking deliberate steps within the constraints of generally accepted accounting principles to bring about desired level of reported earnings (Manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan).

2. Schipper

Earnings management is a purposes intervention in the external financial reporting process, with the intent of obtaining some private gain (as opposed to say, merely facilitating the neutral operation of the process (Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses))

3. National Association of Certified Fraud Examiners

Earnings management is the intentional, deliberate, misstatement or omission of material facts, or accounting data, which is misleading and, when considered with all the information made available, would cause the reader to change or alter his or

judgement or decision (Manajemen laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan yang menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya).

4. Fisher dan Rosenzweig

Earnings management is a actions of a manager which serve to increase (decrease) current reported earnings of the unit which the manager is responsible without generating a corresponding increase (decrease) in long- term economic profitability of the unit (Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang)

5. Lewitt

Management laba is flexibility in accounting allows it to keep pace with business innovations. Abuses such as earnings occur when people exploit this pliancy. Trickery is employed to obscure actual financial volatility. This in turn, make the true consequences of management decisions (Manajemen laba adalah fleksibilitas akuntansi untuk menyetarafkan diri dengan inovasi bisnis. Penyalahgunaan laba ketika publik memanfaatkan hasilnya. Penipuan mengaburkan volatilitas keuangan sesungguhnya. Itu semua untuk menutupi konsekuensi dari keputusan-keputusan manajer).

6. Healy dan Wahlen

Earnings management occurs when managers uses judgment in financial reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about underlying economics performance of the company or to influence contactual outcomes that depend on the reported accounting numbers (Manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu).

Melihat definisi di atas ada kesamaan terminologi yang digunakan setiap definisi itu, yaitu langkah tertentu yang disengaja untuk mengatur laba (Davidson, Stickney, dan Weil), campur tangan dalam penyusunan laporan keuangan (Schipper), kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan keuangan (*National Association of Fraud Examiners*), tindakan untuk mengatur laba (Fisher dan Rosenzweig), fleksibilitas yang mendorong penyalahgunaan laba (Lewitt), serta menggunakan keputusan tertentu untuk mengubah laporan keuangan (Healy dan Wahlen). Walaupun menggunakan terminologi yang berbeda secara konseptual definisi-definisi itu mempunyai benang merah yang menghubungkan satu definisi dengan definisi lainnya, yaitu menyepakati bahwa manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk “mempengaruhi” dan mengintervensi laporan keuangan.

Secara konseptual apa yang dilakukan manajer itu bisa diterima, sejauh yang dilakukan manajer masih dalam ruang lingkup prinsip akuntansi berterima umum. Atau dengan kata lain, apabila manajemen laba yang dilakukan seorang manajer merupakan “permainan” memilih metode dan standar akuntansi yang sesuai dengan kebutuhannya dan diungkapkan dalam laporan keuangan, maka tindakan tersebut tidak dikategorikan sebagai kecurangan. Namun, pemerhati lain, khususnya para praktisi, menganggap bahwa selama tindakan yang dilakukan seorang manajer untuk mempengaruhi laporan keuangan ini dilakukan untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri dengan memanfaatkan ketidaktahuan orang lain akan informasi mengenai perusahaan yang sesungguhnya, maka manajemen laba dianggap sebagai perbuatan curang. Apalagi secara empiris terbukti bahwa manajemen laba telah mengakibatkan keputusan yang dibuat pemakai laporan keuangan menjadi keliru. Maka untuk memahami lebih lanjut apakah manajemen dikategorikan sebagai kecurangan atau bukan maka diperlukan telaah lebih mendalam terhadap definisi-definisi itu.

1. Manajemen laba dapat dilakukan dengan berbagai macam cara

Secara umum definisi-definisi di atas menyebutkan bahwa upaya mempengaruhi laporan keuangan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai dengan kepentingan manajer. Namun beberapa definisi secara tegas ada yang menekankan bahwa selama apa yang dilakukan manajer masih dalam ruang lingkup prinsip akuntansi berterima umum maka akan tetap diakui dan diperbolehkan. Artinya, manajemen laba sebenarnya merupakan upaya untuk merekayasa angka-angka

dalam laporan keuangan dengan mempermainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan.

Sebagai contoh adalah keputusan manajer untuk mengatur besar kecilnya estimasi akuntansi untuk umur ekonomis dan nilai residu aktiva tetap, kewajiban manfaat pensiun dan manfaat pasca-bekerja yang lain, pajak ditangguhkan, serta kerugian dari piutang tak tertagih dan kerusakan aktiva. Contoh lain adalah keputusan manajer untuk memilih berbagai metode akuntansi yang dipakai untuk melaporkan transaksi yang dilakukan perusahaan, misalkan metode garis lurus atau depresiasi yang dipercepat untuk aktiva tetap atau LIFO, FIFO, rata-rata tertimbang untuk metode penghitungan harga pokok persediaan. Semua metode dan prosedur itu akan membuat laba berbeda besarnya sesuai dengan metode dan prosedur yang dipilih dan digunakan perusahaan.

Selain keputusan-keputusan untuk memilih metode atau prosedur akuntansi tertentu maka seorang manajer juga diberi kebebasan untuk merubah metode dan prosedur akuntansi yang digunakannya. Standar akuntansi hanya mensyaratkan agar semua perubahan itu diungkapkan dengan jelas dalam laporan keuangan, khususnya dalam catatan kakinya. Sebagai informasi yang menyertai laporan keuangan maka catatan kaki merupakan media untuk menginformasikan segala sesuatu yang diperlukan agar informasi dalam laporan keuangan menjadi lebih jelas. Tujuan pengungkapan itu adalah agar apa dilakukan manajer dapat diketahui oleh orang lain, terutama oleh orang-orang yang memahami bahwa hal itu secara resmi diakui dan diterima oleh prinsip akuntansi. Selain itu pengungkapan ini juga bertujuan agar manajer perusahaan tidak dituduh telah menyelewengkan informasi yang seharusnya diketahui oleh publik.

Meskipun demikian ada kendala yang tidak bisa dihindari dalam pengungkapan informasi ini, yaitu tidak semua orang bisa memahami pentingnya dan bagaimana cara membaca catatan kaki itu secara integral dan komprehensif. Publik cenderung hanya melihat laporan keuangan yang merupakan informasi utama tanpa memperhatikan informasi-informasi lain yang menyertai laporan keuangan itu. Inilah yang mengakibatkan pengungkapan informasi perubahan metode atau prosedur akuntansi menjadi kurang bermanfaat untuk dilakukan. Hingga perusahaan yang melakukan sebenarnya tidak akan dirugikan dan kehilangan apapun tetapi

justru akan memperoleh manfaat, yaitu dikenal sebagai perusahaan yang transparan dalam mengungkapkan informasi. Hal ini secara langsung akan berdampak positif terhadap integritas dan kredibilitas manajer maupun perusahaan bersangkutan.

Kebebasan manajer untuk memilih dan menggunakan standar akuntansi serta ketidaktahuan *stakeholder* terhadap informasi yang diungkapkan dalam catatan kaki itulah yang mendorong perilaku oportunistik seorang manajer. Kedua hal itu dimanfaatkan manajer untuk mengoptimalkan kepentingan dan kesejahteraannya. Semua keputusan manajerial yang seharusnya diambil untuk kepentingan dan kesejahteraan *stakeholder* diselewengkan demi kepuasan pribadi. Hal ini disebabkan adanya kesenjangan informasi antara manajer dengan *stakeholder*. Manajer sebagai pengelola perusahaan cenderung lebih menguasai informasi mengenai perusahaan dibandingkan pihak lain. Hingga laporan keuangan yang seharusnya merupakan media komunikasi antara manajer dengan berbagai pihak yang mempunyai hubungan dengan perusahaan ini dimanfaatkan manajer menjadi media untuk mencari keuntungan sesaat oleh manajer.

Upaya itu dilakukan manajer dengan mempengaruhi laporan keuangan, yaitu dengan menyembunyikan, menunda, atau mengubah informasi-informasi yang ada dalam laporan itu. Ada berbagai macam cara yang dapat digunakan manajer untuk itu, misalnya, mempercepat pengakuan penjualan periode mendatang menjadi penjualan periode berjalan. Hal ini dilakukan apabila penjualan menurun merosot sementara perusahaan berharap tingkat penjualan yang pasti. Selanjutnya apabila penjualan periode berikutnya tetap namun sebenarnya perusahaan berharap penjualan meningkat maka perusahaan akan meningkatkan aktivitas rekayasa labanya. Inilah yang akan terus dilakukan sampai perusahaan merasa tidak mampu lagi untuk melanjutkan aktivitas rekayasa atau pada saat hal ini diketahui oleh orang ketika pemeriksaan dilakukan.

Cara yang lain adalah dengan mengatur dan menentukan waktu yang paling tepat dalam pembelian atau pengiriman dan penerimaan persediaan yang diperlukan yang mempunyai pengaruh terhadap alokasi harga pokok dan pendapatan bersih. Upaya manajerial untuk mempengaruhi laporan keuangan ini juga bisa dilakukan dengan memilih apakah membuat atau menunda pengeluaran *discretionary*, seperti pengeluaran *research and development* (R&D), iklan, dan perawatan. Bahkan untuk

merekayasa informasi keuangan manajer juga bisa melakukan strukturisasi transaksi-transaksi perusahaan, misalkan kombinasi bisnis yang direstrukturisasi untuk meningkatkan kualitas untuk akuntansi *pooling* atau pembelian, kontrak *leasing* yang direstrukturisasi menjadi kewajiban yang *di-on* atau *of-balance sheet*-kan, dan investasi ekuitas yang direstrukturisasi untuk menghindari atau memerlukan konsolidasi.

Maka secara singkat manajemen laba dapat dikatakan sebagai perilaku manajer untuk bermain-main dengan komponen akrual yang *discretionary* untuk menentukan besar kecilnya laba, sebab standar akuntansi memang menyediakan berbagai alternatif metode dan prosedur yang bisa dimanfaatkan. Upaya ini diakui dan diperbolehkan dalam standar akuntansi selama apa yang dilakukan perusahaan diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan. Meski kewajiban untuk mengungkapkan semua metode dan prosedur akuntansi ini belum mampu untuk mengeliminasi upaya-upaya curang manajer untuk memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri.

2. Tujuan manajemen laba adalah mengelabui pemakai laporan keuangan

Selain sebagai penyusun dan penyedia laporan keuangan dari perusahaan yang dikelolanya, manajer juga merupakan salah satu pemakai informasi itu. Artinya, laporan keuangan tidak hanya dipersiapkan atau disajikan untuk *stakeholder* namun juga untuk pengelola perusahaan itu sendiri, baik untuk membuat keputusan operasi, deviden, maupun investasi. Atas dasar pemikiran itulah laporan keuangan harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu sehingga dapat menjadi informasi yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan semua orang yang membutuhkannya. Hingga tidak hanya manajer sebagai pihak yang menyusun laporan keuangan itu yang akan memperoleh memperoleh informasi berkualitas namun juga semua pihak yang mempunyai hubungan dengan perusahaan. Apalagi laporan keuangan merupakan informasi utama yang digunakan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi.

Namun kesenjangan informasi antara manajer dan *stakeholder* telah membuat manajer cenderung menjadi pihak yang lebih superior dalam menguasai informasi dibandingkan pihak lain. Secara konseptual kesenjangan informasi semacam ini mendorong manajer untuk berperilaku oportunistik dalam mengungkapkan informasi

mengenai perusahaan. Manajer hanya akan mengungkapkan suatu informasi tertentu jika ada manfaat yang diperolehnya. Sedangkan apabila tidak manfaat yang bisa diperolehnya maka manajer akan menyembunyikan atau menunda pengungkapan informasi itu, bahkan kalau diperlukan manajer akan mengubah informasi itu.

Upaya mempermainkan informasi ini tidak selalu dilakukan manajer untuk membuat informasi menjadi lebih bagus dibandingkan dengan informasi sesungguhnya. Ada kalanya informasi justru diubah menjadi lebih buruk dibandingkan dengan informasi sesungguhnya. Sebagai contoh adalah perusahaan dapat menggunakan keputusan akuntansi untuk menyatakan laba lebih rendah (*understate*) yang digunakan untuk memberikan isyarat bahwa perusahaan itu mempunyai prospek masa depan yang bagus.

Secara konseptual upaya menyembunyikan, menunda pengungkapan, dan mengubah informasi ini dilakukan manajer untuk mengelabui pemakai laporan keuangan yang ingin mengetahui kondisi dan kinerja perusahaan. Alasannya, upaya ini dilakukan manajer untuk menyesatkan pihak lain yang ingin mengetahui dan menilai kinerja dan kondisi perusahaan. Atau dengan kata lain, upaya manajerial itu merupakan tindakan-tindakan yang disengaja untuk menipu pihak lain yang menyebabkan pihak bersangkutan kehilangan kekayaan. Hingga “keberhasilan” manajemen laba dinilai ketika seorang manajer berhasil menyesatkan pihak lain dalam menilai perusahaan yang dikelolanya. Pemahaman ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan akan mendorong manajer berusaha memaksimalkan kesejahteraan, meski harus mengelabui pihak lain.

Upaya di atas akan berhasil apabila manajer mengetahui pemakai laporan keuangan tidak mempunyai akses dan sumber informasi yang memadai. Meskipun sebenarnya pemakai laporan juga melakukan antisipasi, berusaha memahami, dan mentoleransi manajemen laba itu. Inilah yang membuat manajer harus berhati-hati dalam memilih dan menggunakan metode atau prosedur akuntansi untuk mengolah laporan keuangan. Secara konseptual ada banyak cara yang dilakukan manajer untuk mempengaruhi laporan keuangan, misalnya keputusan mengenai umur ekonomis dan nilai sisa (residu) aktiva jangka panjang, kewajiban manfaat pensiun dan manfaat *post-employment* yang lain, pajak ditangguhkan, dan kerugian piutang tak

tertagih dan kerusakan aktiva. Selain itu, eksekutif dapat “bermain” dengan menggunakan berbagai metode akuntansi, misalnya metode depresiasi atau metode pengakuan persediaan. Atau secara singkat dikategorikan sebagai berikut:

a. Memilih metode dan standar akuntansi.

Apabila seorang manajer menggunakan pemilihan metode akuntansi tertentu, maka kebijakan ini relatif lebih mudah diketahui oleh pemakai laporan keuangan. Alasannya, prosedur yang digunakan manajer dalam menyusun laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan laporan keuangan bersangkutan, termasuk jika terjadi perubahan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan.

b. Mengendalikan berbagai akrual.

Apabila seorang manajer mengendalikan transaksi akrual maka kebijakan ini lebih relatif lebih sulit untuk terdeteksi oleh pemakai laporan keuangan sehingga manajer cenderung memilih kebijakan rekayasa dengan mengendalikan berbagai akrual. Secara konseptual upaya semacam ini akan membuat komponen akrual perusahaan menjadi lebih besar dibandingkan komponen kasnya.

Secara konseptual upaya untuk mengungkapkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan atau diubah perusahaan dalam laporan keuangannya dapat meminimalisir upaya rekayasa manajerial ini. Ada harapan dengan pengungkapan itu pemakai laporan keuangan dapat mengetahui apa yang digunakan dan telah diubah perusahaan dalam menginformasikan laporan keuangannya. Meski demikian ada dua keterbatasan pemakai laporan keuangan dalam menginterpretasikan laporan keuangan yang mengakibatkan manajemen laba dapat secara leluasa dilakukan manajer perusahaan, yaitu:

- a. Kriteria penyajian laporan keuangan merupakan hal rawan terhadap kebijakan manajerial, sehingga seorang manajer memiliki peluang untuk menetapkan rekayasa kebijakan, yang merupakan fleksibilitas dalam memperhitungkan nilai laba yang dilaporkan, karena memang akuntansi memberikan peluang bagi manajer untuk mencatat fakta tertentu dengan cara tertentu dan melibatkan subyektifitas dalam penyusunan estimasi.
- b. Tidak ada observasi yang sempurna terhadap kebijakan manajemen, mengingat tidak semua kebijakan manajemen dapat diobservasi oleh pemakai laporan

keuangan. Meski ada kewajiban bagi perusahaan untuk mengungkapkan semua metode dan prosedur akuntansi yang digunakan namun tidak semua kebijakan manajerial dapat diketahui atau diakses secara leluasa oleh pemakai laporan keuangan. Banyak informasi yang tetap tersembunyi yang sulit diketahui oleh publik.

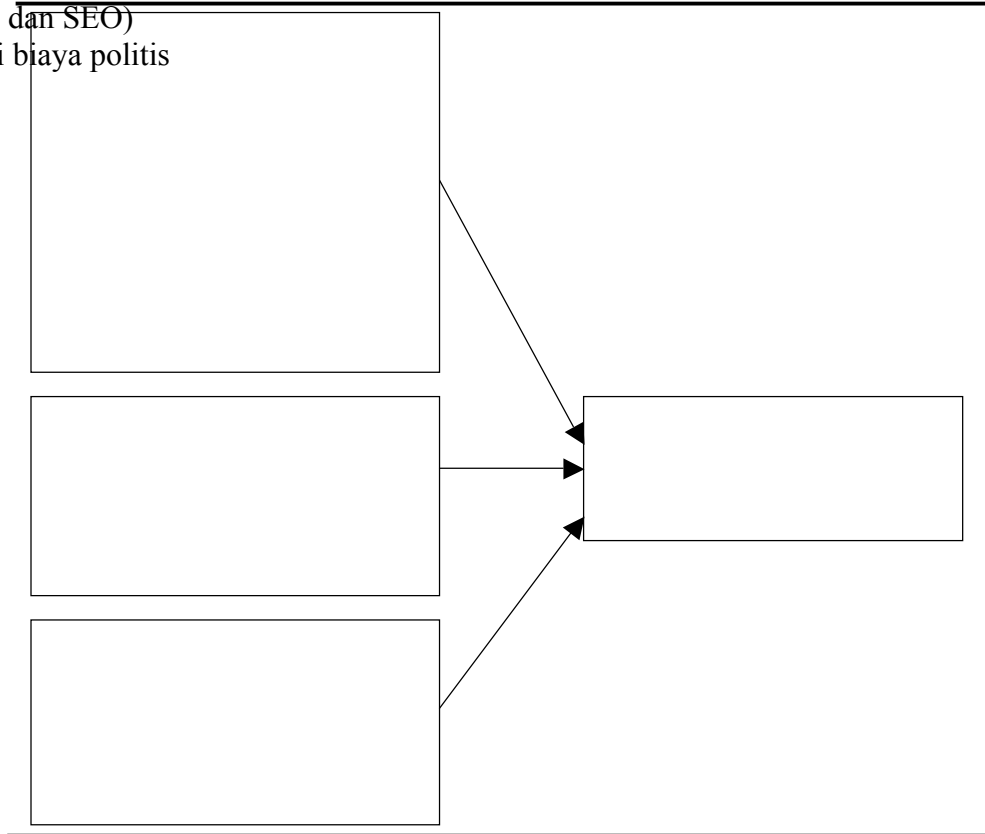
3. Ada biaya dan manfaat manajemen laba

Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang selalu menekankan adanya biaya (*costs*) dan manfaat (*benefits*) dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, yang diperhitungkan sebelum orang itu melaksanakan apa yang telah direncanakan. Tujuannya, agar orang dapat meminimalkan biaya yang harus ditanggungnya dan mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas yang dilakukannya. Aktivitas yang memberikan manfaat lebih besar dibandingkan biaya yang diperlukan merupakan aktivitas yang layak untuk dikerjakan. Sedangkan aktivitas yang memberikan manfaat lebih kecil dibandingkan biaya yang diperlukan merupakan aktivitas yang sebaiknya tidak dikerjakan, ditunda pengerjaannya, atau direvisi sebelum dikerjakan, untuk menghindari kerugian (*regret*).

Secara konseptual biaya tidak selalu harus dimaknai sebagai pengeluaran berupa uang tunai yang harus dikeluarkan seseorang (*out of pocket cost*) ketika memilih suatu aktivitas tertentu. Biaya dapat dimaknai sebagai hilangnya kesempatan untuk mengerjakan suatu aktivitas tertentu karena seseorang telah memilih aktivitas yang lain (*opportunity cost*). Demikian juga dengan manfaat yang tidak harus dimaknai sebagai pendapatan berupa uang tunai yang dapat diterima dari aktivitas-aktivitas yang dilakukannya. Manfaat dapat dimaknai sebagai kesempatan yang diperoleh untuk mengerjakan suatu aktivitas tertentu karena seseorang memilih untuk tidak mengerjakan aktivitas yang lain. Biaya dan manfaat semacam ini memang relatif lebih sulit untuk dihitung dan ditentukan dibandingkan biaya dan manfaat yang dapat dikeluarkan atau diterima secara tunai. Tetapi berdasarkan pengalaman pribadi atau pihak-pihak lain biaya dan manfaat semacam ini dapat ditentukan besar kecilnya.

- Dorongan untuk mengelola
- Manajemen Laba
- Kendala Manajemen Laba
- Mewahabaregalanggaran
- Lingkarsimetri informasi
- Serikurapulang
- Prinsip akuntansi
- Persepsi dan kampanus berterima umum (auditor) manajemen
- Faktor lain
- Memaksimalkan harga saham (IPO dan SEO)
- Mengurangi biaya politis

Pilihan manajemen laba
Tingkat akrual akuntansi
yang dikelola



Sumber: Richardson, 1998.

Gambar 2.1
Pengaruh Insentif, Kendala, dan *Cost* Terhadap Manajemen Laba

Oleh sebab itu sebelum melakukan manajemen laba seorang manajer harus mempertimbangkan biaya dan manfaat yang ditanggung dan dirasakannya. Apalagi manajemen laba sebenarnya merupakan aktivitas dengan pola tindakan-tindakan tertentu yang tidak boleh keliru dalam menerapkannya. Sebagai contoh, apabila manajer menginginkan agar saham yang ditawarkannya direspon secara positif oleh pasar maka pola manajemen laba yang harus dilakukannya adalah menaikkan laba. Hal ini disebabkan ada hubungan positif antara laba dengan harga saham. Semakin tinggi laba yang dicapai perusahaan akan membuat semakin tinggi harga saham perusahaan bersangkutan. Hingga seandainya manajer keliru dalam memilih pola tindakan, yaitu dengan penurunan laba, maka apa yang sebenarnya ingin dicapainya tidak mungkin dapat terwujud.

Contoh lain adalah pada saat manajer ingin menghindari kewajiban membayar pajak maka harus melakukan manajemen laba dengan pola penurunan laba atau meratakan laba pada saat ingin mengoptimalkan bonus yang ingin diperolehnya. Kekeliruan dalam menentukan pola tindakan akan membuat manajer terpaksa membayar pajaknya lebih tinggi atau gagal untuk memperoleh bonus. Untuk itu, sebelum melaksanakan niatnya untuk merekayasa laba, manajer harus mempertimbangkan apakah biaya yang harus dikeluarkan sepadan dengan manfaat yang diperolehnya. Apalagi aktivitas mengelola dan mengatur laba ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, baik biaya tunai maupun *opportunity cost*.

Biaya tunai ini dikeluarkan untuk mengubah bukti-bukti transaksi maupun metode dan prosedur akuntansi yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Hal ini disebabkan untuk mengubah bukti-bukti transaksi itu manajer harus bekerja sama dengan pihak lain yang menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan yang mengakibatkan timbulnya bukti-bukti itu. Selain itu manajer juga memerlukan biaya tunai untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak yang mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan manajer, yaitu auditor internal, komisar, maupun akuntan publik. Artinya, semakin besar komponen yang akan direkayasa membuat semakin besar pula biaya yang harus ditanggung manajer perusahaan.

Selain itu *opportunity cost* juga harus ditanggung perusahaan yang melakukan manajemen laba. Perusahaan yang merekayasa labanya menjadi kehilangan kesempatan untuk menyajikan informasi yang relevan, netral, lengkap, serta mempunyai daya banding dan daya uji. Perusahaan terpaksa harus menyajikan informasi yang tidak mencerminkan nilai fundamental yang sesungguhnya kepada publik. *Opportunity cost* yang lebih tinggi harus ditanggung perusahaan ketika aktivitas rekayasa manajerial ini diketahui oleh publik. Perusahaan akan mengalami krisis kepercayaan publik yang dapat mengakibatkan harga sahamnya jatuh, dijauhi publik, bahkan bangkrut. Sebagai contoh adalah skandal keuangan Enron, Worldcom, dan Xerox di Amerika Serikat. Terbongkarnya skandal ini telah mengakibatkan perusahaan-perusahaan itu bangkrut karena dijauhi publik dan manajernya diseret ke pengadilan. Atau dengan kata lain, biaya yang harus ditanggung perusahaan ini lebih besar dibandingkan manfaat yang diterima.

Meski manfaat bukan hal yang mudah untuk ditentukan namun upaya ini tetap harus dilakukan untuk meminimalisir resiko yang harus ditanggung perusahaan. Manfaat manajemen laba ini akan berbeda antara satu dengan yang lain, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai pelaku. Sebagai contoh adalah perusahaan yang menginginkan harga sahamnya bagus harus mempertimbangkan apakah tujuan ini dapat tercapai dengan melakukan rekayasa manajerial dengan pola menaikkan laba. Maka perusahaan harus membuat agar aktivitas rekayasa ini tidak mudah diketahui oleh publik agar tujuannya tercapai. Hingga perusahaan tidak perlu gagal memperoleh manfaat seperti yang diinginkannya, yaitu harga sahamnya bagus, integritas manajer tetap terjaga, dan kredibilitas perusahaan di mata publik tetap baik.

BAB 3

MOTIVASI MANAJERIAL

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah membaca bab ini pembaca diharapkan dapat memahami bahwa:

1. Manajemen laba dilakukan seorang manajer dengan memanfaatkan transaksi-transaksi yang terjadi di pasar modal.
2. Manajemen laba dilakukan seorang manajer dengan memanfaatkan perjanjian kontraktual dengan pihak-pihak lain.
3. Manajemen laba dilakukan seorang manajer dengan memanfaatkan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah membaca bab ini pembaca diharapkan dapat memahami bahwa:

1. Manajemen laba dilakukan pada saat perusahaan melakukan penawaran saham perdana, *seasoned equity offerings*, dan *management buyout*, kebijakan multi papan, tingkat pengungkapan laporan keuangan, dan kebijakan *good corporate governance*.
 2. Manajemen laba dilakukan pada saat manajer perusahaan ingin memperoleh keuntungan pribadi dari perjanjian kompensasi manajerial dengan pemilik perusahaan dan melakukan pelanggaran perjanjian hutang dengan debitor.
 3. Manajemen laba dilakukan pada saat manajer perusahaan ingin memperoleh keuntungan pribadi dari peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah.
-

Ada yang menarik sejalan dengan perkembangan penelitian-penelitian akuntansi keuangan sejak pertengahan tahun 1985-an. Penelitian akuntansi ini tidak lagi hanya terfokus angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan namun juga berusaha mengurai perilaku etis seseorang ketika mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan. Hingga penelitian-penelitian itu tidak hanya menggunakan laporan keuangan sebagai basis telaah dan analisis, namun juga data-data mengenai perilaku dan pemahaman etis seseorang dalam proses pencatatan transaksi dan pembuatan laporan

keuangan. Secara konseptual telaah dan analisis ini menarik dilakukan sebab laporan keuangan sebenarnya merupakan cermin perilaku oportunistis seseorang yang menyusun laporan keuangan itu. Artinya besar kecilnya kinerja yang disajikan dalam laporan keuangan akan dipengaruhi oleh keinginan dan kepentingan penyusunnya dan bukan semata-mata oleh kinerja perusahaan sesungguhnya. Inilah yang menjadi dasar berkembangnya konsep-konsep dalam teori akuntansi positif.

Secara konseptual ada tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dipergunakan untuk menguji perilaku etis seseorang dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan. *Pertama, bonus plan hypothesis* yang menyatakan bahwa rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan manajerial. Agar selalu bisa mencapai tingkat kinerja yang memberikan bonus, manajer mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan sehingga bonus itu selalu didapatnya setiap tahun. Hal inilah yang mengakibatkan pemilik mengalami kerugian ganda, yaitu memperoleh informasi palsu dan mengeluarkan sejumlah bonus untuk sesuatu yang tidak semestinya.

Kedua, debt (equity) hypothesis yang menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio antara hutang dan ekuitas lebih besar cenderung akan memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas bahwa manajer cenderung melanggar perjanjian hutang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Dalam konteks perjanjian hutang, manajer akan mempermainkan laba agar kewajiban hutang-piutang yang seharusnya diselesaikan dapat ditunda untuk periode berikutnya. Meski permainan ini sebenarnya hanya masalah waktu pengakuan (*timing*) kewajiban, namun hal ini telah mengakibatkan semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya akan memperoleh informasi yang keliru dan membuat keputusan bisnis menjadi keliru pula. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam mengalokasikan sumberdaya.

Ketiga, political cost hypothesis yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mengecilkan atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi pemerintah apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Dalam konteks regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha ini, misalkan undang-undang perpajakan, manajer akan memperlakukan laba agar agar kewajibannya yang harus dibayarkannya menjadi tidak terlalu tinggi. Hal ini disebabkan manajer tidak ingin kewajiban itu terlalu membebannya. Akibatnya, laba yang diperoleh perusahaan tidak dialokasikan sebagaimana menerimanya karena tidak diberikan kepada pihak yang seharusnya berhak untuk menerimanya.

Ketiga hipotesis ini sebenarnya merupakan sisi lain dari teori agensi yang menekankan pentingnya penyerahan wewenang pengelolaan perusahaan dari pemilik kepada pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan perusahaan dengan lebih baik. Sebagai penerima wewenang untuk mengelola perusahaan, manajer seharusnya bekerja untuk mewakili kepentingan dan demi kesejahteraan pemilik. Namun yang terjadi sebaliknya, manajer bekerja demi kepentingan dan kesejahteraan pribadi. Bahkan dalam perkembangannya manajer tidak hanya mengambil hak pemilik tetapi juga mengambil hak semua pihak lain yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan. Hal ini dilakukan manajer dengan menyajikan informasi yang telah diubah sesuai dengan keinginannya, meski membuat pihak yang menerima informasi itu menjadi keliru dalam memahami dan membuat keputusan ekonomi.

Upaya mengubah informasi akuntansi inilah yang disebut dengan manajemen laba. Secara konseptual ada tiga motivasi yang dapat menjelaskan mengapa seorang manajer melakukan upaya manajerial itu, yaitu motivasi pasar modal, kontraktual (bonus atau kompensasi manajerial dan hutang), dan *antitrust* atau regulasi pemerintah yang lain. Apabila dicermati maka motivasi-motivasi ini sejalan dengan hipotesis teori akuntansi positif yang juga membahas permasalahan agensi, yaitu permasalahan kontraktual dan biaya politis suatu perusahaan. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa teori akuntansi positif merupakan basis pengembangan penelitian-penelitian manajemen laba. Bahkan pengujian terhadap perilaku dan perilaku oportunistik manajer ini sebenarnya merupakan upaya untuk menguji hipotesis-hipotesis teori akuntansi itu.

A. MOTIVASI PASAR MODAL

Penelitian-penelitian pasar modal berjalan seiring dengan perkembangan teori akuntansi dan pasar modal di seluruh dunia. Teori-teori akuntansi ini berkembang mengikuti perkembangan konsep manajemen korporasi modern sejak awal abad 20. Sebagai sub sistem dari sistem manajerial, akuntansi memang tidak bisa melepaskan diri dari apa yang sedang terjadi dalam manajemen sebuah perusahaan. Hal disebabkan akuntansi merupakan salah satu komponen yang menjalankan fungsi manajemen, khususnya bidang keuangan. Apapun yang dilakukan dan dialami manajemen perusahaan akan dirasakan dan dialami fungsi akuntansi. Inilah yang membuat akuntansi rawan untuk diintervensi dan ditekan oleh fungsi manajemen di atasnya. Oleh sebab itu prinsip akuntansi mensyaratkan agar laporan keuangan diperiksa dahulu oleh pihak yang netral dari intervensi dan tekanan manajemen perusahaan sebelum dinyatakan layak dipublikasikan, yaitu akuntan publik yang memang mempunyai wewenang untuk melakukan hal itu.

Selain itu, perkembangan teori akuntansi ini merupakan hasil adopsi dari berbagai teori ilmu lain, yang mempunyai kemampuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena akuntansi. Sebagai contoh adalah teori keperilakuan (*behavioral theory*) yang diadopsi dari ilmu psikologi. Teori ini digunakan untuk menjelaskan fenomena perilaku oportunistis penyusun laporan keuangan pada saat mencatat atau menyusun informasi keuangan itu. Contoh lain adalah teori keorganisasian (*organization theory*) dari ilmu manajemen yang digunakan untuk menjelaskan bahwa laporan keuangan sangat dipengaruhi struktur organisasi bersangkutan. Selain itu juga ada ilmu manajemen juga teori sinyal (*signaling theory*) yang digunakan untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya laporan keuangan dimanfaatkan perusahaan untuk memberi sinyal positif maupun negatif kepada pemakainya. Demikian juga dengan teori agensi yang digunakan untuk menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan akibat pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.

Faktor lain yang mempengaruhi studi pasar modal adalah perkembangan pasar modal itu sendiri. Perkembangan pasar modal ini sebenarnya merupakan dampak dari perubahan orientasi dunia usaha. Apabila beberapa dekade yang lalu dunia usaha cenderung memilih menggunakan dana pinjaman atau hutang untuk mengembangkan

bisnisnya (*debt oriented*). Saat ini dunia usaha telah mengalami perubahan orientasi dalam mencari dana. Dunia usaha tidak lagi menggantungkan diri pada perbankan atau lembaga keuangan lain untuk memenuhi kebutuhan dana operasional dan investasi namun lebih menyukai menggunakan dana yang diperoleh dari pasar modal (*stock market oriented*). Ada beberapa alasan yang mendasarinya:

1. Bunga hutang yang harus dibayarkan kepada kreditur relatif lebih tinggi dibandingkan deviden yang dibayarkan kepada investor, sehingga menjadi beban periodik yang harus ditanggung oleh perusahaan. Hal ini membuat perusahaan mempunyai kinerja periode berjalan menjadi rendah.
2. Biaya bunga merupakan pengeluaran periodik yang wajib dibayar meski perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Sementara pembayaran deviden tergantung pada kebijakan perusahaan, apakah periode akan membagi deviden dan tidak tergantung pada laba yang diperoleh perusahaan.
3. Hutang merupakan kewajiban yang harus dilunasi perusahaan pada suatu saat sedangkan dana pasar modal merupakan sebagian modal perusahaan yang tidak harus dikembalikan kepada pemiliknya. Hutang juga merupakan kewajiban yang harus diselesaikan meskipun perusahaan bersangkutan mengalami kesulitan keuangan, bahkan mengalami kebangkrutan.

Sementara di sisi lain publik juga mulai mengalami perubahan orientasi dalam menyimpan dana. Apabila beberapa dekade yang lalu publik cenderung memilih perbankan atau lembaga keuangan lain sebagai tempat menginvestasikan dana, saat ini publik cenderung memilih memanfaatkan pasar modal untuk menginvestasikan dana yang dimilikinya. Publik tidak lagi menggantungkan diri pada perbankan atau lembaga keuangan lain untuk menyimpan dana, publik lebih menyukai pasar modal untuk menginvestasikan dananya. Ada beberapa alasan yang mendasarinya:

1. Semakin rendahnya bunga tabungan dibandingkan deviden yang diterimanya dari perusahaan yang menjadi tempat menginvestasikan dananya. Kondisi ini membuat investasi di pasar modal menjadi lebih menguntungkan dibandingkan menyimpan dana di bank atau lembaga keuangan lain.
2. Upaya menginvestasikan dana di pasar modal berarti seseorang telah menjadi salah seorang pemilik (*owner*) perusahaan bersangkutan. Bahkan apabila hak kepemilikannya mayoritas, orang ini akan mempunyai suara yang cukup signifikan

dalam menentukan dalam memilih manajer dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan perusahaan.

Secara konseptual ada hubungan sebab-akibat antara perkembangan teori akuntansi dan pasar modal yang mendorong perkembangan penelitian pasar modal ini. Dalam teori manajemen modern dijelaskan pentingnya pemisahan dan kepemilikan perusahaan. Tujuannya, agar perusahaan dikelola secara profesional oleh orang yang memahami bagaimana menjalankan sebuah perusahaan dengan baik. Apalagi jika perusahaan telah mencapai skala operasi tertentu yang mengakibatkan pemilik tidak mungkin secara langsung bias mengoperasikan semua aktivitas perusahaannya seorang diri. Pemilik membutuhkan bantuan orang lain yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan fungsi yang seharusnya dilakukannya. Bahkan seandainya diperlukan semua kewenangan pengelolaan perusahaan dapat dilepas dan dijalankan orang lain. Hingga dalam teori manajemen modern ini pemilik cukup menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap pengelola perusahaannya.

Tuntutan pemisahan kepemilikan dan pengelolaan ini semakin kencang untuk perusahaan publik atau perusahaan yang telah melepaskan sebagian sahamnya ke publik, sebab dalam perusahaan publik tidak ada lagi pemilik tunggal. Sebagai perusahaan dengan kepemilikan terbuka maka kepemilikan dibagi-bagi untuk siapapun yang memegang saham perusahaan bersangkutan. Setiap pemegang saham menjadi mempunyai hak suara untuk menentukan siapa yang harus mengelola dan membuat kebijakan dasar perusahaan. Meski demikian pemegang saham mayoritas tetap akan mempunyai hak suara lebih besar dibandingkan pemegang saham yang lain. Hal ini mengakibatkan pemegang saham mayoritas menjadi pihak yang mampu dan bisa mempengaruhi keputusan dan kebijakan manajerial perusahaan. Namun demikian jarang sekali ada pemegang saham mayoritas yang secara langsung mengoperasikan perusahaan. Pemegang saham mayoritas tetap cenderung menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang lebih profesional dalam menjalankan perusahaan.

Ada alasan penting mengapa pemegang saham mayoritas tidak menjalankan perusahaan secara langsung. Sebagai perusahaan dengan kepemilikan terbuka maka integritas dan kredibilitas perusahaan merupakan kunci utama diterima tidaknya saham perusahaan itu oleh publik. Penilaian ini juga mencakup apakah perusahaan telah dikelola mengikuti kaidah-kaidah bisnis atau tidak, termasuk apakah perusahaan

dikelola oleh orang-orang yang hanya mewakili kepentingan pemegang saham mayoritas atau tidak. Publik cenderung akan memilih perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh para profesional yang integritas dan kredibilitas telah teruji. Inilah yang mengakibatkan pemegang saham mayoritas menyerahkan pengelolaan perusahaan ke orang lain. Meski pemegang saham ini tetap bisa mempengaruhi dan mengintervensi keputusan dan kebijakan manajerial perusahaan. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa dalam sebuah perusahaan terbuka pemisahan kepemilikan dan pengelolaan merupakan hal penting.

Secara konseptual pemisahan ini mendorong terjadinya asimetri informasi antara manajer perusahaan dengan pihak eksternal yang tidak mempunyai akses dan sumber informasi yang memadai. Sebagai pihak yang menguasai informasi lebih banyak dibandingkan pihak lain, manajer akan berperilaku oportunistik, yaitu mendahulukan kepentingannya di atas kepentingan pihak lain. Kewajiban manajer sebagai pengelola perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi mengenai apa yang dilakukan dan dialaminya kedalam laporan keuangan dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. Laporan keuangan yang seharusnya menginformasikan nilai dan kondisi fundamental perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini dilakukan dengan menyembunyikan, menunda pengungkapan, atau mengubah informasi fundamental menjadi informasi palsu pada saat perusahaan akan melakukan suatu transaksi tertentu.

A.1. PENAWARAN SAHAM PERDANA

Penawaran saham perdana atau *initial public offerings* (IPO) merupakan penawaran saham suatu perusahaan *private* untuk pertama kalinya kepada publik. Sebagai perusahaan *private* maka seluruh kepemilikan perusahaan itu dimiliki dan dikuasai oleh orang, keluarga atau kelompok tertentu, sehingga perusahaan semacam ini seringkali disebut sebagai perusahaan keluarga atau perusahaan tertutup. Hal inilah yang membuat pemilik mempunyai hak dan tanggung jawab yang tidak terbatas dalam perusahaan. Artinya, pemilik dapat menikmati seluruh keuntungan yang diperoleh perusahaan seorang diri sekaligus harus menanggung resiko yang mungkin muncul seorang diri pula. Hal ini berbeda dengan perusahaan terbuka yang kepemilikan tidak lagi hanya dikuasai oleh orang atau kelompok tertentu. Atas dasar kelebihan dan

kelemahan penawaran saham secara terbuka maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai perusahaan yang melakukan penawaran, yaitu:

1. Perusahaan memperoleh tambahan dana

Perusahaan memperoleh tambahan dana yang akan digunakan untuk membiayai dan mengembangkan usaha. Saat ini memang ada perubahan orientasi perusahaan dalam mencari dana tambahan, yaitu perusahaan cenderung lebih menyukai mencari dana di pasar modal daripada menggunakan dana pinjaman atau hutang. Alasannya, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar bunga pinjaman setiap periode. Padahal bunga akan menambah beban periodik perusahaan pada saat perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, apalagi pada saat mengalami kerugian. Selain itu dana yang diperoleh dari investor tidak mewajibkan perusahaan untuk mengembalikan seperti halnya dana pinjaman.

2. Membagi-bagikan resiko perusahaan

Secara konseptual perusahaan tidak hanya memperoleh keuntungan (*return*) dalam proses operasinya tetapi juga harus menanggung resiko (*risk*) yang mungkin timbul dari kegiatan-kegiatan bisnisnya. Semakin tinggi keuntungan yang diharapkan perusahaan maka semakin tinggi pula resiko yang mungkin harus ditanggungnya. Atau sebaliknya, semakin tinggi resiko yang harus ditanggung perusahaan semakin tinggi pula keuntungan yang mungkin akan diperolehnya. Oleh sebab itu, dengan menjadi perusahaan publik maka pemilik tidak lagi menanggung kemungkinan resiko seorang diri. Resiko akan ditanggung bersama-sama dengan pemegang-pemegang saham yang lain, meskipun keuntungan yang diperolehnya pun harus juga dibagi dengan pemegang saham lain. Oleh sebab itu Upaya menjual sebagian kepemilikan ini sebenarnya mencerminkan upaya pemilik lama sebenarnya upaya untuk membagi-bagikan (*sharing*) resiko perusahaan kepada pihak lain.

Perusahaan harus menyediakan prospektus yang berisi informasi keuangan dan non keuangan mengenai nilai dan kondisi perusahaan pada saat melakukan penawaran saham perdana itu. Secara umum informasi keuangan terdiri dari neraca (*balance sheet*), laporan laba rugi (*income statement*), laporan arus kas (*cash flow statement*), dan penjelasan atas laporan keuangan. Sedangkan informasi non keuangan berisi informasi mengenai *underwriter*, auditor independen, konsultan hukum, nilai penawaran saham, prosentase saham yang ditawarkan, umur perusahaan, dan informasi lain yang

mendukung. Informasi-informasi dalam prospektus ini akan memberikan gambaran mengenai kondisi, prospek ekonomi, rencana investasi, serta ramalan laba dan dividen yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan keputusan rasional mengenai resiko dan nilai saham yang ditawarkan perusahaan. Informasi ini dibutuhkan investor untuk menilai, menentukan, dan membuat keputusan apakah perusahaan bersangkutan merupakan perusahaan yang layak dipilih sebagai tempat untuk menginvestasikan dananya.

Pada saat IPO prospektus merupakan satu-satunya sumber informasi dalam proses penawaran saham perdana ini sebab selain prospektus hampir tidak ada sumber informasi lain yang tersedia untuk investor. Sebagai perusahaan tertutup yang mayoritas kepemilikannya dikuasai keluarga atau kelompok tertentu maka jarang ada media yang meliput nilai dan kondisi perusahaan itu sebelum perusahaan *go public*. Oleh sebab itu investor cenderung menyandarkan diri kepada prospektus untuk mengetahui informasi dan menilai perusahaan yang melakukan penawaran saham itu. Investor menjadi tergantung pada informasi yang dicantumkan dalam prospektus. Ini mengakibatkan semakin banyak informasi yang ada dalam prospektus berarti semakin banyak pula informasi yang dapat diterima investor, sebaliknya semakin sedikit informasi yang ada dalam prospektus berarti semakin sedikit pula informasi yang dapat diterima investor. Oleh sebab itu kualitas informasi yang diterima dan dikuasai investor sangat tergantung pada kualitas informasi yang ada dalam prospektus perusahaan pada saat penawaran perdana.

Secara konseptual minimnya informasi yang tersedia ini akan mendorong dan memotivasi manajer perusahaan untuk melaporkan informasi yang menguntungkan dirinya dengan mempercantik laporan keuangan (*fashioning accounting reports*). Upaya ini sebenarnya logis mengingat manajer berkeinginan menaikkan kesempatan untuk memperoleh *issue fully subscribed*. Apalagi jika melihat hubungan positif antara informasi akuntansi dan harga saham perusahaan bersangkutan. Semakin bagus informasi yang dipublikasikan perusahaan semakin bagus pula harga saham perusahaan bersangkutan atau sebaliknya semakin buruk informasi yang dipublikasikan perusahaan semakin buruk pula harga sahamnya. Oleh sebab itu perusahaan cenderung menginformasikan hal-hal yang positif agar investor juga secara positif merespon saham yang ditawarkan. Manajer akan menyembunyikan, menunda, atau mengubah informasi

yang dapat membuat investor mempunyai persepsi negatif terhadap perusahaan sebab hal ini akan mengakibatkan harga saham perusahaan bersangkutan jatuh.

Inilah sebabnya mengapa manajer melakukan manajemen laba pada saat penawaran saham perdana. Perusahaan memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba yang dapat meningkatkan penerimaan melalui pengaturan tingkat laba yang dilaporkan dalam prospektus. Perusahaan melaporkan labanya lebih tinggi (*overstate*) dibandingkan laba sesungguhnya ketika penawaran itu. Upaya rekayasa manajerial ini bahkan dilanjutkan perusahaan selama beberapa periode setelah melakukan penawaran itu. Secara konseptual dorongan untuk melakukan upaya rekayasa manajerial ini lebih besar dilakukan oleh perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan penawaran saham. Hingga apabila angka-angkanya diperbandingkan maka angka-angka rekayasanya pun juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan penawaran saham perdana.

Tabel 3.1
Manajemen Laba Pada Penawaran Saham Perdana

Peneliti	Kesimpulan
Teoh, Welch, dan Wong (1998)	Perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana menggunakan kebijakan depresiasi dan piutang tak tertagih untuk menaikkan kinerja pada saat dan beberapa tahun setelah penawaran lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan lain.
Chambers (1999)	Sikap oportunistik manajer merupakan sikap curang untuk melakukan manajemen laba dalam melaporkan kinerjanya pada saat penawaran saham perdana dengan tujuan menyesatkan investor dalam menilai saham yang ditawarkannya.
Gumanti (2001)	Perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi tertentu untuk melakukan manajemen laba dua tahun sebelum penawaran. Tetapi tidak ditemukan bukti adanya manajemen laba satu periode sebelum penawaran saham perdana.
Saiful (2002)	Ada bukti yang menunjukkan bahwa manajer perusahaan melakukan manajemen laba dua tahun sebelum penawaran saham perdana, pada saat penawaran saham perdana, dan dua tahun setelah penawaran saham perdana. Manajemen laba ini mengakibatkan rendahnya kinerja operasi, namun tidak berpengaruh terhadap penurunan <i>return</i> saham setelah

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2005.

Anehnya meski mengetahui bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan telah direkayasa menjadi lebih indah dibandingkan informasi sesungguhnya namun investor tetap memusatkan perhatian kepada informasi laba daripada informasi arus kas. Investor tetap membutuhkan dan menggunakan informasi laba yang berbasis akrual untuk menilai dan membuat keputusan investasinya. Padahal sebenarnya laporan arus kas merupakan informasi yang relatif bebas dari upaya rekayasa manajerial sebab menggunakan basis kas untuk menyusunnya. Hal ini disebabkan informasi laba lebih mampu memprediksi arus kas masa depan dibandingkan informasi arus kas. Inilah yang membuat perusahaan yang melakukan penawaran saham cenderung melakukan manajemen laba berpola menaikkan laba agar sahamnya direspon secara positif oleh pasar. Bahkan rekayasa itu tidak hanya dilakukan terhadap laporan keuangan periode penawaran saja namun juga dilakukan terhadap laporan keuangan selama beberapa sebelum penawaran. Apalagi upaya *restatement* semacam ini memang diperkenankan oleh prinsip akuntansi berterima umum.

Meski perusahaan mempunyai keleluasaan untuk merekayasa informasi-informasi yang disampaikannya kepada publik, namun upaya ini tidak mungkin dilakukan secara terus menerus. Sebagai sebuah informasi mengenai kinerja yang berisi angka-angka akuntansi maka upaya untuk menyembunyikan, menunda, atau memalsukan informasi sebenarnya hanyalah merupakan upaya untuk mengundur pengakuan atau pencatatan suatu transaksi atau peristiwa. Atau dengan kata lain, upaya-upaya seperti ini hanyalah permainan di atas kertas belaka. Oleh sebab secara garis besar keterbatasan manajemen laba adalah:

1. Publik akan mengetahui apa saja yang dilakukan perusahaan

Hal ini bisa terjadi pada saat perusahaan harus menjalani proses pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik. Akuntan publik pada saat melakukan pemeriksaan harus melakukan *crosscheck* terhadap komponen-komponen laporan keuangan, termasuk meminta konfirmasi dari perusahaan atau pihak lain yang menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan bersangkutan. Upaya ini merupakan usaha untuk mengidentifikasi terjadi kecurangan-kecurangan korporasi. Apabila

menemukan indikasi perusahaan melakukan kecurangan maka akuntan public bersangkutan mempunyai kewajiban untuk menolak memberikan opini dan melaporkan kepada regulator yang berwenang untuk menangani kecurangan-kecurangan itu.

2. Perusahaan pada suatu saat akan kehilangan kemampuannya untuk melanjutkan proses rekayasa manajerial ini

Apalagi pada saat perusahaan harus menginformasikan nilai dan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Bahkan secara tidak langsung perusahaan harus mengungkapkan semua upaya rekayasa yang pernah dilakukan dalam laporan keuangannya. Apabila upaya rekayasa manajerial yang dilakukannya berpola penurunan laba maka suatu ketika perusahaan harus menanggung konsekuensinya yang berupa menaikkan kinerja (*overperformance*). Sebaliknya apabila upaya rekayasa manajerial yang dilakukannya berpola menaikkan laba maka suatu ketika perusahaan harus menanggung konsekuensinya berupa penurunan kinerja (*underperformance*).

Situasi semacam ini juga akan dialami perusahaan yang melakukan manajemen laba pada saat penawaran saham perdana. Perusahaan akan mengalami kenaikan kinerja selama beberapa periode sebelum penawaran, memuncak pada saat penawaran, dan akhirnya mengalami penurunan kinerja selama beberapa periode setelah penawaran saham. Oleh sebab itu bisa diduga perusahaan akan mengalami penurunan kinerja setelah melakukan penawaran saham perdana. Bahkan apabila perekonomian makro secara umum sedang mengalami penurunan, perusahaan yang baru saja melakukan penawaran saham akan mengalami penurunan kinerja lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Hal ini menandakan bahwa perusahaan bersangkutan selain harus menanggung menurunnya perekonomian juga menanggung konsekuensi dari manajemen laba yang pernah dilakukannya.

A.2. SEASONED EQUITY OFFERINGS

Seasoned equity offerings (SEO) merupakan penawaran saham tambahan yang dilakukan oleh perusahaan publik yang memerlukan tambahan dana untuk membiayai kegiatan operasional maupun investasinya. Alasan lain mengapa sebuah perusahaan melakukan SEO adalah mencari dana untuk membayar hutang jangka panjangnya yang

akan jatuh tempo. Secara konseptual penawaran saham ini dapat dilakukan dua cara, *pertama*, melalui mekanisme *right issue* atau menjual hak (*right*) kepada pemegang saham lama untuk membeli saham tambahan itu dengan harga tertentu dan pada saat tertentu. Mekanisme ini biasa dilakukan oleh perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham lama agar dapat mempertahankan proporsi kepemilikannya sama seperti sebelum penawaran ekuitas ini (*preemptive right*). Mekanisme ini biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan di pasar modal negara berkembang (*emerging market*) yang kepemilikannya cenderung terkonsentrasi pada orang, keluarga, atau kelompok tertentu.

Kedua, melalui mekanisme *second offerings*, *third offerings*, dan seterusnya. atau menjual saham tambahan ini kepada setiap investor di pasar yang ingin membelinya tidak hanya kepada pemegang saham lama. Mekanisme ini biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan di pasar modal negara maju (*developing market*) yang kepemilikannya cenderung tersebar pada banyak pihak dan tidak ada pemegang saham mayoritas. Namun berbeda dengan *right issue* maka harga saham dalam mekanisme ini secara murni ditentukan oleh besarnya penawaran dan permintaan di pasar. Harga saham akan tinggi apabila permintaan pasar tinggi, sebaliknya harga saham akan rendah apabila permintaan pasar juga rendah.

Ada kelemahan mekanisme SEO dibandingkan menggunakan dana pinjaman, yaitu SEO membuat kepemilikan perusahaan semakin menyebar, sebab SEO merupakan proses menjual kepemilikan perusahaan kepada orang lain. Atau dengan kata lain, orang yang membeli saham SEO berarti akan menjadi salah satu pemilik perusahaan. Namun dibalik kelemahan SEO ada beberapa kelebihan yang menjadi alasan mengapa perusahaan cenderung memilih menggunakan mekanisme SEO untuk memperoleh tambahan dana dibandingkan menggunakan dana pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain, yaitu:

1. Mekanisme SEO tidak perlu membayar bunga pinjaman yang relatif lebih tinggi dibandingkan besarnya deviden yang harus dibagikan kepada investor. Apalagi deviden akan dibagikan hanya ketika perusahaan memperoleh laba saja, namun apabila tidak memperoleh laba yang cukup besar atau menderita kerugian maka perusahaan tidak wajib untuk membagikan deviden. Ini berbeda dengan bunga pinjaman yang harus dibayarkan kepada kreditur yang tanpa melihat apakah

perusahaan memperoleh laba atau tidak. Hal ini lebih meringankan keuangan perusahaan daripada harus membayarnya secara periodik.

2. Dana pinjaman atau hutang merupakan kewajiban yang harus diselesaikan perusahaan pada suatu saat sedangkan dana yang diperoleh dari mekanisme SEO menjadi bagian dari modal perusahaan yang harus dikembalikan. Artinya, orang yang membeli saham tambahan ini akan menjadi salah satu pemilik perusahaan seperti halnya pemilik yang lain, dengan hak dan kewajiban yang proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Secara konseptual pemegang saham menempati urutan terakhir apabila perusahaan menyelesaikan kewajiban-kewajibannya pada saat dinyatakan pailit atau bangkrut.
3. Apabila dana perusahaan telah habis untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang lain maka pemegang saham tidak akan memperoleh apapun dari saham yang dipegangnya. Hal ini sebenarnya konsekuensi pemegang saham sebagai pemilik perusahaan yang harus mau dan bertanggung jawab menanggung segala resiko yang muncul dari bisnis yang dijalankan perusahaannya. Hal ini lebih meringankan keuangan perusahaan daripada suatu saat harus menyediakan dana segar untuk mengembalikan pinjamannya itu.
4. Mekanisme SEO lebih memberikan nilai tambah dibandingkan dengan menggunakan dana pinjaman. Secara konseptual dana yang diperoleh dari SEO akan diakui sebagai tambahan modal sehingga dalam struktur neraca dimasukkan dalam komponen modal saham. Hal ini membuat kinerja solvabilitas perusahaan lebih terjaga daripada seandainya perusahaan menggunakan dana pinjaman sebab dana ini akan membuat nilai hutang perusahaan menjadi lebih tinggi.
5. Mekanisme SEO akan membuat harga saham perusahaan di pasar modal juga akan terjaga seandainya perusahaan mempunyai kinerja solvabilitas yang bagus. Alasannya, pada dasarnya investor akan menggunakan ukuran-ukuran kinerja keuangan perusahaan sebelum memutuskan akan menginvestasikan dananya pada perusahaan bersangkutan atau tidak. Hingga semakin bagus kinerja keuangan perusahaan semakin bagus pula kinerja sahamnya, sebaliknya semakin buruk kinerja keuangan perusahaan semakin buruk pula kinerja sahamnya. Inilah sebabnya mengapa perusahaan memilih menggunakan mekanisme SEO daripada menggunakan hutang.

Apabila dalam penawaran saham perdana investor cenderung menggunakan laporan keuangan sebagai satu-satunya sumber informasi maka dalam SEO ada lebih banyak informasi yang dapat dimanfaatkan investor sebelum membuat keputusan investasinya. Sebagai perusahaan publik dengan pengelolaan yang terbuka maka apa yang dilakukan dan dialami perusahaan selama periode tertentu dapat diketahui oleh publik. Perusahaan tidak lagi menjadi organisasi tertutup yang bebas melakukan apa saja sesuai dengan keinginan pengelolanya. Setiap keputusan dan kegiatan akan diawasi, dikontrol, dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Bahkan keputusan dan kegiatan itu harus dilakukan dengan mengikuti kaidah dan norma bisnis yang diterima secara umum. Upaya-upaya penyelewengan dalam mengelola perusahaan pun dapat menjadi subyek tuntutan hukum yang akan diselesaikan di pengadilan. Harapannya, hak publik untuk memperoleh informasi yang relevan, akurat, dan netral dapat dipenuhi.

Oleh sebab itu berbeda dengan penawaran saham perdana maka investor mempunyai akses dan sumber untuk memperoleh informasi yang lebih memadai dalam SEO ini. Selain menggunakan informasi laporan keuangan maka investor dapat menggunakan berbagai akses dan sumber informasi lain untuk menilai apakah perusahaan layak digunakan sebagai tempat menginvestasikan dananya. Secara konseptual hal ini membuat investor lebih mudah dalam membuat keputusan-keputusan investasi. Namun demikian ternyata asimetri informasi antara manajer perusahaan dengan investor tetap ada. Meski di pasar tersedia informasi yang memadai manajer tetap merupakan pihak yang lebih superior dibandingkan pihak lain. Hal inilah yang mendorong dan memotivasi manajer untuk berperilaku oportunistik dengan melakukan manajemen laba agar mempunyai kesempatan untuk memiliki *issue fully subscribed*. Bahkan semakin besar asimetri informasi semakin besar pula dorongan manajer bersikap curang (*fraud*) dalam melaporkan kinerja. Tujuannya, menyesatkan investor dalam menilai saham yang ditawarkan.

Upaya ini sebenarnya wajar dilakukan manajer perusahaan yang melakukan SEO sebab secara teoritis memang terbukti ada hubungan positif antara kinerja perusahaan dengan harga saham perusahaan bersangkutan. Semakin tinggi kinerja perusahaan semakin tinggi pula harga sahamnya, sebaliknya semakin rendah kinerjanya semakin rendah pula harga saham perusahaan bersangkutan. Maka tidak mengherankan

apabila perusahaan melakukan rekayasa manajerial dengan pola menaikkan laba selama beberapa periode sebelum SEO. Upaya rekayasa ini juga dilakukan manajer pada periode penawaran sehingga pada saat penawaran kinerja perusahaan terlihat lebih bagus dibandingkan kinerja sesungguhnya. Tujuannya perusahaan untuk menginformasikan hal-hal yang positif ini adalah agar investor juga secara positif merespon saham yang ditawarkan.

Hal itu sejalan dengan konsep *windows of opportunity* yang menjelaskan bahwa manajer yang oportunistik melakukan SEO untuk dengan memanfaatkan asimetri informasi antara manajer dan pasar. Konsep ini juga menjelaskan bahwa kebanyakan perusahaan akan melakukan penawaran saham tambahan pada saat sahamnya *overvalued*, puncak *overvaluation* adalah pada saat penawaran, dan kesalahan estimasi penilaian secara signifikan berkaitan dengan probabilitas bahwa perusahaan akan melakukan SEO. Atau dengan kata lain, manajer berperilaku oportunistik ketika mengetahui investor *overoptimism* terhadap nilai penawaran saham tambahan itu. Hingga manajer hanya akan mengeluarkan ekuitas tambahan jika percaya bahwa nilai perusahaannya *overvalue*. Jadi, jika kinerja jangka panjang perusahaan merupakan refleksi dari kegagalan pasar dalam mengumpulkan informasi yang disampaikan pada saat pengumuman, maka perusahaan yang memanfaatkan *windows of opportunity* hanya menerima manfaat ketika pasar belum melakukan koreksi terhadap pengumuman tersebut.

Tabel 3.2
Manajemen Laba Pada SEO

Peneliti	Kesimpulan
Teoh, Welch, dan Wong (1998)	Manajer berperilaku oportunistik dengan melakukan manajemen laba untuk menaikkan harga saham yang ditawarkannya sehingga ada peningkatan laba (<i>income increasing</i>) menjelang penawaran, memuncak pada saat penawaran dan menurun setelah penawaran.
Shivakumar (2000)	Manajer telah melakukan <i>overstate</i> terhadap laba sebelum melakukan pengumuman SEO. Namun, manipulasi yang dikenal dengan istilah manajemen laba ini tidak dapat dipertahankan perusahaan dalam jangka panjang dan mengakibatkan penurunan kinerja pasca penawaran.
Sulistyanto dan Wibisono (2003)	Manajer bersikap oportunistik melakukan manajemen laba selama tiga tahun sebelum penawaran dan memanfaatkan <i>windows of opportunity</i> pada saat penawaran. Akibatnya

perusahaan mengalami penurunan kinerja operasi dan saham selama dua tahun setelah penawaran.

Mardiyah (2003) Perusahaan yang melakukan SEO melakukan manajemen laba untuk memperbaiki kinerja yang dilaporkan dalam prospektus dengan harapan saham yang ditawarkan akan merespon secara positif oleh pasar. Akibatnya, perusahaan mengalami penurunan kinerja pasca penawaran.

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2005.

Anehnya, meskipun *average return* perusahaan yang melakukan SEO hanya 7% per tahun sedangkan perusahaan yang tidak melakukan penawaran rata-rata 15% per tahun, penawaran saham tambahan ini tetap mendapat respon positif dari investor. Apalagi jika investor menangkap sinyal bahwa dana yang diperoleh dari hasil SEO ini akan digunakan untuk diinvestasikan pada kesempatan yang menguntungkan. Selain itu pasar juga akan bereaksi secara positif apabila melihat bahwa perusahaan yang melakukan penawaran saham itu pertumbuhannya yang tinggi. Inilah yang membuat perusahaan yang mencoba memberi sinyal positif ketika melakukan penawaran saham tambahan. Upaya memberi sinyal positif itu manajer melakukan manajemen laba menaikkan laba agar kinerja perusahaannya kelihatan lebih baik dibandingkan kinerja sesungguhnya selama beberapa periode sebelum penawaran. Bahkan untuk itu perusahaan juga mengatur agar kinerjanya seolah-olah mengalami peningkatan selama beberapa periode. Hal ini dilakukan untuk memberi sinyal bahwa perusahaan mempunyai kesempatan bertumbuh yang tinggi.

Secara konseptual manajemen laba tidak mungkin dilanjutkan perusahaan dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan, *pertama*, publik akan mengetahui bahwa perusahaan telah melakukan aktivitas rekayasa manajerial dengan menyembunyikan, menunda, atau mengubah informasi yang seharusnya diungkap secara terbuka. *Kedua*, perusahaan pada suatu saat akan kehilangan kemampuannya untuk melanjutkan proses rekayasa manajerial ini. Suatu ketika perusahaan harus menginformasikan nilai dan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Bahkan secara tidak langsung perusahaan harus mengungkapkan semua upaya rekayasa yang pernah dilakukan dalam laporan keuangannya. Perusahaan pun harus menanggung dampak yang muncul dari upaya-upaya rekayasa yang pernah dilakukannya. Apabila perusahaan melakukan manajemen laba berpola penurunan laba maka suatu ketika perusahaan akan mengalami kenaikan kinerja (*overperformance*). Sebaliknya apabila perusahaan

melakukan manajemen laba berpola menaikkan laba maka suatu ketika perusahaan akan mengalami penurunan kinerja (*underperformance*).

Oleh sebab itu perusahaan yang melakukan manajemen laba berpola menaikkan laba pada saat SEO juga akan mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan setelah melakukan penawaran saham itu. Penurunan kinerja ini akan dialami perusahaan selama beberapa periode setelah penawaran. Bahkan dalam kondisi perekonomian makro sedang mengalami penurunan, perusahaan akan mengalami penurunan kinerja lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Hal ini menandakan bahwa perusahaan bersangkutan selain harus menanggung menurunnya perekonomian juga menanggung konsekuensi dari manajemen laba yang pernah dilakukannya. Sejalan dengan penurunan kinerja ini maka harga saham perusahaan bersangkutan di pasar modal akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pada dasarnya tinggi-rendahnya harga saham suatu perusahaan akan ditentukan dan dipengaruhi oleh tinggi-rendahnya kinerja perusahaan bersangkutan.

C.3. TRANSAKSI DAN PERISTIWA LAIN

Selain transaksi saham pada saat penawaran saham perdana dan SEO maka ada transaksi-transaksi lain yang terjadi di pasar modal, sebagai contoh adalah *management buyouts*, yaitu upaya manajer perusahaan untuk membeli kembali saham perusahaan yang sudah beredar secara luas di tengah masyarakat. Tujuannya, manajer ingin mempunyai atau menguasai kepemilikan perusahaan yang dikelolanya (*managerial ownership*). Oleh sebab itu manajer berupaya agar dapat membeli saham perusahaannya sendiri semurah-murahnya sehingga dapat membeli saham sebanyak mungkin. Serupa dengan transaksi-transaksi lain di pasar modal maka laba perusahaan akan menentukan nilai saham perusahaan bersangkutan. Atau dengan kata lain secara konseptual harga saham dipengaruhi oleh laba perusahaan. Artinya semakin tinggi laba perusahaan semakin tinggi pula harga saham perusahaan bersangkutan. Sebaliknya, semakin rendah laba perusahaan semakin rendah harga saham perusahaan bersangkutan.

Oleh sebab itu informasi laba sangat penting dalam proses *management buyouts*. Ini sebabnya mengapa manajer perusahaan yang melakukan *buyouts* mempunyai dorongan untuk melakukan manajemen laba dengan melaporkan labanya lebih rendah (*understate*) daripada sesungguhnya. Tujuannya, agar saham perusahaan bersangkutan

harganya jatuh dibawah harga fundamentalnya, sehingga manajernya dapat membeli saham-saham itu dengan harga lebih murah dibanding harga sesungguhnya. Secara empiris aktivitas rekayasa manajerial ini berhasil mengelabui pasar agar mau menjual dan menghargai saham perusahaan itu lebih rendah. Namun setelah berhasil menguasai saham-saham itu maka manajer itu akan merekayasa laba lagi dengan pola menaikkan laba untuk mengembalikan harga saham perusahaan ke tingkat yang sebenarnya.

Selain *management buyout* maka kebijakan multi papan (*multiboard system*) yang diperlakukan di pasar modal juga merupakan salah satu pendorong sebuah perusahaan melakukan manajemen laba. Secara konseptual kebijakan multi papan adalah proses untuk mendisiplinkan pasar yang dilakukan pengelola pasar modal di suatu negara. Dalam sistem ini maka perusahaan yang dinilai tidak dapat memenuhi kriteria pencatatan di papan utama, misalkan ukuran keuangan, likuiditas, persentase kepemilikan saham dan keaktifan perdagangan, dan lain-lain, akan diturunkan ke papan pengembangan. Apabila pada suatu saat perusahaan bersangkutan dinilai telah berhasil memenuhi kriteria-kriteria itu maka akan dikembalikan ke papan pencatatan utama. Hal inilah yang mendorong manajer melakukan manajemen laba. Alasannya, *pertama*, penurunan status pencatatan merupakan prestasi negatif bagi manajer sebagai seorang agen yang menjalankan wewenang dari prinsipal. *Kedua*, penurunan ini dapat mempengaruhi harga saham perusahaan bersangkutan.

Atas dasar alasan inilah manajer melakukan manajemen laba agar terhindar dari degradasi dari papan pencatatan utama ke pencatatan pengembangan. Upaya rekayasa manajerial ini bisa dilakukan dengan pola menaikkan laba atau perataan laba. Pola menaikkan laba dipilih apabila selama periode pengawasan perusahaan mempunyai kinerja yang rendah, sementara perataan laba dipilih pada saat periode pengawasan perusahaan mempunyai kinerja yang relatif fluktuatif antara tinggi dan rendah. Pola perataan laba ini dipilih agar kinerja perusahaan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, yang penting perusahaan tidak dikenai kebijakan degradasi pencatatan saham. Selain ini maka manajemen laba juga dilakukan perusahaan yang berada di papan pencatatan pengembangan. Upaya rekayasa manajerial ini dilakukan dengan pola menaikkan laba untuk mengusahakan agar laba perusahaan selalu di atas batas minimal degradasi pencatatan saham. Upaya ini dilakukan agar perusahaan dapat dinaikkan laba ke papan pencatatan utama.

Tingkat pengungkapan (*disclosure*) laporan keuangan ternyata juga merupakan pendorong sebuah perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Secara konseptual tingkat pengungkapan akan membantu pemakai laporan keuangan untuk memahami isi dan angka yang diinformasikan dalam laporan keuangan. Ada tingkatan pengungkapan yang selama ini dikenal, yaitu pengungkapan penuh, cukup, dan wajar. Pengungkapan penuh merupakan upaya perusahaan untuk mengungkapkan seluruh informasi yang dimilikinya, baik informasi keuangan maupun non keuangan. Sementara pengungkapan cukup merupakan upaya perusahaan untuk mengungkapkan informasi sesuai dengan diwajibkan oleh standar akuntansi. Sementara pengungkapan penuh merupakan upaya perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara cukup ditambah dengan informasi-informasi lain yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan seperti *contingencies*, *commitments*, dan sebagainya.

Secara konseptual tingkat pengungkapan perusahaan dipengaruhi oleh asimetri informasi yang terjadi di pasar. Semakin tinggi asimetri informasi akan membuat tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan semakin rendah. Artinya, semakin tinggi asimetri informasi akan membuat manajer semakin leluasa untuk mengatur informasi apa yang saja yang harus diungkapkan, disembunyikan, ditunda, atau diubah. Upaya semacam inilah yang disebut dengan manajemen laba. Oleh sebab itu salah satu cara untuk mengelirakan upaya rekayasa manajerial adalah dengan membuat peraturan tentang keharusan bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi-informasi tertentu secara wajib (*mandated disclosure*) dan sukarela (*voluntary disclosure*). Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan.

Peristiwa lain yang mempengaruhi manajer sebuah perusahaan melakukan aktivitas rekayasa manajerial terhadap informasi yang diungkapkannya dalam laporan keuangan, yaitu kewajiban menerapkan prinsip *good corporate governance*. Secara konseptual upaya membangun kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam mengelola sebuah perusahaan dapat menjadi penghambat bagi aktivitas rekayasa manajerial. Oleh sebab itu perusahaan yang menerapkan prinsip *good corporate governance* secara konsisten akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menurunkan tingkat manajemen labanya. Sementara perusahaan yang tidak menerapkan prinsip-prinsip itu cenderung lebih buruk kualitas laporannya. Inilah sebabnya

mengapa perusahaan-perusahaan yang secara konsisten menerapkan prinsip *good corporate governance* akan memperoleh premium di pasar modal lebih tinggi dibanding perusahaan lain.

Ada alasan penting mengapa prinsip *good corporate governance* dapat menghambat aktivitas rekayasa manajerial dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Secara konseptual manajer perusahaan melakukan manajemen laba didorong oleh adanya asimetri antara manajer bersangkutan dengan pihak-pihak lain. Bahkan semakin tinggi asimetri informasi semakin besar pula dorongan bagi manajer untuk merekayasa labanya. Oleh sebab itu prinsip *good corporate governance* menekankan pentingnya pembentukan komite audit dan komisaris independen disetiap perusahaan untuk mengeliminasi asimetri informasi antara manajer dengan pihak-pihak lain. Alasannya, pengawasan dan pengendalian dapat berjalan secara efektif apabila dilakukan oleh pihak yang independen dengan kepentingan manajerial. Untuk itu komite audit dan komisaris independen harus merupakan orang-orang yang bebas dari tekanan dan intervensi manajerial.

Tabel 3.3
Manajemen Laba Pada Saat Transaksi dan Peristiwa Lain

Peneliti	Kesimpulan
DeAngelo (1988)	Informasi laba sangat penting untuk menilai <i>management buyouts</i> dan menghipotesiskan bahwa manajer perusahaan yang melakukan <i>buyouts</i> mempunyai dorongan untuk melaporkan labanya lebih rendah (<i>understate</i>)
Djakman (2003)	Perusahaan termotivasi melakukan manajemen laba untuk meningkatkan laba sebagai akibat penerapan kebijakan muti papan agar dapat tercatat di papan utama.
Veronica dan Bachtiar (2003)	Semakin tinggi tingkat pengungkapan perusahaan maka akan membuat semakin rendah tingkat manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Selain itu semakin tinggi tingkat pengungkapan sukarela semakin rendah pula tingkat manajemen laba yang dilakukan perusahaan.
Midiastuty dan Machfoedz (2003)	Ada hubungan antara mekanisme <i>good corporate governance</i> dengan manajemen laba dan kualitas laba. Alasannya, mekanisme ini mampu mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Mekanisme ini mampu mengendalikan dan meminimalkan manajemen laba sehingga meningkatkan kualitas laba.

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2005.

B. MOTIVASI KONTRAKTUAL

Ada permasalahan serius yang muncul seiring dengan pemisahan kepemilikan dan pengelolaan sebuah perusahaan. Secara konseptual pemisahan ini bertujuan agar perusahaan dapat dikelola secara profesional oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk itu. Sementara pemilik hanya menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian tanpa harus terjun mengoperasikan perusahaan secara langsung. Profesionalisme pengelolaan perusahaan akan muncul seandainya setiap pihak menjalankan perannya masing-masing tanpa mengintervensi kepentingan pihak lain. Sebaliknya permasalahan agensi akan muncul seandainya ada pihak yang mendahulukan kepentingan pribadi dengan mengintervensi kepentingan pihak lain. Permasalahan inilah yang memicu konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan.

Permasalahan agensi ini semakin berkembang seiring dengan perkembangan bisnis perusahaan yang membuat hubungan bisnis perusahaan semakin luas dengan berbagai pihak. Apabila pada mulanya permasalahan agensi hanya muncul diantara manajer dan pemilik maka dalam perkembangannya permasalahan ini juga menjadi pemicu konflik kepentingan antara manajer dengan pihak lain yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan. Sebagai contoh adalah konflik kepentingan antara manajer dengan calon investor, manajer dengan kreditur, maupun manajer dengan regulator. Hal ini bisa terjadi karena manajer cenderung selalu berusaha memaksimalkan kepentingan dan kesejahteraan pribadi dari hubungan bisnis yang dijalin dengan pihak-pihak itu. Hubungan bisnis yang seharusnya dijalin dengan dasar saling menguntungkan semua pihak dimanfaatkan manajer untuk mencari keuntungan-keuntungan pribadi.

Upaya mencari keuntungan pribadi ini bisa dilakukan manajer disebabkan kesuperiorannya dalam menguasai informasi mengenai perusahaan dibandingkan pihak lain. Sebagai pengelola perusahaan manajer mengetahui dan menguasai seluruh informasi mengenai perusahaan, baik informasi bagus maupun buruk. Hal ini mendorong manajer bersikap oportunistik dengan hanya mempublikasikan informasi-informasi yang memberi manfaat bagi dirinya. Informasi yang kurang menguntungkan bagi dirinya jika diketahui oleh orang lain tidak akan dipublikasikan kepada publik. Hingga manajer akan memilih mana informasi yang harus disembunyikan, ditunda

publikasinya, maupun diubah sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapainya. Akibatnya informasi yang disampaikan kepada pihak lain menjadi tidak mencerminkan nilai perusahaan yang sesungguhnya.

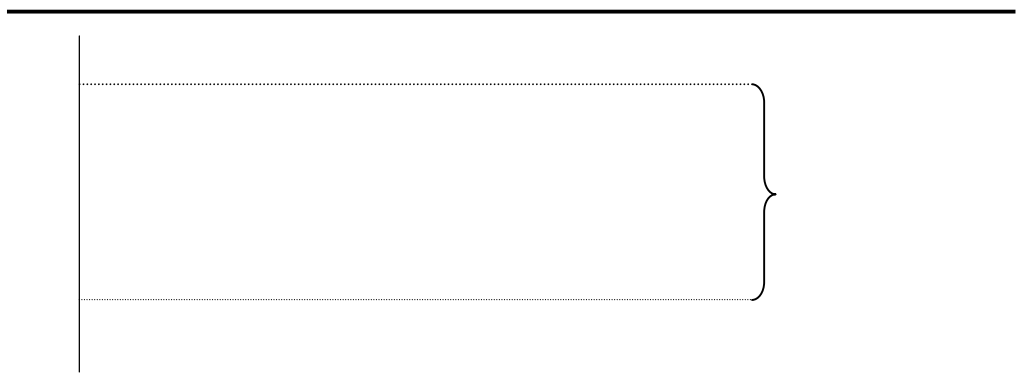
Inilah yang mengakibatkan terjadi kesalahan alokasi sumberdaya perusahaan yang seharusnya diterima pihak lain yang mempunyai hubungan dengan perusahaan itu. Hal ini terjadi karena pihak-pihak itu menggunakan informasi yang telah direkayasa oleh manajer perusahaan untuk membuat keputusan-keputusan strategisnya. Akibatnya, pihak-pihak itu menjadi tidak bisa menerima hasil yang optimal dari hubungan bisnisnya dengan perusahaan. Pemilik menjadi tidak dapat menerima hasil dari modal yang ditanamkan kedalam perusahaan secara optimal, seperti yang diharapkannya. Kreditur menjadi tidak dapat menerima hasil dan pengembalian dari dana yang dipinjamkannya kedalam perusahaan secara optimal. Bahkan pemilik dan kreditur bisa kehilangan dana apabila upaya ini dilakukan secara terus menerus dalam jangka panjang. Oleh sebab itu secara umum motivasi kontrak ini muncul karena perjanjian antara manajer dengan pihak lain yang berbasis pada kompensasi manajerial (*managerial compensations*) dan perjanjian hutang (*debt covenant*).

1. Motivasi bonus merupakan dorongan bagi manajer dalam melaporkan laba yang diperolehnya untuk memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba tersebut. Jika laba lebih rendah daripada target yang ditetapkan maka akan mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi dengan mentransfer laba masa depan menjadi laba sekarang dengan harapan akan memperoleh bonus. Bahkan agar dapat memperoleh bonus lebih besar manajer menggunakan mengundurkan diri dalam pendekatan *chief executive officers* (CEO) digunakan sebagai strategi untuk memaksimalkan laba sebagai upaya untuk menaikkan bonus.
2. Pelanggaran perjanjian hutang (*debt covenant violations*) membuktikan adanya penggunaan akrual dengan menaikkan laba dalam laporan keuangan tahunan perusahaan yang melanggar perjanjian tersebut. Perjanjian hutang terbukti mempunyai pengaruh terhadap pilihan akuntansi pada tahun pelaporan dan tahun terjadinya pelanggaran itu. Perusahaan yang dinyatakan melanggar perjanjian hutang secara signifikan akan menaikkan laba sehingga rasio *debt-to-equity* dan *interest coverage* pada level yang ditentukan.

B.1. KOMPENSASI MANAJERIAL

Permasalahan agensi antara manajer dengan pemilik perusahaan terjadi karena ada pihak yang selalu berusaha memaksimalkan kepentingan dan kesejahteraan pribadinya dengan memanfaatkan pihak lain. Pemilik selalu mendorong dan memotivasi manajer agar selalu bekerja untuk memaksimalkan dan meningkatkan nilai perusahaan yang dimilikinya. Alasannya, meningkatnya nilai perusahaan secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan pemilik. Hingga semakin tinggi peningkatan nilai perusahaan akan membuat semakin tinggi pula peningkatan kesejahteraan yang dapat dinikmati pemilik. Untuk itulah berbagai upaya dilakukan pemilik untuk mendorong dan memotivasi manajer agar mau dan bersedia bekerja lebih baik dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Bahkan agar manajer termotivasi mau bekerja lebih baik dan keras maka pemilik menjanjikan sejumlah bonus yang akan diberikan apabila kinerja yang dicapainya di atas rata-rata periode-periode sebelumnya. Untuk itu pemilik menetapkan angka tertentu sebagai batas bawah (*boogey*) dan batas atas (*cap*) untuk memperoleh bonus. Seorang manajer akan memperoleh sejumlah bonus apabila laba perusahaan yang dikelolanya di atas batas bawah, sebaliknya manajer tidak akan menerima bonus apabila laba perusahaannya tidak mencapai batas bawah. Sedangkan batas atas diperlukan untuk menentukan maksimal perolehan laba yang akan dipakai sebagai dasar penghitungan bonus. Artinya, manajer hanya akan memperoleh bonus untuk laba yang berada diantara batas atas dan bawah, sedangkan kelebihannya tidak akan diperhitungkan sebagai penghitung bonus.



Gambar 3.1
 Skema Bonus

Secara konseptual dengan skema bonus ini semua pihak akan memperoleh keuntungan dan meningkat kesejahteraannya. Pemilik akan memperoleh keuntungan berupa meningkatnya nilai perusahaan yang dimilikinya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraannya. Oleh sebab itu semakin baik manajer bekerja maka semakin tinggi kinerja perusahaan walaupun bonus yang harus diberikan kepada manajer akan semakin tinggi. Bagi pemilik hal ini tidak menjadi masalah besar sebab manfaatnya yang diterima pemilik berupa peningkatan kesejahteraan lebih tinggi dibandingkan bonus yang harus dibagikan kepada manajer. Sedangkan manajer akan memperoleh keuntungan berupa peningkatan pendapatan yang diterimanya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraannya. Semakin baik manajer bekerja maka semakin tinggi kinerja perusahaan sehingga bonus yang harus diterimanya akan semakin tinggi. Hal inilah yang mendorong manajer untuk selalu mempunyai kinerja dalam rentang perhitungan bonus.

Upaya manajer untuk selalu mempunyai kinerja dalam rentang bonus ini akhirnya memotivasi manajer untuk bersikap oportunistik agar dapat selalu menerima bonus setiap periode. Manajer bersedia untuk memaksimalkan nilai perusahaan bukan untuk mengoptimalkan kesejahteraan pemilik, tetapi untuk mengoptimalkan kesejahteraannya sendiri. Upaya ini dilakukan dengan mengatur laba agar selalu dalam posisi diantara *boogey* dan *cap* setiap periode. Apabila laba sesungguhnya di bawah batas bawah yang telah ditetapkan maka manajer akan melakukan rekayasa manajerial agar laba bisa di atas batas bawah sehingga manajer tetap dapat mendapat bonus pada periode pelaporan tersebut. Sebaliknya, seandainya laba sesungguhnya di atas batas atas, manajer akan mengatur agar laba dapat dilaporkan dibawah batas atas, sementara selisih laba yang belum dilaporkan akan “disimpan” sebagai cadangan untuk periode-periode berikutnya.

Secara konseptual cadangan merupakan “laba yang ditarik kebelakang dari periode pengakuan sesungguhnya dan menggunakan pada saat dibutuhkan”. Sebagai contoh adalah cadangan kerugian piutang, penurunan nilai persediaan, akumulasi depresiasi aktiva tetap, akumulasi amortisasi aktiva tak berwujud, dan lain-lain. Hal ini dilakukan perusahaan dengan tujuan agar laba yang dilaporkan perusahaan pada periode berjalan tidak terlalu tinggi. Hingga pada saat apabila menginginkan labanya menjadi

lebih tinggi dari laba sesungguhnya maka perusahaan dapat menggunakan cadangan itu untuk mengatur laba sesuai dengan kepentingannya. Upaya semacam ini disebut dengan perataan laba (*income smoothing*) yang dilakukan agar laba perusahaan setiap periode tidak terlalu tinggi sekaligus tidak terlalu rendah, dibandingkan laba sesungguhnya yang dicapai perusahaan.

Upaya membuat cadangan ini sebenarnya tidak diijinkan dalam ruang lingkup prinsip akuntansi berterima umum, karena prinsip akuntansi mensyaratkan bahwa laba baru dapat diakui apabila ada kepastian laba tersebut dapat diperoleh dan direalisasi. Selain itu, upaya ini sebenarnya akan membuat laporan keuangan menjadi tidak mencerminkan kondisi fundamental perusahaan yang sesungguhnya. Hingga pemilik perusahaan sebagai pemakai laporan keuangan akan memperoleh informasi yang menyesatkan dan melakukan kekeliruan dalam menilai kinerja manajer perusahaan. Akibatnya, pemilik keliru dalam menentukan dan memberikan bonus untuk manajer. Manajer akan selalu menerima sejumlah bonus yang seharusnya tidak diterimanya. Hal ini mengakibatkan terjadi kekeliruan dalam mengalokasikan sumberdaya perusahaan kepada pihak yang seharusnya tidak menerimanya. Dalam jangka panjang hal ini dapat mengakibatkan perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan sebab mengeluarkan sumberdaya diluar kewajiban sesungguhnya.

Tabel 3.4
Manajemen Laba Untuk Mengoptimalkan Kompensasi Manajerial

Peneliti	Kesimpulan
Healy (1985)	Perusahaan mencapai sampai batas atas pemberian bonus lebih menyukai untuk menunda akrualnya agar selalu memperoleh bonus selama beberapa periode meskipun kinerja akan lebih rendah dibandingkan kinerja sebelumnya.
Dechow dan Sloan (1991)	Tahun terakhir di sebuah perusahaan seorang manajer akan mengurangi pengeluaran R&D, untuk menaikkan laba yang dilaporkannya.
Holthausen, Larcker, dan Sloan (1995)	Manajer perusahaan lebih menyukai untuk menunda akrual pada saat laba yang diperolehnya mencapai sampai batas atas pemberian bonus meskipun kinerja akan lebih rendah dibandingkan kinerja-kinerja sebelumnya.
Guidry, Leone, dan Rock (1998)	Manajer divisi untuk perusahaan multinasional lebih menyukai menunda pendapatan pada saat target laba untuk memperoleh bonus tidak tercapai atau pada saat target laba melebihi batas maksimal memperoleh laba.

Sumber: Healy dan Wahlen, 1998.

Selain dengan mempermainkan laba untuk mengoptimalkan bonus yang diterimanya maka manajer dapat menggunakan strategi pengunduran diri untuk memaksimalkan laba sebagai upaya untuk menaikkan bonus. Secara konseptual manajer yang mempunyai kinerja bagus akan mengikat pemilik untuk mempertahankan manajer bersangkutan sebagai pengelola perusahaannya. Semakin bagus kinerja yang dibuat manajer itu selama mengelola suatu perusahaan semakin terikat pemilik perusahaan untuk tetap mempertahankan manajer bersangkutan. Alasan inilah yang mendorong manajer untuk selalu mempunyai kinerja yang bagus dari periode ke periode berikutnya. Hal seperti ini sebenarnya tidak akan menjadi permasalahan seandainya kinerja yang dilaporkan manajer dalam laporan keuangan merupakan kinerja fundamental.

Permasalahan agensi muncul karena manajer bersikap oportunistik untuk mengelola kinerja yang dilaporkan agar selalu kelihatan lebih bagus daripada kinerja sesungguhnya. Manajer melakukan manajemen laba agar kinerja seakan-akan selalu meningkat dari periode ke periode. Hal inilah yang membuat pemilik keliru dalam menilai kinerja manajer. Pemilik juga keliru ketika membuat keputusan apakah manajer yang mengelola perusahaannya harus diganti atau dipertahankan. Bahkan dengan dasar yang keliru pemilik terpaksa harus mempertahankan manajer itu meski manajer bersangkutan sebenarnya mau mengundurkan diri. Akibatnya, sumberdaya perusahaan dialokasikan secara tidak tepat kepada pihak yang seharusnya tidak menerimanya. Atau dengan kata lain pemilik harus memberi bonus kepada manajer yang sebenarnya tidak berhak menerima bonus itu. Situasi seperti ini dalam jangka panjang akan mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang dapat membuat perusahaan bersangkutan kolaps bahkan bangkrut.

B.2. PELANGGARAN PERJANJIAN HUTANG

Selain permasalahan agensi di atas, permasalahan agensi juga bisa terjadi antara manajer dengan kreditur yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan. Secara konseptual manajer akan menandatangani kontrak hutang (*lending contract*) pada saat menyepakati hutang piutang antara perusahaan dan kreditur. Kontrak hutang ini dilakukan untuk menjamin bahwa manajer akan selalu melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi yang mengarah pada upaya untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan

tepat pada waktunya disertai dengan pembayaran sejumlah bunga pada saat-saat tertentu. Atas dasar inilah manajer hanya akan menggunakan dana pinjaman itu untuk aktivitas-aktivitas produktif yang dapat memberikan hasil optimal. Manajer tidak akan menggunakan dana pinjaman untuk menjalankan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Secara konseptual semakin tinggi nilai tambah yang dihasilkan manajer semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk mengembalikan dana pinjaman dan membayar sejumlah bunga pinjaman secara periodik. Sebaliknya semakin rendah nilai tambah yang dihasilkan manajer semakin rendah pula kemampuan perusahaan untuk mengembalikan dana pinjaman dan membayar sejumlah bunga pinjaman secara periodik. Hal ini yang mendorong kreditur untuk selalu memastikan bahwa manajer telah bekerja sesuai dengan prosedur untuk meningkatkan kemampuannya mengembalikan pinjaman dan membayar bunga. Kreditur secara periodik akan memantau seluruh aktivitas manajer dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan bersangkutan. Hingga kemungkinan terjadinya berbagai halangan yang dapat menghambat kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya itu dapat terdeteksi sejak awal.

Untuk itu manajer harus mau bertermu dengan kreditur setiap saat diperlukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Agar manajer selalu mentaati perjanjian itu maka dalam perjanjian itu juga diatur hukuman terhadap perusahaan apabila melanggarnya, misalnya pembatasan dividen dan tambahan hutang. Pelanggaran perjanjian hutang (*debt covenant violations*) membuktikan adanya manajemen laba dengan menaikkan laba dalam laporan keuangan tahunan perusahaan yang melanggar perjanjian tersebut. Perjanjian hutang terbukti mempunyai pengaruh terhadap pilihan akuntansi pada tahun pelaporan dan tahun terjadinya pelanggaran itu. Perusahaan yang dinyatakan melanggar perjanjian hutang secara signifikan akan menaikkan laba sehingga rasio *debt-to-equity* dan *interest coverage*, *working capital*, dan *shareholder's equity* pada level yang ditentukan.

Tabel 3.5
Manajemen Laba Untuk Melanggar Perjanjian Hutang

Peneliti	Kesimpulan
Healy dan Palepu (1990)	Perusahaan menyembunyikan perjanjian hutang dengan melakukan manajemen laba untuk merekayasa kinerja yang diperolehnya selama satu periode tertentu.
DeAngelo dan Skinner (1992)	Perusahaan menutupi pelanggaran perjanjian dividen dengan perubahan metode akuntansi, estimasi akuntansi, atau akrual untuk menghindari kewajiban deviden atau membuat restrukturisasi keputusan-keputusan menjadi lebih mahal.
DeAngelo dan Skinner (1992)	Perjanjian hutang terbukti mempunyai pengaruh terhadap pilihan standar akuntansi pada tahun pelaporan dan tahun terjadinya pelanggaran ini.
Sweeney (1994)	Perusahaan yang dinyatakan melanggar perjanjian hutang akan melakukan manajemen laba dengan pola menaikkan laba sehingga menaikkan rasio <i>debt-to-equity</i> dan <i>interest coverage</i> pada level yang ditentukan.

Sumber: Healy dan Wahlen, 1999.

C. MOTIVASI REGULASI

Sejalan dengan perkembangan bisnis perusahaan maka hubungan bisnis yang dijalin perusahaan akan semakin meluas, termasuk dengan pemerintah. Hubungan yang terjalin antara perusahaan dengan pemerintah ini juga merupakan pemicu terjadi permasalahan agensi antara kedua belah pihak ini. Secara konseptual dalam hubungan agensi ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dapat diterima oleh semua pihak. Permasalahan agensi akan muncul apabila ada pihak yang tidak mau menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Dalam konteks hubungan agensi antara perusahaan dan pemerintah ini maka perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah pajak yang ditentukan dengan menggunakan laba sebagai dasar perhitungannya. Sebaliknya pemerintah mempunyai hak untuk menerima pembayaran pajak perusahaan itu. Sedangkan hak yang akan diterima perusahaan berupa rasa aman dan pelayanan publik dalam menjalankan usahanya sebagai bagian dari kewajiban pemerintah memberi rasa aman dan pelayanan publik bagi seluruh publik.

Secara konseptual dengan menggunakan laba sebagai dasar perhitungan pajak ini akan membuat semakin besar laba yang diperoleh perusahaan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Sebaliknya semakin kecil laba yang diperoleh perusahaan semakin kecil pula pajak yang harus dibayarkan kepada

pemerintah. Artinya semakin besar laba perusahaan akan membuat semakin besar kewajiban yang harus ditanggung dan diselesaikan perusahaan sebaliknya semakin kecil laba perusahaan semakin kecil pula kewajiban yang harus ditanggung dan diselesaikan perusahaan. Inilah yang menjadi awal permasalahan agensi antara perusahaan dengan pemerintah. Manajer cenderung selalu berusaha untuk meminimalisir kewajiban-kewajibannya, termasuk kewajiban untuk membayar pajak. Bagi manajer semakin kecil pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah berarti semakin kecil kewajibannya.

Oleh sebab itu manajer akan berusaha agar laba perusahaan selalu kelihatan lebih rendah daripada laba yang sesungguhnya diperoleh. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir pajak atau nilai pajak yang harus dibayar perusahaan. Hal ini dapat dilakukan manajer karena kesuperiorannya dalam menguasai informasi perusahaan dibanding dengan pemerintah. Manajer mengetahui mana informasi yang harus diungkapkan dan mana informasi yang harus disembunyikan, ditunda pengungkapannya, maupun diubah untuk mengatur laba perusahaan. Manajer menjadi mempunyai kesempatan untuk mengatur laba perusahaan sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan dari periode ke periode dapat menjadi lebih rendah dibandingkan kewajiban pajak sesungguhnya. Setiap kesempatan akan selalu dimanfaatkan manajer untuk meminimalisir pajak, baik ketika harus membayar pajak tahunannya maupun ketika pemerintah mengganti peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ada berbagai cara yang dapat dilakukan manajer untuk mengatur labanya untuk menurunkan nilai pajak perusahaan. Sebagai contoh perusahaan melakukan pembelian persediaan pada akhir tahun untuk menurunkan pajaknya. Dalam kondisi perekonomian normal dimana harga barang cenderung naik maka perusahaan yang menggunakan asumsi aliran persediaan LIFO akan menghasilkan angka harga pokok penjualan yang tinggi. Secara konseptual semakin tinggi harga pokok penjualan akan membuat semakin rendah laba yang diperoleh perusahaan. Akibatnya, semakin rendah pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah. Selain itu perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan penentuan estimasi cadangan kerugian piutang maupun biaya amortisasi dan depresiasi aktiva. Secara konseptual semakin besar cadangan kerugian piutang berarti semakin besar pula biaya kerugian piutang yang harus ditanggung perusahaan. Besarnya biaya kerugian piutang ini akan mengakibatkan semakin kecil laba yang diperoleh perusahaan. Hal ini akan membuat pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah

menjadi semakin kecil. Demikian juga dengan biaya amortisasi aktiva tak berwujud dan depresiasi aktiva tetap.

Dorongan lain untuk menurunkan pajak adalah dengan memanfaatkan perubahan peraturan perundang-undang perpajakan. Suatu negara jamak mengganti peraturan perundang-undangan perpajakannya pada suatu saat, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan bisnis di negara itu. Perubahan peraturan perundang-undang ini biasanya terfokus pada aturan mengenai besar kecilnya batasan pajak yang akan dipungut oleh pemerintah. Selain itu peraturan perundang-undangan perpajakan ini biasanya tidak diperlakukan secara efektif pada tahun disahkan tetapi satu tahun setelah disahkan secara resmi. Hal ini digunakan untuk sosialisasi peraturan perundang-undang perpajakan yang baru agar publik mempunyai kesempatan untuk mengetahui dan mengenalnya. Namun jeda waktu antara pengesahan dan pemberlakuan secara efektif ini ternyata dimanfaatkan manajer perusahaan untuk meminimalisir kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

Saat ini banyak banyak studi empiris yang membuktikan bahwa perusahaan memanfaatkan perubahan peraturan perpajakan untuk meminimalkan pajak. Sebagai contoh adalah apabila perubahan peraturan pajak dipublikasikan pada September 1986 dan berlaku efektif per 1 Juli 1987 yang membuat tingkat pajak maksimum perusahaan berkurang dari 46% menjadi 34%. Penundaan laporan laba sebesar \$1 dari satu periode sebelum berlakunya peraturan itu secara efektif menjadi laba periode setelah perubahan peraturan aktif dapat menghemat pajak sebesar \$0,12. Penghematan pajak ini dapat juga diartikan sebagai tambahan laba sebesar 22% ($0,12/(1-0,46)$) yang diperoleh hanya dengan menunda pelaporan laba satu periode fiskal.

Tabel 3.6
Manajemen Laba Untuk Meminimalkan Pajak

Peneliti	Kesimpulan
Guther (1994)	Tidak menemukan bukti bahwa perusahaan melakukan manajemen laba penurunan laba untuk memaksimalkan penghematan pajak satu periode sebelum berlakunya <i>Tax Reform Act</i> (TRA).
Maydew (1997)	Membuktikan bahwa penghematan pajak menjadi insentif bagi manajer, khususnya bagi manajer yang mengalami <i>net operating loss</i> , untuk mempercepat pengakuan biaya dan menunda pengakuan pendapatan.
Setiawati (2001)	Tidak ada bukti bahwa perusahaan berusaha menurunkan laba untuk memperoleh penghematan pajak ketika ada

Hidayati dan Zulaikha (2003)	perubahan peraturan perpajakan. Perubahan undang-undang perpajakan yang mengubah lapisan penghasilan kena pajak tidak direspon oleh wajib pajak untuk melakukan manajemen laba untuk meminimumkan beban pajak penghasilan perusahaan.
------------------------------	--

Sumber: Setiawati, 2001.

Selain itu ada beberapa alasan lain mengapa manajer mempunyai motivasi regulasi (politik) untuk melakukan pelanggaran berbagai regulasi pemerintah. Sebagai contoh adalah perusahaan yang melakukan manajemen laba untuk melanggar terhadap regulasi *anti-trust* dan anti monopoli. Secara konseptual perusahaan yang melakukan pelanggaran semacam ini akan merekayasa labanya agar kelihatan lebih rendah dibandingkan laba sesungguhnya. Perusahaan juga akan melakukan aktivitas rekayasa manajerial untuk menurunkan laba agar dapat mempengaruhi keputusan pengadilan dalam menetapkan finalti terhadap perusahaan yang mengalami *damage award*. Apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini sebenarnya sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa manajemen laba akan dilakukan pada saat perusahaan menghadapi *intertemporal choice*, yaitu situasi yang memaksa perusahaan melakukan manajemen laba.

Ada alasan yang cukup mendasar mengapa perusahaan melanggar berbagai regulasi. Industri-industri tertentu di berbagai negara diatur dengan menggunakan regulasi yang dikeluarkan pemerintah, misalkan perbankan dan asuransi. Industri perbankan mensyaratkan bahwa sebuah bank harus memenuhi syarat kecukupan modal agar dapat dinyatakan sebagai perusahaan yang sehat. Demikian juga dengan industri asuransi yang harus memenuhi kondisi tertentu untuk memenuhi persyaratan minimal keuangan yang sehat. Secara konseptual persyaratan semacam ini mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Agar dapat diakui sebagai perusahaan yang sehat maka perusahaan itu akan merekayasa kinerja sesuai dengan batas minimal persyaratan dalam regulasi itu. Oleh sebab itu perusahaan akan melakukan aktivitas rekayasa manajerial ini untuk menaikkan kinerjanya apabila mempunyai kinerja dibawah yang dipersyaratkan. Tujuannya, agar terhindar dari finalti yang dikenakan untuk perusahaan-perusahaan yang dinyatakan tidak sehat atau tidak memenuhi syarat minimal sebagai perusahaan yang sehat.

Selain itu ada alasan lain mengapa sebuah perusahaan melakukan manajemen laba, yaitu melanggar regulasi *anti-trust* atau persaingan tidak sehat yang dikeluarkan pemerintah untuk menciptakan pasar yang sehat. Secara konseptual regulasi semacam ini membuat sebuah perusahaan menjadi tidak leluasa untuk mengembangkan usahanya. Ada batasan-batasan tertentu yang harus ditaati perusahaan agar perusahaan lain pun mempunyai kesempatan yang sama dengan perusahaan ini, misalkan batasan harga produk. Inilah yang membuat perusahaan yang merasa mampu menguasai pasar melakukan upaya-upaya tertentu agar dapat mensiasati regulasi itu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan itu adalah dengan mengatur informasi dalam laporan keuangannya. Informasi yang seharusnya mengungkapkan nilai fundamental perusahaan direkayasa sedemikian rupa sehingga nilai perusahaan yang diungkapkan dalam laporan keuangan itu menjadi lebih rendah dibanding nilai sesungguhnya. Upaya ini dilakukan agar perusahaan masuk dalam skala dan kategori usaha tertentu yang diijinkan untuk melakukan apa yang sebelumnya tidak boleh dilakukan jika skala dan kategorinya lain.

Upaya manajemen laba ini juga dilakukan perusahaan yang melakukan monopoli untuk memberi kesan bahwa praktik monopoli itu tidak memberi keuntungan. Untuk itu perusahaan mengatur agar laba yang diinformasikan dalam laporan keuangannya menjadi kelihatan lebih kecil dibanding laba yang sesungguhnya. Selain itu aktivitas rekayasa manajerial ini dilakukan sebuah perusahaan untuk mengatur laba pada saat perusahaan dijatuhi denda oleh pemerintah karena ketahuan melanggar regulasi *anti-trust* dan persaingan tidak sehat itu. Agar denda yang harus ditanggung bisa seminimal mungkin, maka perusahaan mengatur agar nilai perusahaan dan labanya menjadi lebih kecil dibandingkan nilai perusahaan dan laba sesungguhnya. Hal ini apabila denda dihitung atas dasar nilai perusahaan atau laba yang diperoleh perusahaan pada periode dilakukannya pelanggaran regulasi itu.

Tabel 3.7
Manajemen Laba Untuk Melanggar Regulasi Lainnya

Peneliti	Kesimpulan
Hall dan Stammerjohan (1990)	Perusahaan akan mengatur laba bersih dan laba kotornya sesuai <i>damage award</i> yang diperolehnya. Artinya manajer perusahaan mempunyai dorongan untuk melakukan manajemen laba pada saat <i>damage award</i> . Upaya manajemen laba ini dilakukan dengan pola penurunan laba apabila <i>damage award</i> semakin besar.

Petroni (1992)	Perusahaan melakukan manajemen laba untuk mensiasati regulasi tentang resiko perusahaan asuransi dengan menurunkan nilai cadangan kerugian klaim nasabah.
Collins, Shackelford, Wahlen (1995)	Bank yang tidak memenuhi regulasi batasan modal yang harus dimilikinya melakukan manajemen laba untuk mensiasati regulasi itu.
Na'im dan Hartono (1996)	Perusahaan yang melakukan praktik monopoli dan persekutuan harga ilegal akan melakukan manajemen laba untuk menurunkan laba yang diperolehnya untuk menciptakan kesan bahwa monopoli yang dilakukannya tidak menguntungkan. Selain itu manajemen laba dilakukan untuk mengurangi denda yang harus ditanggungnya seandainya monopoli itu diketahui pemerintah.

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2005.

BAB 4

PANDANGAN DAN IMPLIKASI

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah membaca bab ini pembaca diharapkan dapat memahami bahwa:

1. Ada perbedaan pandangan terhadap manajemen laba antara praktisi dan akademisi.
2. Pemahaman etis seseorang pandangannya terhadap manajemen laba.
3. Implikasi dari aktivitas manajemen laba yang dilakukan dunia usaha.

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah membaca bab ini pembaca diharapkan dapat memahami bahwa:

1. Para praktisi menilai manajemen laba sebagai kecurangan manajerial sementara akademisi menilai manajemen laba sebagai bukan kecurangan, tetapi sebagai dampak kebebasan manajerial dalam memilih dan menggunakan standar akuntansi.
 2. Manajemen mencerminkan pemahaman seseorang terhadap nilai etis dan tanggung jawab sosial.
 3. Manajemen laba mempunyai implikasi terhadap perekonomian, etika dan moral, dan standar akuntansi.
-

Ada perbedaan mendasar antara praktisi dan akademisi dalam memandang dan memahami manajemen laba. Secara umum para praktisi, yaitu investor, pemerintah, asosiasi profesi, dan pelaku ekonomi lainnya, menganggap manajemen laba sebagai kecurangan manajerial. Alasannya, aktivitas rekayasa manajerial ini dilakukan untuk menyesatkan dan merugikan pihak lain yang menggunakan laporan keuangan sebagai sumber informasi untuk mengetahui segala sesuatu tentang perusahaan. Apalagi secara empiris terbukti bahwa manajemen laba merupakan salah satu faktor yang menyebabkan hancurnya tatanan ekonomi, etika, dan moral suatu bangsa. Manajemen laba tidak hanya membuat perusahaan yang melakukannya mengalami kesulitan tetapi secara makro juga telah mengakibatkan kesulitan ekonomi semua pihak. Selain itu

manajemen laba telah mengakibatkan skandal keuangan internasional yang melibatkan dan membuat banyak pihak di berbagai negara mengalami kesulitan ekonomi.

Secara teoritis aktivitas rekayasa manajerial ini mempengaruhi besar kecilnya laba yang diinformasikan perusahaan dalam laporan keuangannya. Padahal laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi *stakeholder* untuk membuat keputusan ekonomi. Apabila informasi mengenai perusahaan dapat dipermainkan maka keputusan ekonomi yang dibuat *stakeholder* pun diragukan kebenarannya. Atau dengan kata lain, ketepatan keputusan *stakeholder* ditentukan oleh kebenaran informasi yang diterimanya, sehingga apabila dasar yang dipakai salah maka keputusan yang dibuatnya pun menjadi ikut salah. Maka sangat tidak mengherankan jika manajemen laba disebut sebagai biang keladi hancurnya tatanan ekonomi. Alasan inilah yang membuat mengapa manajemen laba sebagai permasalahan harus diselesaikan meski bukan hal yang mudah untuk dilakukan.

Sementara akademisi, termasuk para peneliti, menilai manajemen laba bukan sebagai kecurangan sebab aktivitas rekayasa manajerial ini pada dasarnya merupakan dampak dari spektrum prinsip akuntansi berterima umum yang luas. Secara konseptual prinsip akuntansi memang menyediakan beragam metode dan prosedur yang bebas dipilih dan dipergunakan suatu perusahaan sesuai dengan keinginannya. Ada lebih dari satu metode dan prosedur untuk satu komponen tertentu yang bisa dipergunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Selain itu perusahaan juga diperbolehkan untuk mengganti satu metode dan prosedur akuntansi yang selama ini telah dipergunakan dengan metode dan prosedur akuntansi yang lain. Bahkan prinsip akuntansi juga mengizinkan suatu perusahaan untuk menyajikan ulang (*restatement*) laporan keuangan beberapa periode lalu. Artinya, laporan keuangan yang pernah disajikan dapat ditarik kembali untuk diganti dengan laporan keuangan yang baru yang menggunakan metode dan prosedur akuntansi berbeda dengan yang dipakai sebelumnya.

Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa perbedaan pemahaman terhadap manajemen laba disebabkan perbedaan sudut pandang antara satu pihak dengan pihak yang lain. Meskipun fakta empiris menunjukkan manajemen laba telah membuat dipertanyakan dan diragukannya integritas dan kredibilitas dunia usaha dan akuntan serta kelayakan standar akuntansi. Namun demikian wacana untuk membuat standar

akuntansi menjadi dogmatis tidak pernah populer dikalangan praktisi maupun akademisi. Kedua pihak sepakat bahwa upaya untuk mendogmatisasi standar akuntansi bukan merupakan jalan keluar yang baik untuk menyelesaikan masalah manajemen laba. Alasannya, standar akuntansi merupakan sebagian dari metode dan prosedur akuntansi yang tercakup dalam prinsip akuntansi berterima umum. Padahal prinsip akuntansi merupakan sekumpulan metode dan prosedur akuntansi yang dipraktikkan dalam pengelolaan perusahaan. Artinya, beragamnya metode dan prosedur akuntansi merupakan hasil dari praktik sehari-hari sejumlah perusahaan di seluruh dunia.

Alasan itulah yang membuat mengapa sampai saat ini standar akuntansi tetap sekumpulan metode dan prosedur akuntansi untuk setiap komponen laporan keuangan. Upaya membuat satu metode dan prosedur untuk satu komponen tetap menjadi wacana yang hanya bisa didiskusikan. Apalagi pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perusahaan lain dan setiap industri mempunyai karakteristik yang berbeda dengan industri lain. Perbedaan karakteristik inilah yang mengakibatkan setiap perusahaan atau industri terpaksa menggunakan metode atau prosedur akuntansi yang berbeda dengan perusahaan atau industri lain. Sebagai contoh adalah metode dan prosedur akuntansi yang dipakai oleh industri manufaktur dengan perbankan (keuangan). Seharusnya setiap industri menggunakan metode dan prosedur akuntansi sesuai dengan karakteristiknya, namun pada kenyataannya setiap industri yang bebas memilih dan menggunakan metode dan standar akuntansi industri lain. Inilah sebabnya mengapa ada pihak yang menyebut manajemen laba sebagai fleksibilitas standar akuntansi.

A. PANDANGAN TERHADAP MANAJEMEN LABA

Ada perbedaan pandangan antara praktisi dengan akademisi terhadap manajemen laba. Secara konseptual perbedaan pandangan disebabkan perbedaan sudut pandang kedua pihak terhadap aktivitas rekayasa manajerial ini. Para praktisi menilai manajemen laba sebagai permasalahan yang harus segera diselesaikan sebab secara signifikan mempengaruhi laba perusahaan dan keputusan yang dibuat *stakeholder*. Apalagi jika aktivitas rekayasa manajerial ini dilakukan untuk menyesatkan dan merugikan pihak lain. Sementara para akademisi menilai manajemen laba bukan sebagai masalah yang berarti sebab aktivitas rekayasa manajerial tidak mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Alasannya, aktivitas rekayasa ini hanya merupakan dampak dari luasnya spektrum prinsip akuntansi berterima umum. Oleh sebab itu ada pandangan yang menyatakan bahwa upaya untuk mengeliminasi manajemen laba adalah dengan melakukan koreksi terhadap standar akuntansi yang diterima dan dipakai secara umum.

1. Manajemen Laba Sebagai Kecurangan

Perbedaan pandangan ini secara langsung mempengaruhi persepsi seseorang terhadap manajemen laba. Sebagian pihak mempunyai persepsi bahwa manajemen laba mencerminkan perilaku tidak etis seorang manajer untuk menipu pihak lain dengan menggunakan informasi-informasi dalam laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai sumber informasi bagi *stakeholder* untuk mengetahui segala sesuatu tentang perusahaan direkayasa sedemikian rupa sehingga pihak ini keliru dalam menilai perusahaan. Padahal penilaian ini secara signifikan akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemakai laporan keuangan. Maka bisa dikatakan bahwa semakin besar angka dan komponen yang direkayasa berarti semakin besar pula tingkat kesalahan yang dilakukan para pemakai laporan keuangan. Atau semakin tidak berkualitas informasi dalam laporan keuangan akan membuat semakin tidak tepat dan berkualitas pula keputusan yang dibuat *stakeholder*.

Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa tingkat ketepatan dan kualitas keputusan *stakeholder* sangat dipengaruhi oleh validitas dan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Untuk itu, agar dapat menjadi sumber informasi yang berkualitas, laporan keuangan harus disusun dengan memenuhi syarat kualitatif tertentu agar mampu menyajikan informasi yang validitasnya dapat dipercaya. Meski disisi lain standar akuntansi memang memberi kebebasan untuk memilih dan menggunakan metode dan prosedur akuntansi sesuai dengan kebutuhannya. Secara konseptual kebebasan inilah yang menjadi salah satu pemicu manajemen laba, yang sampai saat ini masih diperdebatkan sebagai kecurangan atau bukan. Beberapa pihak menyatakan aktivitas rekayasa manajerial ini dianggap kecurangan apabila perusahaan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

a. Mencatat penjualan sebelum dapat direalisasi

Aktivitas rekayasa ini dilakukan dengan mencatat penjualan sebelum dapat direalisasi. Aktivitas semacam ini bertentangan dengan prinsip konservatisme akuntansi yang menyatakan bahwa suatu transaksi atau peristiwa dapat diakui dan dicatat sebagai pendapatan apabila perusahaan dapat memastikan bahwa pendapatan itu kemungkinan besar dapat terealisasi dimasa depan. Sementara transaksi atau peristiwa yang belum dapat dipastikan apakah akan dapat terealisasi dimasa depan tidak diijinkan untuk diakui dan dicatat dalam laporan keuangan yang disusunnya.

b. Mencatat penjualan fiktif

Aktivitas rekayasa ini dilakukan dengan mencatat penjualan fiktif. Artinya, perusahaan memalsukan transaksi penjualan yang sebenarnya belum atau tidak pernah dilakukannya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan dengan mengakui dan mencatat barang konsinyasi atau barang yang baru dikirim kepada pembeli sebagai barang yang telah terjual. Lebih parah lagi adalah dengan mengakui dan mencatat transaksi-transaksi yang sebenarnya tidak pernah ada atau tidak pernah dilakukan sama sekali.

c. Mengundurkan tanggal bukti pembelian

Aktivitas rekayasa ini dilakukan dengan mengundurkan tanggal bukti pembelian. Hal ini dilakukan untuk mengatur tingkat laba sesuai yang diinginkan manajer perusahaan. Apabila pada suatu periode kinerja perusahaan lebih rendah dari kinerja yang ditargetkan maka perusahaan akan menunda pengakuan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembelian itu. Hal ini dilakukan agar kinerja perusahaan kelihatan bagus dari periode ke periode meskipun sebenarnya dalam periode tertentu perusahaan mengeluarkan biaya cukup tinggi.

d. Mencatat persediaan fiktif

Aktivitas rekayasa ini dilakukan dengan mencatat persediaan fiktif. Hal ini dilakukan agar nilai aktiva perusahaan menjadi lebih besar daripada nilai sesungguhnya. Upaya ini dilakukan agar perusahaan kelihatan mempunyai aktiva lebih besar dibandingkan aktiva yang sesungguhnya dimiliki, sehingga akan meningkatkan kinerja solvabilitas perusahaan bersangkutan.

2. Manajemen Laba Bukan Kecurangan

Sementara pihak lain mempunyai persepsi bahwa manajemen laba bukanlah kecurangan yang dilakukan manajer perusahaan. Apalagi jika aktivitas ini dilakukan manajer dalam kerangka prinsip akuntansi berterima umum. Pendapatan ini sesuai dengan kenyataan yang menunjukkan bahwa manajemen laba berada di daerah abu-abu (*grey area*) antara aktivitas yang diijinkan prinsip akuntansi dan kecurangan. Apalagi pada dasarnya manajemen laba sulit untuk diobservasi oleh pemakai laporan keuangan. Prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa manajer harus mengungkapkan secara lengkap semua informasi dalam pelaporan keuangan juga tidak mampu membuat pemakai laporan keuangan mengetahui apakah perusahaan itu melakukan manajemen laba atau tidak.

Secara konseptual seharusnya perusahaan mengungkapkan laba yang sesungguhnya diperoleh dari aktivitas-aktivitasnya, namun demikian akuntansi memberi kesempatan perusahaan untuk secara konservatisme dan agresivisme dalam mengakui dan mencatat suatu transaksi atau peristiwa yang dilakukan dan dialaminya. Akuntansi memang tidak mengharuskan suatu perusahaan untuk selalu mengakui dan mencatat suatu transaksi atau peristiwa sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya. Atau dengan kata lain, perusahaan tidak selalu harus menginformasikan laba yang sesungguhnya diperoleh selama satu periode tertentu dalam laporan keuangannya.

a. Akuntansi konservatif

Akuntansi konservatif adalah proses akuntansi untuk mengakui dan mencatat suatu transaksi atau peristiwa secara berhati-hati sehingga perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dimasa depan. Untuk itu perusahaan akan menghemat atau membuat cadangan dengan mengakui dan mencatat suatu transaksi atau peristiwa yang terjadi saat ini untuk dipakai dimasa depan pada saat diperlukan. Sebagai contoh adalah mempercepat pengakuan provisi dan cadangan, melebihi-lebihan nilai yang diperoleh dalam proses R&D dalam pendapatan penjualan, dan membesar-besarkan biaya restrukturisasi dan penghapusan aktiva.

b. Akuntansi agresif

Sementara akuntansi agresif adalah proses akuntansi untuk mengakui dan mencatat suatu transaksi atau peristiwa secara eksploratif. Sebagai contoh adalah

mengecilkan catatan provisi piutang tak tertagih dan menarik kebawah provisi atau cadangan. Secara konseptual kedua model akuntansi dapat membuat informasi laba dalam laporan keuangan menjadi lebih kecil atau lebih besar daripada laba sesungguhnya. Alasan inilah yang menjadi dasar dari pendapat yang menyatakan bahwa manajemen laba bukanlah tindakan rekayasa yang mengarah pada kecurangan.

Tabel 4.1
Perbedaan Manajemen Laba dan Kecurangan

	Metode Akuntansi	Metode Arus Kas
	Sesuai PABU*	
Akuntansi "Konservatif"	Mempercepat pengakuan provisi dan cadangan Melebih-lebihkan nilai yang diperoleh dalam proses R&D dalam pendapatan penjualan	Menunda penjualan Mempercepat pengeluaran R&D dan iklan
Laba "Netral"	Membesar-besarkan biaya restrukturisasi dan penghapusan aktiva Laba yang dihasilkan dari proses akuntansi yang sesungguhnya	
Akuntansi "Agresif"	Mengecilkan catatan provisi piutang tak tertagih Menarik kebawah provisi atau cadangan Melanggar PABU	Menunda pengeluaran R&D dan iklan Mempercepat penjualan
Akuntansi "Kecurangan"	Mencatat penjualan sebelum dapat direalisasi Mencatat penjualan fiktif Memundurkan tanggal bukti penjualan Membesar-besarkan catatan persediaan dengan mencatat persediaan fiktif	

Sumber: Dechow & Skinner, 2000.

Keterangan: * : Prinsip akuntansi berterima umum.

Meskipun demikian sebenarnya ada benang merah antara kedua pendapat itu, yaitu adanya kesepakatan bahwa manajemen laba merupakan upaya manajerial untuk mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan. Upaya ini dilakukan sesuai dengan keinginan manajer sehingga pola rekayasa itu bisa menaikkan laba,

perataan laba, maupun penurunan laba. Hal ini dilakukan dengan memperbesar atau mengecilkan pendapatan dan biaya periode berjalan. Selain itu kedua pendapat ini sebenarnya juga sepakat bahwa ada pihak yang dirugikan akibat manajemen laba. Perbedaannya, pendapat yang satu menyatakan upaya manajerial itu dilakukan dengan melanggar prinsip akuntansi sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa manajemen sebenarnya merupakan cermin dari fleksibilitas standar akuntansi. Oleh sebab itu ada pihak yang mengatakan bahwa upaya untuk mengeliminasi manajemen laba merupakan upaya untuk mengoreksi standar akuntansi yang berlaku.

B. PEMAHAMAN ETIS TERHADAP MANAJEMEN LABA

Ada sisi positif sejalan dengan perkembangan penelitian-penelitian akuntansi selama beberapa dekade terakhir ini. Apabila pada awalnya penelitian akuntansi hanya terfokus pada angka-angka dalam laporan keuangan, pada saat ini penelitian akuntansi mulai membahas pemahaman etika dan tanggung jawab sosial yang mendasari seseorang ketika mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan. Alasannya, ada perbedaan pemahaman etis dan tanggung jawab sosial antara satu orang dengan orang lain dalam memahami suatu peristiwa tertentu. Perbedaan ini membuat apa yang dihasilkan antara satu orang dengan orang lain berbeda meski kedua orang ini melakukan hal yang sama. Alasan inilah yang menjelaskan mengapa laporan keuangan disebut sebagai cermin perilaku etis dan tanggung jawab sosial orang yang menyusun informasi itu.

Oleh sebab itu ada pihak yang menyatakan bahwa angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja perusahaan namun juga dipengaruhi oleh pemahaman etis dan tanggung jawab sosial seseorang terhadap kepentingan publik. Artinya, laporan keuangan tidak lagi hanya mencerminkan kondisi dan kinerja suatu perusahaan yang sesungguhnya namun juga mencerminkan sikap etis dan tanggung jawab sosial pribadi orang yang menyusun informasi itu. Alasan ini yang mendasarinya mengapa saat ini semakin banyak penelitian-penelitian empiris yang mencoba mengetahui dan mengurai sikap etis dan tanggung jawab sosial seseorang ketika membuat laporan keuangan. Untuk itulah selama beberapa tahun terakhir dikembangkan berbagai macam instrumen untuk mengidentifikasi pemahaman etis dan

tanggung jawab sosial seseorang. Selain itu juga dikembangkan instrumen untuk mengidentifikasi pemahaman seseorang terhadap aktivitas manajemen laba.

Tabel 4.2
Pemahaman Etis dan Tanggung Jawab Sosial

Peneliti	Kesimpulan
Vitell <i>et al.</i> (2000)	Penelitian ini mencatat bahwa perilaku etis manajer puncak (pembuat keputusan) sangat tergantung kepada situasi yang terjadi pada saat itu.
Davis <i>et al.</i> (2001)	Penelitian ini mencatat adanya perbedaan individual ideologi etis yang dipercaya sebagai kunci utama pembuatan keputusan etis. Penelitian tersebut membedakan ideologi etis dalam dimensi, yaitu: relativisme dan idealisme. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan positif antara idealisme dan keputusan moral, sebaliknya dengan relativisme.
Deshpande <i>et al.</i> (2000)	Penelitian ini menyimpulkan tidak ada perbedaan persepsi etis antara pria dan wanita yang menjadi respondennya.
Bampton & Cowton (2002)	Penelitian ini menemukan bukti hanya sedikit dosen yang menyisipkan etika ketika memberikan kuliah di kelas dan memberikan alasan mengapa mereka membahas masalah etika. Sebagian sampel merasa yakin bahwa etika sangat penting untuk membangun sikap dan perilaku mahasiswa.

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2005.

Ada hubungan sebab akibat yang dikembangkan untuk menjelaskan mengapa pemahaman etika dan tanggung jawab sosial seseorang dapat mempengaruhi pemahaman orang itu terhadap manajemen laba. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa etika yang dipegang dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan manajemen laba. Alasannya, pemahaman seseorang terhadap etika mempengaruhi pandangannya terhadap manajemen laba. Oleh sebab itu semakin positif pemahaman etis dan tanggung jawab sosial seorang terhadap lingkungannya semakin tinggi pula pemahamannya bahwa manajemen laba merupakan aktivitas yang sebaiknya tidak dilakukan, apalagi untuk membohongi *stakeholder* yang membutuhkan informasi-informasi yang disajikannya. Sebaliknya semakin negatif pemahaman etis dan tanggung jawab sosial seorang terhadap lingkungan maka semakin rendah pula pemahamannya bahwa manajemen laba merupakan aktivitas yang sebaiknya tidak dilakukan.

Secara konseptual apa yang dijelaskan di atas memang dapat diterima meski kenyataannya apa yang terjadi sangat berbeda dengan konsep itu. Seorang manajer yang melakukan manajemen laba tidak selalu disebabkan nilai-nilai etika yang dipegangnya rendah. Selain itu seorang manajer yang melakukan aktivitas rekayasa manajerial tidak selalu bisa dihubungkan dengan rendahnya tanggung jawab sosialnya. Manajemen laba bisa terjadi disebabkan adanya tekanan keuangan yang ditanggung seorang manajer meskipun manajer itu memegang teguh nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosialnya. Bahkan sebuah hasil penelitian menyatakan bahwa 95% aktivitas rekayasa ini disebabkan tekanan keuangan yang dialami seseorang. Hal ini tentu menarik dibahas mengingat tekanan finansial sebenarnya fenomena yang tidak hanya dialami seorang manajer tetapi oleh seluruh manusia di dunia ini.

Hal ini sejalan dengan perspektif manajemen laba yang tidak lagi hanya terfokus pada penelitian akuntansi angka-angka yang ada dalam laporan keuangan saja (perspektif informasi), namun juga mencoba mengurai motivasi apa yang mendasari seseorang ketika menyusun laporan keuangan (perspektif oportunistik). Untuk ini, penelitian akuntansi tidak hanya menggunakan dasar informasi dalam laporan keuangan, namun juga menggunakan informasi lain dan data-data primer untuk melakukan analisis empirisnya. Hingga kesimpulan yang dihasilkannya lebih komprehensif, valid, dan *robust*. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa penelitian dan analisis empiris terhadap manajemen laba sebenarnya merupakan upaya untuk mengetahui dan menganalisis berbagai motivasi mendasari dan mendorong seseorang ketika mencatat transaksi dan peristiwa bisnis, selain ingin menyediakan informasi bagi pihak lain. Untuk beberapa peneliti telah mencoba mengembangkan kuisioner sebagai alat untuk menguji manajemen laba dari sudut pandang oportunistik ini.

Penelitian-penelitian semacam ini tidak hanya menggunakan laporan keuangan sebagai basis telaah dan analisis namun juga data empiris mengenai perilaku, motivasi, persepsi, dan pemahaman etis seseorang dalam proses membuat laporan keuangan itu. Hal ini sejalan dengan perkembangan perspektif manajemen laba yang tidak lagi hanya dalam konteks informasi namun juga dalam perspektif perilaku oportunistik. Artinya, penelitian-penelitian itu tidak hanya terfokus pada upaya untuk mendeteksi keberadaan dan konsekuensi manajemen laba, tetapi meluas menjadi penelitian untuk mengetahui mengapa seorang manajer melakukan rekayasa itu. Bahkan pada upaya untuk

mengidentifikasi pandangan, pemahaman, dan motivasi apa yang mendorong seseorang untuk melakukan manajemen laba. Alasan inilah yang mendasari mengapa penelitian-penelitian ini tidak hanya menggunakan laporan keuangan perusahaan tetapi menggunakan kuisioner sebagai basis pengumpulan data.

Tabel 4.3
Pemahaman Etis Mempengaruhi Manajemen Laba

Peneliti	Kesimpulan
Elias (2002)	Ada perbedaan etika dan tanggung jawab sosial dan filosofi moral individu terhadap manajemen laba. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan positif antara tanggung jawab sosial, idealisme dan persepsi etis terhadap manajemen laba dan hubungan negatif antara realitivisme dan persepsi etis terhadap manajemen laba.
Fisher & Rosenzweig (1995)	Sikap mahasiswa dan praktisi berkaitan dengan akseptabilitas etis manajemen laba menyimpulkan bahwa mahasiswa dan praktisi mempunyai beberapa sensitivitas yang sama untuk praktik manajemen laba.
George <i>et al.</i> (1999)	Ada perbedaan perbedaan persepsi etis terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan-perusahaan di negara Rusia dan Amerika.
Kaplan (2001)	Penelitian eksperimental (<i>experimental study</i>) untuk menguji sikap etis mahasiswa terhadap manajemen laba menyimpulkan sikap etis mahassiswa sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang makna manajemen laba.

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2005.

Ada berbagai fakta empiris yang menunjukkan bahwa perilaku etis merupakan faktor utama yang mempengaruhi seorang manajer untuk melakukan aktivitas rekayasa manajerial ini. Demikian juga penelitian yang menguji persepsi etika seseorang juga mempunyai hubungan positif dengan persepsi manajemen laba yang dipahami orang itu. Sebagai contoh adalah penelitian yang menguji menguji sikap mahasiswa dan praktisi berkaitan dengan akseptabilitas etis rekayasa keuangan menyimpulkan bahwa mahasiswa dan praktisi mempunyai beberapa sensitivitas yang sama untuk praktik rekayasa manajerial ini. Sementara penelitian yang lain menguji etika praktik manajemen laba para praktisi, akademisi, dan mahasiswa akuntansi. Penelitian ini membedakan antara etika dan tanggung jawab sosial dan filosofi moral individu terhadap praktik rekayasa manajerial ini. Hasilnya, adanya hubungan positif antara

tanggung jawab sosial, idealisme dan persepsi etis terhadap manajemen laba dan hubungan negatif antara realitivisme dan persepsi etis terhadap aktivitas rekayasa manajerial itu.

Sebuah penelitian eksperimental (*experimental study*) untuk menguji sikap etis mahasiswa terhadap rekayasa keuangan juga menyimpulkan sikap etis mahasiswa sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang makna aktivitas rekayasa manajerial itu. Selain itu perbedaan pemahaman terhadap manajemen laba juga bisa dipengaruhi oleh perbedaan individual ideologi etis yang dipercaya sebagai kunci utama pembuatan keputusan etis. Sebuah penelitian yang membedakan ideologi etis dalam dimensi, yaitu: relativisme dan idealisme, membuktikan adanya hubungan positif antara idealisme dan keputusan moral, sebaliknya dengan relativisme. Alasan-alasan ini yang menjelaskan mengapa pentingnya etika perlu diberikan kepada mahasiswa pada saat menemupuh studinya. Meski sampai saat ini hanya sedikit dosen yang menyisipkan etika ketika memberikan kuliah di kelas dan memberikan alasan mengapa mereka membahas masalah etika ini. Beberapa dari dosen-dosen bahkan yakin dan percaya bahwa etika sangat penting diberikan kepada mahasiswa untuk membangun sikap dan perilaku mahasiswa, karena secara signifikan memang ditemukan bukti adanya hubungan positif antara sikap dan perilaku mahasiswa dengan materi yang diterimanya ketika belajar di perguruan tinggi.

Fenomena ini semakin menarik untuk dibahas karena fakta empiris juga menunjukkan ada perbedaan pemahaman etika, tanggung jawab sosial, dan manajemen laba yang disebabkan perbedaan geografis. Sebuah penelitian yang menggunakan responden manajer dari negara yang berbeda, yaitu Rusia dan Amerika, membuktikan adanya perbedaan persepsi etis terhadap praktik rekayasa keuangan yang dilakukan perusahaan-perusahaan di negara-negara itu. Secara konseptual perilaku etis manajer puncak atau pembuat keputusan memang dipengaruhi oleh situasi yang terjadi pada saat itu. Atau dengan kata lain manajer melakukan rekayasa keuangan sangat tergantung pada perilaku etis manajer pada saat menghadapi situasi tertentu. Inilah yang bisa menjelaskan mengapa ada perbedaan persepsi etis terhadap manajemen laba antara manajer di negara-negara yang berbeda. Setiap negara mempunyai situasi, peraturan, serta kehidupan bisnis dan politik yang berbeda. Perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan adanya perbedaan persepsi etis itu. Namun perbedaan persepsi etis

terhadap manajemen laba ini tidak dipengaruhi oleh perbedaan gender. Artinya tidak ada perbedaan persepsi etis antara pria dan wanita.

MODEL KUISONER UNTUK PENELITIAN PERSEPSI ETIS, TANGGUNG JAWAB SOSIAL, DAN MANAJEMEN LABA

A. Kuisoner Persepsi Pentingnya Etika Dan Tanggung Jawab Sosial

(Dikembangkan Oleh Forsyth, 1980).

1. Etika dan tanggung jawab sosial merupakan sesuatu yang paling penting untuk dilakukan oleh perguruan tinggi.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sangat tidak setuju				Sangat setuju

2. Ketika kualitas output menjadi esensial bagi sebuah keberhasilan, etika dan tanggung jawab sosial merupakan sesuatu yang tidak penting.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sangat tidak setuju				Sangat setuju

3. Komunikasi lebih penting bagi keefektifan organisasi daripada hanya berkonsentrasi dengan etika dan tanggung jawab sosial
4. Perencanaan dan penetapan tujuan seharusnya masuk dalam pembicaraan etika dan tanggung jawab sosial.
5. Perhatian paling penting untuk suatu organisasi adalah mencari keuntungan, walaupun harus melanggar peraturan.
6. Etika dan tanggung jawab sosial organisasi sangat esensial bagi keberhasilan jangka panjang.
7. Keefektifan suatu organisasi dapat ditentukan dengan meningkatkan etika dan tanggung jawab sosial.
8. Untuk memikirkan kembali persaingan dalam lingkungan global, organisasi harus mengabaikan etika dan tanggung jawab sosial.
9. Tanggung jawab sosial adalah kompatibel.
10. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial merupakan hal yang kritis bagi survive-nya organisasi
11. Prioritas pertama suatu organisasi adalah memprioritaskan karyawannya
12. Organisasi harus mempunyai tanggung jawab sosial, selain mencari keuntungan.
13. Pada saat kelangsungan hidup organisasi dipertaruhkan, maka etika dan tanggung jawab sosial diabaikan.
14. Efisiensi lebih penting bagi organisasi daripada memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial.
15. Organisasi yang mempunyai etika bagus adalah organisasi yang baik/*good organization*.
16. Jika *stakeholder* tidak puas, tidak akan ada sesuatu yang terjadi.

B. Kuisioner Persepsi Ideologi Etika Dan Tanggung Jawab Sosial

(Dikembangkan Forsyth, 1980)

1. Seseorang harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak merugikan orang lain termasuk masyarakat kecil.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sangat tidak setuju				Sangat setuju

2. Merugikan orang lain seharusnya tidak pernah ditoleransi, sekecil apapun kerugian tersebut.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sangat tidak setuju				Sangat setuju

3. Timbulnya potensi kerugian bagi orang lain selalu salah, walaupun mendatangkan keuntungan pribadi.
4. Seseorang seharusnya tidak pernah secara psikologi atau secara fisik merugikan orang lain.
5. Seseorang tidak boleh melakukan tindakan yang dapat mengancam martabat dan keselamatan orang lain.
6. Jika suatu tindakan dapat merugikan seseorang yang tidak bersalah, maka tindakan tersebut tidak boleh dilakukan.
7. memutuskan apakah melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan dengan menyeimbangkan konsekuensi positif dan konsekuensi negatif dari tindakan tersebut, adalah tidak bermoral.
8. Menghargai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan perhatian yang paling penting dalam kemasyarakatan.
9. Mengorbankan kesejahteraan orang lain adalah sesuatu yang tidak perlu dilakukan.
10. Tindakan yang bermoral adalah tindakan yang sempurna.
11. Tidak ada prinsip etika yang sangat penting yang harus dimasukkan dalam semua kode etik.
12. Sesuatu yang dianggap etis bervariasi dari situasi yang satu dengan situasi yang lain dan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.
13. Standar moral harus dilihat sebagai sesuatu yang individualistik, yaitu apa yang dianggap bermoral bagi seseorang, mungkin tidak dianggap bermoral bagi orang lain.
14. Berbagai jenis moral tidak dapat dianggap sebagai kebenaran .
15. Pertanyaan mengenai apa yang dianggap etis bagi setiap orang tidak pernah dapat dipecahkan sepanjang apa yang dianggap bermoral atau tidak bermoral tergantung pada perasaan individual.
16. Standar moral akan memudahkan aturan seseorang, yang mengindikasikan bagaimana seseorang harus berperilaku, dan tidak diterapkan dalam pembuatan judgment atas orang lain.
17. Rumusan tentang etika dalam hubungan interpersonal sangat kompleks karena setiap individu diperbolehkan untuk memformulasikan kode etik individual.
18. Kode etik yang disusun secara kuat dapat mengarahkan menuju pada hubungan kemanusiaan yang lebih baik

19. Apakah kebohongan/kepalsuan dianggap bermoral atau tidak bermoral tergantung pada keadaan di sekitar tindakan tersebut.

C. Kuisisioner Tentang Persepsi Terhadap Manajemen Laba

(Dikembangkan oleh Merchant, 1989 Dan Fischer dan Rosenzweig, 1995)

Dalam mengisi kuisisioner ini Anda adalah seorang supervisor dari manajer divisi. Anda akan menilai tindakan manajer etis atau tidak dengan skala sebagai berikut:

- 1 = Tindakan manajer merupakan praktik yang etis
- 2 = Tindakan manajer dapat dipertanyakan
(Saya diamkan saja tetapi tindakan itu membuat saya gelisah)
- 3 = Tindakan manajer merupakan pelanggaran kecil
(Manajer harus diperingatkan untuk tidak melakukan praktik-praktik itu lagi)
- 4 = Tindakan manajer merupakan pelanggaran serius
(Manajer harus ditegur keras)
- 5 = Tindakan manajer sangat tidak etis
(Manajer harus dikeluarkan)

Sebagai seorang supervisor dari seorang manajer divisi berilah penilaian Anda mengenai dapat diterima atau tidaknya tindakan-tindakan manajer dalam mempengaruhi laba berikut ini:

1. Gedung kantor divisi telah dijadwalkan akan dicat ulang tahun depan. Namun karena laba tahun ini telah melewati target maka manajer memutuskan untuk mencat gedung bersangkutan pada tahun ini. Tindakan manajer divisi
- (1) (2) (3) (4) (5)

Informasi untuk pertanyaan No.2 dan 3:

Manajer memerintahkan karyawan divisi untuk menunda semua *discretionary expenditures* (misalnya pengeluaran untuk perjalanan, iklan, sewa, pemeliharaan, dan lain-lain) menjadi pengeluaran periode berikutnya. Dengan demikian divisi dapat mencapai target laba yang telah dianggarkan.

2. Jika pengeluaran-pengeluaran itu dapat ditunda dari bulan Februari dan Maret sampai bulan April agar supaya target laba kuartal pertama dapat dicapai, maka tindakan manajer divisi
- (1) (2) (3) (4) (5)
4. Apabila pengeluaran-pengeluaran itu ditunda dari bulan November dan Desember sampai bulan Januari tahun berikutnya agar supaya target laba tahunan dapat tercapai, maka tindakan manajer divisi
5. Untuk mencapai target laba tahun ini maka manajer memutuskan untuk memberikan syarat penjualan yang sangat longgar kepada konsumen (misalnya: pelanggan yang membeli pada kuartal keempat diberi waktu kredit 120 hari dari biasanya 60 hari). Kebijakan ini diambil untuk menarik konsumen melakukan pembelian lebih cepat (pada tahun ini). Tindakan manajer divisi
6. Untuk mencapai target laba tahun ini maka manajer memerintahkan bagian pabrik untuk kerja lembur pada bulan Desember sehingga segala sesuatu yang mungkin dapat dikirimkan pada akhir tahun. Tindakan manajer divisi

7. Untuk mencapai target laba tahun ini maka manajer menjual aktiva yang berlebihan dan mendapatkan keuntungan dan penjualan aktiva itu. Tindakan manajer divisi
 8. Pada tanggal 15 Desember seorang staf administrasi divisi itu telah memesan perlengkapan kantor dan telah dikirim pada tanggal 29 Desember. Pesanan ini merupakan suatu kesalahan karena manajer divisi telah memerintahkan untuk tidak melakukan pengeluaran-pengeluaran *discretionary* pada sisa tahun fiskal ini, disamping itu perlengkapan bersangkutan belum terlalu dibutuhkan.
 9. Setelah mempelajari apa yang terjadi maka manajer memerintahkan bagian akuntansi untuk tidak mencatat pembelian itu sampai dengan bulan Februari. Tindakan ini dilakukan untuk mengkoreksi kesalahan yang terjadi. Tindakan manajer divisi
 10. Menyadari bahwa divisi akan dapat melampaui target laba tahun ini maka manajer memerintahkan divisi pengawasan untuk membayar dimuka beberapa biaya untuk pameran dagang yang akan diadakan bulan Maret tahun depan dan mengakuinya sebagai beban tahun ini. Tindakan manajer divisi
 11. Menyadari bahwa divisi akan dapat melampaui target laba tahun ini maka manajer divisi memerintahkan stafnya untuk mencatat persediaan yang disebabkan karena keusangan (mengurangi nilai aktiva dan mencatat kerugian dalam laporan rugi laba) walaupun manajer tahu bahwa dimasa depan barang itu akan dapat dijual mendekati harga pasar yang berlaku. Tindakan manajer divisi
 12. Tahun berikutnya pelanggan membeli persediaan yang telah dihapuskan. Manajer membalik penghapusan persediaan untuk dapat melanjutkan proyek pengembangan yang tertunda karena keterbatasan anggaran. Tindakan manajer divisi
 13. Sama dengan No.10 tetapi motivasi manajer adalah untuk mencapai target laba. Tindakan manajer divisi
 14. Pada bulan November tahun ini divisi sedang berupaya keras akan mencapai target laba yang dianggarkan. Perusahaan mengundang konsultan yang telah melaksanakan beberapa pekerjaan untuk divisi dan memintanya untuk tidak mengirimkan tagihan sampai dengan tahun berikutnya. Konsultan itu setuju. Pekerjaan yang telah dilakukan oleh konsultan dan belum ditagih mempunyai nilai yang material. Tindakan manajer divisi
 15. Dalam upaya memenuhi target laba maka manajer memerintahkan bagian akuntansi untuk mengurangi besarnya cadangan penghapusan piutang tahun berjalan serta memperpanjang umur ekonomis aktiva tetap. Tindakan manajer divisi
-

C. IMPLIKASI MANAJEMEN LABA

Ada yang patut dipertanyakan mengapa manajemen laba banyak dipraktikkan oleh dunia usaha di berbagai negara. Pertanyaan ini layak diajukan mengingat implikasi aktivitas rekayasa manajerial ini tidak hanya menghancurkan tatanan ekonomi namun

juga tatanan etika dan moral. Apalagi hal ini juga telah membuat membuat publik mempertanyakan integritas para pengelola perusahaan, pemerintah, pembuat regulasi, asosiasi profesi, dan akuntan publik, dan lain-lain. Selain itu publik juga mempertanyakan kelayakan berbagai regulasi yang selama ini dipakai untuk mengatur dunia usaha, termasuk standar akuntansi. Alasannya, mengapa standar akuntansi sedemikian mudah diselewengkan untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan manajerial. Laporan keuangan sebuah perusahaan yang seharusnya disusun sesuai dengan standar akuntansi justru dimanipulasi dengan memanfaatkan berbagai metode dan prosedur yang tercakup dalam standar itu sendiri.

Secara konseptual memang sangat mudah untuk merekayasa informasi-informasi dalam laporan keuangan. Apalagi pada dasarnya laporan keuangan hanya merupakan pencatatan yang mudah untuk diubah, dipalsukan, disembunyikan, atau ditunda waktu pengungkapan informasi-informasinya. Hingga informasi apa yang disajikan dalam laporan keuangan sangat tergantung pada pihak-pihak tertentu. Pihak ini tidak akan mengungkapkan suatu informasi jika merasa tidak akan memperoleh manfaat apapun. Sebaliknya, pihak ini akan mengubah, memalsukan, menyembunyikan, atau menunda suatu informasi jika merasa ada manfaat yang akan diperolehnya dari upaya ini. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan sangat tergantung pada motivasi dan perilaku etis pihak yang membuat informasi ini.

Meski sekedar masalah pencatatan namun informasi-informasi dalam laporan keuangan bisa mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh *stakeholder* perusahaan. Hal ini disebabkan laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi utama bagi *stakeholder*, khususnya untuk *stakeholder* yang tidak mempunyai sumber dan akses yang memadai untuk memperoleh informasi lain mengenai perusahaan. Inilah yang menyebabkan mengapa manajer perusahaan mudah untuk mempermainkan informasi-informasi dalam laporan keuangan. Apalagi untuk melakukan hal ini seorang manajer tidak perlu harus melanggar peraturan apapun. Standar akuntansi seolah-olah memfasilitasi aktivitas rekayasa manajerial ini. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa kualitas keputusan yang dibuat *stakeholder* tergantung pada kualitas informasi yang diungkapkan perusahaan.

Manajemen laba sebenarnya merupakan permasalahan agensi yang muncul dari penyerahan pengelolaan perusahaan. Hal ini dilakukan sejalan dengan semakin

membesar, melebar dan meluasnya hubungan bisnis yang dijalin perusahaan. Perkembangan inilah yang membuat perlunya keterlibatan orang luar yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan secara penuh. Pemilik tidak lagi harus mengoperasikan perusahaan secara langsung, namun cukup menyerahkan hak dan kewenangan pengelolaan pada pihak lain yang dinilai lebih mampu. Pemilik hanya bertugas mengawasi, mengendalikan, dan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan orang itu. Inilah awal berkembangnya teori agensi dalam dunia usaha.

Secara khusus Jensen dan Meckling pada tahun 1974 berusaha mendefinisikan hubungan agensi sebagai sebuah kontrak antara seseorang atau lebih meminta orang lain untuk melakukan jasa tertentu demi kepentingannya. Untuk itu orang ini atau pemilik perusahaan akan mendelegasikan wewenang untuk mengerjakan sesuatu yang seharusnya dilakukannya kepada orang yang dipilihnya atau disebut dengan manajer. Pendelegasian wewenang ini menjadi sebuah keharusan dalam hubungan agensi agar manajer mempunyai kesempatan yang luas untuk menjalankan tugasnya, sekaligus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakannya kepada pemilik perusahaan. Secara konseptual hubungan agensi ini seharusnya dapat membuat perusahaan meningkat nilainya karena dikelola oleh orang yang mengetahui dan memahami bagaimana menjalankan usaha serta diawasi secara ketat oleh pemilik, namun yang terjadi justru sebaliknya. Namun permasalahan agensi akan muncul apabila salah satu pihak mempunyai keinginan untuk memaksimalkan kesejahteraannya (*moral hazard*), meski harus merugikan pihak lain.

Keinginan untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi ini sesuai dengan konsep *resourceful, evaluative, maximizing model*. Konsep ini menyatakan bahwa sebagai manusia pihak-pihak yang menjalin hubungan agensi tidak dapat melepaskan diri dari sifat alamiah kemanusiaannya. Manusia mempunyai kemampuan untuk menilai dan memanfaatkan apa yang ada disekitarnya untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Manusia tidak akan melepaskan setiap kesempatan yang ada disekitarnya untuk kemakmurannya. Manusia selalu dapat memilih sesuatu yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Manusia selalu berusaha untuk meraih semua hal yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Oleh sebab itu model ini menggunakan empat buah postulat mengenai perilaku manusia untuk menjelaskan konsep di atas.

1. Setiap manusia *care* dan *evaluator*.

Manusia yang *carefulness* dan *evaluateness* akan mempunyai kecenderungan untuk peduli dengan semua hal (*thing*), misalkan pengetahuan, honor, status, dan kekayaan. Selain itu setiap manusia juga mempunyai kecenderungan selalu ingin menciptakan *trade-off* dan *substitusi* dengan mengorbankan sejumlah barang tertentu dengan nilai yang relatif rendah untuk memperoleh barang lain yang nilai lebih besar. Manusia juga mempunyai kecenderungan untuk menilai apa yang sebaiknya dilakukan dan sebaiknya tidak dilakukannya. Orang akan selalu mempunyai preferensi yang transitif.

2. Keinginan manusia tidak terbatas.

Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Artinya, apabila barang tertentu mempunyai nilai positif maka manusia lebih menyukainya dengan jumlah yang lebih banyak. Manusia juga tidak dapat jenuh sehingga manusia selalu menginginkan lebih banyak *thing*, tanpa memandang apakah *tangible* atau *intangible*. Inilah yang membuat manusia selalu berusaha mencari sesuatu yang dapat memuaskan keinginannya.

3. Setiap manusia adalah pemaksimum (*maximizer*).

Manusia akan bertindak sedemikian rupa sehingga ia dapat menikmati nilai pada tingkat setinggi mungkin. Meskipun demikian model ini mengakui bahwa manusia selalu menghadapi kendala-kendala dalam memuaskan keinginannya. Kekayaan, waktu, dan hukum alam adalah kendala-kendala penting yang mempengaruhi kesempatan yang tersedia bagi manusia.

4. Setiap manusia adalah *resourceful*.

Manusia dipandang sebagai makhluk yang kreatif, sehingga manusia akan mampu untuk mengkonsepsikan perubahan lingkungan, meramal konsekuensi dari perubahan itu, dan merespon kesempatan baru. Oleh sebab itu setiap manusia akan selalu memanfaatkan apapun yang dapat memberinya kepuasan.

Empat postulat ini merupakan dasar untuk mempelajari perilaku oportunistis manajer dalam teori keagenan ini. Secara konseptual manajer adalah *self-interested* atau *maximizer*. Maka sebagai pemaksimum utilitas manajer mempunyai kecenderungan untuk tidak selalu bekerja demi kepentingan pemilik perusahaan. Ada ketidakselarasan perilaku atau tujuan antara pemilik dan manajer perusahaan (*disfunctional behavior*)

yang disebut dengan *agency cost* dalam hubungan keagenan ini. Teori agensi merupakan pengorbanan yang timbul dari hubungan keagenan apapun, termasuk hubungan didalam kontrak kerja antara pemegang saham dan manajer perusahaan. Oleh sebab itu, dalam hubungan keagenan, setiap pihak akan menanggung biaya keagenan, tidak hanya prinsipal tetapi juga agen.

Inilah yang membuat setiap pihak harus menanggung implikasi manajemen laba yang dilakukan manajer perusahaan. Manajer perusahaan harus menanggung implikasi manajemen laba yang berupa kemungkinan kesulitan keuangan atau kebangkrutan dimasa depan. Investor harus menanggung implikasi berupa hilangnya kesempatan memperoleh *return* dan kehilangan modal yang telah ditanamkannya. Pemerintah harus menanggung implikasi berupa kehilangan kesempatan untuk memperoleh pajak. Regulator harus menanggung implikasi berupa hilangnya integritas dan kredibilitas karena regulasinya mudah dipermainkan. Kreditur harus menanggung implikasi berupa kehilangan kesempatan memperoleh *return* dan dana yang dipinjamkan kepada perusahaan bersangkutan. Masyarakat harus menanggung implikasi berupa hancurnya perekonomian.

1. Implikasi terhadap perekonomian

Secara konseptual sistem perekonomian suatu negara merupakan sub sistem dari sistem perekonomian internasional. Sedangkan sistem perekonomian nasional merupakan sebuah kumpulan dari para pelakunya, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Apa yang dilakukan dan dialami salah satu elemen secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi elemen yang lain. Maka sebagai salah satu elemen dalam sistem perekonomian apa yang dilakukan dan dialami oleh dunia usaha juga akan dirasakan dampaknya oleh pemerintah dan masyarakat, demikian pula sebaliknya. Oleh sebab itu manajemen laba yang dilakukan sebuah perusahaan tidak hanya mempengaruhi kondisi perusahaan bersangkutan, tetapi secara makro juga mempengaruhi perusahaan-perusahaan lain, *stakeholder*, publik, bahkan secara internasional mempengaruhi kondisi perekonomian negara-negara lain.

a. Implikasi terhadap perekonomian mikro

Secara mikro perusahaan yang melakukan aktivitas rekayasa manajerial ini akan mengalami kesulitan-kesulitan keuangan yang berujung pada kebangkrutan. Ada alasan logis yang dapat menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Secara

konseptual sekali melakukan manajemen laba maka suatu perusahaan terpaksa melakukan aktivitas ini selamanya. Alasannya, untuk menyembunyikan manajemen laba maka perusahaan harus menutupinya dengan manajemen laba juga, demikian seterusnya. Sementara manajemen laba tidak mungkin dilakukan terus menerus oleh suatu perusahaan. Oleh sebab itu pada suatu ketika perusahaan akan kehilangan kemampuannya melakukan aktivitas rekayasa manajerial ini. Oleh sebab itu meski dapat disembunyikan dalam jangka pendek namun dalam jangka panjang perusahaan tidak mungkin mampu melanjutkan aktivitas rekayasanya itu.

b. Implikasi terhadap perekonomian makro

Secara makro manajemen laba telah membuat dunia usaha seolah telah berubah menjadi sarang pelaku korupsi, kolusi, dan berbagai penyelewengan lain yang merugikan masyarakat. Apabila informasi-informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan telah direkayasa sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tertentu maka bisa dibayangkan keputusan seperti apa yang dihasilkannya. Padahal laporan keuangan merupakan sumber utama bagi *stakeholder* dalam membuat keputusan ekonomi. Dampak buruk ini tidak hanya berhenti sampai disini sebab keputusan-keputusan itu secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hingga tidak hanya *stakeholder* yang dirugikan tetapi juga pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan perusahaan. Alasan inilah yang mendorong publik menuntut agar dunia usaha dikelola secara lebih sehat, bersih, dan bertanggung jawab.

c. Implikasi terhadap perekonomian internasional

Selain perekonomian suatu negara maka aktivitas rekayasa manajerial ini juga dapat mempengaruhi perekonomian internasional. Alasannya, globalisasi ekonomi membuat perekonomian nasional suatu negara seakan-akan telah menyatu dengan perekonomian nasional negara lain. Antara satu negara dengan negara lain seakan-akan mempunyai satu sistem perekonomian yang mengikat dan mempengaruhi satu dengan yang lain. Hingga krisis ekonomi yang melanda suatu negara secara langsung maupun tidak langsung akan dirasakan dampaknya di negara-negara lain. Selain itu semakin banyaknya perusahaan multinasional

yang beroperasi di berbagai negara juga merupakan faktor mengapa kecurangan keuangan ini tidak hanya mempengaruhi perekonomian suatu negara. Sebagai perusahaan multinasional maka apa yang dilakukan dilakukan cabangnya di suatu negara tertentu juga merupakan tanggung jawab afiliasinya di negara-negara lain.

Oleh sebab itu tidak aneh apabila kasus *creative accounting* di Inggris tidak hanya menyebabkan *good corporate governance* menjadi perhatian publik setempat tetapi juga menjadi perhatian dunia. Contoh lain adalah kasus konspirasi KAP Arthur Anderson & Co. dengan kliennya ternyata tidak hanya merontokkan KAP Arthur Anderson & Co. di Amerika Serikat, namun juga merontokkan afiliasi-afiliasinya di seluruh dunia. Hingga peristiwa ini tidak hanya menjadi wacana yang menarik untuk dibahas di Amerika, tetapi juga menjadi wacana internasional. Tidak hanya para praktisi yang secara langsung merasakan dampak dari peristiwa itu, tetapi juga para akademi dan peneliti yang selanjutnya berusaha mengurai kasus-kasus manajemen laba itu. Aktivitas rekayasa manajerial menjadi topik di berbagai kesempatan.

2. Implikasi terhadap etika dan moral

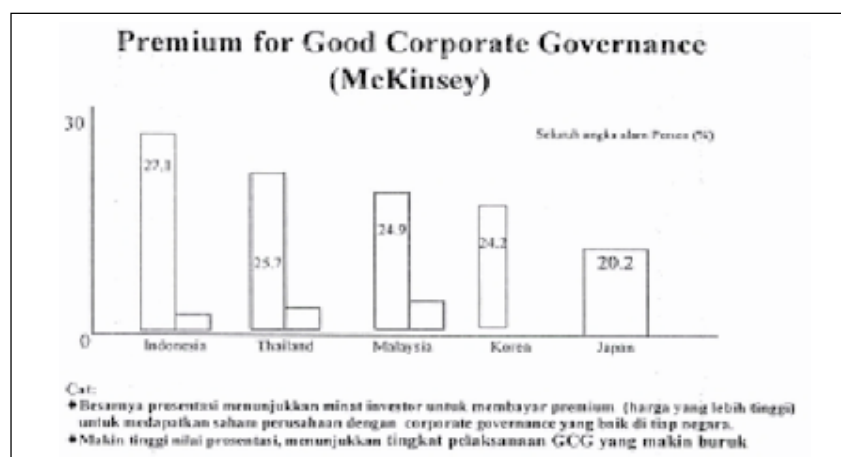
Sementara dari sudut pandang etika dan moral, manajemen laba telah membuat publik mempertanyakan integritas dan kredibilitas para pelaku ekonomi maupun regulator, yaitu pengelola perusahaan, pemerintah, pembuat regulasi, asosiasi profesi, dan akuntan publik, termasuk berbagai keputusan, kebijakan, dan regulasi yang dihasilkannya. Apa yang dilakukan publik ini sebenarnya berakar pada dampak negatif dari aktivitas manajemen laba selama beberapa tahun terakhir. Publik melihat bahwa tidak hanya perusahaan yang merasakan dampak negatif dari manajemen laba, namun juga *stakeholder* maupun pihak lain yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan perusahaan bersangkutan. Bahkan tidak hanya perekonomian nasional yang berantakan akibat aktivitas rekayasa itu namun juga perekonomian nasional.

a. Manajer Perusahaan

Seorang manajer seharusnya mengelola perusahaannya secara bertanggung jawab agar perusahaan itu dapat menghasilkan *return* yang layak bagi pemilik. Selain itu seorang manajer juga harus mempunyai tanggung jawab moral

terhadap *stakeholder* maupun publik yang ada disekitar perusahaannya. Bahkan seorang manajer dengan pemilik atau *stakeholder* tertentu dilarang untuk menjalin kerja sama yang dapat merugikan *stakeholder* lainnya. Untuk itulah mengapa seorang manajer harus menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan *stakeholder* apalagi jika perbuatan itu dilakukan untuk mengoptimalkan kepentingan pribadi Oleh sebab itu apapun yang dilakukan manajer dalam mengelola perusahaan harus dalam rangka untuk menciptakan bisnis yang sehat dan bersih.

Upaya manajer untuk mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan ketidaktahuan *stakeholder*, seperti halnya manajemen laba, hanya membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap perusahaannya. Akibatnya publik akan mempertanyakan etika dan moral seorang manajer sebagai pengelola perusahaan. Inilah yang membuat publik malas dan menghindari untuk menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan bersangkutan. Alasannya, apabila etika dan moral para pengelolanya tidak bisa dipercaya bagaimana perusahaan dapat menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Ada kecurigaan bahwa manajer perusahaan hanya akan mencari keuntungan pribadi meskipun harus merugikan kepentingan pihak lain. Inilah yang menyebabkan mengapa perusahaan yang dikelola secara sehat, bersih, dan bertanggung jawab lebih dipercaya.



Sumber: Daniri, 2000.

Gambar 4.1
Premium untuk Good Corporate Governance

b. Pemerintah, Regulator, Asosiasi Profesi

Secara konseptual pemerintah, regulator, asosiasi profesi merupakan pihak yang mengawasi dan mengendalikan jalannya bisnis di suatu negara. Untuk itulah pihak-pihak ini mengeluarkan berbagai regulasi agar dunia usaha dikelola secara profesional sehingga kehidupan bisnis yang sehat, bersih dan bertanggung jawab dapat diwujudkan di negara itu. Selain itu pemerintah, regulator, asosiasi profesi seharusnya selalu mengingatkan, menegur, dan menghukum pengelola perusahaan maupun perusahaan yang diketahui telah melanggar regulasi tertentu. Apalagi pelanggaran-pelanggaran itu merugikan kepentingan *stakeholder* dan publik secara umum. Pemerintah, regulator, asosiasi profesi tidak boleh ragu-ragu atau segan untuk menegur dan menghukum siapapun yang melakukan kesalahan. Ketidaktegasan pemerintah dan pembuat regulasi dalam menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten dapat menyebabkan publik kehilangan kepercayaan terhadap ketiga pihak ini.

Ketidpercayaan publik ini merupakan cermin dari keragu-raguan publik terhadap integritas dan kredibilitas pemerintah, regulator, asosiasi profesi. Publik mempertanyakan komitmen etis dan moral kedua pihak-pihak dalam membangun kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu apabila pemerintah, regulator, asosiasi profesi menjalin konspirasi dengan dunia usaha sehingga merestui apapun yang dilakukan dunia usaha maka publik akan semakin mencurigai komitmen etika dan moral pihak-pihak ini. Publik akan semakin kesulitan mencari perlindungan apabila dirugikan dunia usaha. Meski dalam jangka pendek hal ini menguntungkan dunia usaha namun konspirasi semacam ini justru akan membuat dunia usaha semakin terpuruk.

c. Akuntan Publik

Akuntan publik merupakan salah satu garda terdepan dalam membangun kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab di suatu negara. Alasannya, akuntan publik merupakan pihak yang mempunyai kemampuan, keahlian, dan kesempatan untuk mendeteksi berbagai aktivitas curang yang dilakukan dunia usaha. Kemampuan dan keahlian ini memang dibangun oleh akuntan publik mulai pada saat belajar di perguruan tinggi dan sebagai

komitmennya ketika memilih profesi ini. Sedangkan kesempatan itu diperoleh akuntan publik pada saat melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Akuntan publik bagaimanapun akan mampu mendeteksi aktivitas-aktivitas kecurangan itu apabila mau menggunakan kemampuan dan keahliannya secara profesional dan mempunyai komitmen untuk berperan aktif dalam membangun kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu akuntan publik akan diragukan komitmen etis dan moralnya oleh publik karena menjalin konspirasi dengan dunia usaha. Akuntan publik tidak menggunakan kemampuan, keahlian, dan kesempatannya secara baik tetapi justru merestui kecurangan-kecurangan yang dilakukan dunia usaha. Etika dan moral tidak lagi menjadi bahan pertimbangan utama dalam menjalankan tugasnya. Padahal keraguan publik terhadap komitmen etis dan moral merupakan awal kejatuhan akuntan publik. Sebagai contoh adalah KAP Arthur Anderson & Co., tanpa harus melewati proses hukum akuntan publik ini mati dengan sendirinya karena dijauhi publik.

3. Implikasi terhadap standar akuntansi

Selain mempertanyakan dan meragukan integritas dan kredibilitas orang-orangnya, publik ternyata juga mempertanyakan dan meragukan kelayakan berbagai regulasi yang selama ini dipakai untuk mengatur dunia usaha, termasuk standar akuntansi. Publik melihat bahwa standar akuntansi ternyata merupakan salah satu alat yang dipakai pengelola dunia usaha untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangannya. Hanya dengan memanfaatkan berbagai metode dan prosedur yang tercakup dalam standar akuntansi pengelola dunia usaha dengan mudah menyembunyikan kecurangan-kecurangannya itu. Bahkan dalam jangka pendek pengelola dunia usaha tidak perlu khawatir perbuatannya itu diketahui oleh publik. Oleh sebab itu bagi sebagian orang standar akuntansi justru mengakomodasi dan memfasilitasi seseorang untuk melakukan kecurangan.

Apa yang terjadi itu tentu diluar pemikiran penyusun standar akuntansi, sebab pada dasarnya standar akuntansi memang tidak berkeinginan dipakai untuk melakukan kecurangan. Apalagi pada dasarnya standar akuntansi merupakan *regulation driven* yang tidak mampu mengarahkan perilaku etis seseorang yang menggunakan standar itu. Artinya sebaik apapun peraturan namun jika pelaku-pelaku tidak mempunyai

niat dan kemauan untuk menjalankan peraturan itu secara konsisten maka peraturan-peraturan itu akan kehilangan makna. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa penyelewengan terhadap standar akuntansi disebabkan oleh rendahnya komitmen etis dan moral pemakai standar itu.

BAB 5

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah membaca bab ini pembaca diharapkan dapat memahami bahwa:

1. Perkembangan konsep dan definisi di berbagai belahan dunia serta penerapan prinsip *good corporate governance* di Indonesia.
2. Salah satu kegagalan penerapan prinsip *good corporate governance* adalah manajemen laba yang dipraktikkan dunia usaha.

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah membaca bab ini pembaca diharapkan dapat memahami bahwa:

1. *Good corporate governance* merupakan konsep untuk menyelaraskan kepentingan dan memberi perlindungan untuk setiap pihak secara adil, transparan, akuntabilitas, responsibilitas. Indonesia sebagai salah satu negara yang gagal untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab harus segera menerapkan prinsip-prinsip ini.
 2. Untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab adalah dengan membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif melalui pembentukan komite audit dan komisaris independen.
-

Ada tuntutan publik yang berkembang sejalan dengan semakin maraknya kasus-kasus penyimpangan korporasi yang terjadi di seluruh dunia selama beberapa dekade terakhir ini, yaitu agar bisnis dijalankan secara bersih dan bertanggung jawab. Alasannya, *pertama*, publik melihat bahwa penyimpangan-penyimpangan korporasi itu seolah telah menjadi *corporate culture* dunia usaha. Hal ini tentu sangat merugikan semua pihak, termasuk pihak yang tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan perusahaan bersangkutan. Apalagi secara empiris memang terbukti kasus penyimpangan itu tidak hanya mempengaruhi kondisi perusahaan maupun pihak-pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan bersangkutan tetapi secara makro juga mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Bahkan dalam beberapa kasus ada

penyimpangan korporasi yang secara global mempengaruhi perekonomian internasional. Hal ini disebabkan semakin banyaknya perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara. Hingga penyimpangan di satu negara secara langsung akan mempengaruhi perusahaan afliasinya di negara lain.

Kedua, publik semakin menyadari bahwa penyimpangan korporasi sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh manajer perusahaan tetapi melibatkan pemilik (*owner*), auditor internal, komisaris, regulator (pemerintah dan asosiasi profesi), dan akuntan publik. Hingga kasus-kasus penyimpangan itu seolah merupakan ajang konspirasi antara manajer dan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan perusahaan itu. Auditor internal dan komisaris yang seharusnya mengarahkan manajer agar berjalan sesuai dengan aturan justru merestui manajer melanggar aturan yang ada untuk mengamankan posisi dan rejekinya. Sementara regulator yang seharusnya mempersiapkan berbagai regulasi agar kehidupan bisnis yang bertanggung jawab dapat terwujud justru bekerja sama dengan perusahaan yang melakukan penyimpangan itu. Sedangkan akuntan publik yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk menciptakan kehidupan bisnis yang bersih justru menjadi ligimator penyimpangan-penyimpangan itu. Inilah yang mengakibatkan dunia bisnis seolah-olah telah menjadi sarang kolusi, korupsi, dan perbuatan tercela lainnya yang merugikan publik.

Tabel 5.1
Indeks Transparansi Lingkungan Bisnis

Tahun	Indonesia	Korea Selatan	Malaysia	Filipina	Singapura	Thailand
1998	8,41	6,58	6,46	6,14	3,61	7,20
1999	8,00	8,50	6,50	6,29	4,55	7,29

Sumber: Djalil (2000).

Keterangan: 0 untuk kondisi terbaik, 10 untuk kondisi terburuk.

Ketiga, semakin kasus penyimpangan itu tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang yang sistem bisnisnya memang belum terbangun dengan baik, namun juga di negara-negara maju yang sistemnya relatif telah tertata dengan baik. Sebagai contoh adalah kasus-kasus penyimpangan korporasi yang mengakibatkan krisis ekonomi berkepanjangan di Indonesia, negara yang dengan sistem bisnisnya belum tertata dengan baik. Contoh lain adalah skandal keuangan Enron, Worldcom, dan Xerox yang meruntuhkan KAP Arthur Anderson dan Co yang terjadi di Amerika Serikat, negara

yang dikenal dengan mempunyai sistem bisnis paling baik di seluruh dunia. Maka sangat bisa dimengerti jika pada akhirnya publik mempertanyakan dan meragukan etika, moral, dan tanggung jawab para pelaku dunia usaha. Mudah dimengerti juga jika publik mempertanyakan dan meragukan kelayakan berbagai regulasi yang dipakai untuk mengatur dunia usaha, termasuk standar akuntansi dan *auditing*.

Selain ketiga hal di atas sebenarnya ada hal lain yang cukup esensial untuk dijelaskan mengapa bisnis seakan telah berubah menjadi sarang pesakitan seperti saat ini. Sebagai sub sistem dari sistem kehidupan berbangsa dan bernegara maka apa yang terjadi dan dilakukan oleh dunia bisnis tidak bisa dilepaskan dengan situasi dan kondisi negara bersangkutan. Pemerintahan yang tidak bersih akan menghasilkan kehidupan bisnis yang tidak bersih pula. Atau sebaliknya, bisnis yang tidak bersih akan mengakibatkan sistem pemerintahan yang tidak bersih pula. Para pengusaha terpaksa harus mau bekerja “tahu sama tahu” dengan penguasa agar apa yang dikerjakannya tidak menemui hambatan. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa salah satu penyebab penyimpangan korporasi yang selama ini terjadi adalah *political cost* yang selama ini harus ditanggung oleh dunia usaha.

Namun demikian bukan berarti dunia usaha dapat melepaskan diri dan cuci tangan dari tanggung jawabnya untuk menciptakan kehidupan bisnis yang bersih dan bertanggung jawab. Sebagai pelaku, dunia usaha tetap merupakan garda terdepan dalam menciptakan kehidupan bisnis yang bersih dan bertanggung jawab. Apalagi bagi publik dunia usaha tetap merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam membangun bisnis yang bersih dan sehat. Publik pun tetap akan menuntut dunia usaha sebagai pihak yang harus berperan aktif untuk mewujudkan bisnis yang adil (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*) ini. Publik tetap akan menuntut dunia usaha agar memenuhi kewajiban supaya akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Hingga secara adil dan transparan publik dapat menerima hak sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu mendorong keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab merupakan syarat mutlak untuk menciptakan kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab.

A. KONSEP, DEFINISI, DAN PENERAPAN

A.1. KONSEP DAN DEFINISI

Konsep *good corporate governance* berkembang seiring dengan tuntutan publik yang menginginkan terwujudnya mewujudkan kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab. Tuntutan ini sebenarnya merupakan jawaban publik terhadap semakin maraknya kasus-kasus penyimpangan korporasi di seluruh dunia. Selain itu tuntutan ini juga mencerminkan keheranan publik mengapa kasus penyimpangan korporasi bisa terjadi dimanapun juga. Tidak hanya di negara-negara yang sistem bisnisnya memang belum tertata tetapi juga terjadi di negara-negara yang sistem bisnisnya yang telah tertata dengan baik, bahkan di negara dimana konsep ini pertama kali dikembangkan, yaitu Amerika Serikat. Publik pun bertanya-tanya mengapa penyimpangan korporasi seolah merupakan ajang konspirasi semua pihak yang mempunyai hubungan dengan perusahaan. Publik juga mempertanyakan mengapa kasus penyimpangan ini justru semakin marak sejalan dengan diterapkan dan dipraktikkannya konsep-konsep manajemen modern dalam pengelolaan dunia usaha.

Ada yang perlu digarisbawahi sejalan dengan perkembangan dunia usaha sejak awal abad 20, yaitu berkembangnya konsep-konsep pengelolaan perusahaan secara modern. Dalam era modernitas dimana usaha semakin menggurita, baik dalam skala operasi maupun lokasi, pemilik tidak mungkin mengelola sendiri usahanya. Pemilik membutuhkan orang lain yang dipercaya untuk membantu menjalankan usaha itu. Bahkan dalam skala dan kapasitas tertentu ketika tidak mungkin melaksanakan sendiri, pemilik tidak lagi hanya membutuhkan orang lain untuk membantu namun secara penuh akan disertai tanggung jawab untuk mengelola sebagian atau seluruh usahanya. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat dikelola dengan lebih baik oleh orang yang lebih mengerti bagaimana menjalankan perusahaan secara profesional. Selanjutnya pemilik hanya mengawasi dan mengendalikan tenaga-tenaga profesional itu agar tetap bekerja untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kemakmurannya. Hal ini sejalan dengan agensi teori dalam konsep manajemen korporasi modern yang menekankan pentingnya pemisahan pemilik dan pengelola.

Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan ini yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang lebih efisien karena perusahaan telah dikelola oleh orang-orang profesional. Untuk menjalankan

tugasnya maka para profesional ini diberi wewenang dan memiliki keleluasaan secara penuh dalam mengelola perusahaan. Hingga dalam konsep ini para profesional berperan sebagai agen (*agent*) yang mewakili kepentingan pemilik untuk menjalankan tugas mengelola perusahaan. Sebagai balasan atas kerjanya maka agen akan menerima penghargaan berupa gaji dan bonus sesuai dengan kinerja yang dicapainya. Artinya, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan semakin besar pula penghargaan yang akan diterima agen itu. Sedangkan pemilik perusahaan bertugas untuk mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan, mengembangkan sistem insentif, dan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dikerjakan agen itu.

Namun ada di sisi segi negatif dari pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan ini. Wewenang dan keleluasaan agen dalam memaksimalkan laba perusahaan mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pribadi dengan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Agen yang seharusnya bekerja untuk meningkatkan kepentingan dan kesejahteraan pemilik justru bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan pribadinya. Upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan tidak lagi mencerminkan kinerja agen yang sesungguhnya, namun telah direayasa sedemikian rupa sehingga menjadi lebih baik sesuai dengan keinginan agen. Apabila penghargaan untuk agen ditentukan berdasarkan kinerja yang dicapainya maka agen akan memperoleh gaji dan bonus yang relatif lebih tinggi dibandingkan penghargaan sesungguhnya. Inilah disebut dengan permasalahan agensi (*agency problem*) dalam pengelolaan korporasi modern.

Secara konseptual permasalahan agensi inilah sumber dari segala penyimpangan korporasi yang selama ini terjadi di dunia usaha. Meski permasalahan agensi ini selalu muncul dalam setiap sistem pengelolaan korporasi modern namun bukan berarti *bad (poor) corporate governance* bisa ditolelir. Apalagi secara empiris banyak bukti yang menunjukkan bahwa penyimpangan-penyimpangan ini telah mengakibatkan rusaknya tatanan ekonomi, etika, dan moral, selain kerugian material yang terpaksa harus ditanggung oleh publik. Sebagai contoh adalah kasus Union Carbide di India yang membuat ratusan manusia tewas sia-sia. Hanya untuk menekan biaya produksi perusahaan ini mengoperasikan mesin produksinya secara nonstop tanpa pengawasan yang memadai, sehingga kebocoran di tangki penyimpanan bahan beracun tidak

diketahui secara cepat. Akibatnya, bahan beracun itu menyebar ke pemukiman penduduk sekitar perusahaan itu. Selain kasus ini masih ada berbagai kasus lain yang pada akhirnya mendorong dikembangkan konsep *good corporate governance* agar dunia usaha dapat dikelola secara lebih profesional, bersih, dan bertanggung jawab.

Tabel 5.2
Kasus *Good Corporate Governance* di Dunia

Perusahaan	Kasus
Union Carbide	Untuk mengoptimalkan kapasitas produksi perusahaan kimia menjalankan mesin-mesinnya 24 jam terus menerus tanpa pengawasan yang memadai di malam hari untuk menekan biaya produksi. Hingga ketika terjadi kebocoran gas beracun hal itu tidak cepat diketahui.
Lockheed	Presiden direktur perusahaan ini bekerja sama dengan menteri keuangan yang korup dari negara tetangga untuk membeli pesawat produksinya. Sebagai imbalannya menteri bersangkutan akan menerima imbalan sebesar 10% dari transaksi jual beli ini.
Johnson & Johnson	Salah satu produk yang dihasilkan perusahaan ini diindikasikan mengandung sianida, tetapi perusahaan tidak secara cepat menariknya dari pasar. Alasannya, produk itu merupakan andalan yang memberikan 7,4% dari <i>revenue</i> dan merupakan 17 -18% dari pendapatan perusahaan. Penarikan produk itu dari peredaran akan mengakibatkan kerugian sebesar \$ 100 juta, rusaknya reputasi, dan menurunkan harga saham sebesar 15%.
Enron, Worldcom, dan Xerox	Untuk memaksimalkan bonus dan nilai saham yang dimilikinya maka manajer bekerja sama dengan akuntan publiknya (KAP Arthur Anderson & Co) merekayasa laporan keuangan selama beberapa periode.

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2005.

Secara definitif *good corporate governance* diartikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*-nya. Untuk itu ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu hak pemegang saham yang harus dipenuhi perusahaan dan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan. Pemegang saham mempunyai hak untuk memperoleh semua informasi mengenai secara akurat dan tepat waktu. Artinya, semua pemegang saham tanpa terkecuali mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi yang sama (*fairness*). Tidak ada informasi yang disembunyikan dari

pemegang saham tertentu untuk kepentingan pribadi pihak-pihak lain (*transparancy*). Sedangkan perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan semua informasi mengenai kinerja perusahaan secara akurat, tepat waktu, dan transparan. Artinya, perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menginformasikan semua apa yang telah dilakukan dan dicapai perusahaan selama satu periode tertentu (*responsibility*). Apa yang diinformasikan oleh perusahaan kepada publik harus dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keakuratannya, serta tidak ada sesuatu yang disembunyikan dari publik (*accountability*).

Selain itu *stakeholder* mempunyai hak untuk memperoleh semua informasi mengenai secara akurat dan tepat waktu. Artinya, semua pemegang saham tanpa terkecuali mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi yang sama (*fairness*). Tidak ada informasi yang disembunyikan dari pemegang saham tertentu untuk kepentingan pribadi pihak-pihak lain (*transparancy*). Sedangkan perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan semua informasi mengenai kinerja perusahaan secara akurat, tepat waktu, dan transparan. Artinya, perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menginformasikan semua apa yang telah dilakukan dan dicapai perusahaan selama satu periode tertentu (*responsibility*). Hal yang lebih penting lagi adalah apa yang diinformasikan oleh perusahaan kepada publik harus dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keakuratannya, serta tidak ada sesuatu yang disembunyikan dari publik (*accountability*).

Definisi di atas sejalan dengan pernyataan *Asian Development Bank* (ADB) yang mengatakan bahwa:

The issue of corporate governance arises because of the separation of ownership from control in modern corporations. When salaried managers run companies on behalf of dispersed shareholders, they may not act in shareholders and managers, but also between controlling and minority shareholders, between shareholders and creditors and between controlling shareholders and other stakeholders; including suppliers and workers. A sound corporate governance sistem should provide effective protection for shareholders and creditors such that they are not denied the return on their investment.

1. Ada ketidakselarasan kepentingan

Ada ketidakselarasan kepentingan antara pemegang saham mayoritas (*controlling shareholder*) dan minoritas. Ketidakselarasan ini disebabkan kemampuan pemegang saham mayoritas untuk mengendalikan manajer sesuai dengan kepentingannya. Sebagai pemilik hak suara mayoritas, pemegang saham ini akan memilih manajer yang dapat mewakili kepentingannya. Secara konseptual kepemilikan yang terkonsentrasi memang mengakibatkan kelompok ini mempunyai akses yang besar untuk mengintervensi keputusan manajerial, yang seringkali merugikan dan melanggar asas akuntabilitas dan keadilan pemegang saham minoritas. Apalagi jika intervensi-intervensi ini dilakukan untuk kepentingan pribadi dan bukan kepentingan *stakeholder* yang lain.

Sedangkan di sisi lain lemahnya budaya litigasi dikalangan pemegang saham minoritas mengakibatkan kelompok ini cenderung mengalah daripada memperjuangkan haknya. Lemahnya posisi pemegang saham minoritas ini pada akhirnya mengakibatkan akses dan sumber terhadap informasi mengenai keuangan, manajemen, dan operasional perusahaan menjadi sangat terbatas. Inilah membuat unsur keadilan dan transparansi informasi tidak dapat terwujud dengan baik. Apalagi jika manajer perusahaan merupakan kepanjangan dari pemegang saham mayoritas, sehingga apapun yang dilakukannya hanya untuk memenuhi kepentingan pemegang saham ini.

2. Munculnya permasalahan agensi

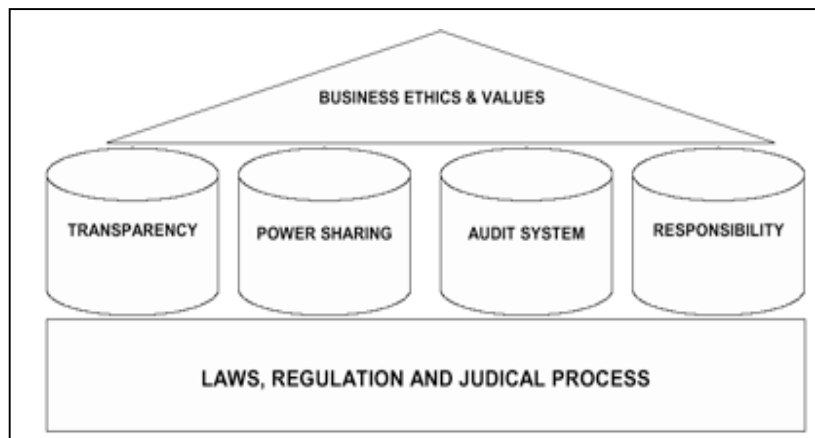
Munculnya permasalahan agensi antara manajer dan pemilik perusahaan, khususnya untuk perusahaan yang kepemilikannya menyebar (*manager controlled*). Kepemilikan seperti ini menyebabkan tidak ada pemegang saham mayoritas yang dapat mengintervensi wewenang manajer perusahaan, sehingga semua pemegang saham mempunyai hak suara yang relatif sama antara satu dengan yang lain. Akibatnya, pemegang saham kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan manajer. Hal ini membuat manajer mempunyai keleluasaan penuh untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingannya. Manajer tidak lagi bekerja untuk mewakili kepentingan dan demi kesejahteraan pemegang saham tetapi bekerja untuk mengoptimalkan kesejahtraannya sendiri. Lemahnya posisi pemegang saham pada akhirnya mengakibatkan akses dan sumber terhadap informasi mengenai keuangan,

manajemen, dan operasional perusahaan menjadi sangat terbatas. Hingga membuat unsur akuntabilitas dan responsibilitas informasi tidak dapat terwujud dengan baik.

3. *Good corporate governance* harus memberi perlindungan

Sistem *corporate governance* yang baik seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada pemegang saham dan kreditor melalui mekanisme internal maupun lewat eksternal perusahaan. Sebab sistem pengawasan dan pengendalian yang baik sebenarnya harus melibatkan auditor internal dan komisaris (internal) serta akuntan publik (eksternal) secara penuh dan bertanggung jawab. Tetapi yang justru sebaliknya, internal dan eksternal perusahaan yang seharusnya mengawasi dan mengontrol jalannya perusahaan ternyata tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya secara optimal. Apalagi jika manajer perusahaan merupakan pihak yang cukup cerdas untuk menjinakkan dan memuaskan kedua pihak itu agar bersedia menerima berbagai kebijakannya. Kuatnya posisi manajer ini pada akhirnya mengakibatkan akses dan sumber pemegang saham terhadap informasi mengenai keuangan, manajemen, dan operasional perusahaan menjadi sangat terbatas. Hingga membuat unsur keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas informasi tidak dapat terwujud dengan baik.

Definisi *good corporate governance* lain diungkapkan oleh *Centre for European Policy Studies* (CEPS). Organisasi mendefinisikan *good corporate governance* sebagai seluruh sistem hak, proses, dan pengendalian yang dibentuk didalam dan diluar manajemen dengan tujuan untuk melindungi kepentingan *stakeholder*. Hak merupakan wewenang yang dimiliki oleh *stakeholder* untuk mempengaruhi manajemen. Proses merupakan mekanisme implementasi hak tersebut. Sedangkan pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan *stakeholder* untuk mendapatkan informasi berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan. Meski secara definitif ada perbedaan pengertian antara satu definisi dengan definisi yang lain namun ada benang merah yang dapat ditarik, yaitu pentingnya pengelola perusahaan untuk adil, transparansi, akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan, dan responsibilitas atau pertanggungjawaban sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder*.



Sumber: Na'im, 2000.

Gambar 5.1
House of Good Corporate Governance

Meskipun secara definitif berbeda, namun ada benang merah antara satu definisi dengan definisi yang lain. Setiap definisi menekankan pentingnya keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab untuk setiap pihak yang mempunyai hubungan dengan perusahaan. Ada harapan yang ingin diraih dengan menerapkan keempat prinsip secara konsisten, yaitu terwujudnya kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab.

1. Keadilan

Keadilan merupakan perlindungan terhadap hak seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas (*minority shareholder*), untuk memperoleh informasi secara tepat waktu dan teratur, memberikan suara dalam rapat pemegang saham, memilih direksi dan komisaris, dan pembagian laba perusahaan. Selain itu keadilan juga menekankan pentingnya perlindungan untuk pemegang saham dari berbagai penyimpangan orang dalam perusahaan, misalnya praktek *insider trading*, *self-dealing*, keputusan manajer lain yang merugikan kepentingan seluruh pemegang saham, dan konflik kepentingan dalam menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, manajer (direksi), dan komite, termasuk sistem remunerasi, menyajikan dan mengungkapkan informasi secara wajar.

2. Transparansi

Transparansi merupakan pengungkapan (*disclosure*) setiap kebijakan atau aturan yang (akan) diterapkan perusahaan, sebab kepercayaan investor dan efisiensi pasar

sangat tergantung dari pengungkapan kinerja perusahaan secara adil, akurat, dan tepat waktu. Ada beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan untuk mewujudkan prinsip ini, yaitu:

- a. Mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi yang diterima secara umum dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.
- b. Mengembangkan teknologi informasi (*information technology*) dan sistem informasi manajemen (*management information system*) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh komisari dan manajer.
- c. Mengembangkan manajemen resiko korporasi (*enterprise risk management*) untuk memastikan bahwa semua resiko telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat yang jelas.
- d. Mengumumkan jabatan yang kosong, agar setiap pihak mengetahuinya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengangkatan pejabat perusahaan dengan cara-cara yang kolusif atau nepotisme.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas didasarkan pada sistem *internal checks and balances* yang mencakup praktik audit yang sehat dan dicapai melalui pengawasan yang efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemegang saham, komisaris, manajer, dan auditor. Ada beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan untuk mewujudkan prinsip ini, yaitu:

- a. Perusahaan dituntut untuk menyiapkan laporan keuangan pada waktu dan cara yang tepat.
- b. Perusahaan harus mengembangkan komite audit dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris.
- c. Perusahaan harus mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi auditor internal sebagai mitra bisnis strategis berdasarkan *best practices*.
- d. Perusahaan harus menjaga manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan menangani pertentangan.
- e. Perusahaan harus menggunakan jasa auditor eksternal yang profesional.

4. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai lingkungan hidup, perlindungan konsumen, perpajakan, ketenagakerjaan, larangan monopoli dan praktik persaingan yang tidak sehat, kesehatan dan keselamatan kerja, dan peraturan lain yang mengatur kehidupan perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Agar semua prinsip-prinsip yang tercakup dalam *good corporate governance* ini dapat berjalan secara efektif maka diperlukan sistem pengawasan dan pengendalian yang memadai dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Untuk itu setiap perusahaan mempunyai kewajiban untuk membentuk sistem pengawasan dan pengendalian sesuai aturan yang berlaku untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang bersih, sehat, dan bertanggung jawab. Secara konseptual pengawasan dan pengendalian ini dapat terlaksana dengan baik apabila dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai independensi dengan kepentingan manajer perusahaan. Artinya, orang-orang ini tidak mempunyai ikatan kepentingan yang dapat mengakibatkannya tidak bebas dari tekanan dan intervensi manajerial. Seluruh tindakan dan keputusan yang dibuatnya harus lepas dari kepentingan manajer, apalagi jika hal itu menyangkut kepentingan *stakeholder*.

Untuk membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam suatu perusahaan ada dua pihak yang diperlukan, yaitu komite audit (*audit committee*) dan komisaris independen (*board of director*). Komite audit merupakan pihak yang mempunyai tugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas internal dan eksternal audit. Sedangkan komisaris independen merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance* di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada manajer secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Meski setiap pihak mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda namun pada prinsipnya kedua pihak ini mempunyai tujuan yang serupa, yaitu mewujudkan kehidupan bisnis yang bersih, sehat, dan bertanggung jawab.

1. Komite Audit

Secara konseptual komite audit bertugas melakukan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dalam menciptakan keterbukaan dan pelaporan keuangan

yang berkualitas, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengawasan internal yang memadai. Untuk itu ada beberapa aspek penting pengawasan yang harus dilakukan komite audit untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab, yaitu:

a. Penyusunan laporan keuangan. Secara konseptual pihak yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan adalah manajer dan dewan komisaris. Sedangkan komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan audit ekstern untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat manajer telah mengungkapkan informasi kondisi keuangan, hasil usaha, serta rencana dan komitmen jangka panjang yang sesungguhnya. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan maka komite audit berperan dan mempunyai tanggung jawab:

- Melakukan pengawasan apakah proses penyusunan pelaporan keuangan telah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan keuangan.
- Menelaah apakah laporan keuangan telah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan serta konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh komite audit.
- Melakukan pengawasi terhadap pelaksanaan audit laporan keuangan oleh auditor eksternal dan menilai mutu pekerjaan dan kewajaran biaya audit (*auditor's fee*) yang diajukan oleh auditor eksternal.

b. Manajemen risiko dan pengendalian. Secara konseptual manajer dan dewan komisaris mempunyai tanggung jawab terhadap manajemen risiko dan kontrol perusahaan. Sedangkan komite audit memberikan pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol, khususnya untuk berbagai hal yang mempunyai potensi risiko, pemberdayaan sistem pengendalian intern, serta pemantauan terhadap proses pengawasan yang dilakukan auditor internal. Apabila menemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku maka komite audit mempunyai kewajiban untuk melaporkannya kepada dewan komisaris. Untuk itu komite audit mempunyai peran dan tanggung jawab untuk:

- Melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan risiko dan kontrol, serta mengidentifikasi risiko dan evaluasi kontrol untuk meminimalisasi risiko.

- Menilai ruang lingkup pemeriksaan auditor internal dan eksternal untuk memastikan bahwa semua bidang berisiko dan memerlukan pengendalian telah dikerjakan.
 - Memastikan bahwa manajer telah melaksanakan semua rekomendasi mengenai risiko dan pengendalian itu.
- c. *Corporate governance*. Secara konseptual direksi dan dewan komisaris merupakan pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan *corporate governance*. Sedangkan komite audit mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan *corporate governance* suatu perusahaan, khususnya untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan usaha secara beretika, dan melaksanakan secara efektif terhadap benturan kepentingan atau kecurangan yang dilakukan oleh karyawan atau manajer perusahaan. Untuk itu komite audit mempunyai peran dan tanggung jawab untuk:
- Melakukan pengawasan terhadap proses penerapan *corporate governance*.
 - Memastikan bahwa manajer senior secara aktif mensosialisasikan budaya *corporate governance*.
 - Memonitor bahwa *code of conduct* telah dilaksanakan secara konsekuen.
 - Memahami semua pokok persoalan dan issues yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja finansial maupun non finansial perusahaan.
 - Memantau bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku.
 - Mewajibkan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil evaluasi pelaksanaan *corporate governance* dan temuan lainnya.

Oleh sebab itu secara singkat fungsi komite audit adalah untuk menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan-penyelewengan. Fungsi lainnya adalah untuk memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajer. Hingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap adanya kontrol internal yang lebih baik.

2. Komisaris Independen

Ada beberapa misi yang diemban komisaris independen untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab, *pertama*, mendorong terciptanya iklim yang objektif dan keadilan untuk semua kepentingan sebagai prinsip utama pembuatan keputusan manajerial. *Kedua*, mendorong diterapkannya prinsip dan praktek *good corporate governance* di Indonesia. *Ketiga*, bertanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance* melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada manajer secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Untuk itu ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh komisaris independen, yaitu memastikan bahwa perusahaan:

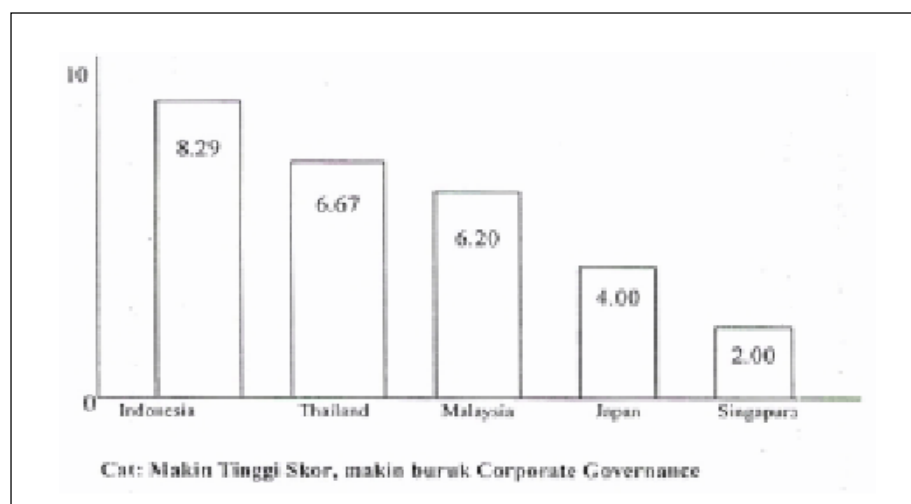
- a. Memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi itu.
- b. Mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
- c. Memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
- d. Mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
- e. Resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
- f. Prinsip-prinsip dan praktek *good corporate governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik, khususnya:
 - Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
 - Perlakuan yang adil untuk pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lain.
 - Diungkapkannya transaksi yang mengandung konflik kepentingan secara wajar dan adil.
 - Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
 - Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

A.2. GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI INDONESIA

Good corporate governance mulai menarik perhatian publik Indonesia sejak 1998-an ketika krisis ekonomi melanda negara ini. Apalagi ketika *Asian Development Bank* (ADB), *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), Booz-Allen &

Hamilton, *World Bank*, dan PricewaterhouseCoopers menyimpulkan bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi ini adalah tidak dipenuhinya syarat-syarat pengelolaan korporasi yang memadai. Ada beberapa faktor yang ditengarai sebagai penyebab, yaitu sistem regulasi yang lemah, standar akuntansi dan audit yang inkonsisten, dan praktek perbankan yang buruk. Kondisi ini mirip yang terjadi di Inggris pada akhir dasawarsa 1980-an ketika *good corporate governance* menjadi perhatian publik sebagai akibat publisitas masalah-masalah korporasi, seperti *creative accounting*, kebangkrutan perusahaan dalam skala yang sangat besar, penyalahgunaan dana *stakeholder* oleh para manajer, terbatasnya peran auditor, tidak jelasnya kaitan antara kompensasi manajer dengan kinerja perusahaan, dan merger dan akuisisi yang merugikan perekonomian secara keseluruhan.

Oleh sebab itu sejalan dengan *letter of intent* (LOI) *International Monetary Fund* (IMF), yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan dunia usaha, perusahaan-perusahaan, Indonesia mulai menerapkan prinsip *good corporate governance*. Untuk itu pemerintah menekankan pentingnya dunia usaha di Indonesia untuk menerapkan standar *good corporate governance* seperti yang diterapkan di tingkat internasional. Alasannya, Indonesia merupakan negara terburuk dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya dalam mewujudkan kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab. Namun meski menyadari pentingnya *good corporate governance*, saat ini masih sedikit perusahaan yang menerapkan prinsip ini. Masih banyak perusahaan menerapkan prinsip *good corporate governance* karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang menganggap prinsip ini sebagai bagian dari kultur perusahaan.



Sumber: Daniri, 2000.

Tabel 5.2
Score on Good Corporate Governance

Ada banyak kasus penyelewengan korporasi yang dapat dijadikan contoh betapa buruknya pengelolaan dunia usaha (*bad corporate governance*) di Indonesia. Sebagai contoh adalah penggunaan nama perusahaan untuk mendapatkan pinjaman pribadi manajer yang memperoleh *back up* dari pemegang saham mayoritas. Meski demikian anggota direksi (manajer) yang lain tidak melaporkannya kepada akuntan publik mengenai transaksi itu ketika perusahaan diaudit. Hal ini disebabkan setiap orang merasa lebih baik diam untuk mengamankan posisi dan kepentingannya. Hingga seolah-olah penyelewengan menjadi konspirasi yang melibatkan semua unsur manajer perusahaan. Namun hal ini mengakibatkan laporan keuangan yang disampaikan kepada publik menjadi *misleading* karena tidak memuat informasi yang benar. Pihak yang menggunakan informasi ini menjadi tertipu dan keputusan yang dibuatnya pun menjadi keliru pula.

Tabel 5.3
Kasus Good Corporate Governance di Indonesia

Perusahaan	Kasus
Sinar Mas Group	Melakukan pelanggaran kegagalan mengumumkan kepada publik informasi material berupa penandatanganan perjanjian penyelesaian dengan krediturnya, tidak mengumumkan laporan keuangan tahunan, dan tidak menginformasikan kepada Bapepam mengenai gugatan piutang dagang dalam jumlah yang cukup material.
Indomobil	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan bahwa tender penawaran saham perusahaan ini mengandung praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pemenang tender bekerja sama dengan penjual, penasihat keuangan, dan pendamping tender.
Kimia Farma	Perusahaan diduga melakukan <i>mark up</i> laporan keuangan, yaitu menggelembungkan laba sebesar Rp 32,668 milyar. Kasus ini menyeret KAP yang mengaudit perusahaan ini meskipun KAP ini yang berinisiatif melaporkan adanya <i>overstated</i> itu.
Lippo Bank	Menerbitkan 3 versi laporan keuangan sekaligus yang saling berbeda antara satu dengan yang lain, yaitu laporan keuangan yang dipublikasikan dalam media massa, laporan keuangan yang dilaporkan kepada Bapepam, dan laporan keuangan yang

disampaikan akuntan publik kepada manajer perusahaan ini. Selain itu, perusahaan ini dinilai telah mencantumkan pendapatan audit secara tidak hati-hati.

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2005.

Kasus-kasus di atas ini terjadi sebagai akibat lemahnya budaya pengawasan dan pengendalian dunia usaha di Indonesia. Semua pihak, internal maupun eksternal, tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Pemegang saham dan komisaris yang seharusnya mengawasi dan mengendalikan manajer jarang menggunakan kewenangannya. Sementara manajer pun cukup cerdas untuk menjinakkan dan memuaskan pemegang saham dan komisaris agar selalu bersedia menerima semua kebijakan yang diputuskannya. Apalagi jika semua unsur manajer mewakili kepentingan pemegang saham mayoritas yang mengakibatkan terjadinya intervensi terhadap berbagai kebijakan manajerial dari pemegang saham itu yang merugikan pemegang saham minoritas. Kondisi ini rawan terjadi karena pasar modal Indonesia merupakan *emerging market* dengan ciri utama kepemilikan yang terkonsentrasi pada kelompok tertentu (*closely held*). Akibatnya, pemegang saham mayoritas mempunyai akses yang besar untuk mempengaruhi keputusan manajerial yang seringkali merugikan dan melanggar asas akuntabilitas dan keadilan pemegang saham minoritas.

Untuk itulah pemerintah Indonesia membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang bertugas menyiapkan kerangka dasar pelaksanaan *good corporate governance*, termasuk memperbaiki kerangka hukum, institusional, dan peraturan untuk pengelolaan korporasi. Bahkan selain mereposisi peran Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Bank Indonesia, komite ini juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengamandemen beberapa undang-undang (UU) untuk menampung aspek *good corporate governance*, yaitu UU Perseroan Terbatas, UU WDP, UU Pasar Modal, dan UU Perbankan. Bursa Efek Jakarta (BEJ), sebagai tempat bernaungnya perusahaan-perusahaan *public* di Indonesia, secara khusus juga telah mengeluarkan peraturan tentang keharusan perusahaan publik untuk mengangkat komisaris independen dan pembentukan komite audit serta *compliance officer* untuk mendukung terlaksananya upaya penerapan prinsip *good corporate governance* di Indonesia.

Selain itu beberapa upaya lain adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman para pelaku bisnis dan pengelola korporasi mengenai *good corporate governance*. Harus diakui bahwa semua perangkat hukum dan peraturan tidak akan ada artinya jika aspek lain yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip *good corporate governance* tidak ditangani dengan baik. Hal ini disebabkan prinsip yang terkandung dalam *code of good corporate governance* pada dasarnya bersifat *regulation driven*, bukan *ethics driven*. Padahal pelaksanaan hukum dan aturan tidak bisa sekedar menggantung diri pada *rules* tetapi juga menggantungkan diri pada sikap etis para penganutnya. Apalagi mengingat bahwa proses pengembangan regulasi di Indonesia terkadang menimbulkan “kekosongan-kekosongan” yang tidak dapat diisi oleh *rules and regulation* dengan baik.

Hingga dalam rangka pelaksanaan *good corporate governance* aspek etis merupakan faktor yang juga harus dipahami oleh para pengelola korporasi di Indonesia. Apalagi sudah bukan jamannya lagi perusahaan melakukan bisnis berdasarkan faktor-faktor *non business considerations* (misalkan monopoli, fasilitas, proteksi, kolusi, dan lain-lain) yang menyebabkan *high cost economy* dan cenderung mengingkari prinsip-prinsip *good corporate governance* serta *sound business practices*. Selain itu, upaya untuk menciptakan *judiciary system* yang independen, berintegritas, serta memahami perubahan yang ada diperlukan untuk menampung dan memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan. Pembentuk undang-undang harus memahami bahwa dunia usaha memerlukan pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, apalagi mengingat dunia usaha Indonesia saat ini sedang dalam proses *recovery* akibat krisis dan dampak globalisasi.

Upaya lain yang telah dilakukan di Indonesia adalah pemantauan atas implementasi *good corporate governance* untuk memonitor kepatuhan korporasi terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut melalui pemberian *Annual Report Award* (ARA). Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan KNKCG pada prinsipnya diserahkan kepada perusahaan publik yang dinilai telah memberikan informasi yang paling terbuka dalam laporan keuangan tahunnya dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang

memenuhi kriteria kelengkapan dalam penyajian laporan keuangannya, khususnya untuk informasi mengenai profil perusahaan, pengungkapan visi dan misi perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan *corporate governance*, analisis dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan, laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan ketentuan pasar modal yang berlaku, dan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan *stakeholder*.

Namun pada akhirnya ada *point* yang harus digarisbawahi bahwa implementasi *good corporate governance* di Indonesia sangat tergantung dalam lingkungan *good (public) governance* secara umum. Atau dengan kata lain, upaya mewujudkan *good corporate governance* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan ketatanegaraan yang bersih dan responsif di Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah harus selalu berupaya untuk berpegang pada prinsip *rule of law* dan melaksanakan *good governance* untuk menciptakan iklim yang kondusif yang menunjang dunia usaha, karena penegakan hukum yang imparial dan efektif atas penyimpangan dan kejahatan korporasi akan mencegah perusahaan untuk melakukan pelanggaran. Apalagi secara empiris juga terbukti bahwa salah satu faktor kegagalan dunia usaha untuk menciptakan kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab adalah *political cost* yang harus ditanggung perusahaan. Bahkan sedemikian tingginya biaya ini hingga mengakibatkan beberapa perusahaan multinasional memilih pindah dan merelokasikan usahanya di negara lain.

Oleh sebab itu, meskipun dunia usaha tetap merupakan garda terdepan dalam menciptakan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk kehidupan bernegara yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab. Upaya-upaya kontraproduktif yang selama ini terjadi harus dieliminir seminimal mungkin untuk membangun kembali integritas dan kredibilitas bisnis Indonesia yang hancur, khususnya di mata internasional. Alasannya, Indonesia membutuhkan masuknya investasi asing dan bukan sebaliknya, yaitu hengkangnya investasi asing keluar dari negara ini. Hal ini didasari kenyataan bahwa untuk membangun kembali perekonomian di negara ini sangat membutuhkan peranan investasi-investasi asing, khususnya investasi dari negara-negara maju.

B. GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN MANAJEMEN LABA

Salah satu kegagalan dunia untuk menciptakan kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab adalah manajemen laba. Upaya untuk merekayasa informasi ini telah menjadi faktor yang menyebabkan laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai fundamental suatu perusahaan. Laporan keuangan yang seharusnya berfungsi sebagai media komunikasi antara perusahaan dengan *stakeholder* menjadi kehilangan makna. Laporan keuangan tidak lagi secara obyektif menginformasikan apa yang telah dilakukan dan dialami perusahaan, sebab aktivitas rekayasa manajerial ini dimanfaatkan manajer untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang pernah dilakukannya. Bahkan manajemen laba juga dimanfaatkan manajer untuk merencanakan kecurangan-kecurangan yang akan dilakukannya di masa depan. Oleh sebab itu manajemen laba sebenarnya merupakan alat bagi manajer untuk mewujudkan kemauan dan keinginan pribadi. Sementara laporan keuangan merupakan media bagi manajer untuk mengekspresikan kemauan dan keinginan itu.

Upaya menyembunyikan kecurangan-kecurangan ini bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan sebab manajemen laba pada dasarnya dilakukan hanya dengan memanfaatkan metode dan prosedur akuntansi. Menariknya, kecurangan sekecil atau sebesar apapun dapat disembunyikan dengan mudah tanpa harus melanggar aturan yang ada, yaitu prinsip akuntansi berterima umum. Meskipun demikian upaya menyembunyikan kecurangan ini tidak mungkin dapat dilakukan perusahaan dalam jangka panjang. Apalagi secara konseptual sekali perusahaan melakukan kecurangan dan manajemen laba maka perusahaan itu akan melakukannya secara terus menerus. Alasannya, ibarat gali lubang tutup lubang maka sebuah kecurangan akan ditutupi dengan kecurangan lain. Oleh sebab itu meskipun dalam jangka pendek perusahaan masih mampu menutupi kecurangannya dengan manajemen laba, namun pada suatu saat perusahaan dengan sendirinya akan kehilangan kemampuan untuk melanjutkan upayanya itu. Akibatnya, perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan dan kolaps, bahkan bangkrut.

Upaya menyembunyikan kecurangan dengan kecurangan lain ini membuat unsur keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab tidak mungkin dapat terwujud

dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Secara konseptual seorang manajer seharusnya menyediakan informasi mengenai perusahaan yang dikelolanya sama persis untuk semua *stakeholder*. Tidak ada perbedaan informasi antara satu pihak dengan pihak lain, meskipun setiap pihak akan menggunakan informasi itu sesuai dengan kebutuhannya dan membuat keputusan yang berbeda. Namun aktivitas rekayasa manajerial dengan menyembunyikan informasi-informasi tertentu telah mengakibatkan laporan keuangan tidak netral dan menjadi berpihak hanya pada orang-orang tertentu, khususnya manajer perusahaan. Laporan keuangan tidak relevan lagi dengan kebutuhan *stakeholder* perusahaan, yang mengakibatkan *stakeholder* yang menggunakannya akan membuat keputusan strategis yang keliru.

Aktivitas rekayasa manajerial ini juga membuat laporan keuangan tidak transparansi lagi dalam menginformasikan apa yang telah dilakukan dan dialami perusahaan selama periode tertentu. Upaya menyembunyikan informasi ini membuat laporan keuangan hanya berisi informasi-informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan manajer perusahaan. Sementara informasi yang tidak memberi manfaat bagi manajer akan disembunyikan atau diubah. Akibatnya, laporan keuangan tidak relevan dan netral lagi dengan kepentingan dan kebutuhan *stakeholder* perusahaan. Selain itu, upaya-upaya manajerial ini juga membuat laporan keuangan tidak menginformasikan secara komprehensif atau lengkap semua transaksi atau kejadian yang telah dilakukan dan dialami perusahaan bersangkutan. Atau dengan kata lain, laporan keuangan menjadi tidak layak lagi digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan ekonomis *stakeholder* perusahaan.

Secara konseptual laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban manajer kepada *stakeholder* perusahaan. Manajer menggunakan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan semua transaksi dan kejadian yang telah dilakukan dan dialaminya selama satu periode tertentu. Manajer harus mengungkapkan semua informasi dan tidak boleh menyembunyikan informasi tertentu sebab informasi ini akan digunakan *stakeholder* perusahaan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomis. Oleh sebab itu upaya untuk merekayasa informasi akuntansi hanya membuat laporan keuangan tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai media pertanggungjawaban manajer kepada semua pihak yang mempunyai hubungan dan kepentingan dengan perusahaan. Inilah yang membuat informasi-informasi dalam laporan keuangan tidak

dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan validitasnya. Laporan keuangan tidak mampu menjadi cermin tanggung jawab manajer dalam mengelola sebuah perusahaan.

Ada berbagai kerugian yang terpaksa harus ditanggung oleh berbagai pihak akibat manajemen laba itu. *Pertama*, perusahaan pada suatu saat akan kehilangan kemampuan untuk melanjutkan rekayasa keuangan ini, yang mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Bahkan, apabila hal ini dilakukan dalam jangka panjang maka perusahaan dapat mengalami kebangkrutan. *Kedua*, *stakeholder* yang menggunakan laporan keuangan sebagai dasar membuat keputusan memperoleh informasi palsu sehingga keputusan-keputusan strategis dan ekonomis yang dibuatnya pun menjadi keliru. Kekeliruan semacam ini tidak hanya merugikan *stakeholder* bersangkutan tetapi secara tidak langsung juga harus ditanggung oleh publik yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan perusahaan. Alasannya, kekeliruan ini akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam mengalokasikan sumberdaya kepada pihak-pihak yang tidak tepat. Apabila hal ini dilakukan dalam jangka panjang akan mempengaruhi perekonomian suatu negara. Inilah yang membuat mengapa manajemen laba menjadi salah satu penyebab krisis ekonomi di Indonesia.

Untuk itu mengapa salah satu upaya mewujudkan *good corporate governance* adalah upaya untuk mengeliminir manajemen laba dalam pengelolaan dunia usaha. Ada beberapa faktor yang ditengarai mengapa upaya rekayasa manajerial ini seolah membudaya dalam pengelolaan sebuah perusahaan, *pertama*, aturan dan standar akuntansi, transparansi, dan auditing yang memang masih lemah. *Kedua*, sistem pengawasan dan pengendalian sebuah perusahaan yang belum optimal. *Ketiga*, *moral hazard* pengelola perusahaan yang memang cenderung mendahulukan dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan pribadi dan kelompoknya. Untuk itu pengelola perusahaan akan selalu mencoba untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sebuah aturan, standar, dan sistem. Pengelola juga mencoba menjalin kerjasama konspirasi dengan pihak-pihak yang seharusnya mengawasi dan mengendalikannya. Sebaliknya pihak-pihak ini pun cenderung lebih menyukai untuk bekerjasama dengan manajer untuk mengamankan posisinya daripada berseberangan dengan pengelola perusahaan itu.

Untuk itu salah satu kunci utama untuk mewujudkan bisnis yang bersih, sehat, dan bertanggung jawab adalah dengan membangun sistem pengawasan dan

pengendalian yang lebih baik. Alasannya, terwujudnya keseimbangan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sebuah perusahaan akan mendorong terciptanya keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Sistem pengawasan dan pengendalian yang baik akan menjadi penghambat bagi manajer untuk membuat kebijakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pribadi dan mengabaikan kepentingan dan kebutuhan publik. Sistem pengawasan dan pengendalian yang baik akan menghambat manajer untuk menyembunyikan, mengubah, atau menunda informasi yang seharusnya diketahui oleh publik. Sistem pengawasan dan pengendalian yang baik akan mendorong manajer selalu mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan-keputusan yang dibuatnya. Sistem pengawasan dan pengendalian yang baik akan mendorong manajer hanya melakukan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Atas dasar pemikiran ini maka dalam pengelolaan perusahaan yang bersih, sehat, dan bertanggung jawab diperlukan adanya pihak yang berperan sebagai pengawas dan pengendali tindakan dan keputusan manajer perusahaan. Apalagi pada dasarnya setiap tindakan dan keputusan manajerial menyangkut kepentingan *stakeholder*. Untuk itulah dalam prinsip *good corporate governance* ditekankan pentingnya keberadaan komite audit dan komisaris independen sebagai pengawas dan pengendali sebuah perusahaan. Komite audit merupakan pihak yang mempunyai tugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas internal dan eksternal audit. Sedangkan komisaris independen merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance* untuk menjamin bahwa transparansi dan keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua *stakeholder*, dan pengungkapan semua informasi meski ada konflik kepentingan.

Ada harapan yang ingin diwujudkan dengan dibangunnya sistem pengawasan dan pengendalian sebagai bagian dari prinsip *good corporate governance*, yaitu menurunnya manajemen laba dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Apalagi secara empiris memang terbukti bahwa penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Alasannya, prinsip *good corporate governance* yang diterapkan secara konsisten dapat menjadi penghambat (*constrain*) dan mengurangi penyimpangan yang mengakibatkan laporan

keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan ini. Hal ini disebabkan upaya menerapkan prinsip *good corporate governance* membuat sebuah perusahaan akan mempunyai komite audit dan komisaris independen sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Padahal keempat faktor inilah yang membuat laporan keuangan sebuah perusahaan menjadi lebih berkualitas.

Tabel 5.4
Hubungan Manajemen Laba dengan *Good Corporate Governance*

Peneliti	Kesimpulan
Chtourou <i>et al</i> (2001)	Penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> secara konsisten dapat menjadi penghambat aktivitas manajemen laba.
Beasley <i>et al.</i> (1996)	Ada hubungan antara penerapan <i>good corporate governance</i> dengan berkurangnya penyimpangan pada pelaporan keuangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Carcello dan Neal (2000)	Ada hubungan positif antara independensi komite audit dengan berkurangnya tekanan manajer terhadap komite audit pada saat menyusun laporan keuangan.
McMullen dan Randghun (1996)	Ada hubungan positif antara kompetensi anggota komite audit dengan menurunnya kemungkinan dilakukannya manajemen laba.

Sumber: Chtourou *et al.*, 2001.

Beberapa studi menyimpulkan bahwa ada hubungan antara karakteristik komite audit dan komisaris independen dengan upaya manajemen laba sebagai ukuran keberhasilan penerapan prinsip *good corporate governance*. Selain itu proporsi independensi komite audit juga mempunyai hubungan positif antara komite audit dengan berkurangnya tekanan manajer terhadap komite audit pada saat menyusun laporan keuangan. Independensi komite audit merupakan salah satu ukuran penerapan prinsip *good corporate governance* selain kompetensi dan aktivitas komite audit. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa independensi komite audit mempunyai hubungan positif dengan level manajemen laba. Selain itu kompetensi anggota komite audit ternyata juga mempunyai hubungan dengan menurunnya kemungkinan dilakukannya

manajemen laba. Atau dengan kata lain, semakin kompeten komite audit akan semakin mengurangi kemungkinan aktivitas manajemen laba.

Selain komite audit, dewan komisaris juga merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam menyediakan laporan keuangan yang *reliable*. Oleh sebab itu keberadaan dewan ini akan mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan dipakai sebagai ukuran tingkat rekayasa keuangan yang dilakukan seorang manajer. Sejalan dengan pengujian yang membuktikan apakah besarnya dewan komisaris mempunyai hubungan yang positif dengan kemungkinan penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Studi ini tidak menemukan hubungan antara kedua hal itu, karena semakin besar dewan direktur semakin tidak efisien dan semakin lemah kontrolnya terhadap manajer. Ada alasan logis mengapa hal ini bias terjadi, yaitu dewan komisaris yang independensi secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajer, sehingga mengurangi kemungkinan penyimpangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan manajer. juga menemukan hubungan negatif antara besarnya *non-executif members* dengan tingkat penyimpangan ini. Hingga secara singkat dapat dikatakan ada hubungan negatif antara proporsi independensi dewan komisaris dengan level manajemen laba. Demikian juga kompetensi dewan komisaris yang mempunyai hubungan negatif dengan level manipulasi ini. Atau dengan kata lain, semakin kompeten dewan komisaris, semakin mengurangi kemungkinan penyimpangan dalam pelaporan keuangan.

BAB 6

METODE MANAJEMEN LABA

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah membaca bab ini pembaca diharapkan dapat memahami bahwa:

1. Manajemen laba merupakan sisi negatif pemakaian akuntansi berbasis akrual.
2. Manajemen laba pada dasarnya merupakan kegagalan prinsip akuntansi dan distorsi terhadap prinsip akuntansi dengan menggunakan metode-metode tertentu.

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah membaca bab ini pembaca diharapkan dapat memahami bahwa:

1. Secara konseptual manajemen laba dilakukan dengan menggunakan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan. Alasannya, komponen akrual tidak memerlukan bukti fisik sehingga rawan untuk direkayasa.
 2. Ada beberapa metode yang bisa dimanfaatkan seseorang untuk merekayasa laba perusahaannya, yaitu *accounting method choice*, *accounting method application*, *accounting method timing*, dan *timing*.
-

Ada sisi positif dari perkembangan penelitian akuntansi keuangan dan keperilakuan (*financial and behavioral accounting*) selama beberapa dekade ini. Para akademisi mulai mengembangkan berbagai metode dan model untuk mengidentifikasi dan mendeteksi manajemen laba. Hal ini didasari kenyataan semakin meluasnya upaya merekayasa informasi dalam laporan keuangan, padahal laporan ini merupakan sumber informasi utama bagi *stakeholder* dalam membuat keputusan ekonomi. Ada tujuan yang ingin dicapai manajer dengan manajemen laba ini, *pertama*, menyesatkan pihak lain yang menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan-keputusan strategis. Oleh sebab itu apabila dasar dan informasi yang dipakai untuk membuat keputusan telah direkayasa dan tidak lagi mencerminkan nilai fundamental perusahaan maka mudah dimengerti jika keputusan-keputusan yang dibuat *stakeholder* menjadi yang tidak tepat. *Kedua*, manajer dapat memperoleh manfaat pribadi dari kesalahan yang dibuat

stakeholder. Semakin tinggi kesalahan yang dibuat *stakeholder* maka semakin tinggi pula manfaat yang akan diterima oleh manajer.

Oleh sebab itu manajemen laba hanya menguntungkan satu pihak tertentu, yaitu manajer perusahaan dan kelompoknya, dan merugikan pihak lain, baik pemilik, investor, kreditur, maupun pemerintah. Bahkan, dampak *multiplier* rekayasa informasi ini tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak itu, namun juga oleh publik yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan perusahaan. Atau dengan kata lain manajemen laba tidak hanya mempengaruhi dan merugikan perekonomian mikro maupun juga mempengaruhi dan merugikan perekonomian makro, bahkan perekonomian global. Alasannya, saat ini perekonomian suatu negara tidak bisa dilepaskan dengan perekonomian negara-negara lain di seluruh dunia, sehingga apa yang terjadi di negara tertentu akan berdampak secara luas perekonomian global. Selain itu seiring dengan semakin banyaknya perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara mengakibatkan apa yang terjadi di satu negara akan mempengaruhi perusahaan afiliasinya di negara lain.

Maka atas dasar alasan-alasan itulah para akademisi mulai mengembangkan model untuk mengidentifikasi dan mendeteksi manajemen laba. Ada tiga pendekatan yang telah dihasilkan seiringan dengan perkembangan ilmu dan penelitian akuntansi ini, yaitu model yang berbasis *aggregate accrual*, *specific accruals*, dan *distribution of earnings after management*. Namun sejauh ini hanya model berbasis *aggregate accrual* diterima secara umum sebagai model yang memberikan hasil yang paling kuat dalam mendeteksi manajemen laba. Alasannya, model ini sejalan dengan basis akuntansi akrual yang selama ini banyak dipergunakan (*accruals basis of accounting*), yang membuat munculnya komponen akrual yang sangat mudah untuk dipermainkan besar kecilnya. Selain itu, model *aggregate accrual* menggunakan semua komponen laporan keuangan untuk mendeteksi rekayasa keuangan itu. Hal ini sejalan dengan basis akuntansi yang digunakan, sebab *account* akrual memang ada dalam setiap komponen laporan keuangan tanpa terkecuali. Model berbasis *aggregate accrual* ini dikembangkan oleh beberapa peneliti, yaitu Healy, DeAngelo, Jones, Dechow, Sloan, dan Sweeney, serta Kang dan Suvaramakrishnan.

A. AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

Secara teoritis manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab akrual merupakan komponen yang mudah untuk dipermainkan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan. Alasannya, komponen akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik, sehingga upaya mempermainkan besar kecilnya komponen akrual tidak harus disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan. Oleh sebab itu upaya awal untuk memahami manajemen laba adalah dengan memahami dasar akuntansi yang selama ini digunakan dan diakui secara luas, yaitu akuntansi berbasis akrual. Basis akuntansi ini merupakan dasar pencatatan akuntansi yang mewajibkan perusahaan mengakui hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kapan kas akan diterima atau dikeluarkan.

Untuk mengakui biaya yang sudah menjadi kewajiban maka perusahaan tidak perlu memperhatikan waktu dan pengeluaran kas. Artinya biaya dapat diakui pada periode tertentu walau pengeluaran kas telah terjadi pada periode sebelumnya. Atau sebaliknya biaya baru akan diakui periode yang akan datang meski pengeluaran kas telah dilakukan periode sebelumnya. Selain itu perusahaan juga bisa biaya yang merupakan komponen alokasi harga pokok aktiva yang dimilikinya, pada saat barang terjual. Sebaliknya metode pencatatan ini membuat perusahaan dapat menunda pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode berikutnya, meskipun kas telah diterima. Artinya, perusahaan dapat mengakui pendapatan pada periode tertentu walaupun kas baru akan diterima pada periode yang akan datang. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai *account* akrual dalam laporan keuangan, misalkan piutang dagang, pendapatan diterima dimuka, hutang biaya, biaya depresiasi, dan biaya dikeluarkan dimuka, biaya cadangan, biaya depresiasi, dan lain-lain.

Model pencatatan akrual ini berbeda dengan model akuntansi berbasis kas (*cash basis of accounting*) yang hanya mengakui pendapatan pada saat kas diterima dan biaya pada saat kas dikeluarkan. Akuntansi berbasis kas ini menghitung dan menentukan laba periode berjalan tergantung pada penerimaan dan pengeluaran kas tunai sehingga prinsip penandingan (*matching cost to revenue*) diabaikan. Akibatnya, laporan keuangan yang dibuat dengan basis kas tidak dapat mencerminkan kinerja

sesungguhnya suatu perusahaan selama periode tertentu. Model perhitungan laba semacam ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum sehingga membuat akuntansi berbasis kas tidak diterima secara umum dan relatif jarang digunakan. Sedangkan model pencatatan akuntansi berbasis akrual ini diterima dan digunakan di seluruh dunia karena memang tidak semua transaksi yang dilakukan perusahaan merupakan transaksi tunai.

Namun demikian ada kelemahan mendasar yang melekat (*inherent*) dalam akuntansi berbasis akrual, yaitu sifat *account* akrual yang rawan untuk direkayasa, dengan atau tanpa harus melanggar prinsip akuntansi berterima umum. Hanya dengan mempermainkan komponen-komponen akrual, khususnya komponen pendapatan dan biaya, perusahaan dapat mengatur besar kecilnya laba dalam suatu periode tertentu dibandingkan laba sesungguhnya. Sebagai contoh, untuk memperbesar pendapatan, perusahaan dapat mengakui barang yang dititipkan sebagai barang konsinyasi atau barang yang dikeluarkan dari perusahaan sebagai barang terjual. Atau sebaliknya, untuk memperkecil laba, perusahaan dapat menunda mengakui pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode berikutnya. Selain itu, perusahaan juga dapat mengakui laba periode berjalan menjadi lebih kecil atau besar dibanding laba sesungguhnya, dengan cara mengatur besar kecilnya biaya. Atas dasar pemikiran ini maka laba dapat dihitung sebagai berikut:

$$Laba_{it} = \Delta kas_{it} + capital\ contributions_{it} + dividen\ kas_{it} + \Delta piutang_{it} + \Delta persediaan_{it} + \Delta payables_{it} + \Delta plant\ assets, net\ of\ additions\ and\ disposals + \dots + etc$$

Secara konseptual model akuntansi berbasis akrual menggunakan komponen kas dan akrual dalam laporan keuangan. Alasannya, ada dua macam transaksi yang selama ini biasa dilakukan perusahaan dalam proses usahanya, yaitu transaksi kas (tunai) maupun non-kas (non-tunai). Komponen kas merupakan komponen yang relatif sulit untuk direkayasa, sebab komponen ini menunjukkan berapa jumlah kas yang diterima perusahaan dalam periode tertentu. Artinya transaksi komponen kas harus disertai dengan bukti berupa uang atau yang setara dengan uang dalam jumlah yang sama, yang secara fisik yang ada. Sebaliknya, transaksi akrual merupakan transaksi yang tidak harus disertai dengan uang atau sejenisnya. Artinya seseorang tidak perlu harus

menunjukkan bukti sejumlah kas yang diterima atau dikeluarkannya untuk mengatur besar kecilnya angka-angka transaksinya.

Maka langkah awal untuk mengidentifikasi manajemen laba adalah dengan mengeluarkan komponen kas dari model akuntansi di atas untuk menghitung dan menentukan besarnya komponen akrual yang diperoleh perusahaan selama satu periode tertentu. Untuk itu laba akuntansi di atas harus dikurangi dengan arus kas yang diperoleh dari operasi perusahaan (*cash flow from operation*) selama periode tersebut. Sedangkan komponen arus kas yang lain, yaitu arus kas pendanaan (*cash flow from financing*) dan arus kas investasi (*cash flow from investment*), tidak dikurangkan dari laba akuntansi ini. Alasannya, kedua arus kas ini bukan merupakan hasil yang diperoleh dari operasional perusahaan selama periode bersangkutan, tetapi merupakan hasil yang diperoleh dari aktivitas non-operasional perusahaan (*extraordinary activities*). Maka atas dasar pemikiran itu secara matematis pemahaman di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Laba_t = Kas_t - Total Akrual_t$$

Apabila besarnya kas yang diperoleh perusahaan dihitung sebagai *cash flow from operation*, maka rumus diatas dapat dirumuskan kembali sebagai berikut:

$$TAC_t = Laba_t - CFO_t$$

Dimana: TAC_t = Total akrual periode- t .
 CFO_t = Arus kas dari operasi periode- t .

Setelah berhasil menentukan besarnya komponen akrual yang diperoleh perusahaan selama satu periode, maka langkah kedua adalah memisahkan komponen akrual itu menjadi dua komponen utama, yaitu *discretionary accruals* dan *nondiscretionary accruals* untuk menentukan apakah ada dan besar kecilnya aktivitas rekayasa manajerial itu. *Discretionary accruals* merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi. Ada beberapa metode yang bisa dipakai manajer perusahaan untuk merekayasa besar kecilnya *discretionary accruals* ini sesuai dengan

tujuan yang ingin dicapainya, misalkan kebebasan menentukan estimasi dan memilih metode depresiasi aktiva tetap, menentukan estimasi prosentase jumlah piutang tak tertagih, memilih metode penentuan jumlah persediaan, dan sebagainya.

Sedangkan *nondiscretionary accruals* merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang diterima secara umum, misalkan metode depresiasi dan penentuan persediaan yang dipilih harus mengikuti metode yang diakui dalam prinsip akuntansi. Atas dasar pemikiran bahwa komponen akrual yang bebas dipermainkan dengan kebijakan manajerial adalah *discretionary accruals*, maka sebagian besar model manajemen laba mengukur atau memproksikan aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan komponen *discretionary accruals*. Hingga atas dasar pemikiran itu, yaitu total akrual merupakan penjumlahan *discretionary accruals* dan *nondiscretionary accruals*, model dasar untuk menghitung manajemen laba dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TAC_t = DA_t + NDA_t$$

Dimana: TAC_t = Total akrual periode- t .
 DA_t = *Discretionary accruals* periode- t .
 NDA_t = *Nondiscretionary accruals* periode- t .

Apabila $TAC_t = Laba_t - CFO_t$ dirumuskan sebagai $Labat = CFO_t - TAC_t$, maka formula di atas dapat dirumuskan kembali sebagai berikut:

$$Labat = CFO_t + DA_t + NDA_t$$

Dimana: CFO_t = Arus kas dari operasi periode- t .
 DA_t = *Discretionary accruals* periode- t .
 NDA_t = *Nondiscretionary accruals* periode- t .

Model akuntansi akrual di atas dengan jelas menunjukkan bahwa laba akuntansi terdiri dari komponen arus kas operasi, *discretionary accruals*, dan *nondiscretionary accruals*. Secara spesifik model ini juga menunjukkan bahwa untuk mendeteksi manajemen laba dimulai dengan menghitung laba yang diperoleh suatu perusahaan

dalam satu periode tertentu. Selanjutnya laba ini dipecah menjadi laba kas dan laba non-kas akrual untuk menentukan jumlah laba akrual untuk menghitung nilai *discretionary accruals* dan *nondiscretionary accruals*. Secara empiris nilai *discretionary accruals* bisa nol, positif, atau negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan selalu melakukan manajemen laba dalam mencatat dan menyusun informasi keuangannya. Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola perataan laba (*income smoothing*). Sedangkan nilai positif menunjukkan bahwa manajemen laba dilakukan dengan pola penaikkan laba (*income increasing*) dan nilai negatif menunjukkan manajemen laba dengan pola penurunan laba (*income decreasing*).

Secara konseptual model di atas memang sudah dapat dipakai untuk mendeteksi manajemen laba meski dalam perkembangannya model di atas diurai lebih detail untuk mendeteksi komponen-komponen dasar yang dipakai untuk mempermainkan besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Upaya ini penting untuk dilakukan mengingat bahwa untuk mengatur laba, manajer dapat mempermainkan semua komponen laporan keuangan, baik komponen lancar (*current*) maupun jangka panjang (*long-term*). Maka upaya ini sebenarnya untuk mengidentifikasi kecenderungan manajerial dalam melakukan manajemen laba, apakah cenderung menggunakan komponen lancar atau jangka (*long-term assets*). Untuk itu *discretionay accruals* dipecah menjadi *discretionay current accruals* dan *discretionay long-term accruals*, demikian juga dengan *nondiscretionary accruals* yang dapat dipecah menjadi *nondiscretionay current accruals* (NDCA) dan *nondiscretionay long-term accruals* (NDLTA) dan dirumuskan sebagai berikut:

$$TAC_t = (DCA_t + DLTA_t) + (NDCA_t + NDLTA_t)$$

Dimana: TAC_t = Total akrual periode- t .
 DCA_t = *Discretionary current accruals* periode- t .
 $DLTA_t$ = *Discretionary long-term accruals* periode- t .
 $NDCA_t$ = *Nondiscretionary current accruals* periode- t .
 $NDLTA_t$ = *Nondiscretionary long-term accruals* periode- t .

Apabila $TAC_t = Laba_t - CFO_t$ dirumuskan sebagai $Labat = CFO_t - TAC_t$, maka formula di atas dapat dirumuskan kembali sebagai berikut:

$$Laba_t = CFO_t + (DCA_t + DLTA_t) + (NDCA_t + NDLTA_t)$$

Dimana: CFO_t = Arus kas dari operasi periode- t .
 DCA_t = *Discretionary current accruals* periode- t .
 $DLTA_t$ = *Discretionary long-term accruals* periode- t .
 $NDCA_t$ = *Nondiscretionary current accruals* periode- t .
 $NDLTA_t$ = *Nondiscretionary long-term accruals* periode- t .

Ilustrasi-Penggunaan Model Dasar Manajemen Laba

Ilustrasi berikut ini akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah di atas diterapkan untuk mengidentifikasi total akrual suatu perusahaan dalam suatu periode. Total akrual merupakan selisih dari laba bersih akuntansi dengan arus kas operasi dalam suatu periode. Ilustrasi ini menggunakan data keuangan sebuah perusahaan dengan periode pengamatan selama 5 tahun, yaitu tahun 1996 sampai dengan tahun 2000.

LK	Laba bersih	Arus kas operasi	Total akrual
1996	16.373	55.323	-38.950
1997	-365.544	-645.361	279.817
1998	-724.478	-13.108	-711.370
1999	166.515	62.141	-104.374
2000	-423.232	94.186	-517.419

Keterangan: LK = Tahun laporan keuangan
 Total akrual = Laba bersih-Arus kas operasi

Dari tabel di atas terlibat nilai total akrual untuk periode tertentu. Ada periode dimana laba bersih lebih kecil maupun lebih besar dibandingkan dengan arus kas operasi.

1. Laba bersih lebih kecil dibandingkan arus kas operasi.

Upaya semacam ini disebut *income decreasing management*. Ini bisa dilihat untuk data tahun 1996 dan 1998. Ada dua kemungkinan yang bisa dipakai untuk menjelaskan mengapa hal ini terjadi:

- a. Secara konseptual besar kecilnya arus kas operasi dipengaruhi oleh besar kecilnya transaksi penerimaan tunai. Artinya, semakin besar transaksi penerimaan tunainya semakin besar pula arus kas operasi atau semakin kecil transaksi penerimaan tunainya semakin kecil pula arus kas operasinya. Maka

apabila yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu transaksi penerimaan tunai lebih kecil daripada arus kas operasi, kemungkinan besar perusahaan berusaha menyembunyikan pendapatan sesungguhnya.

Upaya di atas bisa dilakukan dengan mengakui penerimaan tunai sebagai pendapatan diterima dimuka sehingga transaksi ini harus dicatat dalam neraca sebagai komponen hutang dan bukan dalam laporan rugi laba sebagai komponen pendapatan. Selain mengakibatkan pendapatan periode berjalan akan menjadi lebih kecil dibandingkan pendapatan sesungguhnya maka pengakuan semacam ini membuat pendapatan periode berjalan menjadi lebih kecil dibandingkan arus kas operasi periode berjalan. Hingga laba bersih periode berjalan pun akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan laba bersih sesungguhnya maupun arus kas operasi sesungguhnya.

- b. Secara konseptual besar kecilnya laba bersih dipengaruhi oleh besar kecilnya biaya periode berjalan. Artinya, semakin besar biaya akan membuat semakin kecil laba periode berjalan atau semakin kecil biaya akan membuat semakin besar laba periode berjalan. Oleh sebab itu tanpa harus menyembunyikan pendapatan sesungguhnya perusahaan dapat mempunyai laba bersih bisa lebih rendah daripada arus kas operasi apabila biaya yang dikeluarkan besar. Selain itu dengan mempermainkan biaya akrual menjadi lebih besar daripada biaya sesungguhnya laba bersih perusahaan pun juga bisa menjadi lebih kecil daripada arus kas operasi.

Upaya lain yang bisa dilakukan perusahaan adalah dengan mempermainkan pendapatan tunai periode berjalan agar menjadi lebih kecil daripada pendapatan sesungguhnya. Upaya ini akan mengakibatkan laba bersih menjadi lebih kecil daripada laba sesungguhnya meskipun perusahaan tidak mempermainkan biaya. Upaya lain lagi adalah dengan mengatur besar kecilnya pendapatan dan biaya sekaligus. Pendapatan tunai diatur supaya lebih kecil dibandingkan pendapatan sesungguhnya, sedangkan biaya diatur menjadi lebih besar daripada biaya sesungguhnya. Hal ini secara langsung juga akan mengakibatkan laba bersih periode berjalan menjadi lebih kecil dibandingkan arus kas operasinya.

2. Laba bersih lebih besar dibandingkan arus kas operasi.

Upaya semacam ini disebut dengan *income increasing management*. Ini bisa dilihat untuk data tahun 1997, 1999, dan 2000. Ada dua kemungkinan yang bisa dipakai untuk menjelaskan mengapa hal ini terjadi:

- a. Hal ini menunjukkan bahwa selama satu periode tertentu perusahaan lebih banyak melakukan banyak transaksi penerimaan non tunai (kredit) daripada transaksi penerimaan tunai. Hingga pendapatan yang diakui selama periode itu akan lebih besar dibandingkan kas yang diterima. Akibatnya, laba bersih pada periode bersangkutan akan lebih besar dibandingkan arus kas operasinya.

Kemungkinan lain adalah perusahaan mengakui pendapatan selama satu periode tertentu lebih besar dibandingkan pendapatan sesungguhnya. Hal ini bisa dilakukan dengan mempermainkan pendapatan-pendapatan akrual yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik, misalkan mengakui pendapatan dari penjualan barang konsinyasi yang dititipkan kepada pihak lain yang sebenarnya belum terjual atau mengubah metode transaksi penjualan dari *FOB destination* menjadi *FOB shipping point*, sehingga barang yang baru dikirim kepada pembeli sudah dapat diakui sebagai pendapatan. Upaya semacam ini akan membuat pendapatan perusahaan akan menjadi lebih tinggi dibandingkan pendapatan sesungguhnya pada periode tertentu. Hingga laba bersih periode bersangkutan akan lebih besar dibandingkan arus kas operasinya.

- b. Secara konseptual besar kecilnya laba bersih juga dipengaruhi oleh besar kecilnya biaya periode berjalan. Artinya, semakin besar biaya akan membuat semakin kecil laba periode berjalan atau semakin kecil biaya akan membuat semakin besar laba periode berjalan. Oleh sebab itu tanpa harus mempermainkan pendapatan sesungguhnya perusahaan dapat mempunyai laba bersih bisa lebih besar daripada arus kas operasi apabila biaya yang dikeluarkan relatif kecil. Selain itu perusahaan pun bisa mempermainkan biaya akrual menjadi lebih kecil daripada biaya sesungguhnya sehingga laba bersih perusahaan pun juga bisa menjadi lebih besar daripada arus kas operasi.

Upaya lain yang bisa dilakukan perusahaan adalah dengan mempermainkan pendapatan tunai periode berjalan agar menjadi lebih besar daripada pendapatan sesungguhnya. Upaya ini akan mengakibatkan laba bersih menjadi lebih besar

daripada laba sesungguhnya meskipun perusahaan tidak mempermainkan biaya. Upaya lain lagi adalah dengan mengatur besar kecilnya pendapatan dan biaya sekaligus. Pendapatan tunai diatur supaya lebih besar dibandingkan pendapatan sesungguhnya, sedangkan biaya diatur menjadi lebih kecil daripada biaya sesungguhnya. Hal ini secara langsung juga akan mengakibatkan laba bersih periode berjalan menjadi lebih besar dibandingkan arus kas operasinya.

Untuk mengidentifikasi lebih lanjut manajemen laba maka nilai total akrual di atas harus dipecah menjadi *discretionary accruals* dan *nondiscretionary accruals* dengan menggunakan model-model empiris yang dibahas akan di Bab 7-Model Empiris. *Discretionary accruals* merupakan proksi atau ukuran dari manajemen laba yang selama ini dipakai secara luas. Demikian juga dengan metode untuk memisahkan *discretionary accruals* menjadi dua komponen utama pembentuknya, yaitu *discretionary current accruals* dan *discretionary long-term accruals*.

B. METODE MANAJEMEN LABA

Semakin meluasnya aktivitas manajemen laba memang telah mengakibatkan hancurnya tatanan ekonomi, etika, dan moral, dipertanyakannya kembali kelayakan prinsip akuntansi serta integritas dan kredibilitas para pelaku ekonomi dan akuntan publik tidak ada kesepakatan antar pihak terhadap aktivitas kecurangan ini. Kelayakan prinsip akuntansi berterima umum ini disebabkan prinsip akuntansi merupakan *regulation driven* yang harus dipakai seseorang ketika mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan. Oleh sebab itu saat ini berkembang dua pendapat yang dipakai untuk menjelaskan mengapa manajemen laba dilakukan perusahaan terkait dengan prinsip akuntansi ini.

1. Distorsi terhadap prinsip akuntansi

Ada pendapat yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan upaya perusahaan untuk melakukan distorsi prinsip akuntansi berterima umum. Meskipun rekayasa informasi ini sebenarnya tidak selalu harus dilakukan dengan melanggar prinsip akuntansi itu. Sebab prinsip akuntansi yang mempunyai spektrum yang luas memang mudah dimanfaatkan oleh siapapun yang menguasai dan memahaminya. Sebagai contoh adalah kebebasan manajerial dalam mengestimasi nilai aktiva atau memilih dan mengganti metode akuntansi yang digunakannya. Hanya dengan

mengganti estimasi atau metode akuntansi ini, manajer perusahaan dapat mengatur besar kecilnya laba yang harus diungkapkannya dalam laporan keuangan. Atau dengan kata lain, manajemen laba merupakan cermin dari upaya manajer perusahaan untuk mencari dan memanfaatkan “celah” yang ada memang dalam prinsip akuntansi.

Maka bisa dikatakan bahwa manajemen laba mencerminkan sifat dasar manusia yang selalu berusaha memaksimalkan kesejahteraannya dari kelemahan peraturan yang ada. Apalagi pada dasarnya prinsip akuntansi hanyalah *regulation driven* dan bukan *ethic driven*, sehingga tidak bisa mengikat pemakainya untuk mengikutinya secara penuh. Oleh sebab itu sebaik apapun prinsip akuntansi tidak ada gunanya bila pemakainya tidak mempunyai niat baik untuk mematuhi. Manajemen laba akan tetap dilakukan meskipun tidak ada celah dalam prinsip akuntansi.

2. Kegagalan prinsip akuntansi

Ada pendapat yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan kegagalan prinsip akuntansi untuk menyediakan regulasi yang tepat. Hal ini disebabkan standar akuntansi tidak secara tegas mengatur metode mana yang boleh dipakai perusahaan dan metode mana yang dilarang untuk diterapkan. Hingga beragam metode dan prosedur akuntansi yang diterima dan diakui menyebabkan manajer perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang ingin dicapainya. Misalnya, untuk mengatur besar kecilnya biaya depresiasi setiap periodenya manajer dapat memilih, mengganti, dan menggunakan ada metode garis lurus, saldo menurun, jumlah angka tahun, dan sebagainya. Atau metode *first in first out* (FIFO), *last in first out* LIFO, rata-rata (*average*), dan sebagainya untuk menentukan nilai persediaan yang dimiliki perusahaan.

Selain itu standar akuntansi juga tidak secara tegas mengatur periode estimasi yang diperkenankan untuk suatu aktiva tertentu. Perusahaan bebas menentukan nilai estimasi untuk aktiva yang dimilikinya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang dicapainya. Misalkan, untuk menurunkan laba yang dilaporkannya manajer perusahaan dapat mengaturnya melalui biaya depresiasi, yaitu membuat umur ekonomi aktiva tetap relatif panjang. Atau sebaliknya untuk menaikkan laba manajer perusahaan dapat menurunkan umur ekonomis aktiva tetap. Metode lain untuk mengatur besar kecilnya laba itu adalah mengatur nilai harga pokok

penjualannya (*cost of goods sold*) dengan menggunakan metode pengakuan persediaannya. Selain itu masih ada banyak metode-metode lain dapat digunakan untuk mengatur laba sesuai dengan keinginan dan tujuan manajer.

Oleh sebab itu standar akuntansi seolah-olah mengakomodasi dan memberi kesempatan perusahaan untuk mengatur dan mengelola laba sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Meskipun harus diakui munculnya manajemen laba tidak hanya masalah lemahnya standar akuntansi, tetapi juga merupakan masalah *moral hazard* pengelola perusahaan. Artinya, untuk membuat informasi yang jujur tidak hanya membutuhkan regulasi yang tidak mempunyai celah untuk dipermainkan (*regulation driven*), tetapi juga dibutuhkan sikap etis dan moral dari para pembuat informasi itu (*ethic driven*). Sebab hanya mengandalkan regulasi yang baik tanpa mempertimbangkan sikap etis dan moral seseorang akan sulit tercipta sesuatu dan kondisi yang lebih kondusif. Hingga regulasi yang baik serta sikap etis dan moral seharusnya berjalan seiring dan bersama-sama.

Secara konseptual metode untuk melakukan manajemen laba dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu *accounting method choice*, *accounting method application*, *accounting method timing*, dan *timing*. *Accounting method choice* merupakan upaya untuk merencanakan informasi keuangan dengan cara memilih standar akuntansi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. *Accounting method application* merupakan upaya untuk merencanakan informasi keuangan dengan cara menerapkan dan menggunakan standar akuntansi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya. *Accounting method timing* merupakan upaya untuk merencanakan informasi keuangan dengan menerapkan metode yang telah dipilihnya pada saat yang tepat. Sedangkan *timing* merupakan upaya untuk merencanakan informasi keuangan dengan memilih dan menerapkan kebijakan manajerial pada saat yang tepat.

B.1. ACCOUNTING METHOD CHOICE

Ada berbagai metode akuntansi yang selama ini diakui oleh prinsip akuntansi, misalkan metode depresiasi garis lurus atau saldo menurun untuk mengalokasikan harga perolehan (*cost*) aktiva tetap. Metode FIFO atau LIFO untuk menentukan harga pokok persediaan. Selain itu ada metode estimasi akuntansi untuk menentukan umur ekonomis, prosentase biaya kerugian, dan penurunan nilai aktiva yang dimiliki perusahaan. Prinsip

akuntansi juga memberi kebebasan kepada penggunanya untuk memilih metode dan prosedur akuntansi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Selain itu, prinsip akuntansi memberi kebebasan untuk mengganti metode akuntansi yang selama ini digunakannya, dengan catatan penggantian metode tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan yang dipublikasikannya.

Tabel 6.1
Metode Akuntansi

Metode Akuntansi	Metode yang Bisa Dipilih
Depresiasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Garis lurus (<i>straight line</i>) ▪ Saldo menurun (<i>double declining balance</i>) ▪ Jumlah angka tahun (<i>sum of year digit</i>)
Harga pokok persediaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FIFO (<i>first in first out</i>) ▪ LFO (<i>last in first out</i>) ▪ Rata-rata (<i>average</i>)

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2005.

Sejalan dengan kebebasan itu, manajer termotivasi dan terdorong untuk memilih dan mengganti metode akuntansi yang selama ini dipakainya untuk mengoptimalkan kesejahteraan pribadi. Atau dengan kata lain, manajer hanya mau menggunakan suatu metode akuntansi tertentu apabila ada manfaat yang bisa diperoleh. Hingga metode akuntansi yang tidak memberi manfaat jika digunakan dalam melaporkan kinerja tidak akan pernah dipergunakan oleh manajer bersangkutan. Manajer juga akan menggantii satu metode tertentu dengan metode akuntansi yang lain apabila metode yang sebelumnya dipakai tidak sesuai dengan kepentingan yang ingin diwujudkankannya. Upaya mengganti metode akuntansi dipergunakan manajer yang ingin mengatur besar kecilnya laba perusahaan yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

Secara konseptual, apabila manajer ingin melaporkan labanya lebih tinggi dari laba yang sesungguhnya, maka manajer dapat memilih, menggunakan, atau mengganti metode akuntansi yang sesuai dengan tujuan yang dicapainya tersebut, misalkan menggunakan metode FIFO untuk menentukan harga pokok persediaannya. Hal ini disebabkan metode FIFO memungkinkan harga pokok yang dipakai sebagai salah satu komponen untuk menghitung laba menjadi lebih kecil dibanding apabila menggunakan metode LIFO untuk menghitung harga pokok persediaan tersebut. Contoh lain adalah dengan mengubah metode depresiasi aktiva tetap saldo menurun menjadi garis lurus sebab metode ini membuat biaya depresiasi pada periode-periode awal relatif lebih kecil

dibandingkan jika menggunakan metode saldo menurun. Namun sebaliknya, apabila depresiasi dilakukan pada periode-periode akhir pengalokasian harga perolehan aktiva tetap itu, metode saldo menurun yang dipakai untuk menurunkan biaya depresiasi. Hingga apabila biaya periode berjalan yang dikeluarkan perusahaan lebih kecil dari biaya sesungguhnya, maka laba periode berjalan akan lebih tinggi dari laba sesungguhnya.

Sebaliknya, apabila manajer ingin melaporkan labanya lebih rendah dari laba sesungguhnya maka manajer dapat memilih dan menggunakan metode LIFO untuk menentukan harga pokok persediaan. Hal ini disebabkan metode LIFO memungkinkan harga pokok yang dipakai sebagai salah satu komponen untuk menghitung laba akan menjadi lebih besar dibanding apabila menggunakan metode FIFO untuk menghitung harga pokok persediaan tersebut. Contoh lain adalah dengan mengubah metode depresiasi aktiva tetap garis lurus menjadi saldo menurun sebab metode ini membuat biaya depresiasi pada periode-periode awal relatif lebih besar dibandingkan jika menggunakan metode garis lurus. Namun sebaliknya, apabila depresiasi dilakukan pada periode-periode akhir pengalokasian harga perolehan aktiva tetap itu, metode garis lurus yang dipakai untuk menurunkan biaya depresiasi. Hingga apabila biaya periode berjalan yang dikeluarkan perusahaan lebih besar dari biaya sesungguhnya, maka laba periode berjalan akan lebih rendah dari laba sesungguhnya.

Kebebasan dalam menentukan nilai estimasi juga akan dimanfaatkan manajer ketika mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan kepentingannya. Apabila manajer ingin membuat kinerja kelihatan lebih bagus dari yang seharusnya maka manajer menentukan nilai cenderung rendah, dan sebaliknya jika manajer ingin membuat kinerjanya kelihatan lebih rendah dari kinerja sesungguhnya. Untuk itu, manajer dapat menentukan estimasi umur ekonomis aktiva lebih tinggi dari umur ekonomis sebelumnya. Hal ini disebabkan umur ekonomis yang tinggi akan mengakibatkan biaya depresiasi per periode akan menjadi lebih rendah jika dibandingkan menggunakan umur ekonomis aktiva yang relatif lebih pendek. Hingga sama halnya dengan penjelasan di atas, biaya periode yang rendah akan mengakibatkan laba periode berjalan menjadi lebih tinggi. Selain itu, manajer juga dapat menentukan estimasi umur ekonomis aktiva lebih pendek dari umur ekonomis sebelumnya. Hal ini disebabkan umur ekonomis yang pendek akan mengakibatkan biaya depresiasi per

periode akan menjadi lebih tinggi jika dibandingkan menggunakan umur ekonomis aktiva yang relatif lebih panjang.

B.2. ACCOUNTING METHOD APPLICATION

Setelah memilih metode akuntansi dan menentukan nilai estimasi akuntansi sesuai dengan kepentingannya, manajer membuat kebijakan bagaimana cara menerapkannya tanpa harus melanggar prinsip akuntansi. Upaya untuk memilih dan menerapkan metode akuntansi yang sesuai dengan kepentingan manajer, secara konseptual, bisa dilakukan untuk mengelola dan mengatur labanya agar lebih tinggi (*income increasing*) atau rendah (*income decreasing*) dari laba yang sesungguhnya. Manajer juga dapat menggunakan upaya semacam ini untuk mengelola dan mengatur agar labanya relatif merata selama beberapa periode (*income smoothing*).

Tabel 6.2
Pola Manejemen Laba

Pola Manejemen Laba	Tujuan
Penaikkan laba (<i>income increasing</i>)	Upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih rendah dari biaya sesungguhnya.
Penurunan laba (<i>income decreasing</i>)	Upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi dari biaya sesungguhnya.
Perataan laba (<i>income smoothing</i>)	Upaya perusahaan mengatur agar labanya relatif sama selama beberapa periode. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan dan biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan atau biaya sesungguhnya.

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2005.

Apabila manajer menginginkan labanya menjadi lebih tinggi dari laba yang sesungguhnya, maka manajer dapat menggunakan metode depresiasi aktiva tetap yang cenderung mengalokasikan harga perolehan aktiva tetap untuk periode-periode awal relatif lebih rendah dibandingkan periode selanjutnya. Manajer juga dapat melakukan strukturisasi estimasi umur ekonomis aktiva menjadi lebih panjang daripada umur ekonomis aktiva tetap yang selama ini telah dipakai. Selain itu, manajer dapat menentukan prosentase kerugian piutang lebih rendah dari biasanya. Upaya lain yang bisa dilakukan manajer adalah dengan memilih metode pengakuan harga pokok persediaan yang dapat membuat harga pokok penjualan lebih rendah dibanding jika menggunakan metode lain untuk menghitung harga pokok tersebut, misalkan FIFO.

Apabila manajer menginginkan labanya menjadi lebih rendah dari laba yang sesungguhnya, maka manajer dapat menggunakan metode depresiasi aktiva tetap yang cenderung mengalokasikan harga perolehan aktiva tetap untuk periode-periode awal relatif lebih tinggi dibandingkan periode selanjutnya, misalkan metode saldo menurun atau metode jumlah angka tahun. Manajer juga dapat melakukan strukturisasi estimasi umur ekonomis aktiva menjadi lebih pendek daripada umur ekonomis aktiva tetap yang selama ini telah dipakai. Selain itu, manajer dapat menentukan prosentase kerugian piutang lebih tinggi dari biasanya. Upaya lain yang bisa dilakukan manajer adalah dengan memilih metode pengakuan harga pokok persediaan yang dapat membuat harga pokok penjualan lebih tinggi dibanding jika menggunakan metode lain untuk menghitung harga pokok tersebut.

Terakhir, apabila manajer menginginkan labanya relatif merata selama beberapa periode, maka manajer dapat menggunakan metode depresiasi aktiva tetap yang cenderung mengalokasikan harga perolehan aktiva tetap selama beberapa periode besarnya sama, misalkan metode depresiasi garis lurus. Manajer juga dapat melakukan strukturisasi estimasi umur ekonomis aktiva menjadi lebih panjang daripada umur ekonomis aktiva tetap yang selama ini telah dipakai. Selain itu, manajer dapat menentukan prosentase kerugian piutang relatif selalu sama selama beberapa periode. Upaya lain yang bisa dilakukan manajer adalah dengan memilih metode pengakuan harga pokok persediaan yang dapat membuat harga pokok penjualan relatif sama selama beberapa periode, misalkan metode *average*.

B.3. ACCOUNTING METHOD TIMING

Selain mempunyai kebebasan untuk memilih dan menentukan metode atau standar akuntansi yang sesuai dengan kebutuhannya, manajer juga mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan kapan dan bagaimana suatu transaksi dan atau peristiwa diakui sebagai transaksi dan peristiwa akuntansi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Artinya suatu transaksi atau peristiwa tidak harus dilaporkan pada periode terjadinya, namun dilaporkan dan diungkapkan di periode lain sesuai kebijakan dan kepentingan perusahaan. Sebagai contoh kebijakan kapan dan seberapa besar piutang tak tertagih dan aktiva yang rusak harus dihapus dari pembukuan (*write-off*), mengestimasi nilai pasar persediaan yang akan dipakai dalam metode *lower-of-cost-or-market*. Atau dengan mengakui pendapatan dari penjualan barang-barang konsinyasi yang baru dititipkan pada pihak lain, padahal barang bersangkutan belum terjual. Cara lain adalah dengan mengubah metode transaksi penjualan dari metode *FOB destination* menjadi *FOB shipping point* yang akan membuat pendapatan lebih tinggi untuk periode bersangkutan.

Selain itu manajer bersangkutan juga dapat menentukan apakah menggunakan klasifikasi apresiasi jangka panjang atau spekulasi jangka pendek dalam penerapan akuntansi *market-to-market* untuk investasi yang mempunyai pengaruh terhadap pengakuan keuntungan yang sebenarnya tidak dapat direalisasikan (*unrealized*) dan kerugian perusahaan. Seorang manajer juga dapat memutuskan bagaimana suatu peristiwa diklasifikasikan. Sebagai contoh kewajiban yang diakui sebagai kontijensi walaupun sebenarnya pasti dapat diterima, jadi menghindari pengakuan biaya dalam laporan laba-rugi. Penguasa tersebut juga dapat mengklasifikasikan biaya tidak langsung sebagai biaya produk pada periode terjadinya agar pengeluaran tersebut tidak kelihatan dalam laporan laba-rugi.

B.4. TIMING

Pemilihan waktu akuisisi aktiva dan disposisi dapat mempengaruhi laba akuntansi. Pengusaha dapat menggunakan metode ini ketika dan seberapa besar yang diinvestasikan dalam biaya *research and development* (R&D), pariwisata, pemeliharaan, yang diakui sebagai biaya periodik (*expenses*) pada periode terjadinya pengeluaran

tersebut. Pengusaha juga dapat memutuskan saat yang tepat penjualan *plant, property, and equipment* untuk dipercepat atau ditunda pengakuan keuntungan atau kerugiannya. Pengusaha juga dapat memutuskan mempercepat atau memperlambat pengiriman barang dagangan kepada konsumen pada akhir periode untuk mempengaruhi pendapatan, terakhir, pengusaha dapat memutuskan untuk mengubah jadwal kompensasinya untuk mempengaruhi biaya kompensasi diakui sebagai laba.

BAB 7

OBJEK MANAJEMEN LABA

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah membaca bab ini pembaca diharapkan dapat memahami bahwa:

1. Manajemen laba dilakukan dengan memanfaatkan komponen aktiva lancar.
2. Manajemen laba dilakukan dengan memanfaatkan komponen aktiva tetap.
3. Manajemen laba dilakukan dengan memanfaatkan komponen hutang lancar.

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah membaca bab ini pembaca diharapkan dapat memahami bahwa:

1. Manajemen laba dilakukan dengan menggunakan komponen kas, piutang, persediaan, dan biaya dibayar dimuka dengan memanfaatkan berbagai metode pengakuan dan pencatatan aktiva lancar ini.
 2. Manajemen laba dilakukan dengan menggunakan komponen aktiva tetap dengan memanfaatkan berbagai metode dan prosedur depresiasi aktiva tetap.
 3. Manajemen laba dilakukan dengan menggunakan komponen hutang dagang, pendapatan diterima dimuka, biaya yang masih harus dibayar, hutang jangka panjang yang jatuh tempo, hutang pajak, dan hutang deviden.
-

Ada dampak negatif dari penggunaan akuntansi berbasis akrual yang selama ini dipakai untuk mencatat semua transaksi dan peristiwa yang dilakukan dan dialami sebuah perusahaan, yaitu manajemen laba. Secara konseptual akuntansi berbasis akrual akan mencatat semua pengaruh keuangan yang terjadi dalam transaksi dan peristiwa yang dialami dan diakui perusahaan yang mempunyai konsekuensi kas yang terjadi selama periode tertentu, tanpa memperhatikan apakah kas langsung diterima dan dibayarkan secara tunai oleh perusahaan atau tidak. Selain itu model akuntansi ini mengakui adanya alokasi harga perolehan aktiva untuk beberapa periode tertentu. Hal ini mengakibatkan timbulnya berbagai *account* akrual dalam laporan keuangan perusahaan, misalnya: hutang, pendapatan diterima dimuka, piutang, biaya dibayarkan dimuka, biaya depresiasi, dan lain-lain.

Akuntansi berbasis akrual menggunakan prosedur akrual, *defferal*, pengalokasian yang bertujuan untuk menghubungkan pendapatan, biaya, keuntungan (*gains*), dan kerugian (*losses*) untuk menggambarkan kinerja perusahaan selama periode berjalan, meski kas belum diterima dan dikeluarkan. Jadi pengakuan pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian serta kenaikan dan penurunan asset maupun kewajiban, termasuk laba (*matching of cost and revenues*), alokasi, dan amortisasi, merupakan esensi penggunaan akuntansi akrual untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja suatu perusahaan. Hal ini sesuai dengan definisi akuntansi berbasis akrual yang dikeluarkan oleh *Financial Accounting Board Standard* (FASB), yaitu:

Accrual accounting attempts to record the the financial effects on an entity of transactions and other events and circumstances the have cash consequences for the entity in the periods in which those transactions, events, and circumstances occur rather than only in the periods in which cash is received or paid by the entity (FASB 1965, SFAC No.6 paragraf 139).

Dalam mengaplikasikan kebijakan akrual digunakan *accruals*, *defferal*, dan prosedur alokasi yang bertujuan untuk menyesuaikan biaya dan pendapatan dengan periode terjadinya, bukan mengkaitkan biaya dan pendapatan berdasarkan pengeluaran dan penerimaan kas (*cash basis*). Oleh karena itu, mudah dimengerti apabila kebijakan akrual dalam ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan manajemen laba. Antara lain, untuk tujuan *increasing income earnings management*, manajer perusahaan dapat memanfaatkan *judgement* dengan menurunkan estimasi tingkat piutang tak tertagih atau memperpanjang estimasi umur ekonomis aktiva tetap untuk melakukan depresiasi terhadap aktiva bersangkutan, mengubah metode akuntansi untuk depresiasi aktiva tetap dari metode saldo menurun menjadi metode garis lurus serta menggeser periode biaya dan pendapatan.

Sementara untuk *decreasing income earnings management*, manajer perusahaan dapat memanfaatkan *judgement* dengan menaikkan estimasi tingkat piutang tak tertagih atau memperpendek estimasi umur ekonomis aktiva tetap untuk melakukan depresiasi terhadap aktiva bersangkutan, mengubah metode akuntansi untuk depresiasi aktiva tetap dari metode saldo menurun menjadi metode garis lurus serta menggeser periode biaya dan pendapatan. Meski sebenarnya prinsip akuntansi memang memberikan kebebasan untuk melakukan perubahan *judgement*, metode akuntansi, serta penggeseran biaya dan

pendapatan, namun jika hal itu dilakukan manajer perusahaan untuk mengoptimalkan kesejahteraan dan kepentingan pribadi dan bukan karena kondisi perusahaan yang menghendaki perubahan maka hal ini disebut manajemen laba.

Oleh sebab itu memang ada beberapa komponen laporan keuangan yang mudah untuk dipermainkan dengan memanfaatkan kebebasan dalam memilih metode akuntansi dan menentukan nilai estimasi. Hingga membuat komponen-komponen ini seringkali digunakan sebagai obyek rekayasa manajerial. Secara umum komponen-komponen ini diklasifikasikan menjadi aktiva lancar, aktiva tetap, hutang lancar, dan laba. Komponen aktiva lancar yang seringkali menjadi obyek rekayasa manajerial ini terdiri atas komponen kas atau setara kas, piutang, persediaan, dan biaya dibayar dimuka. Sedangkan komponen aktiva tetap yang seringkali menjadi obyek rekayasa manajerial adalah metode depreasasi dan nilai estimasi umur ekonomis aktiva bersangkutan. Komponen hutang lancar yang seringkali menjadi obyek rekayasa manajerial ini adalah hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang yang mau jatuh tempo. Sementara komponen laba yang seringkali menjadi obyek rekayasa manajerial adalah berbagai komponen pendapatan (*revenues*) dan biaya (*expenses*).

A. AKTIVA LANCAR

Aktiva lancar (*current assets*) merupakan aktiva paling likuid yang dimiliki perusahaan. Secara teoritis suatu aktiva diklasifikasikan sebagai aktiva lancar apabila aktiva itu berupa kas atau setara kas yang dapat diwujudkan dalam bentuk kas dan siap untuk digunakan kurang dari satu periode akuntansi atau operasi normal perusahaan. Sesuai dengan sifat fisiknya yang relatif ringan, kecil, dan mudah dibawa, aktiva lancar merupakan harta perusahaan yang paling mudah diselewengkan. Hal inilah yang membuat aktiva lancar mudah menjadi obyek manajemen laba. Selain itu upaya rekayasa terhadap komponen kas dapat dilakukan dengan mempermainkan transaksi-transaksi yang terkait dengan komponen ini. Untuk menutupi kecurangan ini pelaku akan memanfaatkan komponen-komponen akrual yang mempunyai hubungan dengan kas. Akrual yang diperoleh dari upaya merekayasa komponen-komponen aktiva lancar ini diklasifikasikan sebagai komponen *discretionary current accruals*.

Ada empat komponen utama aktiva lancar yang selama ini dikenal dan dipakai sebagai obyek rekayasa manajerial secara umum, yaitu, *pertama*, kas dan komponen

lain yang setara kas (*cash*) yang dicatat sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan. *Kedua*, piutang usaha (*account receivable*) yang dicatat pada estimasi jumlah yang mungkin dapat ditagih atau direalisasi. *Ketiga*, persediaan (*inventory*) yang dicatat pada nilai wajarnya. *Keempat*, komponen biaya dibayar dimuka (*prepaid items*) yang dicatat sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan secara tunai. Upaya rekayasa terhadap komponen-komponen ini dilakukan dengan memperlakukan besar kecilnya komponen bersangkutan. Untuk itu dapat berbagai metode akuntansi yang selama ini diterima dapat dipilih dan digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pelakunya, baik dengan melanggar maupun tanpa harus melanggar prinsip akuntansi berterima umum.

A.1. KAS DAN SETARA KAS

Kas adalah aktiva lancar yang paling mudah dan sering disalahgunakan, sesuai dengan sifatnya yang mudah untuk dipakai atau dibelanjakan. Secara konseptual ada beberapa cara merekayasa yang dapat dipakai seseorang untuk menyembunyikan kecurangannya dalam mengelola kas perusahaan.

1. Lapping

Lapping merupakan upaya rekayasa manajerial dengan memakai atau menggelapkan kas perusahaan dengan cara menunda pencatatan transaksi bersangkutan sampai terjadi lagi transaksi yang serupa. Hingga apabila suatu transaksi penerimaan kas terjadi, misalnya penjualan tunai, maka transaksi ini langsung dicatat dalam pembukuan perusahaan. Transaksi ini baru akan dicatat ketika terjadi transaksi penerimaan kas yang lain sejumlah kas yang diterima dalam transaksi yang terakhir ini. Hal ini mengakibatkan terjadinya penundaan pencatatan transaksi sampai dengan periode berikutnya, sehingga kinerja periode terjadinya transaksi yang diselewengkan tidak lagi mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.

2. Check kiting

Check kiting merupakan upaya rekayasa manajerial dengan menggelapkan kas perusahaan dengan menutupi kekurangan kas yang digelapkan dengan menarik cek dari bank dan menyetorkannya ke bank lain. Harapannya, pada saat pemeriksaan bank tempat penarikan belum mencatat penarikan kas ini, sedangkan bank yang menerima setoran telah mencatat penyetoran itu. Atau sebaliknya pada saat

pemeriksaan bank tempat penarikan telah mencatat penarikan kas ini, sedangkan bank yang menerima setoran belum mencatat penyetoran itu.

A.2. PIUTANG

Piutang merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lain karena perusahaan telah menjual produknya kepada pihak lain secara kredit (non tunai). Secara konseptual piutang dapat berupa piutang tanpa disertai dengan perjanjian secara formal dan piutang yang disertai dengan perjanjian secara formal (piutang wesel). Ada beberapa alasan mengapa piutang menjadi obyek rekayasa manajerial, yaitu: piutang merupakan komponen laporan keuangan yang tidak mempunyai wujud fisik sehingga mudah untuk mengubah bukti-bukti transaksi yang menimbulkan piutang, mudah untuk mengubah bukti pencatatan piutang, kebebasan dalam menentukan estimasi prosentase biaya kerugian piutang, dan kebebasan untuk memilih komponen yang dipakai sebagai dasar penghitungan biaya kerugian piutang.

Kedua kebebasan inilah yang seringkali disalahgunakan untuk mempermainkan besar kecilnya laba perusahaan mengoptimalkan kepentingan pribadi pengelola perusahaan. Untuk menaikkan laba yang diperoleh maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengecilkan biaya kerugian piutang untuk periode tertentu, yaitu dengan mengecilkan prosentase nilai untuk menghitung biaya kerugian piutang. Sebaliknya untuk menurunkan laba yang diperoleh maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperbesar biaya kerugian piutang untuk satu periode tertentu, yaitu dengan memperbesar prosentase nilai untuk menghitung biaya kerugian piutang. Sedangkan untuk menentukan mana komponen yang akan dipilih sebagai dasar penghitungan biaya kerugian piutang, biasanya perusahaan akan memilih antara besarnya piutang bersih atau penjualan bersih untuk periode bersangkutan. Pemilihan ini sangat tergantung pada besar kecilnya laba yang diinginkan perusahaan, besar kecilnya prosentase nilai kerugian piutang, dan besar kecilnya piutang atau penjualan bersihnya.

Ilustrasi- Penentuan Biaya Kerugian Piutang

Ilustrasi berikut ini akan menunjukkan bagaimana dengan menggunakan prosentase kerugian piutang yang berbeda akan menghasilkan biaya kerugian piutang

yang berbeda yang berdampak pada besar kecilnya laba perusahaan. Ilustrasi ini juga menunjukkan bagaimana dengan menggunakan komponen yang berbeda sebagai dasar penentuan biaya kerugian piutang akan menghasilkan biaya kerugian piutang yang berbeda yang berdampak pada besar kecilnya laba perusahaan. Ilustrasi ini menggunakan data-data sebagai berikut: piutang bersih: Rp 1.000.0000 dan penjualan (pendapatan) bersih Rp 10.000.000, dengan menggunakan prosentase kerugian piutang 10% dan 15%. Maka perhitungan biaya kerugian piutang untuk setiap nilai prosentase dan dasar penghitungan adalah:

Komponen	Nilai	Prosentase Kerugian Piutang	Biaya Kerugian Piutang (Rp)
Piutang bersih	1.000.000	10%	$10\% \times 1.000.000=100.000$
		15%	$15\% \times 1.000.000=150.000$
Penjualan bersih	10.000.0000	10%	$10\% \times 10.000.000=1.000.000$
		15%	$15\% \times 10.000.000=1.500.000$

Dari tabel di atas terlihat bahwa dengan menggunakan prosentase dan komponen dasar penghitungan kerugian piutang yang berbeda akan menghasilkan biaya kerugian piutang yang berbeda. Dengan menggunakan dasar penghitungan yang sama tetapi prosentase kerugian piutang yang berbeda akan menghasilkan biaya kerugian piutang yang berbeda pula. Demikian juga dengan menggunakan prosentase kerugian piutang yang sama tetapi dasar penghitungan berbeda akan menghasilkan biaya kerugian piutang yang berbeda. Perbedaan akibat perbedaan penggunaan dasar dan prosentase ini akan mempengaruhi besar kecilnya laba periode berjalan yang diterima perusahaan. Apabila perusahaan ingin semakin mengecilkan labanya maka perusahaan harus semakin menaikkan prosentase kerugian piutangnya. Atau sebaliknya apabila perusahaan ingin membuat labanya lebih besar lagi maka perusahaan harus menurunkan prosentase kerugian piutangnya. Pemilihan seperti ini diperbolehkan oleh prinsip akuntansi, termasuk penggantian nilai estimasi yang dipergunakan, asal diungkapkan dalam laporan keuangan.

A.3. PERSEDIAAN

Persediaan merupakan barang-barang fisik yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali dalam operasi normal perusahaan (persediaan barang dagangan) atau untuk diproses lebih lanjut sebelum dijual dalam operasi normal perusahaan (persediaan bahan baku). Sebagai komponen laporan keuangan maka persediaan mempunyai peran ganda yang harus dijalankan, yaitu sebagai unsur penentu harga pokok penjualan (*cost of goods sold*) dalam laporan laba-rugi (*income statement*) dan salah satu unsur penentu nilai aktiva lancar didalam neraca (*balancing sheet*). Oleh sebab itu kesalahan dalam menentukan nilai satu unsur akan mempengaruhi unsur yang lain, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam menentukan nilai persediaan akhir akan berdampak terhadap laporan laba-rugi dan neraca sekaligus. Sebagai contoh, apabila nilai persediaan dicatat terlalu tinggi maka akan mengakibatkan harga pokok penjualan menjadi terlalu rendah dan membuat laba yang dilaporkannya menjadi terlalu tinggi. Sebaliknya apabila nilai persediaan dicatat terlalu rendah maka akan mengakibatkan harga pokok penjualan menjadi terlalu tinggi dan membuat laba yang dilaporkan menjadi terlalu rendah. Ada beberapa alasan mengapa persediaan menjadi salah satu komponen laporan keuangan yang seringkali dijadikan obyek rekayasa manajerial, yaitu kebebasan perusahaan untuk memilih dan menggunakan:

1. Metode Penentuan Harga Pokok

Perusahaan dalam melakukan transaksi penjualan mempunyai kebebasan untuk memilih dan menggunakan metode penentuan harga pokok sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Standar akuntansi yang berlaku hanya mensyaratkan agar metode yang dipakai perusahaan diungkapkan dalam laporan keuangan, termasuk apabila perusahaan melakukan perubahan penggunaan metode penentuan harga pokok yang dipakainya menjadi metode penentuan harga pokok yang lain. Secara umum dikenal tiga metode penentuan harga pokok yang relatif sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan dan diterima oleh undang-undang atau peraturan perpajakan, yaitu FIFO, LIFO, dan rata-rata.

a. FIFO (First In First Out)

Metode penentuan harga pokok ini mengasumsikan bahwa biaya akan mengalir seperti suatu barisan tertentu. Artinya barang yang pertama masuk diasumsikan akan digunakan (dijual) pertama kali pula dan barang yang masuk terakhir akan

digunakan (dijual) terakhir pula. Hingga persediaan akhir akan ditentukan dengan menggunakan harga barang yang terakhir masuk ke perusahaan.

Penggunaan metode FIFO akan mengakibatkan nilai harga pokok penjualan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan metode lain. Sebaliknya nilai persediaan akhir yang dimiliki perusahaan akan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode lain.

b. LIFO (Last In First Out)

Metode penentuan harga pokok ini mengasumsikan bahwa biaya akan mengalir secara kebalikan dengan suatu barisan tertentu. Artinya barang yang terakhir masuk diasumsikan akan digunakan (dijual) pertama kali dan barang yang masuk pertama kali akan digunakan (dijual) terakhir kali. Hingga persediaan akhir akan ditentukan dengan menggunakan harga barang yang pertama masuk ke perusahaan.

Penggunaan metode LIFO akan mengakibatkan nilai harga pokok penjualan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode lain. Sebaliknya nilai persediaan akhir yang dimiliki perusahaan akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan metode lain.

c. Rata-rata (Average)

Metode penentuan harga pokok ini mengasumsikan semua biaya besarnya sama. Artinya tidak ada perbedaan biaya antara harga barang pertama kali masuk dengan barang yang terakhir kali masuk. Hingga nilai persediaan akhir ditentukan atas dasar harga rata-rata tertimbang seluruh persediaan barang serupa yang dimiliki perusahaan. Faktor penimbang yang biasanya dipakai untuk menentukan harga pokok persediaan biasanya menggunakan jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan pada awal periode ditambah dengan jumlah barang yang dibeli perusahaan selama periode itu.

Penggunaan metode rata-rata akan mengakibatkan nilai harga pokok penjualan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan metode LIFO dan lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode FIFO. Sebaliknya nilai persediaan akhir yang dimiliki perusahaan akan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode LIFO dan lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan metode FIFO.

Secara konseptual manajemen laba dapat dilakukan dengan memanfaatkan penentuan harga pokok penjualan ini. Apabila manajer menginginkan laba periode berjalannya lebih tinggi maka manajer dapat menggunakan metode FIFO untuk menentukan harga pokok penjualannya. Hal ini disebabkan semakin rendah harga pokok penjualan semakin besar laba yang diperoleh. Sebaliknya apabila perusahaan menginginkan laba periode berjalannya lebih rendah maka manajer dapat menggunakan metode LIFO atau rata-rata untuk menentukan harga pokok penjualannya. Hal ini disebabkan semakin besar harga pokok penjualan semakin kecil laba yang diperoleh.

2. Metode Transaksi Penjualan

Perusahaan dalam melakukan transaksi penjualan mempunyai kebebasan untuk memilih menggunakan metode pengakuan penerimaan pendapatan penjualan sesuai dengan tujuannya, meskipun standar akuntansi yang berlaku mensyaratkan metode yang dipakai perusahaan diungkapkan dalam laporan keuangan, termasuk apabila perusahaan melakukan perubahan metode pengakuan pendapatan penjualan yang dipakainya menjadi metode pengakuan pendapatan penjualan yang lain.

a. Barang Dalam Perjalanan

Ada dua metode transaksi penjualan yang selama ini dikenal dan dipakai secara umum, yaitu: *free on board (FOB) shipping point* dan *FOB destination*.

- *FOB shipping point* merupakan metode pencatatan penjualan yang mengakui adanya transaksi penjualan pada saat barang mulai dikirim kepada pembeli. Hingga tanpa mempertimbangkan apakah barang sudah diterima pembeli atau belum perusahaan sudah dapat mencatatnya sebagai transaksi penjualan dan pengurangan nilai persediaan barang dagangan.
- *FOB destination* merupakan metode pencatatan penjualan yang mengakui adanya transaksi penjualan pada saat barang diterima oleh pembeli. Hingga pencatatan transaksi penjualan dan pengurangan nilai persediaan barang dagangan harus menunggu sampai barang secara pasti telah diterima oleh pembeli.

Kedua inilah yang seringkali disalahgunakan perusahaan untuk melakukan rekayasa manajerial. Untuk membuat laba lebih tinggi dari laba sesungguhnya, perusahaan dapat mengubah metode penjualannya dari *FOB destination* menjadi

FOB shipping point atau menganggap semua penjualan dilakukan dengan metode *FOB shipping point*. Hingga setiap barang yang baru keluar dan dikirim kepada pembeli selalu dianggap sebagai transaksi penjualan, meskipun sebenarnya barang baru akan diterima oleh pembeli pada periode berikutnya. Hal inilah yang mengakibatkan terjadi pencatatan pendapatan penjualan lebih cepat satu periode dari pendapatan penjualan yang sesungguhnya dan membuat laba periode berjalan akan menjadi lebih tinggi dari laba sesungguhnya.

Sebaliknya untuk membuat laba lebih rendah dari laba sesungguhnya, perusahaan dapat mengubah metode penjualannya dari *FOB shipping point* menjadi *FOB destination* atau menganggap semua penjualan dilakukan dengan metode *FOB destination*. Hingga setiap barang yang telah keluar dan dikirim kepada pembeli harus dicatat sebagai transaksi penjualan, namun ditunda pengakuannya sampai barang diterima oleh pembeli. Hal inilah yang mengakibatkan pencatatan pendapatan penjualan harus menunggu sampai barang diterima pembeli, sehingga apabila barang baru diterima pembeli pada periode berikutnya maka pengakuan pendapatan penjualan pun juga akan dilakukan pada periode berikutnya. Oleh sebab itu hal ini dapat membuat laba periode berjalan akan menjadi lebih rendah dari laba sesungguhnya.

b. Barang Konsinyasi

Barang konsinyasi merupakan barang yang dititipkan perusahaan kepada pihak lain untuk dijualkan. Secara teoritis barang konsinyasi tetap menjadi hak milik perusahaan yang menitipkan sampai dengan barang itu terjual. Artinya sebelum barang itu terjual maka perusahaan yang menitipkan tidak dapat mengakuinya sebagai pendapatan penjualan meski barang telah dikeluarkan dari perusahaan. Transaksi ini baru akan diakui sebagai pendapatan penjualan apabila barang konsinyasi benar-benar telah dibeli oleh pihak ketiga.

Serupa dengan metode pengakuan pendapatan penjualan yang lain, metode konsinyasi juga dapat dipakai untuk rekayasa manajerial. Untuk menaikkan laba maka perusahaan akan membuat pendapatan penjualannya lebih tinggi dari pendapatan penjualan yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan dengan mengakui semua barang konsinyasi sebagai barang yang telah terjual. Hingga pendapatan yang seharusnya diakui lebih cepat dari seharusnya, yaitu ketika barang benar-

benar telah dibeli oleh pihak ketiga. Sedangkan untuk menurunkan laba maka perusahaan akan membuat pendapatan penjualannya lebih rendah dari pendapatan penjualan yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan dengan mengakui barang terjual seolah-olah barang konsinyasi yang belum terjual. Hingga pendapatan yang seharusnya diakui ditunda satu atau beberapa periode lebih lambat dari seharusnya.

Ilustrasi-Metode Penentuan Harga Pokok

Ilustrasi berikut ini akan menunjukkan bagaimana dengan menggunakan metode penentuan harga pokok yang berbeda akan menghasilkan harga pokok penjualan dan nilai persediaan akhir yang berbeda. Perbedaan harga pokok penjualan inilah yang berdampak pada besar kecilnya laba perusahaan. Ilustrasi ini menggunakan data-data sebagai berikut: sebuah perusahaan mempunyai persediaan awal sebanyak 1000 unit dengan harga Rp 25 per unit, membeli barang sebanyak 2000 unit dengan harga Rp 30 per unit, dan melakukan penjualan sebanyak 1500 unit. Maka perhitungan harga pokok penjualan dan persediaan akhir untuk setiap metode harga pokok adalah:

Pembelian	Penjualan	Saldo
A. FIFO		
100@Rp25=Rp2500		100@Rp25=Rp2000
200@Rp30=Rp6000		200@Rp30=Rp6000
	150=100@ Rp25=Rp2500 = 50@Rp30=Rp1500 Rp4000*	150@Rp30=Rp4500
B. LIFO		
100@Rp25=Rp2500		100@Rp25=Rp2500
200@Rp30=Rp6000		200@Rp30=Rp6000
	150=150@Rp30=Rp4500	100@Rp25=Rp2500 50@Rp30=Rp1500 Rp4000**
C. Rata-rata		
100@Rp25=Rp2500		100@Rp25=Rp2500
200@Rp30=Rp6000		200@Rp30=Rp6000
	150=150@Rp28=Rp4250	300@Rp28=Rp8500*** 150@Rp28=Rp4250

Keterangan: * Penjumlahan saldo harga pokok penjualan Rp 25.000 dan Rp 15.000

- ** Penjumlahan saldo persediaan yang masih tersisa dari Rp 25.000 dan Rp 15.000
- *** Harga pokok barang per unit berasal dari penghitungan rata-rata semua persediaan yang dimiliki perusahaan, yaitu:

$$\frac{(1000 @ Rp25) + (2000 @ Rp30)}{(1000 + 2000)unit} = \frac{25.000 + 60.000}{3000unit} = Rp28$$

Dari tabel di atas terlihat bahwa dengan menggunakan metode penentuan harga pokok yang berbeda akan menghasilkan harga pokok penjualan dan nilai persediaan akhir yang berbeda pula. Perbedaan ini akan mempengaruhi besar kecilnya laba yang diterima perusahaan. Untuk membuat labanya menjadi lebih besar dari laba yang sesungguhnya maka perusahaan dapat menggunakan metode FIFO, sebab metode ini membuat harga pokok penjualan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan metode penentuan harga pokok yang lain. Rendahnya harga pokok penjualan akan membuat laba perusahaan menjadi lebih tinggi dibanding apabila perusahaan menggunakan metode penentuan harga pokok yang lain. Sebaliknya untuk membuat labanya menjadi lebih kecil dari laba yang sesungguhnya maka perusahaan dapat menggunakan metode LIFO, sebab metode ini membuat harga pokok penjualan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan metode penentuan harga pokok yang lain. Tingginya harga pokok penjualan akan membuat laba perusahaan menjadi lebih rendah dibanding apabila perusahaan menggunakan metode penentuan harga pokok yang lain.

Selain berdampak pada harga pokok penjualan maka perbedaan penggunaan metode penentuan harga pokok ini akan mempengaruhi nilai persediaan akhir yang dimiliki perusahaan. Apabila perusahaan menggunakan metode FIFO maka nilai persediaan akhirnya akan lebih besar dibandingkan dengan menggunakan metode LIFO dan rata-rata. Hal ini membuat nilai aktiva lancar dan total aktiva perusahaan menjadi lebih besar pula. Hingga kinerja perusahaan pun akan terlihat lebih bagus apabila diukur dengan menggunakan menggunakan aktiva lancar atau total aktiva itu. Sebaliknya apabila perusahaan menggunakan metode LIFO atau rata-rata maka nilai persediaan akhirnya akan lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode FIFO. Hal ini membuat nilai aktiva lancar dan total aktiva perusahaan menjadi lebih kecil pula.

Hingga kinerja perusahaan pun akan terlihat lebih lebih rendah apabila diukur dengan menggunakan menggunakan aktiva lancar atau total aktiva itu.

A.5. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Biaya dibayar dimuka (*deffered charge*) adalah biaya yang telah dikeluarkan perusahaan secara tunai untuk memperoleh barang atau jasa tertentu yang baru akan diterima dimasa depan. Hal ini terjadi karena saat ini perusahaan memesan atau membeli barang atau jasa kepada pihak lain yang baru bisa diserahkan atau dirasakan manfaatnya dimasa depan. Ada berbagai macam bentuk biaya dibayar dimuka yang selama ini dikenal, misalkan porsekot pembelian barang atau aktiva tetap lain, asuransi dibayar dimuka, gaji dibayar dimuka, bunga dibayar dimuka, dan lain-lain. Pada prinsipnya semua semua biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dapat diperlakukan sebagai biaya dimuka asalkan pengeluaran kas secara tunai telah dilakukan namun barang atau jasa belum diterima perusahaan. Apabila barang atau jasa telah diterima maka perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengakuinya sebagai biaya periode berjalan pada saat yang sama dengan periode diterimanya barang atau jasa bersangkutan.

Biaya dibayar dimuka untuk pembelian jasa yang bersifat tidak akan diterima secara langsung tetapi dapat dinikmati manfaatnya selama periode tertentu maka biaya ini harus dialokasikan atau diamortisasi selama periode yang telah ditentukan itu. Atau dengan kata lain, biaya dibayar dimuka harus diakui sebagai biaya periodik secara proporsional sesuai dengan estimasi periode pemakaian dan metode amortisasi. Secara konseptual prinsip akuntansi memberi kebebasan kepada perusahaan untuk menentukan estimasi periode pemanfaatan biaya dibayar dimuka itu, sesuai dengan perkiraan berapa lama perusahaan dapat menerima manfaat dari biaya itu. Namun biasanya perusahaan menggunakan periode yang disepakati dengan penyedia atau penjual jasa untuk menentukan periode estimasi amortisasi itu, misalkan biaya asuransi dibayar dimuka akan diamortisasi selama 2 tahun untuk pembayaran asuransi 2 tahun kedepan.

Meski demikian, sejalan dengan kebebasan dalam menentukan nilai estimasi, perusahaan dapat memperlakukan besar kecilnya laba dengan mengatur nilai estimasi biaya itu. Seandainya menginginkan laba periode berjalan lebih besar dibandingkan laba sesungguhnya maka perusahaan dapat melakukannya dengan membuat nilai

estimasi amortisasi biaya dibayar dimuka lebih panjang. Sebab dengan membuat nilai estimasi biaya itu lebih panjang akan membuat biaya periodiknya lebih kecil dan labanya lebih besar. Namun seandainya menginginkan laba periode berjalan lebih kecil dibandingkan laba sesungguhnya maka perusahaan dapat melakukannya dengan membuat nilai estimasi amortisasi biaya dibayar dimuka lebih pendek. Sebab dengan membuat nilai estimasi biaya itu lebih pendek akan membuat biaya periodiknya lebih besar dan labanya lebih kecil.

Ilustrasi-Penentuan Biaya Periodik Dari Amortisasi Biaya Dibayar Dimuka

Ilustrasi berikut ini akan menunjukkan bagaimana dengan menentukan nilai estimasi yang berbeda akan menghasilkan biaya periodik yang berbeda pula. Perbedaan biaya periodik inilah yang berdampak pada besar kecilnya laba perusahaan. Ilustrasi ini menggunakan data-data sebagai berikut: sebuah perusahaan mempunyai komponen biaya dibayar dimuka Rp 1.000.000 dan akan diamortisasi dengan metode garis lurus selama 2 atau 4 tahun. Maka perhitungan biaya periodik untuk setiap nilai estimasi adalah:

Nilai Estimasi Amortisasi	
2 tahun	4 tahun
$\frac{1.000.000}{2} = 500.000$	$\frac{1.000.000}{4} = 250.000$

Dari tabel di atas terlihat bahwa dengan menggunakan estimasi umur ekonomis yang berbeda akan menghasilkan biaya amortisasi yang berbeda pula. Perbedaan ini secara langsung akan mempengaruhi besar kecilnya laba yang diterima perusahaan. Untuk membuat labanya menjadi lebih besar dari laba yang sesungguhnya maka perusahaan dapat menggunakan estimasi amortisasi yang lebih panjang, sebab hal itu akan membuat biaya depresiasi menjadi lebih rendah dibandingkan apabila estimasi amortisasi yang lebih pendek. Rendahnya biaya amortisasi per periode akan membuat laba periode berjalan menjadi lebih tinggi. Sebaliknya untuk membuat labanya menjadi lebih kecil dari laba yang sesungguhnya maka perusahaan dapat menggunakan estimasi amortisasi yang lebih pendek, sebab hal itu akan membuat biaya amortisasi menjadi lebih besar dibandingkan apabila estimasi amortisasi yang lebih panjang. Tingginya

biaya amortisasi per periode secara langsung akan membuat laba periode berjalan menjadi lebih kecil.

B. AKTIVA TETAP

Aktiva tetap (*fixed assets*) merupakan harta perusahaan yang mempunyai wujud fisik, dipakai dalam operasi normal perusahaan, dimiliki perusahaan lebih dari satu periode akuntansi, dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Aktiva tetap dapat diklasifikasikan menjadi aktiva tetap yang umurnya terbatas dan aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas. Aktiva tetap yang umurnya terbatas adalah aktiva tetap tidak dapat terus menerus digunakan tetapi suatu saat akan rusak atau usang sehingga harus diganti dengan aktiva sejenis, misalkan gedung, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Dalam bahasa akuntansi hal itu disebut dengan umur ekonomis aktiva tetap, yang lamanya ditentukan atas dasar estimasi atau perkiraan. Umur ekonomis biasanya ditentukan sesuai dengan kebijakan perusahaan dengan mempertimbangkan jangka waktu pemakaian dan kemampuan aktiva tetap memberikan manfaatnya. Umur ekonomis merupakan dasar untuk mengalokasikan harga perolehan (*cost*) aktiva tetap selama periode pemakaiannya. Asumsinya, aktiva tetap jenis ini suatu saat akan rusak atau usang, sehingga nilainya semakin lama akan semakin berkurang. Alokasi inilah yang disebut dengan depresiasi.

Sedangkan aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas adalah aktiva tetap yang dapat dipakai terus menerus dan tidak perlu diganti karena tidak pernah usang atau rusak, misalkan tanah. Oleh sebab itu aktiva tetap ini tidak mengenal umur ekonomis karena dapat dipakai sampai kapanpun sampai perusahaan mempunyai kebijakan untuk mengganti aktiva tetap ini. Selain itu aktiva ini juga tidak perlu dialokasikan harga perolehannya atau didepresiasi sebab tidak pernah mengalami kerusakan atau keusangan seperti halnya aktiva yang umurnya terbatas. Bahkan dalam beberapa kasus nilai aktiva tetap ini dapat meningkat sejalan dengan peningkatan harga pasar aktiva bersangkutan. Hingga untuk mengakomodir peningkatan nilai itu perusahaan harus melakukan penilaian kembali atau revaluasi terhadap aktiva tetap itu.

Secara teoritis hanya aktiva tetap dengan umur terbatas yang dapat dipakai sebagai obyek rekayasa manajerial, sedangkan aktiva tetap dengan umur tidak terbatas relatif sulit untuk dijadikan obyek rekayasa manajerial ini. Alasannya, cara rekayasa

yang paling mudah dilakukan adalah dengan memanfaatkan metode depresiasi dan menentukan estimasi umur ekonomis yang bebas dipilih dan digunakan perusahaan untuk menentukan biaya depresiasi per periodenya. Perusahaan dapat mengatur besar kecilnya laba periode berjalan dengan menggunakan metode depresiasi yang berbeda. Untuk mengatur besar kecilnya laba perusahaan dapat mengganti metode depresiasinya dengan metode depresiasi lain. Hal ini dikarenakan memang ada metode depresiasi yang dapat membuat biaya depresiasi menjadi relatif lebih besar dibandingkan jika menggunakan metode depresiasi lain. Atau sebaliknya, ada metode depresiasi yang dapat membuat biaya depresiasi menjadi relatif lebih rendah dibandingkan jika menggunakan metode depresiasi lain.

Upaya lain untuk mempermainkan laba yang memanfaatkan aktiva tetap adalah dengan mengganti umur ekonomis aktiva tetap lebih panjang maupun pendek tergantung besar kecil laba yang diinginkannya. Untuk membuat biaya depresiasi periode berjalan menjadi lebih besar dibandingkan biaya depresiasi periode sebelumnya maka perusahaan dapat mengganti umur ekonomis aktiva tetap bersangkutan menjadi lebih pendek. Perubahan ini secara langsung akan membuat laba periode bersangkutan menjadi lebih kecil dibandingkan laba sesungguhnya. Sedangkan untuk membuat biaya depresiasi periode berjalan menjadi lebih rendah dibandingkan biaya depresiasi periode sebelumnya maka perusahaan dapat mengganti umur ekonomis aktiva tetap bersangkutan menjadi lebih panjang. Perubahan ini secara langsung akan membuat laba periode bersangkutan menjadi lebih besar dibandingkan laba sesungguhnya. Sementara rekayasa manajerial dengan mengubah nilai aktiva tetap tertentu dengan melakukan revaluasi relatif jarang digunakan sebab revaluasi bukan proses yang mudah dilakukan perusahaan.

Selain itu perusahaan juga dapat mempermainkan nilai residu aktiva tetap, yaitu nilai sisa yang diperkirakan masih melekat dalam suatu aktiva tetap tertentu pada saat dihentikan pemakaiannya. Hingga nilai residu akan dikurangkan dari nilai aktiva tetap sebelum aktiva tetap bersangkutan didepresiasi. Dengan mengubah-ubah nilai residu pun perusahaan juga dapat mempermainkan besar kecilnya laba periode berjalan. Apabila perusahaan menginginkan labanya lebih tinggi maka perusahaan dapat mengecilkan biaya depresiasi dengan membuat nilai residu aktiva tetap lebih besar. Sebaliknya, apabila perusahaan menginginkan labanya lebih rendah maka perusahaan

dapat membuat biaya depresiasi lebih besar dengan mengganti nilai residu aktiva tetapnya lebih kecil. Upaya-upaya semacam di atas itu diperbolehkan untuk dipraktikkan oleh perusahaan dengan syarat harus diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan.

Ada beberapa metode depresiasi yang selama ini dikenal dan dipakai secara umum, bahkan diterima oleh undang-undang dan peraturan perpajakan, yaitu metode garis lurus, saldo menurun, dan jumlah angka tahun.

1. Metode Garis Lurus

Metode depresiasi garis lurus merupakan metode alokasi harga perolehan aktiva tetap yang menggunakan dasar alokasi estimasi jangka waktu pemakaian aktiva bersangkutan (umur ekonomis). Depresiasi ini dilakukan dengan membagi harga perolehan suatu aktiva tetap dengan estimasi umur ekonomisnya. Dalam beberapa kasus, sebelum dibagi dengan estimasi umur ekonomis harga perolehan aktiva tetap dapat dikurangi dengan nilai residunya.

$$\text{Biaya depresiasi per periode} = \frac{\text{Harga perolehan} - \text{Nilai residu}}{\text{Umur ekonomis}}$$

2. Metode Saldo Menurun

Metode depresiasi saldo menurun merupakan metode alokasi harga perolehan aktiva tetap yang menggunakan dasar tarif depresiasi tertentu yang ditentukan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Depresiasi ini dilakukan dengan mengalikan tarif depresiasi yang telah ditentukan dengan nilai buku (*book value*) aktiva tetap bersangkutan. Nilai residu aktiva atau nilai sisa yang diperkirakan masih melekat dalam suatu aktiva tetap tertentu pada saat dihentikan pemakaiannya juga akan dipertimbangkan dalam menentukan tarif depresiasi aktiva bersangkutan.

$$\text{Tarif depresiasi per periode} = 1 - \text{umur ekonomis} \sqrt{\frac{\text{Nilai residu}}{\text{Harga perolehan}}}$$

3. Metode Jumlah Angka Tahun

Metode depresiasi jumlah angka tahun merupakan metode alokasi harga perolehan aktiva tetap yang menggunakan dasar jumlah angka-angka tahun dari estimasi umur ekonomis aktiva tetap bersangkutan. Depresiasi ini menggunakan asumsi bahwa semakin lama aktiva tetap dipakai semakin menurun kemampuannya dalam memberikan manfaat, sehingga biaya depresiasinya pun semakin lama semakin menurun nilainya. Untuk menggunakan metode ini maka yang pertama kali harus dilaksanakan adalah menghitung jumlah angka-angka tahun (JAT) yang akan dipergunakan dengan rumus:

$$JAT = \text{Umur ekonomis} \left(\frac{\text{Umur ekonomis} + 1}{2} \right)$$

Selanjutnya untuk menentukan biaya depresiasi per periode akan dihitung dengan mengalikan umur ekonomis dikurangi (periode depresiasi-1) yang dibagi JAT dengan nilai buku aktiva tetap bersangkutan atau dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Biaya depresiasi per periode} = \frac{\text{Umur ekonomis} - (\text{periode depresiasi} - 1)}{JAT} (\text{Nilai buku})$$

Secara konseptual manajemen laba dapat dilakukan dengan memanfaatkan penentuan metode depresiasi ini. Apabila manajer menginginkan laba periode berjalannya lebih tinggi pada periode awal pengalokasian maka manajer dapat menggunakan metode saldo menurun untuk menentukan biaya depresiasi per periode. Hal ini disebabkan metode saldo menurun akan membuat biaya depresiasi relatif lebih tinggi dibanding apabila biaya depresiasi ditentukan dengan menggunakan metode garis lurus dan jumlah angka tahun.

Sementara untuk membuat laba periode berjalannya lebih rendah pada periode awal pengalokasian maka manajer dapat menggunakan metode garis lurus atau jumlah angka tahun untuk menentukan biaya depresiasi per periode. Hal ini disebabkan metode garis lurus atau jumlah angka tahun akan membuat biaya depresiasi relatif lebih rendah dibanding apabila biaya depresiasi ditentukan dengan menggunakan metode saldo menurun. Sedangkan untuk membuat biaya depresiasi relatif konstan

selama beberapa periode maka perusahaan dapat menggunakan metode garis lurus untuk melakukan pengalokasian harga perolehan aktiva tetap.

Ilustrasi-Penentuan Biaya Depresiasi Dengan Umur Ekonomis dan Nilai Residu Berbeda

Ilustrasi berikut ini akan menunjukkan bagaimana dengan menentukan estimasi umur ekonomis dan nilai residu yang berbeda akan menghasilkan biaya depresiasi per periode yang berbeda pula. Perbedaan biaya depresiasi inilah yang berdampak pada besar kecilnya laba perusahaan. Ilustrasi ini menggunakan data-data sebagai berikut: sebuah perusahaan mempunyai aktiva dengan harga perolehan Rp 10.000.000, didepresiasi dengan metode garis lurus selama 5 dan 10 tahun. Selain itu perusahaan menetapkan nilai residu aktiva tetap bersangkutan adalah Rp 0 dan Rp 500.000. Maka perhitungan biaya depresiasi per periode untuk setiap nilai estimasi umur ekonomis adalah:

Nilai Residu (Rp)	Umur Ekonomis	
	5 tahun	10 tahun
	$\frac{10.000.000 - 0}{5} = 2.000.000$	$\frac{10.000.000 - 0}{10} = 1.000.000$
500.000	$\frac{10.000.000 - 500.000}{5} = 1.900.000$	$\frac{10.000.000 - 500.000}{10} = 950.000$

Dari tabel di atas terlihat bahwa dengan menggunakan estimasi umur ekonomis dan nilai residu aktiva tetap yang berbeda akan menghasilkan biaya depresiasi per periode yang berbeda pula. Perbedaan ini akan mempengaruhi besar kecilnya laba periode berjalan yang diterima perusahaan. Untuk membuat labanya menjadi lebih besar dari laba yang sesungguhnya maka perusahaan dapat menggunakan estimasi umur ekonomis yang lebih panjang dan nilai residu lebih besar, sebab hal itu akan membuat biaya depresiasi menjadi lebih rendah dibandingkan apabila estimasi umur ekonomis yang lebih pendek dan nilai residu lebih kecil. Rendahnya biaya depresiasi per periode akan membuat laba periode berjalan menjadi lebih tinggi.

Atau sebaliknya untuk membuat labanya menjadi lebih kecil dari laba yang sesungguhnya maka perusahaan dapat menggunakan estimasi umur ekonomis yang lebih pendek dan nilai residu lebih kecil, sebab hal itu akan membuat biaya depresiasi

menjadi lebih besar dibandingkan apabila estimasi umur ekonomis yang lebih panjang dan nilai residu lebih besar. Tingginya biaya depresiasi per periode akan membuat laba periode berjalan menjadi lebih kecil.

Ilustrasi-Penentuan Biaya Depresiasi Dengan Metode Depresiasi Yang Berbeda

Ilustrasi berikut ini akan menunjukkan bagaimana dengan menentukan metode depresiasi yang berbeda akan menghasilkan biaya depresiasi per periode yang berbeda pula. Perbedaan biaya depresiasi inilah yang berdampak pada besar kecilnya laba perusahaan. Ilustrasi ini menggunakan data-data sebagai berikut: sebuah perusahaan mempunyai aktiva dengan harga perolehan Rp 10.000.000, didepresiasi selama 10 tahun dan menetapkan nilai residu aktiva tetap adalah Rp 500.000. Maka perhitungan biaya depresiasi tahun pertama untuk setiap metode depresiasi adalah :

Metode Depresiasi	Biaya Depresiasi
Garis lurus	$\frac{10.000.000 - 500.000}{5} = 1.900.000$
Saldo menurun*	$25,88\% \times 10.000.000 = 2.558.700$
JAT**	$\frac{10}{55} (10.000.000 - 500.000) = 1.727.273$

Keterangan: * $Tarif\ depresiasi = 1 - \sqrt[10]{\frac{500.000}{10.000.000}} = 25,88\%$

** $JAT = 10 \left(\frac{10 + 1}{2} \right) = 55$

Dari tabel di atas terlihat bahwa dengan menggunakan metode depresiasi aktiva tetap yang berbeda akan menghasilkan biaya depresiasi per periode yang berbeda pula. Perbedaan ini akan mempengaruhi besar kecilnya laba yang diterima perusahaan. Untuk membuat labanya menjadi lebih besar dari laba yang sesungguhnya di tahun-tahun pertama maka perusahaan dapat menggunakan metode garis lurus atau JAT, sebab hal itu akan membuat biaya depresiasi menjadi lebih rendah dibandingkan apabila menggunakan metode saldo menurun. Rendahnya biaya depresiasi per periode akan membuat laba periode berjalan menjadi lebih tinggi. Atau sebaliknya untuk membuat labanya menjadi lebih besar dari laba yang sesungguhnya di tahun-tahun berikutnya

maka perusahaan dapat menggunakan metode saldo atau JAT, sebab hal itu akan membuat biaya depresiasi menjadi lebih rendah dibandingkan apabila menggunakan metode garis lurus. Rendahnya biaya depresiasi per periode akan membuat laba periode berjalan menjadi lebih tinggi.

Untuk membuat labanya menjadi lebih kecil dari laba yang sesungguhnya di tahun-tahun pertama maka perusahaan dapat menggunakan metode saldo menurun, sebab hal itu akan membuat biaya depresiasi menjadi lebih rendah dibandingkan apabila menggunakan metode garis lurus atau JAT. Rendahnya biaya depresiasi per periode akan membuat laba periode berjalan menjadi lebih tinggi. Sedangkan untuk membuat labanya menjadi lebih kecil dari laba yang sesungguhnya di tahun-tahun berikutnya maka perusahaan dapat menggunakan metode garis lurus, sebab hal itu akan membuat biaya depresiasi menjadi lebih rendah dibandingkan apabila menggunakan metode saldo menurun atau JAT. Rendahnya biaya depresiasi per periode akan membuat laba periode berjalan menjadi lebih tinggi.

C. HUTANG LANCAR

Hutang (*liabilities*) merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan perusahaan oleh perusahaan di masa depan dalam bentuk penyerahan barang atau jasa yang disebabkan transaksi atau peristiwa di masa lalu. Secara teoritis hutang dapat diklasifikasikan menjadi hutang jangka panjang dan jangka pendek. Hutang jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan hutang jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan kurang dari satu periode akuntansi. Hutang jangka pendek seringkali disebut dengan hutang lancar (*current liabilities*) sebab untuk menyelesaikannya pun dibutuhkan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Ada beberapa jenis hutang yang dapat diklasifikasikan sebagai hutang lancar ini, yaitu hutang dagang, pendapatan dibayar dimuka, biaya yang masih harus dibayar, hutang jangka panjang yang jatuh tempo (*current maturity of long-term debt*), hutang pajak, dan hutang deviden.

1. Hutang Dagang

Hutang dagang merupakan kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan dan menyerahkan sejumlah kas secara tunai kepada pihak lain yang harus diselesaikan

dimasa depan karena perusahaan telah melakukan pembelian barang atau menerima jasa secara kredit.

2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban perusahaan untuk penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain yang harus diselesaikan dimasa depan karena perusahaan telah menerima sebagian atau keseluruhan pembayaran secara tunai dari pihak lain itu. Sebagai contoh adalah persekot yang dibayarkan secara tunai oleh pihak lain karena memesan barang atau jasa dari perusahaan.

3. Biaya yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar merupakan kewajiban perusahaan berupa pengeluaran dan pembayaran kas secara tunai kepada pihak lain yang harus diselesaikan dimasa depan karena perusahaan telah menerima barang atau jasa dari pihak lain itu. Sebagai contoh adalah berbagai hutang biaya (administrasi dan umum maupun pemasaran) karena perusahaan telah menerima barang atau jasa dari pihak lain.

4. Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo

Hutang jangka panjang yang jatuh tempo merupakan kewajiban perusahaan berupa pengeluaran dan pembayaran kas secara tunai kepada pihak lain yang harus diselesaikan dimasa depan karena hutang jangka perusahaan telah jatuh tempo.

5. Hutang Pajak

Hutang pajak merupakan kewajiban perusahaan berupa pengeluaran dan pembayaran kas secara tunai dimasa depan kepada pemerintah yang harus diselesaikan dimasa depan karena perusahaan mempunyai tunggakan sejumlah pajak.

6. Hutang Dividen

Hutang dividen adalah kewajiban berupa pengeluaran dan pembayaran kas kepada pemegang saham yang harus diselesaikan dimasa depan karena perusahaan mempunyai janji untuk membagikan sejumlah dividen kepada pemegang sahamnya.

Semua jenis hutang di atas pada dasarnya mempunyai sifat yang sama, yaitu harus diselesaikan perusahaan dengan menggunakan aktiva lancar dalam waktu kurang dari satu periode akuntansi. Sebagian besar hutang lancar merupakan hutang yang timbul dari transaksi-transaksi yang berkaitan dengan aktiva lancar. Artinya, semakin

besar transaksi yang menimbulkan aktiva lancar semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk memiliki hutang lancar. Oleh sebab itu cara dan metode untuk merekayasa aktiva lancar juga bisa dilakukan untuk merekayasa hutang lancar. Maka atas pemikiran inilah ada beberapa upaya rekayasa manajerial yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan hutang lancar ini, yaitu:

1. Mengakui dan mencatat transaksi pembelian lebih besar dibandingkan pembelian sesungguhnya

Upaya ini dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan penjual barang agar mau mengubah bukti transaksi jual-beli itu menjadi lebih besar dibandingkan transaksi sesungguhnya. Sementara selisih dana yang seharusnya digunakan untuk transaksi itu digunakan secara pribadi oleh pelakunya. Untuk menutupi penyelewengan ini manajer akan menggunakan barang-barang yang dibeli dari transaksi berikutnya sehingga pada saat ada pemeriksaan terhadap barang secara fisik ada kesesuaian jumlah antara yang dicatat dengan riilnya. Hal ini akan dilakukan terus menerus sampai pelaku mempunyai kemampuan untuk mengembalikan kas yang dipakainya itu. Upaya penyelewengan semacam ini dapat terungkap pada saat ada pemeriksaan (*auditing*) yang dilakukan secara berkala maupun tahunan.

2. Menunda mengakui pendapatan diterima dimuka sebagai pendapatan periodik

Secara konseptual pendapatan diterima dimuka harus segera diakui sebagai pendapatan periode berjalan apabila perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya yang berupa penyerahan barang atau jasa senilai kas yang sebelumnya telah diterima. Namun perusahaan akan menunda pengakuan ini apabila menginginkan laba periode berjalan menjadi lebih rendah dibandingkan laba sesungguhnya, sebab semakin rendah pendapatan akan semakin rendah pula laba yang diperolehnya. Hal ini dilakukan perusahaan pada saat perusahaan ingin menghindari kewajiban-kewajibannya, seperti menghindari untuk membayar pajak yang lebih besar atau menunda penyelesaiannya hutang-hutangnya.

3. Menunda mengakui biaya yang masih harus dibayar sebagai biaya periodik

Secara konseptual biaya yang masih harus dibayar harus segera diakui sebagai biaya periode berjalan apabila perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya yang berupa penyerahan kas senilai barang atau jasa yang sebelumnya telah diterima. Namun perusahaan akan menunda pengakuan ini apabila menginginkan laba periode

berjalan menjadi lebih tinggi dibandingkan laba sesungguhnya, sebab semakin rendah biaya akan semakin rendah pula laba yang diperolehnya. Hal ini dilakukan perusahaan pada saat perusahaan ingin terlihat mempunyai kinerja yang lebih bagus dibandingkan kinerja sesungguhnya, seperti pada saat manajer menginginkan agar sahamnya direspon secara positif oleh pasar, mengejar bonus yang dijanjikan pemilik, memperoleh pinjaman dana dari kreditur, dan sebagainya.

4. Menunda mengakui hutang jangka panjang yang jatuh tempo

Secara konseptual bagian hutang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo harus segera diakui sebagai hutang lancar, sehingga perusahaan dapat mengetahui berapa jumlah hutang yang segera harus diselesaikannya. Namun hal ini akan mengakibatkan kinerja keuangan (likuiditas dan solvabilitas) perusahaan menjadi menurun dan terlihat kurang menguntungkan pada saat perusahaan menginginkan kinerja terlihat bagus di mata *stakeholder*. Oleh sebab itu perusahaan akan merekayasa hutang lancarnya dengan menunda untuk mengakui hutang jangka panjangnya yang akan jatuh tempo. Hutang ini baru akan diakui pada saat tujuan di atas sudah tercapai.

BAB 8

MODEL EMPIRIS

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah membaca bab ini pembaca diharapkan dapat memahami bahwa:

1. Ada tiga pendekatan yang dikembangkan oleh para peneliti untuk mendeteksi manajemen laba, yaitu *aggregate accrual*, *specific accruals*, dan *distribution of earnings after management*.
2. Ada empat model empiris dari pendekatan berbasis akrual.

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah membaca bab ini pembaca diharapkan dapat memahami bahwa:

1. Hanya pendekatan berbasis akrual yang saat ini diterima untuk mendeteksi manajemen laba, sebab pendekatan ini sejalan dengan basis akuntansi yang dipakai dan menggunakan seluruh komponen laporan keuangan.
 2. Penetapan model Healy, Dechow, Jones, dan Jones dimodifikasi untuk mendeteksi manajemen laba.
-

Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa penelitian dan analisis empiris mengenai manajemen laba (*earnings management*) beberapa dekade terakhir ini semakin berkembang. *Pertama*, semakin tingginya angka dan aktivitas rekayasa keuangan yang terjadi. Bahkan bisa dikatakan hampir semua perusahaan di seluruh dunia, dengan alasan yang berbeda, melakukan manajemen laba ketika mencatat transaksi dan menyusun informasi keuangannya. Apalagi aktivitas rekayasa ini relatif mudah dilakukan oleh siapapun yang memahami dan menguasai konsep akuntansi keuangan (*financial accounting*), tanpa harus melanggar prinsip akuntansi yang ada. Hal ini bisa terjadi karena pada dasarnya manajemen laba merupakan upaya manajerial untuk mempermainkan semua komponen laporan keuangan dengan memanfaatkan “celah” yang ada dalam standar akuntansi sesuai dengan keinginan manajer perusahaan. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa penelitian dan analisis empiris terhadap

manajemen laba sebenarnya merupakan upaya untuk mengidentifikasi komponen dan standar yang menjadi obyek rekayasa manajerial itu.

Kedua, semakin tajamnya perbedaan perspektif antara para praktisi dengan akademisi dalam memandang dan memahami manajemen laba. Praktisi menganggap manajemen laba sebagai kecurangan manajerial untuk mengelabui *stakeholder* perusahaan. Apalagi manajemen laba dilakukan manajer perusahaan untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dan kelompoknya, meski harus merugikan pihak lain. Sedangkan para akademisi melihat manajemen laba sebagai dampak pemakaian basis akrual dan longgarnya standar akuntansi yang dipakai saat ini. Dalam pemahaman ini maka manajemen laba tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan curang (*fraud*), apabila aktivitas ini dilakukan masih dalam kerangka prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa penelitian dan analisis empiris terhadap manajemen laba sebenarnya merupakan jembatan untuk mempertemukan dan memadukan perbedaan pandangan kedua pihak ini.

Ketiga, semakin berkembangnya penelitian dibidang akuntansi, khususnya akuntansi keuangan dan keperilakuan (*financial and behavior accounting*). Saat ini penelitian akuntansi tidak hanya terpaku pada angka-angka yang ada dalam laporan keuangan saja (perspektif informasi), namun juga mencoba mengurai motivasi apa yang mendasari seseorang ketika menyusun laporan keuangan (perspektis oportunistis). Untuk ini, penelitian akuntansi tidak hanya menggunakan dasar informasi dalam laporan keuangan, namun juga menggunakan informasi lain dan data-data primer untuk melakukan analisis empirisnya. Hingga kesimpulan yang dihasilkannya lebih komprehensif, valid, dan *robust*. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa penelitian dan analisis empiris terhadap manajemen laba sebenarnya merupakan upaya untuk mengetahui dan menganalisis berbagai motivasi yang mendasari dan mendorong seseorang ketika mencatat transaksi dan peristiwa bisnis, selain ingin menyediakan informasi bagi pihak lain. Untuk itu beberapa peneliti telah mencoba mengembangkan kuisisioner sebagai alat untuk menguji manajemen laba dari sudut pandang oportunistis ini.

Kondisi ini tentu sangat positif bagi perkembangan ilmu dan penelitian akuntansi, karena membuat akuntansi tidak lagi hanya terfokus pada masalah proses pencatatan transaksi dan peristiwa bisnis semata, namun meluas untuk mendeteksi dan mengevaluasi motivasi yang mempengaruhi dan mendorong seseorang ketika membuat

dan menyusun laporan keuangan. Penelitian akuntansi tidak lagi hanya merupakan untuk mendeteksi proses mencatat, menggolongkan, dan mengolah angka, namun berkembang untuk mendeteksi apakah seseorang mempunyai motivasi lain ketika menyusun laporan keuangan, selain motivasi untuk menyediakan informasi untuk semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan. Selain mendeteksi mengapa dan bagaimana seseorang melakukan manajemen laba, perkembangan ini pada akhirnya mendorong berkembangnya model matematis yang digunakan untuk mendeteksi manajemen laba. Hingga mudah dipahami jika pada akhirnya ada berbagai model matematis dengan berbagai pendekatan yang berhasil dirumuskan untuk mendeteksi manajemen laba sampai saat ini.

A. PENDEKATAN MANAJEMEN LABA

Secara umum ada tiga pendekatan yang telah dihasilkan para peneliti untuk mendeteksi manajemen laba, yaitu model yang berbasis *aggregate accrual*, *specific accruals*, dan *distribution of earnings after management*.

1. Model Berbasis *Aggregate Accrual*

Model pertama merupakan model yang berbasis *aggregate accrual*, yaitu model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Healy, DeAngelo, dan Jones. Selanjutnya Dechow, Sloan, dan Sweeney mengembangkan model Jones menjadi model Jones yang dimodifikasi (*modified Jones model*). Model-model ini menggunakan total akrual dan model regresi untuk menghitung akrual yang diharapkan (*expected accruals*) dan akrual yang tidak diharapkan (*unexpected accruals*).

Model Healy merupakan model yang relatif sederhana karena menggunakan total akrual (*total accruals*) sebagai proksi manajemen laba. Padahal total akrual merupakan penjumlahan *discretionary accruals* dan *nondiscretionary accruals*. Secara konseptual *discretionary accruals* merupakan komponen akrual yang dapat diatur dan direkayasa sesuai dengan kebijakan (*discretion*) manajerial, sementara *nondiscretionary accruals* merupakan komponen akrual yang tidak dapat diatur dan direkayasa sesuai dengan kebijakan manajer perusahaan. Hingga atas dasar pemikiran ini bisa disimpulkan ada kelemahan mendasar dalam model Healy, sebab

memasukkan komponen *nondiscretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba seolah menganggap manajer dapat mengatur dan merekayasa semua komponen akrual tanpa terkecuali. Hal ini tentu kontradiktif dengan filosofi dasar akuntansi yang mengatakan bahwa manajer tetap mempunyai keterbatasan dalam mengatur besar kecilnya komponen akrual.

Model DeAngelo dikembangkan dengan menggunakan perubahan dalam total akrual (*change in total accruals*) sebagai proksi manajemen laba. Model Jones menggunakan sisa regresi total akrual dari perubahan penjualan dan *property, plant, and equipment* sebagai proksi manajemen laba. Sedangkan model Jones dimodifikasi (*modified Jones model*) menggunakan sisa regresi total akrual dari perubahan penjualan dan *property, plant, and equipment*, dimana pendapatan disesuaikan dengan perubahan piutang yang terjadi pada periode bersangkutan. Sementara Kang dan Suvaramakrishnan menggunakan sisa regresi dari aktiva lancar non-kas yang dikurangi dengan kewajiban yang dibagi dengan aktiva tersebut pada periode sebelumnya, yang disesuaikan dengan kenaikan pendapatan, biaya, dan *plant and equipment* sebagai proksi manajemen laba.

2. Model Berbasis *Spesific Accruals*

Model kedua merupakan model yang berbasis akrual khusus (*specific accruals*), yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen laporan keuangan tertentu dari industri tertentu, misalnya piutang tak tertagih dari sektor industri tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industri asuransi. Model ini dikembangkan oleh McNichols dan Wilson, Petroni, Beaver dan Engel, Beaver dan McNichols. McNichols dan Wilson mengembangkan model yang menggunakan sisa provisi untuk piutang tak tertagih, yang diestimasi sebagai sisa regresi provisi untuk piutang tak tertagih pada saldo awal, serta penghapusan piutang periode berjalan dan periode yang akan datang sebagai proksi manajemen laba. Model berikutnya dikembangkan oleh Petroni yang menggunakan klaim terhadap estimasi cadangan kesalahan, yang diukur selama lima tahun perkembangan cadangan kerugian penjaminan kerusakan *property* sebagai proksi manajemen laba.

Model Beaver dan Engel menggunakan biaya yang tersisa dari kerugian pinjaman, yang diestimasi sebagai sisa regresi biaya dari kerugian pinjaman pada *charge-of*

bersih, pinjaman yang beredar, aktiva yang tidak bermanfaat dan melebihi satu tahun perubahan aktiva tidak bermanfaat sebagai proksi manajemen laba. Sedangkan Beneish mengembangkan model yang menggunakan hari-hari dalam indeks piutang, indeks laba kotor (*gross margin*), indeks kualitas aktiva, indeks depresiasi, indeks biaya administrasi umum dan penjualan, indeks total akrual terhadap total aktiva sebagai proksi manajemen laba. Terakhir adalah model Beaver dan McNichols yang menggunakan korelasi serial dari satu tahun perkembangan cadangan kerugian penjaminan kerusakan *property* sebagai proksi manajemen laba.

3. Model Berbasis *Distribution Of Earnings After Management*.

Sementara model *distribution of earnings* dikembangkan oleh Burgtähler dan Dichev, DeGeorge, Patel, dan Zeckhauser, serta Myers dan Skinner. Pendekatan ini dikembangkan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan laba. Model ini terfokus pada pergerakan laba disekitar *benchmark* yang dipakai, misalkan laba kuartal sebelumnya, untuk menguji apakah *incidence* jumlah yang berada di atas maupun di bawah *benchmark* telah didistribusikan secara merata, atau merefleksikan ketidakberlanjutan kewajiban untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Model Burgtähler dan Dichev merupakan model yang menguji apakah frekuensi realisasi laba tahunan yang merupakan bagian atas (bawah) laba yang besarnya nol dan laba akhir tahun adalah lebih besar (kecil) daripada yang diharapkan untuk mendeteksi manajemen laba. Selanjutnya DeGeorge, Patel, dan Zeckhauser mengembangkan model yang menguji apakah frekuensi realisasi laba kuartalan yang merupakan bagian atas (bawah) laba yang besarnya nol, laba akhir kuartal dan *forecast* investor adalah lebih besar (kecil) daripada yang diharapkan untuk mendeteksi manajemen laba. Sedangkan model Myers dan Skinner merupakan model yang menguji apakah angka-angka laba meningkat yang berurutan adalah lebih besar dibandingkan angka-angka jika tanpa manajemen laba untuk mendeteksi manajemen laba.

Di bidang akademis, perkembangan setiap model manajemen laba dengan berbagai dan keunggulan dan kelemahan ini tentu sangat menggembirakan. Namun sejauh ini hanya model yang menggunakan basis akrual (*accruals basis*) yang diterima sebagai model yang memberikan hasil yang cukup kuat untuk mendeteksi keberadaan

manajemen laba. Ada dua alasan yang mendasari mengapa model yang memproksikan manajemen laba dengan *discretionary accruals* ini lebih dapat diterima dan dipergunakan dalam berbagai penelitian manajemen laba.

1. Akuntansi berbasis akrual

Model manajemen laba berbasis *aggregate accruals* sejalan dengan basis akuntansi yang selama ini banyak dipergunakan di berbagai negara, yaitu akuntansi berbasis akrual (*accruals accounting*). Secara konseptual akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui dan mencatat semua transaksi (*transaction*) dan peristiwa (*event*) berdasarkan waktu terjadinya dan bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Artinya, suatu transaksi sudah dapat diakui dan dicatat sebagai hak walaupun kas baru akan diterima pada periode berikutnya atau mengakui hak pada periode berikutnya walaupun kas telah diterima. Sebaliknya, suatu transaksi sudah dapat diakui dan dicatat sebagai kewajiban walaupun kas baru akan dikeluarkan pada periode berikutnya atau mengakui kewajiban pada periode berikutnya walaupun kas telah dikeluarkan. Hingga dalam akuntansi berbasis akrual tidak semua transaksi dan peristiwa harus dilakukan secara tunai.

2. Menggunakan seluruh komponen laporan keuangan

Model manajemen laba berbasis *aggregate accruals* merupakan model yang menggunakan komponen-komponen laporan keuangan yang secara langsung dideteksi sebagai obyek rekayasa akuntansi tersebut. Secara teoritis, akuntansi berbasis akrual mengakibatkan munculnya beberapa komponen non-kas dalam laporan keuangan, misalkan hutang, piutang, biaya dibayar dimuka (*deffered charge*), pendapatan diterima dimuka, biaya cadangan kerugian dan penurunan nilai aktiva lancar, biaya penyusutan (amortisasi, depresiasi, dan depleksi) aktiva, dan lain-lain. Atau dengan kata lain, komponen non-kas merupakan penyebab munculnya komponen akrual dalam laporan keuangan. Komponen non-kas ini tidak akan ada jika perusahaan menggunakan akuntansi berbasis kas,

Komponen non-kas atau akrual inilah yang selama ini ditengarai dipakai sebagai obyek “permainan” manajer ketika mengelola dan mengatur laba yang akan dilaporkannya. Hal ini bisa dilakukan karena manajer mempunyai kebebasan untuk memilih dan mengganti metode dan prinsip akuntansi untuk mencatat komponen-komponen tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Sehingga

pengembangan model manajemen yang menggunakan komponen-komponen tersebut relatif dapat diterima karena sejalan dengan akuntansi berbasis akrual. Apalagi mengingat *discretionary accruals* (proksi manajemen laba) merupakan selisih antara total akrual dan *nondiscretionary accruals*, yang merupakan komponen utama laba dalam akuntansi berbasis akrual.

B. MODEL EMPIRIS

B.1. MODEL HEALY

Model empiris untuk mendeteksi manajemen pertama kali dikembangkan oleh Healy pada tahun 1985. Secara umum model ini tidak berbeda dengan model-model lain yang dipergunakan untuk mendeteksi manajemen laba dalam menghitung nilai total akrual (*TAC*), yaitu mengurangi laba akuntansi yang diperolehnya selama satu periode tertentu dengan arus kas operasi periode bersangkutan.

$$TAC = Net\ income - Cash\ flows\ from\ operations$$

Untuk menghitung *nondiscretionary accruals* model healy membagi rata-rata total akrual (*TAC*) dengan total aktiva periode sebelumnya. Oleh sebab itu total akrual selama periode estimasi merupakan representasi ukuran *nondiscretionary accruals* dan dirumuskan sebagai berikut:

$$NDA_t = \frac{\sum TA_t}{T}$$

Dimana:	<i>NDA</i>	= <i>Nondiscretionary accruals</i> .
	<i>TAC</i>	= Total akrual yang diskala dengan total aktiva periode <i>t-1</i> .
	<i>T</i>	= 1, 2, <i>T</i> merupakan tahun <i>subscript</i> untuk tahun yang dimasukkan dalam periode estimasi.
	τ	= Tahun <i>subscript</i> yang mengindikasikan tahun dalam periode estimasi

Ada kelemahan mendasar dalam model Healy yang diindikasikan oleh Dechow *et al.* (1995) bahwa total akrual yang digunakan oleh model ini sebagai proksi manajemen laba juga mengandung *nondiscretionary accruals*. Padahal *nondiscretionary*

accruals merupakan komponen total akrual yang tidak bisa dikelola dan diatur oleh manajer seperti halnya komponen *discretionary accruals*. Atau dengan kata lain, model Healy mengarah kepada uji yang salah spesifikasi. Kelemahan seperti ini dalam ilmu ekonometrika disebut salah pengukuran. Namun, Healy beralasan bahwa *nondiscretionary accruals* tidak dapat diobservasi dari laporan keuangan, sehingga terpaksa menggunakan total akrual sebagai proksi manajemen laba.

Ilustrasi-Penggunaan Model Healy

Ilustrasi sederhana berikut ini akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah di atas diaplikasikan untuk mengidentifikasi manajemen laba. Ilustrasi ini menggunakan data-data keuangan 3 perusahaan dengan periode pengamatan selama 2 tahun, yaitu tahun 1999 dan 2000.

Persh	LK	NI	CF	TA
A	1999	4335	-134	13514
A	2000	-107	1711	14732
B	1999	11154	-2510	124839
B	2000	-124528	-1139	63305
C	1999	24703	44619	374190
C	2000	-1584	65090	428549

Keterangan: Persh : Nama perusahaan
 LK : Tahun laporan keuangan
 NI : Laba bersih
 CF : Arus kas operasi
 TA : Total aktiva

Langkah I: Menghitung nilai total akrual (*TAC*) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

Persh	LK	NI	CF	TAC=NI-CF
A	1999	4335	-134	4469
A	2000	-107	1711	-1819
B	1999	11154	-2510	13664
B	2000	-124528	-1139	-123389
C	1999	24703	44619	-19916
C	2000	-1584	65090	-66673

Langkah II: Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (*NDA*) yang merupakan rata-rata total akrual (*TAC*) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = \frac{\sum TA_t}{T}$$

Persh	LK	TAC	TA	NDA
A	1999	4469	13514	0.33069
A	2000	-1819	14732	-0.12347
B	1999	13664	124839	0.10945
B	2000	-123389	63305	-1.94912
C	1999	-19916	374190	-0.05322
C	2000	-66673	428549	-0.15558

Langkah III: Menghitung nilai *discretionary accruals* (*DA*), yaitu selisih antara total akrual (*TAC*) dengan *nondiscretionary accruals* (*NDA*). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

Persh	LK	TAC	NDA	DA
A	1999	4469	0.33069	13513.669
A	2000	-1819	-0.12347	14732.123
B	1999	13664	0.10945	124838.891
B	2000	-123389	-1.94912	63306.949
C	1999	-19916	-0.05322	374190.053
C	2000	-66673	-0.15558	428549.156

Keterangan: DA = TAC-NDA

B.2. MODEL DEANGELO

Model lain untuk mendeteksi manajemen laba dikembangkan oleh DeAngelo pada tahun 1986. Secara umum model ini juga menghitung total akrual (*TAC*) sebagai selisih antara laba akuntansi yang diperoleh suatu perusahaan selama satu periode dengan arus kas periode bersangkutan atau dirumuskan sebagai berikut:

$$TAC = Net\ income - Cash\ flows\ from\ operations$$

Model deangelo mengukur atau memproksikan manajemen laba dengan *nondiscretionary accruals*, yang dihitung dengan menggunakan total akrual akhir

periode yang diskala dengan total aktiva periode sebelumnya. Atau dirumuskan sebagai berikut:

$$NDA_{\tau} = TAC_{\tau-1}$$

Dimana: NDA_{τ} = *Discretionary accruals* yang diestimasi.
 TAC_t = Total akrual periode t .
 TA_{t-1} = Total aktiva periode $t-1$.

Secara umum, seperti halnya model healy, model deangelo juga menggunakan total akrual periode estimasi sebagai proksi *expected nondiscretionary accruals*. Seandainya *nondiscretionary accruals* selalu konstan setiap saat dan *discretionary accruals* mempunyai rata-rata sama dengan nol selama periode estimasi, maka kedua model tersebut akan mengukur *discretionary accruals* tanpa kesalahan. Namun, apabila *nondiscretionary accruals* berubah dari periode keperiode, maka kedua model tersebut akan mengukur *discretionary accruals* dengan kesalahan. Sedangkan, seandainya kedua model mengukur *discretionary accruals* dengan lebih tepat maka hal ini tergantung pada sifat proses *time-series* untuk menghasilkan *nondiscretionary accruals*. Seandainya *nondiscretionary accruals* mengikuti proses *white noise* sepanjang rata-ratanya konstan maka model healy akan lebih tepat. Namun seandainya *nondiscretionary accruals* mengikuti *random walk* maka model deangelo yang lebih tepat.

Ilustrasi-Penggunaan Model DeAngelo

Ilustrasi sederhana berikut ini akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah di atas diaplikasikan untuk mengidentifikasi manajemen laba. Ilustrasi ini menggunakan data-data keuangan 3 perusahaan dengan periode pengamatan selama 2 tahun, yaitu tahun 1999 dan 2000.

Persh	LK	NI	CF	TA
A	1999	4335	-134	13514
A	2000	-107	1711	14732
B	1999	11154	-2510	124839
B	2000	-124528	-1139	63305
C	1999	24703	44619	374190

C	2000	-1584	65090	428549
<hr/>				
Keterangan:	Persh	:	Nama perusahaan	
	LK	:	Tahun laporan keuangan	
	NI	:	Laba bersih	
	CF	:	Arus kas operasi	
	TA	:	Total aktiva	

Langkah I: Menghitung nilai total akrual (*TAC*) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

Persh	LK	NI	CF	TAC=NI-CF
A	1999	4335	-134	4469
A	2000	-107	1711	-1819
B	1999	11154	-2510	13664
B	2000	-124528	-1139	-123389
C	1999	24703	44619	-19916
C	2000	-1584	65090	-66673

Langkah II: Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (*NDA*) yang merupakan rata-rata total akrual (*TAC*) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_{\tau} = TAC_{\tau-1}$$

Persh	LK	TAC	TA	NDA
A	1999	4469	13514	
A	2000	-1819	14732	-0.40703
B	1999	13664	124839	
B	2000	-123389	63305	-1.94912
C	1999	-19916	374190	
C	2000	-66673	428549	-0.15558

Langkah III: Menghitung nilai *discretionary accruals* (*DA*), yaitu selisih antara total akrual (*TAC*) dengan *nondiscretionary accruals* (*NDA*). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

Persh	LK	TAC	NDA	DA
A	1999	4469	0.33069	
A	2000	-1819	-0.12347	-1818.593

B	1999	13664	0.10945	
B	2000	-123389	-1.94912	-123387.051
C	1999	-19916	-0.05322	
C	2000	-66673	-0.15558	-66672.844
Keterangan: DA		= TAC-NDA		

B.3. MODEL JONES

Model Jones dikembangkan oleh Jones (1991) ini tidak lagi menggunakan asumsi bahwa *nondiscretionary accruals* adalah konstan. Hal ini sesuai dengan penelitian Kaplan (1985) yang merupakan dasar pengembangan model yang menyatakan bahwa akrual ekuivalen dengan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan manajerial atau hasil yang diperoleh dari proses perubahan kondisi ekonomi perusahaan. Atas dasar alasan itulah model Jones mengusahakan untuk mengendalikan pengaruh perubahan kondisi perekonomian perusahaan terhadap *nondiscretionary accruals*. Selain itu model ini menggunakan dua asumsi sebagai dasar pengembangan, yaitu:

1. Akrual periode berjalan (*current accruals*), yaitu perubahan dalam rekening modal kerja, merupakan hasil dari perubahan yang terjadi di lingkungan ekonomi perusahaan yang dihubungkan dengan perubahan penjualan, sehingga semua variabel yang digunakan akan dibagi dengan aktiva atau penjualan periode sebelumnya.
2. *Gross property, plant, and equipment* merupakan salah satu komponen utama yang digunakan untuk menghitung total akrual, khususnya untuk biaya depresiasi *nondiscretionary*.

Maka, atas dasar dua asumsi di atas, untuk menghitung total akrual, model ini menghubungkan total akrual dengan perubahan penjualan dan *gross property, plant, and equipment*. Sementara untuk menghitung *nondiscretionary accruals* di tahun peristiwa model ini memrumuskan sebagai berikut:

$$NDA_t = \alpha_1 \frac{1}{A_{t-1}} + \alpha_2 \frac{\Delta REV_t}{TA_{t-1}} + \alpha_3 \frac{PPE_t}{TA_{t-1}}$$

Dimana: ΔREV_t = Pendapatan tahun t dikurangi pendapatan periode $t-1$.

PPE_t = Gross property, plant, and equipment periode t .
 TA_{t-1} = Total aktiva periode $t-1$.
 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = Firm-specific parameters.

Estimasi α_1 , α_2 , α_3 dihitung selama periode estimasi dengan menggunakan model sebagai berikut:

$$\frac{TAC_t}{TA_{t-1}} = \alpha_1 \left(\frac{1}{TA_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_t}{TA_{t-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_t}{TA_{t-1}} + v_t \right)$$

Dimana: TAC_t = Total akrual

Secara implisit model Jones mengasumsikan bahwa pendapatan merupakan *nondiscretionary*. Apabila *earnings* dikelola dengan menggunakan pendapatan *discretionary*, maka model ini akan menghapus bagian laba yang dikelola untuk proksi *discretionary accruals*. Sebagai contoh, misalkan ketika manajemen perusahaan menggunakan kebijakan untuk mengatur pendapatan akhir tahun ketika kas belum diterima dan dipertanyakan apakah pendapatan tersebut dapat diterima atau tidak. Hasil dari kebijakan manajerial ini dapat menaikkan pendapatan dan total akrual melalui kenaikan piutang.

Ilustrasi-Penggunaan Model Jones

Ilustrasi sederhana berikut ini akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah di atas diaplikasikan untuk mengidentifikasi manajemen laba. Ilustrasi ini menggunakan data-data keuangan 4 perusahaan dengan periode pengamatan selama 4 tahun, yaitu tahun 1997 sampai dengan tahun 2000.

Persh	LK	NI	CF	PPE	CA	Cash	CL	CM	TA	Sales	TR
A	1999	4335	-134	5536	3552	966	13773	259	13514	11437	103
A	2000	-107	1711	5501	3816	1171	12789	258	14732	13722	756
B	1999	11154	-2510	58600	4344	598	219368	5925	124839	3787	1324
B	2000	-124528	-1139	42555	15601	132	293386	7388	63305	4489	285
C	1999	24703	44619	156121	226264	89193	147567	87334	374190	413772	54955
C	2000	-1584	65090	166680	269339	100719	100947	48164	428549	549171	66679

Keterangan: Persh : Nama perusahaan
 LK : Tahun laporan keuangan
 NI : Laba bersih
 CF : Arus kas operasi
 PPE : *Gross property, plant, and equipment*
 CA : Aktiva lancar
 CL : Hutang lancar
 CM : *Current maturity*
 TA : Total aktiva
 TR : Piutang dagang

Langkah I: Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

Persh	LK	NI	CF	TAC=NI-CF
A	1999	4335	-134	4469
A	2000	-107	1711	-1819
B	1999	11154	-2510	13664
B	2000	-124528	-1139	-123389
C	1999	24703	44619	-19916
C	2000	-1584	65090	-66673

Langkah II: Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* sesuai dengan rumus di atas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana terhadap $\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel dependen serta $\frac{1}{TA_{i,t-1}}$, $\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$, dan $\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel independennya.

Persh	LK	$\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$	$\frac{1}{TA_{i,t-1}}$	$\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$	$\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$
A	2000	-0,1345633	0,000074	0,1690796	0,4070106
B	2000	-0,9883897	0,000008	0,0056167	0,340879
C	2000	-0,1781801	0,000003	0,3618448	0,4454412

$$\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = \hat{b}_0 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_1 \left(\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_2 \left(\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right),$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independen, yaitu $b_1 = 4936,211$, $b_2 = 0,000$ dan $b_3 = 7,985$ yang akan dimasukkan dalam persamaan di bawah ini untuk menghitung nilai *nondiscretionary total accruals*.

$$NDA_{i,t} = \hat{b}_0 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_1 \left(\frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_2 \left(\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right)$$

		$\frac{1}{TA_{i,t-1}}$	$\frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$	$\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$	$NDA_{i,t}$
Persh	LK				
A	2000	0,000074	0,120734697	0,4070106	3,6152352
B	2000	0,000008	0,01393496	0,340879	2,7614597
C	2000	0,000003	0,330514513	0,4454412	3,5700396

Langkah III: Menghitung nilai *discretionary accruals*, yaitu selisih antara total akrual (*TAC*) dengan *nondiscretionary accruals* (*NDA*). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

Persh	LK	TAC	NDA	DA
A	2000	-1818	3,615	-1822
B	2000	-123389	2,761	-123391
C	2000	-66673	3,570	-66676

Keterangan: DTA = TAC - NDTA

B.4. MODEL JONES DIMODIFIKASI

Model jones dimodifikasi (*modified jones model*) merupakan modifikasi dari model Jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk menentukan *discretionary accruals* ketika *discretion* melebihi pendapatan. Model ini banyak digunakan dalam penelitian-penelitian akuntansi karena dinilai merupakan model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dan memberikan hasil paling *robust*. Sama halnya model manajemen laba berbasis *aggregate accruals* yang lain model ini menggunakan

discretionary accruals sebagai proksi manajemen laba. Kelebihannya, model ini memecah total akrual mejadi empat komponen utama akrual, yaitu *discretionary current accruals*, *discretionary long-term accruals*, *nondiscretionary current accruals*, dan *nondiscretionary long-term accruals*. *Discretionary current accruals* dan *discretionary long-term accruals* merupakan akrual yang berasal dari aktiva lancar (*current assets*). Sedangkan *nondiscretionary current accruals* dan *nondiscretionary long-term accruals* merupakan akrual yang berasal dari aktiva tidak lancar (*fixed assets*).

$$TAC = Net\ income - Cash\ flows\ from\ operations$$

Akrual periode berjalan (*current accruals*) didefinisikan sebagai perubahan aktiva lancar non-kas (*noncash current assets*) dikurangi perubahan kewajiban lancar (*operating current liabilities*). Perubahan aktiva lancar non-kas akan dihitung sebagai perubahan aktiva lancar dikurangi dengan kas. Sedangkan perubahan kewajiban lancar akan dihitung sebagai perubahan total hutang dikurangi dengan hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo (*current maturity of long-term debt*).

$$Current\ accruals = \Delta(current\ assets-cash) - \Delta(current\ liabilities-current\ maturity\ of\ long-term\ debt)$$

Nondiscretionary current accruals merupakan *accruals* yang diekspektasi dengan menggunakan *modified jones model*. *Expected current accruals* sebuah perusahaan ditahun tertentu diestimasi dengan menggunakan *cross-sectional ordinary least square (OLS) regression* terhadap *current accruals (CurAcc)* dan perubahan penjualan.

$$\frac{CurAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = a_1 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + a_2 \left(\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right)$$

Semua nilai di atas diregresikan dengan menggunakan $\frac{CurAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel dependen, sedangkan $\frac{1}{TA_{i,t-1}}$ dan $\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel independen. Regresi terhadap tiga komponen ini menghasilkan nilai a_1 dan a_2 yang digunakan untuk menghitung nilai *nondiscretionary accruals* dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$NDC A_{i,t} = a_1 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + a_2 \left(\frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right)$$

Dimana: $NDC A_{it}$ = Nondiscretionary accruals perusahaan I periode t
 a_1 = *Estimated intercept* perusahaan i periode t .
 a_2 = *Slope* untuk perusahaan i periode t
 $TA_{i,t-1}$ = *Total assets* untuk perusahaan i periode $t-1$
 $\Delta Sales_{it}$ = Perubahan penjualan perusahaan i periode t .
 ΔTR_{it} = Perubahan dalam piutang dagang perusahaan i periode t .

Discretionary current accruals untuk sebuah perusahaan pada tahun tertentu dihitung sebagai berikut:

$$DCA_{i,t} = \frac{CurAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}} - NDC A_{i,t}$$

Dimana: DCA_{it} = *Discretionary current accruals* perusahaan i periode t .
 $CurAcc_{it}$ = *Current accruals* perusahaan i periode t .
 $TA_{i,t-1}$ = Total aktiva perusahaan i periode $t-1$.
 $NDC A_{it}$ = *Nondiscretionary current accruals* perusahaan i periode t .

Untuk menghitung *discretionary* dan *nondiscretionary long-term accruals*, harus menghitung *discretionary* dan *nondiscretionary total accruals*. *Discretionary total accruals* sebuah perusahaan ditahun tertentu dihitung meregresi total akrual sebagai dependen variabel dan *gross property, plant, and equipment* (PPE) sebagai *additional explanatory variable*.

$$\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = \hat{b}_0 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_1 \left(\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_2 \left(\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right),$$

Semua nilai di atas diregresikan dengan menggunakan $\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel

dependen, sedangkan $\frac{1}{TA_{i,t-1}}$, $\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$, dan $\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel independen.

Regresi terhadap keempat komponen ini menghasilkan nilai b_1 , b_2 , dan b_3 yang digunakan untuk menghitung nilai *nondiscretionary total accruals* (NDTA) dihitung sebagai berikut:

$$NDTA_{i,t} = \hat{b}_0 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_1 \left(\frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_2 \left(\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right)$$

- Dimana: \hat{b}_0 = *Estimated intercept* perusahaan i periode t .
 \hat{b}_1, \hat{b}_2 = *Slope* untuk perusahaan i periode t
 PPE_{it} = *Gross property, plant, and equipment* perusahaan i periode t .
 $\Delta TA_{i,t-1}$ = *Perubahan total aktiva* perusahaan i periode $t-1$.

Ilustrasi-Penggunaan Model Jones Dimodifikasi

Ilustrasi sederhana berikut ini akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah di atas diaplikasikan untuk mengidentifikasi manajemen laba. Ilustrasi ini menggunakan data-data keuangan 3 perusahaan dengan periode pengamatan selama 2 tahun, yaitu tahun 1999 dan 2000.

Persh	LK	NI	CF	PPE	CA	Cash	CL	CM	TA	Sales	TR
A	1999	4335	-134	5536	3552	966	13773	259	13514	11437	103
A	2000	-107	1711	5501	3816	1171	12789	258	14732	13722	756
B	1999	11154	-2510	58600	4344	598	219368	5925	124839	3787	1324
B	2000	-124528	-1139	42555	15601	132	293386	7388	63305	4489	285
C	1999	24703	44619	156121	226264	89193	147567	87334	374190	413772	54955
C	2000	-1584	65090	166680	269339	100719	100947	48164	428549	549171	66679

Keterangan: Persh : Nama perusahaan
 LK : Tahun laporan keuangan
 NI : *Net income*
 CF : *Cash flow from operation*
 PPE : *Gross property, plant, and equipment*
 CA : *Current assets*
 CL : *Current liabilities*
 CM : *Current maturity*
 TA : *Total assets*
 TR : *Trade receivables*

Langkah I: Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

Persh	LK	NI	CF	TAC=NI-CF
A	1999	4335	-134	4469
A	2000	-107	1711	-1819
B	1999	11154	-2510	13664
B	2000	-124528	-1139	-123389
C	1999	24703	44619	-19916
C	2000	-1584	65090	-66673

Langkah II: Menghitung nilai *current accruals* yang merupakan selisih antara perubahan (Δ) aktiva lancar (*current assets*) dikurangi kas dengan perubahan (Δ) hutang lancar (*current liabilities*) dikurangi hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo (*current maturity of long-term debt*).

Persh	LK	CA	Cash	CL	CM	A	B	C	D	CurAcc
A	1999	3552	966	13773	259	2586	348	13514	-1520	1868
A	2000	3816	1171	12789	258	2645	59	12531	-983	1042
B	1999	4344	598	219368	5925	3747	-337	213443	-26205	25868
B	2000	15601	132	293386	7388	15469	11722	285997	72555	-60832
C	1999	226264	89193	147567	87334	137072	13131	60234	-36354	49485
C	2000	269339	100719	100947	48164	168620	31548	52783	-7450	38999

Keterangan: A = CA-Cash
 B = (CA-Cash)_t-(CA-Cash)_{t-1}
 C = CL-CM
 D = (CL-CM)_t-(CL-CM)_{t-1}
 CurAcc = Current accruals = C - D

Langkah III: Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* sesuai dengan rumus di atas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana terhadap $\frac{CurAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel dependen serta $\frac{1}{TA_{i,t-1}}$ dan $\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel independennya.

Persh	LK	$\frac{CurAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$	$\frac{1}{TA_{i,t-1}}$	$\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$
A	2000	0,0771	0,000074	0,1690796
B	2000	-0,4872876	0,000008	0,0056167
C	2000	0,1042212	0,000003	0,3618448

$$\frac{CurAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = a_1 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + a_2 \left(\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right)$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independen, yaitu $a_1 = 4289,682$ dan $a_2 = 1,721$ yang akan dimasukkan dalam persamaan di bawah ini untuk menghitung nilai *nondiscretionary accruals*.

$$NDCA_{i,t} = a_1 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + a_2 \left(\frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right)$$

Persh	LK	$\frac{1}{TA_{i,t-1}}$	$\frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$	NDCA _{i,t}
A	2000	0,000074	0,120734697	0,5251997
B	2000	0,000008	0,01393496	0,0583439
C	2000	0,000003	0,330514513	0,5802794

Langkah IV: Menghitung nilai *discretionary current accruals*, yaitu *discretionary accruals* yang terjadi dari komponen-komponen aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan rumus sebagai berikut:

$$DCA_{i,t} = \frac{CurAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}} - NDCA_{i,t}$$

Persh	$CurAcc_{i,t}$		
	$TA_{i,t-1}$	$NDCA_{i,t}$	$DCA_{i,t}$
A	0,0771	0,5251997	-0,4480997
B	-0,4872876	0,0583439	-0,5456315
C	0,1042212	0,5802794	-0,4760582

Langkah V: Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* sesuai dengan rumus di atas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana terhadap $\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel dependen serta $\frac{1}{TA_{i,t-1}}$, $\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$, dan $\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel independennya.

Persh	LK	$\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$	$\frac{1}{TA_{i,t-1}}$	$\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$	$\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$
		A	2000	-0,1345633	0,000074
B	2000	-0,9883897	0,000008	0,0056167	0,340879
C	2000	-0,1781801	0,000003	0,3618448	0,4454412

$$\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = \hat{b}_0 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_1 \left(\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_2 \left(\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right)$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independen, yaitu $b_1 = 4936,211$, $b_2 = 0,000$ dan $b_3 = 7,985$ yang akan dimasukkan dalam persamaan di bawah ini untuk menghitung nilai *nondiscretionary total accruals*.

$$NDTA_{i,t} = \hat{b}_0 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_1 \left(\frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_2 \left(\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right)$$

		1	$\frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$	$\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$	
Persh	LK	$TA_{i,t-1}$	$TA_{i,t-1}$	$TA_{i,t-1}$	$NDTA_{i,t}$
A	2000	0,000074	0,120734697	0,4070106	3,6152352
B	2000	0,000008	0,01393496	0,340879	2,7614597
C	2000	0,000003	0,330514513	0,4454412	3,5700396

Langkah VI: Menghitung nilai *discretionary accruals*, *discretionary long-term accruals*, dan *nondiscretionary long-term accruals*. *Discretionary accruals* (DTA) merupakan selisih total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDTA). *Discretionary long-term accruals* (DLTA) merupakan selisih *discretionary accruals* (DTA) dengan *discretionary current accruals* (DCA). Sedangkan *nondiscretionary long-term accruals* (NDLTA) merupakan selisih *nondiscretionary accruals* (NDTA) dengan *nondiscretionary current accruals* (NDCA).

Persh	LK	TAC	NDCA	DCA	NDTA	DTA	DLTA	NDLTA
A	2000	-1818	0,525	-0,448	3,615	-1822	-1821	3,090
B	2000	-123389	0,058	-0,545	2,761	-123391	-123391	2,703
C	2000	-66673	0,580	-0,476	3,570	-66676	-66676	2,989

Keterangan: DTA = TAC-NDTA
DLTA = DTA-DCA
NDLTA = NDTA-NDCA

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott. L.J., S. Parker, dan G.F. Peters, 2000, "The Effectiveness of Blue Ribbon Committee Recommendations in Mitigating Financial Misstatement: An Empirical Study", *Working paper*.
- Affiff, Faisal, 2001, "Kebangkitan Pendidikan Moral dan Etika di Perguruan Tinggi", *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol.1, No.1.
- Agung, Julianto, dan Lilis Setiawati, 2003, "Kesempatan Bertumbuh dan Manajemen Laba", *Proceeding*, Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.
- Alderson, Michael J., dan Brian L. Betker, 1997, "The Long Run Performance of Companies That Withdraw Seasoned Equity Offerings", *Working paper*, September.
- Allen, David E., dan Victor Soucik, 2001, "Performance of Seasoned Equity Offerings in a Risk Adjusted Environment", *Working paper*.
- Anderson Ronald C., Thomas W. Bates, John M. Bizjak, dan Michael L. Lemmon, 2000, "Corporate Governance and Firm Diversification", *Financial Management*, Spring.
- Atkins, Glenn E., 1999, "Earnings Management (Manipulations?) and Operating Income", *Working paper*, 28 Juli.
- Backman, Michael, 2001, *Asian Eclipse: Exposing the Dark Side of Business in Asia*, Revised edition, John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.
- Ball, Ray, dan Philip Brown, 1968, "An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers", *Journal of Accounting Research*, Autumn.
- Baridwan, Anis, 2000, "Ketentuan Pasar Modal Dalam Penegakan Good Corporate Governance: Tinjauan Atas Perlindungan Hak-hak Pemegang Saham", *Makalah*, Seminar Pengelolaan Perusahaan yang Baik, Surabaya, 14 September.
- Beasley, C., M. Defond, J. Jiambalvo, dan K.R. Subramanyam, 1998, "The Effect of Audit on The Quality of Earnings Management", *Contemporary Accounting Research*, 15 (Spring).
- Beneish, Messod D., 2001, "Earnings Management: A Perspective", *Workingpaper*, April.

- Bampton, Roberta dan Cowton, Christopher J., 2002, "Pioneering in Ethics Teaching: The Case of Management Accounting in Universities in the British Isles", *Teaching Business Ethics*, 6(3), Agustus.
- Bayless, M., dan Chaplinsky, 1996, "Is There a Window of Opportunity for Seasoned Equity Issuance?", *Journal of Finance*.
- Broude, Paul D., 1997, "Going Public", *Journal of Management Consulting*, 9 (3), Mei.
- Budisantoso, A. Totok, 2002, "Rekayasa Ulang Pendidikan Akuntansi", *Proceeding Simposium Nasional*, FE UAJY, September.
- Buhner, Thomas., dan Christoph Kasere, 2000, "External Financing and Economics of Scale in Investment Banking-The Case of Seasoned Equity Offerings in Germany", *Working paper*, Juni.
- Cahan, Steven F., 1992, "The Effect of Antitrust Investigations on Discretionary Accruals: A Refined Test of The Political-Cost Hypothesis", *The Accounting Review*, Vol.67/No.1/Januari.
- Carcello, J.V. dan T.L. Neal, 2000, "Audit Committee Characteristics and Auditor Reporting", *The Accounting Review*, 75 (Oktober)
- Chtourou, Sonda Marrakchi, Jean Bedard, dan Lucie Courteau, 2001, "Corporate Governance and Earnings Management", *Workingpaper*, April.
- Chambers, Dennis J., 1999, "Earnings management and Capital Market Misallocation", *Workingpaper*, Desember.
- Cooney, J., dan A. Kalay, 1993, "Positive Information from Equity Issue Announcements", *Journal of Financial Economics*.
- Chen, Jo-Hui, 2001, "ISO Certification and Abnormal Return of Stock Price-The Study of the Taiwan Stock Market", *Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies*, Vol. 4, No. 2, 109-126.
- Choi, Wonseok, dan Jung-wook Kim, 2000, "Underreaction, Trading Volume, and Post-announcement Earnings-drift", *Working paper*, November.
- De Roon, Frans Andrianus, dan Chris Veld, 2002, "Announcement Effects of Convertible Bond Loans Versus Warrant-Bond Loans: An Empirical Analysis for the Dutch Market", *Working paper*.
- Danandjaja, James, 1988, *Antropologi Psikologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djalil, Sofyan A., 2000, "Good Corporate Governance", *Makalah*, Seminar Pengelolaan Perusahaan yang Baik, Surabaya, 14 September.

- Daniri, Mas Achmad, 2000, "Good Corporate Governance", *Makalah*, Seminar Pengelolaan Perusahaan yang Baik, Surabaya, 14 September.
- Davis, Mark A., Andersen, Mark G., dan Curtis, Mary B., 2001, "Measuring Ethical Ideology in Business Ethics: A Critical Analysis of the Ethics Position Questionnaire", *Journal of Business Ethics*, 32(1), Juli.
- DeFond, Mark L., dan James Jiambalvo, 1994, "Debt Covenant Violation and Manipulation of Accruals", *Journal of Accounting and Economics*, 17.
- Dezoort, F.T. dan S. Salterio, 2002, "The Effects of Corporate Governance Experience and Financial Reporting and Audit Knowledge on Audit Committee Members' Judgments", *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 21 (Fall): Forthcoming.
- Deshpande, Satish P., Joseph, Jacob, dan Maximov, Vasily V., 2000, "Perceptions of Proper Ethical Conduct of Male and Female Russian Managers", *Journal of Business Ethics*, 24(2), Maret.
- Dechow, Patricia M., Richard G. Sloan dan Amy P. Sweeny, 1995, "Detecting Earnings Management", *The Accounting Review*, 7(2), April.
- Dechow, Patricia M., 1994, "Accounting Earnings and Cash Flows as Measures of Firm Performance: The Role of Accounting Accruals", *Journal of Accounting and Economics*, (18).
- Denis, David J., dan Atulya Sarin, 1999, "Is the Market Surprised by Poor Earnings Realization Following Seasoned Equity Offerings", *Working paper*, Desember.
- Denis, David J., 1994, "Investment Opportunities and the Market Reaction to Equity Offerings", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol. 29 No.2.
- Djakman, Chaerul D., "Manajemen Laba dan Pengaruh Kebijakan Multi Papan Bursa Efek Jakarta, *Proceeding*, Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.
- Dubois, Michel., dan Pierre Jeanneret, 2000, "The Long-Run Performance of Seasoned Equity Offerings With Rights", *Working paper*, Januari.
- DuCharme, Larry L., Paaul H. Malatesta, dan Stephan E. Sefcik, 2000, "Earnings Management: IPO Valuation dan Subsequent Performance", *Working paper*, 8 Agustus.
- Eckbo, B.E., dan Masulis, 1992, "Adverse Selection and The Rights Offer Paradox", *Journal of Financial Economics*.
- Elias, Rafick Z., 2002, "Determinants of Earnings Management Ethics Among Accountants, *Journal of Business Ethics*, 40(1), September.

- Espenlaub, Susanne, 1999, "Discussion of The Life Cycle of Initial Public Offerings Firms", *Journal of Business Finance & Accounting*, 26(9) & (10), November/Desember.
- Forker, John J., 1992, "Corporate Governance and Disclosure Quality", *Accounting and Business Research*, Vol.22 No.86.
- Forum of Corporate Governance in Indonesia (FCGI), 2003, www.fcgi.co.id
- Friedlan, J., 1994, "Accounting Choices by Issuers of Initial Public Offerings", *Contemporary Accounting Research*, Summer.
- Firth, Michael, dan Chee Keng Liaui-Tan, 1998, "Auditor Quality, Signaling, and The Valuation of Initial Public Offerings", *Journal of Business Finance and Accounting*, 25 (1 & 2), Jan./Mar.
- Ferere, Dherment, dan Renneboog L.Share, 2000, "Price Reactions to CEO Resignations and Large Shareholder Monitoring in Listed French Companies", *Working paper*.
- Garvey, Gerald T. dan Todd T. Milbourn, 2001, "Do Stock Prices Incorporate the Potential Dilution of Employee Stock Options?" *Social Science Research Network*, April.
- Gibbons, R dan K.J. Murphy, 1990, "Relative Performance Evaluation of Chief Executive Officers", *Industrial and Labor Relations Review*, 42(3).
- George, Elizabeth, Milman, Claudio, dan Deshpande, Satish P. A, 1999, "Comparison of Ethical Practices of Russian and American Managers, *International Journal of Value-Based Management*, 12 (2).
- Gumanti, Tatang Ary, 2000, "Earnings Management Dalam Penawaran Saham Perdana di Bursa Efek Jakarta", *Seminar Nasional Akuntansi (SNA) III*.
- Gunarsih, Tri, 2003, "Good Corporate Governance Sebagai Prakondisi Memasuki Pasar Global", *Makalah, KIPNAS VIII*, 9-11 September.
- Guo, Lin., dan Timothy S. Mech, 2000, "Conditional Event Study, Anticipation, and Asymmetric Information: The Case of Seasoned Equity Issues and Pre-issue Information Releases", *Journal of Empirical Finance*, 7.
- Hall, Steven C., dan William W. Stammerjohan, 1997, "Damage Awards and Earnings Management in The Oil Industry", *The Accounting Review*, 72 (1), Januari .
- Harto, Puji, 2001, "Analisis Kinerja Perusahaan yang Melakukan *Right Issue* di Indonesia", *Simposium Nasional Akuntansi IV*.
- Hartono, Jogiyanto, 2000, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi 2, Yogyakarta: BPF.

- Hartono, Jogyanto, 1998, "Aspek Metodologi Penelitian Pasar Modal", *Artikel Semiloka Arah dan Topik Penelitian Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal*, Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi (PPA FE) UGM.
- Hasibuan, Irwansyah, 2003, "Nilai dan Budaya", *Working paper*.
- Herwidayatmo, 2000, "Peranan Bapepam dalam Penegakkan Corporate Governance", *Makalah*, Seminar Good Governance dalam Masyarakat Bisnis Indonesia, Yogyakarta, 21 Juli.
- Healy, Paul M. & James M. Wahlen, 1998, "A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting", *Working paper*.
- Hidayati, Siti Munfiah, dan Zulaikha, 2003, "Analisis Perilaku Management Laba", Yogyakarta, 21 Juli.
- Healy, Paul M. & James M. Wahlen, 1998, "A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting", *Working paper*.
- Husnan, Suad, 2000, "Corporate Governance Di Indonesia Pengamatan Terhadap Sektor Korporat dan Keuangan", *Makalah*, Seminar Good Governance dalam Masyarakat Bisnis Indonesia, Yogyakarta, 21 Juli.
- Jain, Bharat A., dan Omesh Kini, 1994, "The Post-issue Operating Performance of IPO Firms", *Journal of Finance*, Desember.
- Jindra, Jan, 2000, "Seasoned Equity Offerings, Overvaluation and Timing", *Working paper*, Maret.
- Kaplan, Steven E., 2001, "Ethically Related Judgments by Observers of Earnings Management", *Journal of Business Ethics*, 32(4), Agustus.
- Kaznik, Ron, 1996, "On the Association Between Voluntary Disclosure and Earnings Management", *Working paper*, Agustus.
- Kim, Jeong Bong, I. Krisky dan J.Lee, 1993, "Motives for Going Public and Underpricing: New Findings From Korea", *Journal of Business Financial and Accounting*, 20(2), Januari.
- Kim, Kenneth A., dan Hyun-Han Shin, 2001, "The Underpricing of Seasoned Equity Offerings: 1983-1998", *Working paper*, Mei.
- Kim, Moonchul, dan Jay R. Ritter, 1999, "Valuing IPO", *Journal of Financial Economics*, 53.

- Kiswara, Endang, 1999, "Indikasi Keberadaan Unsur Manajemen Laba (Earnings Management) dalam Laporan Keuangan Perusahaan Publik", *Tesis*, Program Pasca Sarjana UGM.
- Klein, April, 2000, "Audit Committee, Board of Director Characteristics, and Earnings Management", download dari www.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=246674.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), 2002, *Pedoman Komite Audit yang Efektif*, 20 Mei.
- Kurniawan, Ch. Heni dan Rosalia Bintarti, 2002, "Persepsi Mahasiswa Program Studi Akuntansi Berlatar Belakang Agama dan Non-agama Terhadap Etika Bisnis", *Proceeding Simposium Nasional*, FE UAJY, September.
- Kussudyarsana, 2000, "Urgensi Etika Bisnis Dalam Dunia Usaha di Indonesia", *Benefit (Jurnal Ekonomi & Bisnis)*, Vol. 1/Th.IV.
- Linnan, David K., 2000, "Prinsip-prinsip OECD Mengenai Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance)", *Makalah*, Lokakarya Pengelolaan Perusahaan, Medan, 27 Juli.
- Lobo, Gerald J., dan Jian Zhou, 2001, "Disclosure Quality and Earnings Management", *Working paper*, Mei.
- Loughran, Tim., dan Jay R. Ritter, 1997, "The Operating Performance of Firms Conducting Seasoned Equity Offerings", *The Journal of Finance*.
- Lubis, Todung Mulya, 2003, "Menuju Good Corporate Governance", *Makalah*, The 1st National Workshop on Curriculum Design of Corporate Governance, Business Ethics, Corporate Social Responsibility, Bandung, 31 Oktober-1 November.
- Luhukay, Jos, 2002, "Tata Pamong dan Nilai Perusahaan", *Warta Ekonomi*, No. 21/XIV/2 September.
- McConnell, J. dan H. Servaes, 1990, "Additional Evidence on Equity Ownership and Corporate Value", *Journal of Financial Economics*, 27.
- McLaughlin, Assem S. dan Gopala K.V, 1996, "The Operating Performance of Seasoned Equity Issuers: Free Cash Flow and Post Issue Performance", *Financial Management*, Vol.25.
- Machfoedz, Mas'ud, 2002, "Akuntan dan Akuntansi Menghadapi Perubahan Paradigma Bisnis", *Makalah*, Seminar Scope to the Future, Yogyakarta, 13-14 September.
- McCulloch, Brian W., 1998, "Relation Among Component of Accruals Under Earnings Management", *Working paper*, September.

- McMullen, D. A. dan K. Raghundan, 1996, "Enhancing Audit Committee Effectiveness", *Journal of Accountancy*, 182 (Agustus).
- McNichols, M.F., 2000, "Research Design Issues in Earnings Management Studies", *Journal of Accounting and Public Policy*, (19).
- Megginson, 1997, *Corporate Finance Theory*, Addison-Wesley Educational Publishers Inc.
- Midiastuty, Pratana Puspa, dan Mas'ud Machfoedz, 2003, "Hubungan Good Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba", *Proceeding*, Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.
- Milgrom, P. dan J. Roberts, 1992, *Economics, Organizations, and Management*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Morck, R., A. Shleifer, dan R. Vishny, 1988, "Management Ownership and Market Valuation: An Empirical Analysis", *Journal of Financial Economics*, 20.
- Murphy, Kevin J., 1985, "Corporate Performance and Managerial Remuneration: Empirical Analysis", *Journal of Accounting and Economics*, 7.
- Morris, Richard D., 1987, "Signalling, Agency Theory and Accounting Policy Choice", *Accounting and Business Research*, Vol.18, No.69.
- Nassiripour, S., K.Karim, P. Siegel dan M. Ahmed, 1998, "The Effect of Seasoned Equity Offerings on Stock Prices: A Case of Diversification VS Growth Opportunities", *Research in Finance*.
- Na'im, Ainun, 2000, "Applying Good Corporate Governance In Indonesia: A General Case Of State Owned Enterprises", *Makalah*, Seminar Good Governance dalam Masyarakat Bisnis Indonesia, Yogyakarta, 21 Juli.
- Nugraheni, B. Linggar Y. & Sulistyanto, H. Sri, 2002, "Earnings Management: Benarkah Memprediksi Penurunan Kinerja Pasca Penawaran Perdana?", *Jurnal Manajemen*, Vol.1/No.2/September.
- Quintero, M. Socorro, Lislle Young, dan Michael Baur, 1997, "Executive Stock Options: Risk and Incentives", *Journal Of Strategic and Financial Decisions*, Summer.
- Pareek, U., 1996, *Perilaku Organisasi: Pedoman Kearah Pemahaman Proses Komunikasi Antar Pribadi dan Motivasi Kerja*, Cet. 3, PT. Ikrar Mandriabadi, Jakarta.
- Pasternack, Daniel , 2000, *Executive Stock Options: Exercise Policy and Market Reaction*, Svenska handelshögskolan, Swedish School of Economics and Business Administration.

- Pasternack, Daniel dan Matts Rosenberg, 2002, "The Impact of Stock Option Intensives on Investment and Firm Value", *Working paper*.
- Peasnell, K.V., P.F. Pope, dan S. Young, 2000, "Board Monitoring and Earnings Management: Do Outside Directors Influence Abnormal Return", *Working paper*, Oktober.
- Perry, Susan E, dan Thomas H. William, 1994, "Earning Management Preceding Management Buyout Offers", *Journal of Accounting and Economics*, 18.
- Pillote, E., 1992, "Growth Opportunities and the Stock Price Response to New Financing", *Journal of Business*.
- Poerwanti, Endang, 2003, "Pemahaman Psikologi Masyarakat Indonesia Sebagai Upaya Menjembatani Permasalahan Silang Budaya", *Makalah*, Lembaga Kebudayaan-Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rafick, Ishak, 2002, "Menggugat Fungsi Komisaris Independen", *SWA*, No.15/XVII/15 Juli-7 Agustus.
- Rakhmat, J., 1996, *Psikologi Komunikasi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Rajagukguk, Erman, 2000, "Good Corporate Governance: Perlunya Pembaruan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Pasar Modal", *Makalah*, Seminar Pengelolaan Perusahaan yang Baik, Surabaya, 14 September.
- Rangan, Srinivasan, 1998, "Earnings Management and the Performance of Seasoned Equity Offerings", *Journal of Financial Economics*, 50.
- Rao, Spuma M., 1997, "The Effect of Announcement Bribery, Scandal, White Collar Crime, and Illegal Payment to Returns of Investors", *Journal of Financial and Strategic Decisions*, Vol.10 No.3, Fall.
- Richardson, Vernon J., 1998, "Information Asymmetry and Earnings Management: Some Evidence", *Workingpaper*, 30 Maret.
- Ritter, Jay R., 1991, "The Long-run Performance of Initial Public Offering", *Journal of Finance*, XLVI (1).
- Rosenberg, Matts, 2002, "Systematic Patterns in Stock Options Contracting and Determinants of Vesting Schedules and Contract Maturity", *Working paper*, 25 November.
- Ruru, Bacelius, 2000, "Good Corporate Governance dalam Masyarakat Bisnis Indonesia, Sekarang dan Masa Mendatang", *Makalah*, Seminar Good Governance dalam Masyarakat Bisnis Indonesia, Yogyakarta, 21 Juli.

- Saiful, dan Jogiyanto Hartono, 2002, "Hubungan Manajemen Laba (Earnings Management) Dengan Kinerja Operasi dan Retur Saham Disekitar IPO", *Proceeding*, Simposium Nasional Akuntansi V, Semarang.
- Scott, William R., 2000, *Financial Accounting Theory*, 2nd Ed., Prentices Hall Canada Inc.
- Setiawati, Lilis, 2001, "Rekayasa Akrual untuk Meminimalkan Pajak", *Seminar Nasional Akuntansi IV*.
- Setiawati, Lilis, 2002, "Manajemen Laba dan IPO", *Proceeding*, Simposium Nasional Akuntansi V, Semarang.
- Shivakumar, Lakshmanan, 2000, "Do Firm Mislead Investor by Overstating Earnings Before Seasoned Equity Offerings?", *Journal of Accounting and Economics*.
- Simanjuntak, Djisman S., 1999, "An Inquiry Into the Nature, Causes and Consequences of the Indonesian Crisis", *Journal of the Asia-Pasific Economy*, Vol.4 No.1.
- Simanjuntak, Djisman S., 2002, "Good Corporate Governance in Post-crisis Indonesia: Initial Conditions, Windows of Opportunity and Reform Agenda", *Working paper*.
- Sugiri, Slamet, 1997, "Earnings Management: Teori, Telaah, dan Bukti Empiris", *Telaah*.
- Sulistyanto, H. Sri, dan Rika Lidyah, 2002, "Good Governance: Antara Idealisme dan Kenyataan", *MODUS*, Vol.14 (1), Februari.
- Sulistyanto, H. Sri, 2002, "Analisis Manajemen Laba Pada Saat Initial Public Offerings: Indikasi Sikap Oportunistik Manajemen", *Tesis*, Program Pasca Sarjana UGM.
- Sulistyanto, H.Sri, dan Midiastuti, Pratana P., 2002, "Seasoned Equity Offerings: Benarkah Underperformance Pasca Penawaran", *Simposium Surviving Strategies to Cope With the Future*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 13-14 September.
- Sulistyanto, H. Sri, dan Meniek S. Prapti, 2003, "Good Corporate Governance: Bisakah Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat", *EKOBIS*, Vol.4/No.4/Januari.
- Sulistyanto H. Sri, dan Haris Wibisono, 2003, "Seasoned Equity Offerings: Antara Agency Theory, Windows of Opportunity, dan Penurunan Kinerja", *Proceeding*, Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.
- Surifah, 2001, "Study Tentang Indikasi Unsur Manajemen Laba pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia", *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol.5/No.1/Juni.

- Sutanto, Intan Imam, 2000, "Indikasi Manajemen Laba Menjelang IPO oleh Perusahaan-perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta", *Tesis*, Program Pasca Sarjana UGM.
- Sutrisno, 2002, "Studi Manajemen Laba (Earnings Management): Evaluasi Pandangan Profesi Akuntansi, Pembentukan dan Motivasinya", *Kompak*, No.5/Mei.
- Simanjuntak, Djisman S., 1999, "An Inquiry Into the Nature, Causes and Consequences of the Indonesian Crisis", *Journal of the Asia-Pasific Economy*, Vol.4 No.1.
- Simanjuntak, Djisman S., 2002, "Good Corporate Governance in Post-crisis Indonesia: Initial Conditions, Windows of Opportunity and Reform Agenda", *Working paper*.
- Sweeney, Amy Patricia, 1994, "Debt-covenant Violations and Managers Accounting Responses", *Journal of Accounting and Economics*, 17.
- Teoh, Siew Hong, T.J. Wong, Gita R. Rao, 1997, "Are Accruals During An Initial Public Offering Opportunistic?", *Workingpaper*, Juli.
- Teoh, Siew Hong, Ivo Welch, dan T. J. Wong, 1998, "Earnings Management and the Long-Run Market Performance of Initial Public Offerings", *The Journal of Finance*, LIII (6), Desember.
- Teoh, Siew Hong, Ivo Welch, dan T. J. Wong, 1998, "Earnings Management and the Underperformance of Seasoned Equity Offerings", *Journal of Financial Economics*.
- The Business Roundtables (BRT), 2002, "Principles of Corporate Governance", *A white paper*, Mei.
- Traill, Marcus dan Ed Vos, 2001, "Do Seasoned Equity Offerings Really Underperform in the Long Run? Evidence from New Zealand", *Working paper*.
- Vasala, Ossi, 1998, "Effect of Executive Stock Options on Shareholder Wealth", *Unpublished Tesis*, Faculty of Accounting and Industrial Management University of Vaasa, Helsinki.
- Veronika, Sylvia, dan Yanivi S. Bachtiar, 2003, "Hubungan Antara Manajemen Laba Dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan", *Proceeding*, Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.
- Vitell, Scott J., Dickerson, Erin Baca, dan Troy A. Festervand, Troy A., 2000, "Ethical Problems, Conflicts and Beliefs of Small Business Professionals", *Journal of Business Ethics*, 28(1), November.
- Walgito, B., 1997, *Pengantar Psikologi Umum*, Penerbit Andi, Jakarta.

- Ward, S.P. dan Deck A.B., 1993, "Certified Public Accountants: Ethical Perception Skill and Attitudes on Ethics Education", *Journal of Business Ethics*, 12.
- Warta Ekonomi, No.21/XIV/2 September 2002.
- Wright, D.W., 1996, "Evidence on The Relation Between Corporate Governance Characteristics and The Quality of Financial Reporting", *Workingpaper*.
- Yahya, Kresnayana, 2000, "Peran Good Corporate Governance: Problem dan Tantangannya, Fakta dan Harapan Dunia Usaha" , *Makalah*, Seminar Pengelolaan Perusahaan yang Baik, Surabaya, 14 September.
- Yermack, David, 1995, "Do Corporations Award CEO Stock Options Effectively", *Journal of Financial Economics*, 39.
- Yermack, David, 1997, "Good Timing: CEO Stock Options Awards and Company News Announcement", *Journal of Finance*, 52 (2).
- Yuswohady, 2002, "Pengutil Kerah Putih dan Masa Depan Corporate Governance", *Swa*, 22/XVIII/24 Oktober.

- A*
- accountability*, 10, 126, 130
 - accounting choices*, 44
 - accounting games*, 11
 - accounting method application*, 151, 164
 - accounting method choice*, 151, 164
 - accounting method timing*, 151, 164
 - accruals basis of accounting*, 9, 152
 - accuals basis of accounting*, 17
 - agency problem*, 29, 128
 - agency theory*, 28
 - agents*, 28
 - akumulasi*, 37, 84
 - akuntansi agresif*, 101
 - akuntansi konservatif*, 101
 - angka akuntansi*, 48, 70
 - anti-trust*, 26, 44, 91, 92
 - Asian Development Bank*, 130, 139
 - audit committee*, 135
 - average*, 75, 163, 165, 169
- B*
- bangkrut*, 3, 57, 72, 86, 145
 - barang konsinyasi*, 181
 - benefits*, 54
 - board of director*, 135
 - boogey*, 39, 83, 84
- C*
- cap*, 39, 83, 84
 - cash basis of accounting*, 154
 - catatan kaki*, 36, 49, 50
 - check kiting*, 175
 - comparability*, 15
 - corporate culture*, 2, 124
- D*
- data akuntansi*, 47
 - debt covenant*, 25, 82
 - debt oriented*, 63
 - destination*, 161, 169, 180
 - differed charge*, 16
 - disclosure*, 10, 14, 78, 79, 134
- E*
- emerging market*, 71, 141
 - ethics driven*, 142
 - event*, 14, 201
 - extraordinary*, 155
- F*
- fairness*, 10, 14, 126, 130
 - Financial Accounting Board Standard*, 172
 - financial and behavior accounting*, 197
 - footnotes*, 36
 - fraud*, 4, 21, 74, 197
- G*
- generally accepted accounting principles*, 5
- I*
- income decreasing*, 157, 159, 167, 168
 - income increasing*, 75, 157, 167
 - income smoothing*, 85, 157, 167, 168
 - income taxation*, 26
 - information asymmetry*, 21
 - information perspective*, 7
 - initial public offerings*, 24, 66
 - intangible assets*, 36
 - internal checks and balances*, 134
 - intertempory choice*, 23
 - intervensi*, 62
- K*
- kontijensi*, 41, 170
- L*
- Lapping*, 174
- M*
- management buyout*, 24, 33, 34, 59, 77
 - managerial compensations*, 25, 82
 - managerial ownership*, 77
 - material*, 47, 112, 129, 141
 - metode manajemen laba*, 151, 162
 - mikro*, 2, 117, 152
 - minority shareholder*, 133
 - moral hazard*, 3, 23, 27, 31, 114, 147, 164
 - motivasi bonus*, 82
 - motivasi kontraktual*, 80

motivasi regulasi, 62
motivasi regulasi, 88

O

operasional, 12, 63, 71, 131, 132, 155
opportunistic perspective, 7
opportunity cost, 55
overperformance, 70, 76
overstate, 68, 75

P

pendanaan, 12, 155
positive accounting theory, 7, 42
preemptive right, 71
principals, 28

R

regulation driven, 123, 142, 162, 163,
164
rencana bonus, 60
reserves, 39
responsibility, 10, 126, 130
restatement, 69, 95
right issue, 71
risk, 45, 66, 134

S

Schilit, 41
seasoned equity offerings, 24, 59
second offerings, 71
shipping point, 161, 170, 180
signaling theory, 62
stock market oriented, 63
stockholder, 10

T

tangible assets, 36
teori akuntansi positif, 7, 42, 60, 61
teori keorganisasian (organization theory), 62
timing, 44, 60, 151, 164
transaction, 14, 201
transparency, 10, 126, 130

U

underperformance, 70, 76
understate, 52, 77, 80

V

validitas, 30, 97
variability, 15